

BUDAYA KONFLIK DAN JARINGAN KEKERASAN

Kajian Tentang Pendekatan Kearifan
Lokal Dalam Penyelesaian Konflik dan
Kekerasan

Zaiyardam Zubir



**BUDAYA KONFLIK DAN
JARINGAN KEKERASAN :
Kajian Tentang Pendekatan Kearifan Lokal
Dalam Penyelesaian Konflik dan Kekerasan**

Zaiyardam Zubir

**Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Andalas**

BUDAYA KONFLIK DAN JARINGAN KEKERASAN : Kajian Tentang Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Konflik dan Kekerasan

Penulis : Zaiyardam Zubir

Tata Letak : Multimedia LPTIK

Sampul : Multimedia LPTIK

ISBN : 978-602-5539-09-1

Diterbitkan oleh

Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas Lantai Dasar
Gedung Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Andalas Jl.
Dr. Mohammad Hatta Limau Manis, Padang, Sumatera Barat,
Indonesia
Web: www.lptik.unand.ac.id
Telp. 0751-775827 - 777049
Email: sekretariat_lptik@unand.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali demi tujuan resensi atau kajian ilmiah yang bersifat nonkomersial.

PRAKATA

Mengamati secara seksama kehidupan berbangsa dan bernegara satu dasa warsa ini, ada satu kehilangan besar yang dirasakan oleh bangsa ini yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Betapa tidak, dengan cara dan tingkat kemampuan masing-masing, setiap elemen masyarakat seolah-olah berusaha untuk mencabik-cabik negara. Rakyat kecil dengan berbagai tindak kekerasan dan konflik mewarnai kehidupan lapisan ini. Tingkat atas, secara sistematis dan terencana menjarah kekayaan negara, sehingga menjadikan bangsa ini mendapat posisi papan atas sebagai negara paling korupsi di dunia. Jika tidak diantisipasi secara cepat, maka sesungguhnya bangsa ini sedang menuju kehancuran. Kehancuran yang diciptakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Bertitik tolak dari persoalan itu, maka buku ini mencoba mengkaji kembali nilai-nilai lokal yang pernah dimiliki bangsa ini, sehingga kearifan lokal itu diharapkan dapat menjadi salah satu senjata pamungkas terhadap kondisi bangsa yang kian hari kian parah ini.

Keinginan menulis buku ajar ini bertitik tolak keprihatinan nan mendalam terhadap situasi bangsa yang terjadi sekarang ini, terutama kekerasan yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Betapa tidak, tindak kekerasan yang melanda bangsa ini –terutama yang dipertontonkan media televisi- sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan bangsa. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pendekatan ilmu-ilmu humaniora sesungguhnya memiliki peranan besar dalam mengatasinya. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan yang mulai copot dari kehidupan bangsa seharusnya dipasang kembali, sehingga tindakan kekerasan yang melanda kehidupan masyarakat dapat dihindari.

Perlu juga disampaikan bahwa penelitian ini merupakan suatu payung besar dari penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan payung besarnya Sejarah Gerakan Sosial –sebagai mata kuliah pokok yang penulis asuh- penelitian ini mencoba mengkaji berbagai aspek gerakan sosial seperti budaya konflik dan jaringan kekerasan yang berlangsung dalam masyarakat. Rangkaian penelitian ini dibantu oleh berbagai lembaga terutama Direktorat Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional, melalui dana Penelitian fundamental. Selain itu, beberapa

penelitian dengan LSM dan PSAH unand juga menjadi rangkaian penelitian tentang gerakan sosial ini.

Tujuan utama penulisan buku teks ini adalah memberi penjelasan dan pengertian tentang Budaya konflik yang terdapat dalam masyarakat. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah budaya konfoik yang seharusnya menjadi sumber dinamika masyarakat, seringkali digunakan oleh pihak luar sebagai ajang untuk menjalankan kepentingan mereka, sehingga menjadi kekerasan, anarkis dan amuk massa. Pada hal, jika budaya konflik ini di ramu sedemikian rupa, bisa menjadi kekuatan untuk memajukan masyarakat. Kepentingan pihak luarlah yang mejadikan budaya ini menjadi negatif, sehingga dengan jaring-jaring kekuasaan yang mereka miliki – terutama pengusaha dan penguasa- mereka gunkan budaya konflik untuk menjadi jaringan kekerasan, dengan menempatkan pihak keamana – tentar, polisi, pamong praja, dan preman sebagai jaringan kekerasan untuk menekan masyarakat.

Sebagai sebuah buku teks, naskah ini akan dapat bermanfaat bagi mahasiswa jurusan sejarah, terutama untuk mata kuliah Sejarah Gerakan Sosial, Sejarah Sosial Indonesia dan Sejarah Kontemporer Indonesia. Selain untuk kalangan mahasiswa sejarah, buku ajar ini juga sangat bermanfaat untuk jurusan Sosiologi dan Ilmu Politik terutama untuk mata kuliah Gerakan Sosial Politik dan Sosiologi Konflik di FISIP.

Batang tubuh dari buku ini terdiri dari 11 bab. Antara satu bab dengan bab lain merupakan satu kesatuan rangkaian pembahasan yang utuh. Bab pertama mengangtarkan pada pengertian budaya konflik dan mencoba meneropong jaringan kekerasan yang terdapat di Indonesia. Bab kedua membahas kondisi konflik yang dirasakan oleh buruh dari berbagai tempat di Sumatera Barat. Dalam konflik buruh ini, masalah utamanya adalah upah yang rendah. Oleh pihak perusahaan, seringkali digunakan pihak luar seperti pooisi, tentara dan preman untuk menekan gejolak buruh, sehingga kehidupan buruh yang sudah merana semakin menderita. Bab tiga membahas konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa konflik horizontal atau lebih dikenal dengan bacakak banyak merupakan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga budaya ini menjadi kekerasan anarkis yang sering ditemukan dalam

masyarakat di pedesaan. Bab keempat membahass tentang peranan elite tradisional penghulu di Minangkabau. Elite ini dalam sejarahnya memiliki dinamika tersendiri, terutama penguasaannya atas tanah. Bahkan, seorang penghulu Minangkabau memiliki peranan penting dalam konflik tanah, terutama kehendaknya untuk menjual tanah pusaka tinggi, yang secara hukum adat tidak boleh dijualbelikan.

Bab kelima membahas konflik tanah. Konflik tanah merupakan persoalan laten dalam masyarakat. Bahkan, angka tertinggi pembunuhan bersumber dari konflik tanah ini. Bab ke enam membahas tingkah laku elite politik yang banyak menjanjikan kebohongan terhadap masyarakat, terutama janji-janji dalam kampanye, yang setelah naik ke puncak kekuasaan, lupa segalanya. Bab ketujuh membahas masalah Islam. Tidak diragukan lagi, pada masanya Islam memiliki peran penting dalam dinamika politik bangsa, sehingga kelompok ini membawa pengaruh penting dalam kebijakan politik di tanah air. Bab ke delapan membahas *illegal logging* dalam masyarakat, yang lagi-lagi melibatkan banyak pihak seperti penguasa, pengusaha, polisi dan elite tradisional. Persoalan ini sangat runyam sekali, karena *illegal logging* membawa dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan kehidupan.

Bab ke sembilan membahas tingkah laku penghulu, yang seringkali menjadi sumber konflik, karena tingkah laku sosial dan politiknya dalam masyarakat. Bab kesepuluh membahas masalah perempuan dalam menghadapi kehidupan. Disini terlihat nyata bahwa sesungguhnya perempuan itu jauh lebih tangguh dari pada yang diperkirakan orang, karena ia mampu menjadi ibu, ayah, kepala keluarga dan ekonomi bagi keluarganya, manakala suaminya pergi merantau ataupun bercerai. Bab penutup mencoba membahas arah Indonesia yang dicitakan. Secara keseluruhan, buku ini mencoba melihat kearifan lokal dalam melihat dan menyelesaikan konflik yang ada.

Dalam proses penulisan buku ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada banyak pihak. Melalui serangkaian penelitian Dasar dan Fundamental yang pernah diberikan oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional kepada penulis, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Prof. Dr. H. Musliar

Kasim, MS, dan Pembantu Rektor I Universitas Andalas Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS, Dekan Fakultas Sastra Unand Dra. Adriyeeti Amis, SU. Yang telah mendukung penulis buku teks ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan di PSH Unand, Drs. Zulqayyim, M. Hum. Harry Efendi, SS. Dr. Herwandi, M. Yunis, SS, dan Silvia Ersi, yang telah banyak memberi support terhadap penulis selama ini. Kepada Des, Nesa, Sena dan Toriq, untuk kesekian kalinya, masih buku yang berharga dapat dipersembahkan untuk kalian semua.

Akhirnya, segala tanggungjawab akademis dari naskah buku ini sepenuhnya berada di tangan penulis.

Padang, April 2008

Zaiyardam Zubir

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEHIDUPAN BURUH : DARI SENIN KAMIS KE SENIN SELASA	19
BAB III BACAKAK ANTAR KAMPUNG : SEBUAH GAMBARAN MASYARAKAT PRIMITIF DI MINANGKABAU	49
BAB IV ANGKU DATUAK, DATUAK GAUL DAN DATUAK DATUAK-ANN	82
BAB V TANAH : KONFLIK YANG TAK BERKESUDAHAN	98
BAB VI HERO ATAU PECUNDANG SAMA BOHONGNYA	125
BAB VII DIMENSI ISLAM DALAM TRANSFORMASI POLITIK : SEBUAH PENGAMATAN PERMULAAN	144
BAB VIII TIADA HARI TANPA ILLEGAL LOGGING : MASALAH EKPLOITASI HUTAN DI SUMATERA BARAT	158
BAB IX <i>MANGGALEHKAN ANAK KAMANAKAN JO HARATONYO</i>	174
BAB X PERTEMPURAN LUAR DALAM PEREMPUAN PEDESAAN MINANGKABAU : DARI SEKEDAR MENCARI TAMBAHAN SAMPAI TIANG UTAMA	218
BAB XI MENUJU INDONESIA NAN DAMAI DAN SEJAHTERA	228
DAFTAR PUSTAKA	232
GLOSARIUM	238
DAFTAR INDEK	245
RIWAYAT HIDUP PENULIS	249

BAB I

PENDAHULUAN

*Indonesiaku nan ramah dimana kau kini
Budayaku nan santun kemana kau pergi
Etnisku yang arif,
jangan sampai kau lenyap di muka bumi*

A. Deskripsi

Bab pertama dari buku ini memberikan penjelasan tentang peta konflik yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Konflik yang terjadi seperti sudah merata ini sudah menjadi penyakit baru dalam masyarakat, yang sampai saat ini belum ditemukan resep untuk menghindari terjadinya konflik. Resep itu baik secara makro maupun mikro. Perbagai pertemuan dibuat pemerintah seperti Pertemuan Helsinki, Malino ataupun lainnya, hanya dsapat meredakan konflik secara sesaat saja, sehingga diperlukan bentuk kebijakan untuk menghindari terjadinya konflik.

B. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari bab ini adalah

1. Mahasiswa memahami latar belakang budaya kekerasan dalam masyarakat
2. Mahasiswa dapat mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kekerasan
3. Mahasiswa dapat menganalisis sentimen atau solidaritas yang dikembangkan dalam kelompok yang bertikai, sehingga mobilisasi massa dengan sangat mudah dilakukan setiap terjadi kekerasan.
4. Mahasiswa dapat mengkaji jaringan kekerasan dari daerah konflik dengan pusat kekuasaan.

C. Tujuan Instruksional Khusus

Tujuan instruksional khusus dari bab pertama adalah :

1. Mahasiswa dapat memahami peta konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia
2. Mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik
3. Mahasiswa dapat menjelaskan solusi untuk menghindari terjadinya konflik

D. Jaringan Kekerasan

Dalam perjalanan kehidupan bangsa dewasa ini, ada dua hal yang sungguh tidak dapat dipahami akal sehat, yaitu masalah korupsi dan kekerasan. Masalah korupsi telah menjadi pemberitaan setiap hari mewarnai pengadilan di dari Aceh sampai Papua. (Dadang Trisasongko 2006). Tindak kekerasan sudah menjadi sajian khusus di media elektronik seperti TKP, Sergap, dan Buser ataupun koran-koran khusus kekerasan, sehingga melihat berbagai kejadian yang ada mengakibatkan hilangnya rasa aman dalam kehidupan masyarakat (Suryadi Radjab, 2002). Ada apa dibalik semua kekerasan yang tengah berlangsung ini, sebuah tanda tanya besar muncul dalam kepala.

Setidaknya, tanda tanya besar itu berlangsung sejak 10 tahun belakangan ini. Banyak kejadian miris yang menggugah jiwa kemanusiaan berlangsung di tanah air. Berbagai peristiwa yang dipertontonkan di media cetak dan elektronik sulit dipahami dengan akal dan jiwa yang sehat. Seorang pencuri dibakar hidup-hidup. Tragedi Tri Sakti I dan II menelan korban jiwa. Puluhan orang hilang tak tahu rimbanya. Ulama yang tidak tahu politik praktis seperti Teungku Bantaqiah di berondong peluru di Aceh. Pembunuhan etnis Cina terjadi di Jakarta dan Solo. Seorang gadis manis di mutilasi di Poso. Munir dihabisi di atas pesawat Garuda. Pembunuhan massal terjadi di Ambon dan Kalimantan Barat. Kepala manusia dikuliti di Kalimantan dan diarak keliling kampung dan kematian rakyat tak berdosa di Papua. Kasus terbaru adalah konflik pasukan Marinir dengan rakyat di Pasuruan, mengakibatkan matinya 4 orang penduduk sipil. Prof. Dr. M. Syafii Maarif, Mantan pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Bangsa ini sudah nyaris sempurna rusaknya (Surat kabar *Media Indonesia*, 16 Agustus 2006). Lantas, bagaimana dengan budaya Indonesia yang dikenal dengan lemah lembut

dan hidup rukun dan damai, sebagaimana dikenal dalam slogan-slogan dan spanduk yang menghiasi jalan-jalan selama ini ?

Bangsa Indonesia yang dikenal selama ini sebagai bangsa yang sopan, santun, dan ramah tamah secara tidak terduga berubah mejadi bangsa yang bringas, sadis, penuh dendam kesumat dan suka ngamuk. Kesalahan kecil bisa berakibat perang antar kampung antar etnis dan antaragama. Nurani waras sudah terkikis dalam bangsa.

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi, ada sebuah gambaran semu bahwa pelaku kekerasan ini bukanlah murni dari masyarakat, akan tetapi ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di dalamnya. Pokok persoalan adalah masalah ekonomi, tanah, penguasaan sumber daya alam dan kepentingan elite politik. Simak misalnya ungkapan seorang pengusaha nasional yang diwawancara Liputan 6 Sore SCTV, Rabu, 6 Juni 2007. Seorang pengusaha nasional yang terlibat sengketa tanah menyatakan bahwa: jika masyarakat bertindak anarkis, maka ia bisa membalas dengan 100 kali lebih anarkis pada tanah yang mereka sengketakan”. Ancaman pengusaha ini sesungguhnya ancaman yang mematikan, karena ia bisa menggunakan tangan-tangan lain untuk melawan rakyat, terutama tangan militer dan preman.

Berbeda dengan aksi anarkis yang dilakukan masyarakat. Tindakan anarkhis yang muncul dari masyarakat hanya sebatas tindakan sporadis, dengan senjata yang mereka miliki seperti demonstrasi, sabotase, boycott dan pembakaran (James C. Scott, 2000). Namun, seorang pengusaha bisa lebih anarkis lagi, karena mereka memiliki modal besar untuk menggerakkan berbagai kekuatan untuk melawan rakyat. Dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa membeli penguasa, hukum, aparat keamanan dan preman untuk melawan kekuatan rakyat. Jaringan antara pengusaha, militer, preman, dan penguasa muncul secara samar dan bahkan secara terang-terangan dalam berbagai konflik yang terjadi di Indonesia.

Dalam setiap konflik yang muncul, dampak langsung bukanlah dirasakan oleh elite politik. Kelompok yang mengalami kerugian dan menjadi korban justru masyarakat, sehingga membuat kehidupan yang sudah susah menjadi semakin parah. Hal yang tidak dapat dihindari adalah semakin memburuknya kondisi

masyarakat. Konsekuensi logis adalah terjadinya penurunan kualitas kehidupan. Secara ekonomis, jelas sekali akan mempengaruhi produktivitas kerja, karena energi mereka telah dihabiskan untuk konflik. Hal yang tak dapat dielakkan adalah kemampuan bertahan atau survival masyarakat makin lama makin lemah, sehingga akan dapat menimbulkan rasa frustrasi baru.

Implikasi konkrit dari konflik yang terjadi adalah munculnya beraneka ragam masalah sosial, ekonomi, agama dan krisis kepercayaan dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, persoalan kecil saja seperti perkelahian antar pemuda, seggolan ditempat keramaian ataupun pencurian, bisa berakibat fatal pada jiwa, harta dan benda. Bahkan lebih parah lagi, bisa menjadi perang antar etnis, agama atau golongan, yang dapat menelan korban jiwa dan harta (Robert Gur, 1971).

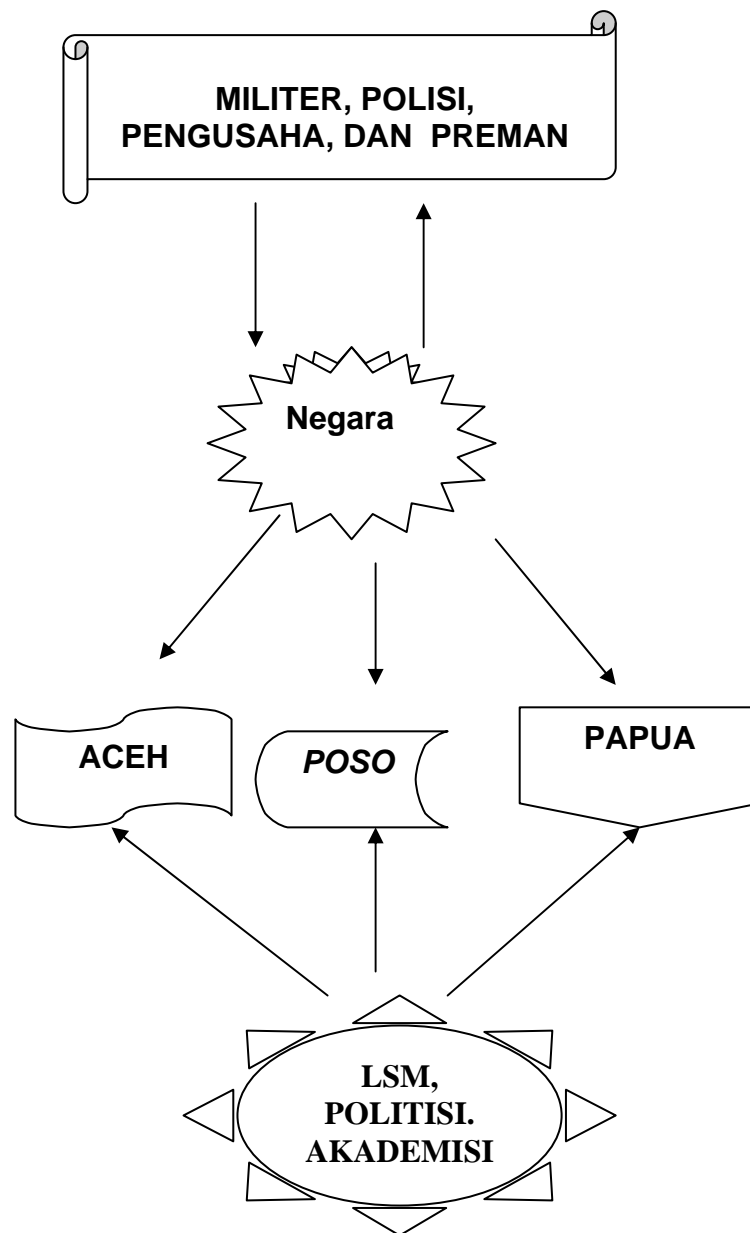
Tidak diragukan lagi bahwa salah satu organisasi yang menjadi pelaku tindakan kekerasan adalah angkatan bersenjata dan polisi. Langkah untuk mengurangi tindakan kekerasan ini sudah dilakukan, terutama ketika akhir Orde Baru tentara di tarik kembali ke barak. Artinya, urusan sosial, politik, ekonomi dari ABRI dikurangi, sebagaimana masa Orde Baru, kelompok ini memainkan peranan penting dengan konsep Dwi fungsi ABRI.

E. Penguasa, Pengusaha dan Militer Sebagai Sumber Konflik

Untuk membebaskan negara dari militer sungguh sangat sulit, karena cengkaman negara di bawah otoriter militer selama 32 tahun, membuat mereka sulit keluar. Martin Shaw dalam bukunya *Bebas dari Militer* menyatakan bahwa tidak akan mudah menghapus begitu saja peranan militer dari kehidupan masyarakat, karena struktur sosial yang terbangun selama ini menempatkan mereka pada posisi yang kuat (Martin Shaw, 2001). Militer inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari luar daerah yang memiliki peranan penting di daerah konflik. Hal ini dapat dilihat dari kasus DOM di Aceh, pertikaian Brimob dan Kopasus di Papua, Marinir di Pasuruan dan Brimob di Poso. Pertanyaan besar adalah bagaimana posisi mereka dalam setiap konflik dan kekerasan yang terjadi

itu. Skema dibawah ini mencoba memberi gambaran jaringan konflik dan kepentingan berbagai kelompok dalam setiap terjadinya konflik di Indonesia

Skema 1
Jaringan Kekerasan
Antara Daerah Konflik dengan Pusat Kekuasaan



Bagan diatas memperlihatkan, semua pihak terlibat dalam konflik yang terjadi. Persoalan ada yang membuat konflik dan ada yang mencegah atau menyelesaikan konflik merupakan suatu rangkaian dari sebuah persoalan yang terjadi wilayah konflik itu. Kekuatan yang begitu mencengkeram dari luar, terutama negara, pengusaha, militer, polisi, dan preman membuat masyarakat semakin terdesak ke dalam jurang kekerasan. Sementara itu, politisi dan LSM juga seringkali memanfaatkan mereka setelah mereka menjadi korban. Tidak dapat dihindarkan, akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan.

Kekerasan yang terjadi di Indonesia umumnya dan tiga wilayah kajian ini khususnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi sebagai sebuah rangkaian jaringan kekerasan secara menyeluruh. Jaringan kekerasan dilihat sebagai sebuah jaringan yang teratur dan terencana, yang dilakukan oleh pihak luar, terutama dari pusat kekuasaan di Jakarta. Ada dugaan bahwa selain masalah lokal, konflik yang terjadi disebabkan konflik kepentingan yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang berada di Jakarta, terutama upaya penguasaan asset dan pengaruh politik di daerah konflik.

Mengamati secara seksama konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa daerah yang memiliki potensi konflik yang tinggi yaitu Aceh, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Poso, Ambon, dan Papua. Setiap daerah ini memiliki corak dan model tersendiri dalam konflik dan kekerasan. Tidak diragukan lagi, sepanjang sejarah etnis Aceh, merupakan daerah yang susah ditaklukkan oleh Belanda. Jika daerah lain dijajah Belanda selama 350 tahun, maka Aceh baru taklud tahun 1935-an atau hanya dijajah belanda sekitar 7 tahun (T. Ibrahim Alfian, 1987). Jakarta, merupakan daerah yang paling banyak terjadi tawuran, antar kampung, antar pelajar, anatar mahasiswa, antara pemerintah dan masyarakat. Konflik di Kalimantan umumnya antara pendatang suku maduran dengan penduduk asli. Konflik Poso sebenarnya murni produk era reformasi atau pasca Orde Baru, karena pada periode Orde baru ataupun sebelumnya, daerah ini tidak memiliki sejarah tentang tindakan kekerasan ataupun konflik berdarah (Tahmady Lasahido, 2003). Ambon juga warisan dari Orde Baru, teruama masyarakat Islam dan Kristen dan anatar pemerintah dan RMS. Sementara itu, Papua memiliki tradisi kekerasan yang tinggi, dan ini

tergambar dengan jelas pada tarian perang sebagai tradisi perang anatar suku yang dimiliki budaya etnis. Tradisi ini kemudian semakin disuburkan oleh berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, terutama penguasaan sumber daya alam seperti PT Freeport.

F. Teori-teori Makro Dalam Melihat Konflik Mirko

Jaringan kekerasan merupakan bentuk gerakan sosial politik yang terjadi dalam masyarakat sipil. Jaringan kekerasan itu tidaklah berdiri, sendiri, akan tetapi juga didukung oleh kelompok lain, seperti penguasa, pengusaha, dan aparat keamanan. Dalam jaringan kekerasan, hal yang paling penting adalah kekerasan terjadi disebabkan skenario yang diiciptakan oleh elite kekuasaan untuk pencapaian tujuannya. Misalnya, seorang pengusaha berkomentar soal tanah, “jika masyarakat anarkis, maka sang pengusaha bisa jauh lebih anarkis”. Masyarakat anarkis hanya berdasarkan kekuatan dan kemampuan yang ada padanya, sedangkan pengusaha bisa lebih anarkis karena ia mampu membayar penguasa secara hukum, aparat keamanan polisi dan tentara, serta preman secara fisik untuk melawan anarkisme yang dilakukan rakyat. Dengan demikian, kerja sama pengusaha, penguasa dan polisi, tentara, dan preman melawan rakyat akan dengan mudah menghancurkan perlawanan. Alur seperti ini sudah menjadi pola yang lazim dalam kehidupan bangsa.

Ditinjau dari masyarakat, asal muasal setiap kekerasan bisa jadi berasal dari rasa frustrasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk dialami rakyat kemudian melahirkan ketidaksenangan, yang puncaknya adalah tindakan kekerasan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin dalam dan panjang pula jaringan kekerasan yang terjadi. Artinya, seorang petani hanya akan mampu membuat jaringan kekerasan pada masyarakat sekitarnya, namun seorang jenderal akan mampu membuat jaringan kekerasan di seluruh pelosok negeri, sejauh masih ada prajuritnya di lapangan. Perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, pengusaha, tentara dan polisi serta preman kemudian melahirkan konflik, kekerasan, kebijakan pengusaha yang tidak merugikan, kebijakan pemerintah yang tidak bijak, jebakan kemiskinan, keresahan, konflik, radikalisme, mogok, demonstrasi, dan pemberontakan (Camara, 2000).

Jaringan kekerasan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai masalah penyakit masyarakat dan kedua kekerasan sebagai hal yang diciptakan. Penyakit sosial masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi untuk bertahan hidup, karena penindasan, ataupun perampasan hak-hak hidup, sedangkan pola kedua adalah upaya pengusaha, penguasa, dan yang didukung oleh tentara, polisi dan preman untuk menguasai sebuah aset ekonomi dan pengaruh politik. Untuk masyarakat, biasanya asal muasal kekerasan adalah keresahan dan ketidakpuasan. Hal ini kemudian diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Pada satu sisi, ada *relative deprivation* (keinginan relatif) yang muncul dari selisih antara *Value Expectation* (nilai harapan) dan *value capabilities* (kemampuan). Nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, dan nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan. Kesenjangan antara nilai harapan dengan kenyataan mempercepat terjadinya perlawanan (Robert Guur, 1971).

Persoalan pokok bagi masyarakat adalah kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Upaya pemenuhan kebutuhan dasarlah yang sesungguhnya menjadi persoalan utama mereka sehingga ketika hal ini tidak tercapai, maka muncullah perlawanan terbuka maupun tertutup terhadap pengusaha maupun penguasa. Dalam melihat konflik ini, Mansour Fakih (2001) merumuskan tiga asumsi dasar, yaitu

Pertama, rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar dan mereka akan berusaha secara keras memenuhinya.

Kedua, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya.

Ketiga, nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing.

Tindakan kekerasan dapat dilihat dari dua bentuk yaitu kekerasan struktural dan kekerasan nonstruktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan oleh pengusaha maupun penguasa. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia mampu membuat hukum atau aturan yang kemudian merugikan

bahkan menindas rakyat. Kekerasan nonstruktural biasanya dilakukan oleh masyarakat, dan sifatnya perlawanan spontan, sporadis, dan tidak tersistematis. Protes sosial dalam bentuk apa pun juga memiliki tingkatan. Tingkatan paling mendasar dalam gerakan sosial adalah gerakan diam, sedangkan tingkatan paling puncaknya adalah peperangan. Robert Gurr (1971) merumuskannya corak kekerasan atas beberapa tingkatan yaitu:

1. Turmoil Yaitu tindakan kekerasan politis yang tidak terorganisasi dan partisipasi populer, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik dan pemberontakan kedaerahan yang relatif spontan.
2. Konspirasi yaitu Kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi terbatas seperti pembunuhan politis terorganisir, terorisme dalam skala kecil, kudeta dan pemberontakan.
3. Perang Internal yaitu Kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi populer dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu, merombak negara. Pola yang ditempuh adalah kekerasan yang ekstensif, termasuk terorisme, perang gerilya dalam skala besar, seperti perang saudara sampai kepada sebuah revolusi.

Turmoil adalah gerakan yang bersifat spontan. Jika ada kejadian seperti pencurian, maka masyarakat langsung menghakimi, seperti mengeroyok, hingga membakar sampai mati. Hal ini biasanya bentuk sikap muak masyarakat terhadap pencuri yang merajalela selama ini sehingga ketika tertangkap basah, akumulasi sakit hati, dendam dan muak selama ini dilampiaskan secara membabi buta. Secara sporadis, bentuk kekerasan ini terjadi di tiga wilayah penelitian.

Konspirasi sudah merupakan tindakan kekerasan yang sudah terencana dengan baik. Dalam konspirasi, aspek organisasi, sumber dana, elite, dan partisipasi dari pengikutnya sudah menjadi hal yang penting. Beberapa kejadian di Aceh, Poso, dan Papua memperlihatkan konspirasi yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat atau mengorbankan masyarakat, sehingga masyarakat seringkali bingung kenapa semua terjadi.

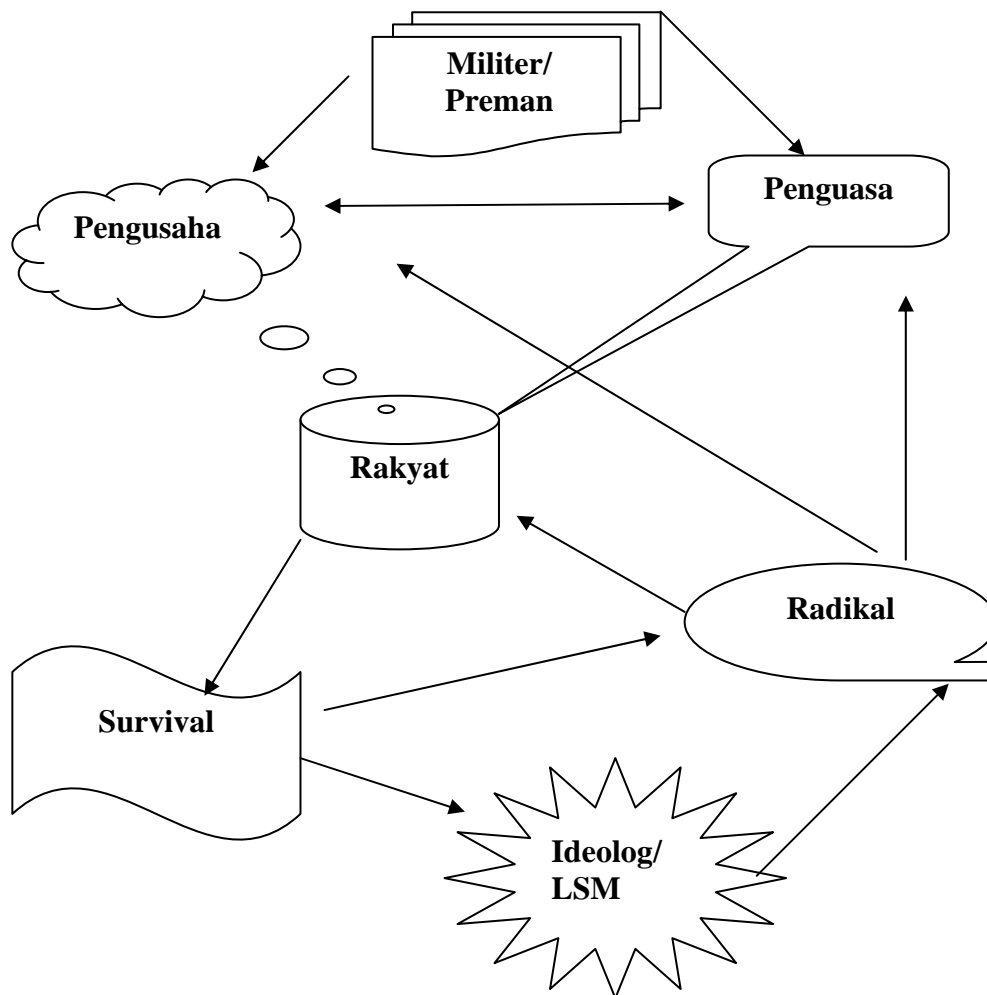
Internal war adalah kekerasan politik yang telah terencana. Dalam konteks ini, kasus Aceh, Poso dan Papua, sudah sampai kekerasan pada

tingkatan Internal War ini. Konflik di Aceh antara tentara dan polisi dengan GAM, konflik antara Islam dan Kristen di Poso dan konflik pengusaha, penguasa dan masyarakat di Irian memperlihatkan jaringan kekerasan sudah berlangsung di tiga tempat ini. Kekerasan di tiga tempat ini menimbulkan ribuan orang meninggal dan milyaran kerugian materi sehingga sudah sampai pada tahap *civil war*. Mereka yang berperang itu sesungguhnya merupakan warga sipil yang tidak dipersenjatai. Namun, jumlah yang banyak mereka miliki dapat menimbulkan korban dalam jumlah yang besar, terutama melalui pembakaran–pembakaran yang mereka lakukan di kedua belah pihak. Dalam internal war ini sudah banyak persoalan yang mengikutinya, seperti provokator, pimpinan, pembakaran, sampai dengantahap pembunuhan massal. Kasus Aceh, Poso, dan Papua merupakan contoh yang menarik dari bentuk *internal war*. Beberapa peristiwa yang terjadi di tiga daerah ini memperlihatkan tingginya tingkat kekerasan. Bahkan, untuk Aceh disebut sebagai bangsa dengan memiliki “tradisi sejarah perang” yang panjang (T. Ibrahim Alfian, 1987).

Pola yang dikembangkan dalam menghadapi masyarakat adalah *political violence*, terutama dilancarkan oleh TNI dan Polisi. Dengan senjata yang dimilikinya militer ini, seringkali menimbulkan tingkatan kekerasan yang luar biasa. Dalam berbagai operasi militer yang dilancarkan, selalu saja timbul korban jiwa di kalangan rakyat seperti pembunuhan terhadap H. Bantaqiah di Aceh merupakan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap rakyat. Pembunuhan ini semakin brutal karena tokoh yang kritis sejak zaman Orde Baru itu juga dihabisi bersama–sama muridnya sebanyak 52 orang. (Otto Syamsudin Ishak, 2003).

Dalam menghadapi jaringan kekerasan yang ada, rakyat tidak memiliki kekuatan yang sama untuk melawannya. Mereka lebih banyak menerima begitu saja. Kalaupun ada perlawanan, itupun bersifat spontan dan sporadis saja. Tidak heran, korban dari rakyat tak berdosa lebih tinggi jumlah dibandingkan dengan pelaku kekerasan itu sendiri.

Skema II
Skema Jebakan Kekerasan



Sumber : Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran**. Yogyakarta : Insist press, 2002, hal. 37.

Pertanyaan pokok dalam konteks ini adalah apakah kekerasan sudah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat atau hanya letupan sesaat saja, ketika ketidakadilan muncul di tengah mereka. Ada pikiran bahwa tindakan kekerasan yang muncul dapat dilihat sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kekerasan sehingga kekerasan sudah menjadi budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Johan Galtung merumuskan bahwa budaya kekerasan adalah aspek-aspek budaya, wilayah simbolis eksistensi, yang diwakili oleh agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris, ilmu pengetahuan logika yang digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural (Johan Galtung, 2002). Jelas sekali di sini bahwa tindakan kekerasan kultural sesungguhnya merupakan jalan yang ditempuh oleh peegang kendali kekuasaan untuk melanggengkan jabatan yang dipegangnya sehingga diberi pembenaran terhadap tindakan kekerasan.

Dalam melihat jaringan kekerasan yang ada, apakah faktor ideologi menentukan atau hanya dijadikan isu saja untuk terjadinya konflik. Kasus Poso sebenarnya dapat dilihat dari konteks ini. Entah dari mana asal muasal nya, konflik ini sudah menjurus saja menjadi perang Islam dengan Kristen. Persoalannya adalah apakah memang ini murni konflik agama, atau justru kembali menjadi kekerasan struktural atau sebuah konspirasi yang diciptakan oleh kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dari mereka. Penelitian yang mendalam terhadap tiga daerah ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor penyebab di balik kejadian-kejadian yang membuat banyak nyawa melayang dan kerugian harta benda di kalangan masyarakat kelas bawah.

G. Beberapa Pemikiran tentang Konflik dan Kekerasan

Konflik dan kekerasan sudah menjadi bagian yang integral dari perjalanan sejarah Indonesia. Bahkan, dalam banyak peristiwa besar, tindakan kekerasan sudah menjadi ciri khas dalam kehidupan bangsa. Kahin, dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia* menuliskan dengan baik sekali bahwa sejarah Indonesia merupakan sejarah yang juga ditandai dengan tindakan kekerasan, seperti episode kemerdekaan, yang telah mengambil korban jiwa dari masyarakat. Revolusi Indonesia merupakan revolusi yang tidak dapat dipisahkan dengan darah (George Mc. Turnan Kahin, 1952). Karakteristik seperti ini sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Contoh lain adalah tulisan Pramoedya Ananta Toer yang menyatakan bahwa bangunan-bangunan peradaban bangsa Indonesia, seperti Candi Borobudur, sesungguhnya dibangun di atas

timbunan tulang manusia, yang mengabdikan atau dipaksa untuk membangun candi yang megah itu (Pramoedya Ananta Toer, 1996).

Episode yang lebih baru, seperti peristiwa peralihan kekuasaan 1966 dan 1998, juga ditandai dengan pembunuhan massal dari kelompok yang bertikai, seperti Islam, PKI, dan Tentara. Kisah-kisah pembunuhan massal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam episode ini. Pada masa pemerintah Soekarno, beberapa peristiwa perang saudara tidak dapat dihindarkan, seperti Darul Islam di Aceh, PRRI di Sumatra, Permesta di Sulawesi, Pemberontakan PKI di Madiun, DI/TII di Jawa, dan Pemberontakan PKI 1965. (Syafurudin Bahar, 1996).

Dengan kekerasan yang ada, kenyamanan hidup dalam masyarakat menjadi tidak ada. Suryadi Radjab dalam bukunya *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman*, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik secara struktural maupun nonstruktural menjadikan banyak rakyat yang tidak bersalah menjadi korban. Kondisi ini memberi gambaran nyata bahwa negara telah gagal menunaikan kewajibannya untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Gawatnya lagi, rasa tidak aman itu justru datang dari pemegang kekuasaan, terutama TNI dan Polri (Suryadi Radjab, 2002).

Ketidaknyamanan itu memang menjalar dari Aceh sampai dengan Papua. Aceh misalnya, sejak jadi Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1985 lalu, tindakan kekerasan menjadi bagian penting dari sejarah etnik ini. Sebagai daerah operasi, maka militer dengan berbagai pembenaran melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah merupakan bentuk konkret dari tindakan militer yang jelas sekali melanggar HAM. Ishak, dalam bukunya *Sang Martir, Teungku Bantaqiah* menyatakan bahwa orang tua, yang tidak memegang senjata, kemudian diberondong dengan senjata *Grenade Launching Machine*. Dalam kesaksian istri Teungku Bantaqiah, ia melihat suaminya diberondong sampai perutnya terhamabur, peluru selanjutnya menembus leher kiri hingga putus (Otto Syamsuddin Ishak, 2003). Sebenarnya, kejadian seperti itu tidak perlu terjadi karena tindakan kekerasan seperti itu lebih banyak menjadi api dalam sekam dalam masyarakat sehingga tindakan balasan tidak dapat dihindarkan.

Jika di Aceh kekerasan lebih bersifat struktural, terutama keterlibatan pihak tentara dan polisi, kekerasan di Jakarta lebih bersifat horizontal. Kekerasan di Jakarta lebih banyak dilakukan oleh warga, mahasiswa, preman, suku dan negara seperti polisi, tentara, Satpol PP. Pokok persoalan pun berbeda, jika warga, preman, dan suku lebih banyak disebabkan persoalan ekonomi, maka oleh negara tindakan kekerasan terhadap warga lebih pada larangan-larangan dan persoalan tanah. Mahasiswa dan pelajar juga memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, terutama tawuran antarsekolah, fakultas ataupun antaruniversitas. Buku *Peta Konflik Jakarta* yang ditulis oleh Agus Budi Purnomo (dkk) memberikan gambaran jelas bahwa Jakarta sebagai pusat ibukota negara menyimpan potensi konflik yang besar. Konflik antara relasi SARA, Pengusaha dan buruh, urban, preman, relasi pemilik dan pemakai tanah, dan Satpol PP dengan pedagang kaki lima merupakan sumber konflik yang tidak habis-habisnya (Agus Budi Purnomo, 2004).

Poso, daerah yang selama ini tidak terjangkau konflik, tiba-tiba saja menjadi daerah yang penuh dengan darah dan kematian. Dalam catatan sejarah, sebagaimana yang ditulis oleh Tahmidy Lasahido (dkk), *Suara dari Poso*, selama ini di Poso tidak terjadi konflik dan tindakan kekerasan yang berarti. Walaupun ada konflik, itu lebih banyak dipicu oleh kelompok pemuda, tanpa mengusung isu agama atau etnis. Persoalan pokok adalah siapa sesungguhnya yang menjadikan Poso sebagai daerah konflik dan kekerasan, sehingga menjadi daerah yang penuh darah. Konflik itu mengembangkan isu agama, terutama Islam dengan Kristen dan konflik etnik antara penduduk asli dengan pendatang. Kekerasan yang berlangsung cukup panjang itu membawa kekerasan dan banyak orang yang kehilangan harta dan jiwanya. Berbagai penyelesaian dicoba dibuat, namun hanya bersifat sementara saja. Kekerasan tetap berlangsung secara periodik. (Tahmidy Lasahido, 2003).

Kalau Poso memang tidak memiliki akar budaya yang penuh kekerasan, maka Irian memiliki sejarah panjang dalam tindakan kekerasan. Tarian perang dan perang antarsuku merupakan bentuk tradisi kekerasan yang dimiliki oleh budaya Papua. Jika di Poso yang menjadi sumber konflik atau isu yang diciptakan adalah isu agama dan etnis, maka di Irian, yang menjadi sumber konflik adalah

penguasaan kekayaan alam, baik oleh pemerintah pusat maupun perusahaan asing seperti, Freeport. Amirudin dan Aderito Jesus De Soares dalam bukunya *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer* menyatakan bahwa semakin banyak kekayaan alam digali dari bumi Papua, maka semakin banyak darah tertumpah. 30 tahun PT Freeport mengeruk kekayaan alam di tanah suku Amungme, maka selama itu pula penderitaan panjang dialami oleh suku itu (Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, 2003)

Lantas, apakah kekerasan yang ada merupakan bentuk perlawanan sebagai orang kalah dari masyarakat, atau sebaliknya sebagai kondisi yang diciptakan oleh pengusaha dan penguasa. Mengamati bentuk perlawanan yang ada itu, mengingatkan kita pada pola perlawanan orang-orang yang kalah seperti Studi penting yang dilakukan oleh James C. Scott. Melalui bukunya *Senjatanya Orang-orang Kalah*, Scott dengan baik sekali merekonstruksi bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani Asia Tenggara. Dengan mengambil satu kampung kecil di Malaysia, ia melihat berlawanan kecil setiap hari dengan penuh kesabaran, organisasi anonim yang informal dengan koordinasi tahu sama tahu, berhati-hati, mencuri sedikit demi sedikit, memperlambat kerja, pura-pura sakit, pura-pura bodoh, di depan bila ya, di belakang mengumpat, sabotase di malam hari, gossip menjatuhkan nama baik atasan, menghindari konfrontasi langsung merupakan pola perlawanan dan senjata yang seringkali digunakan oleh orang-orang kalah (James C. Scott, 2000).

H. Rakuman

Bab ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang teori-teori makro dalam melihat peta konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai teori tentang konflik dan kekerasan. Dukungan beberapa tinjauan dari buku tentang teori konflik dan kekerasan akan dapat memperdalam pemahaman mahasiswa tentang persoalan yang dibahas.

I. Soal-soal Latihan

1. Kenapa orang memberontak?
2. Bagaimana tingkatan perlawanan menurut Robert Gur?
3. Bagaimana jaringan kekerasan dalam masyarakat ?
4. Bagaimana senjata orang-orang kalah menurut James Scott ?

J. Bacaan Pilihan

Bell, David, V.J., 1973. **Resistance and Revolution**. Boston : Houghton Mifflin Company.

Brinton, Crane, 1984. **Anatomi Revolusi**. Jakarta : Bharatara.

Burke, Peter, 1992. **History and social Theory**. Cambridge, Polity Press.

Camara, Donm Helder, 2000. **Spiral Kekerasan**. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar

Debray, R., 1969. **Strategy for Revolution**. New York : Monthly Review Press.

Gurr, Robert, 1971. **Why Men Rebel** Princeton : Princeton University Press.

Kuntowidjojo, 1993. **Radikalisme Petani**. Bentang Press Intervisi Utama.

Mills, C.W. 1967. **The Power Elite**. London : Oxford University Press.

Mirsel, Robert, 2004. **Teori Pergerakan Sosial**. Yogyakarta : INSIST PRESS.

Sartono Kartodirodjo, 1983. **Elite Dalam Perspektif Sejarah**. Jakarta : LP3ES.

Scott, C. James. 2000. **Senjatanya Orang-orang Yang Kalah**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Shaw, Martin, 2001. **Bebas dari Militer**. Yogyakarta : INSIST PRESS.

Singh, Rejendra **Social Movements : Old and New**. New Delhi : Sage Publications, 2001.

Suryadi Radjab, 2002. **Indonesia : Hilangnya Rasa Aman**. Jakarta : The Asia Foundation dan PBHI.

Tahmidy Lasahido, dkk, 2003. **Suara dari Poso : Kerusuhan, konflik, dan resolusi.** Jakarta : Yappika.

T. Ibrahim Alfian, 1987. **Perang di Jalan Allah.** Jakarta : Sinar Harapan.

Zaiyardam Zubir (dkk), 2003, **Penanggulangan Tindakan KeKerasan dan Agresivitas Remaja di Sumatera Barat.** Padang, Balitbangda.

BAB II

KEHIDUPAN BURUH : DARI SENIN KAMIS KE SENIN SELASA

*Merdeka
Sebuah kata nan indah
Sayangnya
Hanya dimiliki segelintir orang saja
dan itu hanya
dari penguasa dan pengusaha*

A. Deskripsi

Fokus bab ini memetakan masalah dan skenario pemecahan buruh. Untuk lebih mempertajam analisis, maka diambil beberapa kantong buruh di Sumatera Barat seperti buruh pabrik PT semen Padang, Buruh tambang Rakyat di Sawahlunto, dan buruh perkebunan di Pasaman.

Pendekatan yang digunakan dalam bab ini adalah pendekatan sejarah sosial ekonomi. Kajian yang bersifat kontemporer menyebabkan studi ini lebih memperlihatkan sisi sosiologis dan ekonomisnya, terutama upaya-upaya buruh untuk bertahan hidup dan impian mereka untuk mencapai kesuksesan ataupun hanya sekedar bertahan hidup.

B. Manfaat

Secara akademis, manfaat yang diharapkan dalam bab ini adalah dapat memahami gejolak yang terjadi kalangan buruh. Gejolak itu bukanlah faktor yang berdiri sendiri, akan tetapi memiliki kaitan erat dengan kebijakan secara keseluruhan, baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Dalam melihat gejolak itu, mahasiswa diharapkan akan dapat melihat faktor-faktor penyebab dan cara penyelesaian dari setiap gejolak ataupun gerakan buruh.

C. Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor penyebab buruh tetap miskin dan cara mereka mempertahankan kelangsungan hidup
2. Mahasiswa dapat menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap persoalan buruh
3. Mahasiswa dapat mengkaji faktor-faktor yang penyebab terjadinya gerakan buruh
4. Mahasiswa dapat memetakan bentuk gerakan buruh
5. Mahasiswa dapat memahami skenario pencegahan dari setiap gerakan yang muncul maupun yang akan muncul dari gerakan buruh

D. Kebijakan Yang Tidak Memihak

Setelah mengalami krisis moneter yang berkepanjangan sejak 1997 lalu dan tak tuntas tuntasnya, sejak Oktober 2005 krisis baru kembali melanda Bangsa ini. Kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat yang dibuat rezim SBY dan yusuf Kalla dengan menaikkan BBM membuat orang telah miskin semakin miskin. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah krisis itu semakin mendalam dan melebar ke sektor-sektor kehidupan lainnya. Artinya, jika pada tahap awal hanya pada bidang menaikkan satu sektrot saja yaitu BBM, maka dampak ekonomi ini melebar ke sektor lain seperti sosial, politik, keamanan, moralitas dan agama. Situasi ini diperparah lagi dengan stabilitas politik, terutama konflik di tingkat elite yang tidak menguntungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Biasanya, kelompok yang paling menderita dan dirugikan dalam masalah ini adalah masyarakat kelas bawah, seperti buruh. Hal ini disebabkan mereka memiliki kelemahan dalam bidang sumber daya manusia, tidak punya akses terhadap sumber daya alam, tidak memiliki asset, dan jaringan informasi. Pada gilirannya masyarakat yang tidak memiliki sumber ekonomi ini terjebak ke dalam kemiskinan struktural (Alfian, 1986).

Salah satu persoalan pokok yang dihadapi buruh adalah bagaimana buruh dapat mempertahankan kehidupan keluarganya. Gaji rendah, tidak adanya jaminan kesehatan dan hari tua membuat buruh semakin frustrasi. Hal itulah yang seringkali menjadi penyebab timbulnya keresahan di kalangan buruh.

Hal yang tidak dapat dielakkan adalah munculnya gerakan-gerakan yang berbentuk radikal di kalangan buruh. Biaya sosial untuk melakukan gerakan ini membuat mereka semakin sulit hidup, karena mereka berhenti bekerja. Hal lain yang menunggu mereka adalah kemiskinan itu sendiri karena ketiadaan tabungan untuk menyambung biaya hidup. Kondisi ini menyebabkan buruh yang telah lemah itu semakin terbenam ke dalamnya. Ibarat orang yang terbenam di dalam air, maka air itu sudah sampai di dagunya. Sebuah ranting kecil yang menyimpannya akan dapat menenggelamkannya (James R. Scott, 1986). Jika pada masa Orde Baru yang dipentingkan masalah ketertiban umum, maka ketika buruh lepas dari kekangan-kekangan yang dibuat penguasa, mereka pun seperti lepas kendali dan bertindak secara anarkis. Masalah tambang rakyat, pemogokan buruh PT Sumatek Subur, pembakaran perkebunan PT Bakrie Brothers Plantation, sabotase PTP VI dan demonstrasi buruh PT Semen Padang merupakan bentuk tindakan yang tak tersalurkan.

Persoalan dasar adalah rendahnya upah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Walaupun ada aturan-aturan mengenai upah seperti Upah Minimal Regional atau Upah Minimal Propinsi, namun tetap saja tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dari masalah upah ini maka kemudian diikuti oleh masalah kesejahteraan buruh. Dalam pendekatan Marxisme tradisional, pendekatan ini lebih cenderung melihat masyarakat kapitalis dari persepektif perekonomian di mana masyarakat dibagi dua yaitu kaum proletar sebagai kelompok yang dieksploitasi dan kapitalis sebagai kelompok yang mengeksploitasi. Jadi, dari sudut pandang ini, masalah perekonomian dilihat dengan cara *made production*, sehingga perubahan sosial diturunkan menjadi perjuangan kelas di mana kelas yang dieksploitasi berjuang melawan kelas mengeksploitasi dari kaum kapitalis (Mansour Fakih, 1996).

E. Yang Dianggap hina dan Yang Dieksploitasi

Buruh, orang yang mencari sesuap nasi, menyambung hidup dengan menggunakan tenaga pada awalnya bukanlah pekerjaan yang diminati oleh orang Minangkabau. Bahkan, ada pada satu masa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dianggap hina. “Janganlah mengambil menantu orang yang

bekerja sebagai buruh tambang batu bara Ombilin, karena itu pekerjaan orang yang kasar, orang yang tidak berbangsa”, setidaknya begitulah pesan orang-orang tua kepada anak gadisnya, jika ada diantara mereka yang berkaitan ataupun berhubungan dengan buruh tambang batu bara Ombilin (Zaiyardam Zubir, 1996). Namun, tidak selamanya pekerjaan menjadi buruh itu dianggap rendah. Bahkan, ketika kesulitan hidup mendera masyarakat, maka pekerjaan apapun mereka lakukan asalkan dianggap halal. Menjadi buruh, yang selama ini dianggap pekerjaan hina, kemudian juga menjadi pilihan pekerjaan bagi masyarakat.

F. Andema Bare Pirang, Karajo Dek Awak Piti Dek Urang

Surat kabar Padang Ekspres, hari Selasa, 11 Oktober lalu ada memuat berita yang cukup menarik –terutama jika dikaitkan dengan fokus penelitian ini-yaitu PT Semen Padang memberikan bantuan modal kerja kepada 42 unit pengusaha kecil di Sumatera Barat. Bantuan diberikan itu untuk meningkatkan usaha para pengusaha kecil. Jumlah dana yang dikucurkan mencapai sebesar Rp487, 5 juta dengan plafon beragam, yakni berkisar antara Rp6 juta hingga Rp35 juta.

Dari kutipan diatas terlihat bahwa publikasi yang dilakukan oleh PT Semen Padang terhadap kerja yang dilakukan cukup bagus. Artinya, Semen Padang tidak hanya memikirkan nasib mereka sendiri, akan tetapi juga memikirkan nasib pengusaha kecil yang terdapat di Sumatera Barat. Dalam hal ini, PT Semen Padang sudah memperlihatkan sebuah niat baiknya untuk memajukan dunia usaha. Hanya, ada hal yang sangat kontradiksi dari kebijakan yang dilakukan oleh PT Semen Padang yaitu terhadap buruh yang bekerja di lingkungan mereka sendiri.

Di PT Semen Padang, selain karyawan, terdapat sekelompok buruh yang mengoperasikan berbagai pekerjaan di lingkungan PT Semen Padang. Buruh ini berasal merupakan buruh harian, buruh lepas dan buruh kontrak yang bekerja pada PT-PT dan CV-CV di PT Semen Padang.

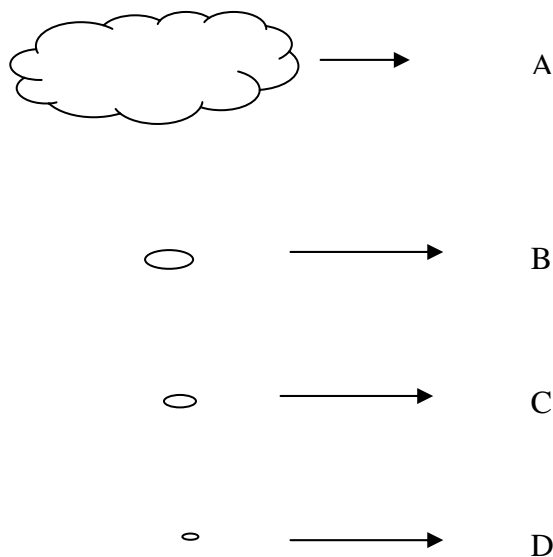
Buruh inilah yang sesungguhnya yang memiliki nasib berbeda dengan karyawan PT Semen.

Persoalan utama adalah rendahnya upah. Dari kerja keras yang mereka lakukan, mereka mendapat upah yang besarnya tidak lebih dari 3 kg beras setiap hari, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pola upah seperti ini masih saja diterapkan dalam jumlah yang sama sehingga nasib buruh pun tidak berubah dari masa kolonial Belanda sampai sekarang ini. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah terjadinya eksploitasi habis-habisan. Realitas yang berlangsung di lapangan adalah cucuran upah yang diterima buruh semakin lama semakin kecil (*trickle down effect*). Namun, beban kerja yang mereka terima semakin berat karena mereka hanya mengandalkan tenaga saja dan membuat mereka tidak punya pilihan lain, kecuali mengabdikan pada pengusaha. Skema di bawah ini memperlihatkan tingkatan yang tidak adil dari sistem upah.

Skema 1

Skema *trickle down effect*

Upah Buruh pada PT Semen Padang



Sumber : Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran**. Yogyakarta : Insist press, 2002, hal. 5.

Gambaran dari skema diatas memperlihatkan secara nyata bahwa terjadi pemotongan-pemotongan dari upah yang diterima buruh. Pada tingkat atas (A) dari PT Semen Padang, upah yang diniatkan untuk buruh itu cukup besar. Namun, potongan sangat besar sehingga upah akhir yang diterima buruh sangat kecil sekali. Potongan pertama (B) terjadi pada PT yang mendapatkan tender proyek dari PT Semen Padang. Potongan kedua (C) diambil oleh CV-CV yang mendapat sub-tender dari PT. Setelah itu, barulah buruh mendapatkan upah setelah potongan dari PT dan CV itu. Buruh hanya mendapatkan bagian yang kecil saja (D). Tidaklah heran, misalnya, dalam sebulan buruh hanya menerima upah Rp 300.000.- sampai Rp. 350.000.- Jika menjadi buruh harian, maka upah dalam 1 hari adalah sebesar Rp12.500.- Bila mereka tidak bekerja, secara otomatis upah mereka pun dipotong (Zaiyardam Zubir, 2002).

Dengan demikian, upah yang sampai ke buruh makin lama makin kecil. Hal ini mengakibatkan upaya buruh untuk dapat bertahan hidup akhirnya semakin sulit karena tekanan yang berat dari pengusaha yang tidak adil dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum pinggiran. Untuk bertahan hidup, buruh meminjam kian kemari hanya untuk sekedar menyambung hidup. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah ketika upah datang, maka hutang pun menghadang.

G. Buruh Tambang Batu Bara : Sehitam Nasibmu Sehitam Baramu

Dalam usianya mencapai 70 tahun, Safarudin, seorang penduduk asli Sungai Durian Sawahlunto menyatakan bahwa sejak ia pandai berjalan, ia telah melihat dan menginjak batu bara dijalanan di sekitar rumahnya. Namun, karena ia bukan bekerja di TBO, ia tak pernah merasakan “manisnya uang” dari batu yang terdapat di tanah leluhurnya itu. Batu bara yang sangat banyak terkandung di

sekitar tempat tinggalnya hanya dapat ia lihat-lihat saja. Walau batu bara mencapai 200 juta ton (Verbeek, 1875), namun Sarifudin tidak tahu “rasanya uang” dari batu bara itu, yang jelas sekali berada di tanah leluhurnya.

Hingga kemudian, ketika republik ini digonjang ganjing oleh gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dengan lagu “reformasi”, keadaanpun berubah 180 derajat. Batu bara yang selama lebih satu abad hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang bernaung di lingkaran TBO, namun kemudian terjadi perubahan besar yaitu siapapun dan dimanapun orang dapat menggali batu bara di tempat yang mereka sukai. Aturan baku yang berlaku selama ini yaitu penguasa tunggal terhadap batu bara hanya boleh ditambang oleh TBO, kemudian berubah secara drastis. Aturan ini kemudian porak poranda dengan datangnya gelombang reformasi. Masyarakat Sawahlunto yang selama ini hanya sebagai penonton dari penambangan batu bara di kampung halaman sendiri ataupun ditanah warisan nenek moyangnya, kemudian secara langsung juga terlibat dalam bisnis tambang ini. Masyarakat setempat menyebut bidang pekerjaan mereka sebagai tambang rakyat. Penyebutan istilah ini juga beragam, karena ada istilah lainnya seperti tambang liar, penambang tanpa izin dan tambang rakyat. Hal ini sangat tergantung dari sudut pandang yang digunakan misalnya, pihak TBO bukit Asam (nama TBO setelah digabungkan PT BO Bukit Asam Palembang) menyebutkan mereka yang menambang di lahan konsesi mereka sebagai penambang liar. Sementara Rakyat menyebutkan diri mereka sebagai tambang rakyat, sedangkan pemerintah menyebutkannya sebagai penambang tanpa izin (PETI).

Salah satu bentuk tambang liar adalah Kasus PT Minang Malindo merupakan contoh yang tepat dalam kasus tambang liar ini. PT Minang Malindo merupakan tambang ilegal yang dilegalkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama melalui KP yang dibuat oleh Zainal Bakar untuk anak dan koleganya yaitu Afrizal, seorang anggota DPRD Tk. I Sumatera Barat. Hal ini menyangkut permainan dari elite Sumbar yang mencoba bermain dengan batu bara. Safarudin yang merupakan salah seorang pelaku usaha tambang rakyat itu, baru dapat merasakan manisnya uang batu bara setelah ia berusia 70 tahun, karena selama ini tidak dapat dilakukannya karena ketatnya dominasi pemerintah dalam menguasai kekayaan alam itu.

Perjalanan panjang selama lebih satu abad penguasaan batu bara Ombilin oleh TBO (baik di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda maupun oleh pemerintah Indonesia) kemudian menjadi sirna. Jika Sejak zaman Belanda sampai zaman Orde Baru, pengelolaan batu bara hanya berada dalam satu tangan, yaitu TBO, maka sekarang diambil oleh banyak pihak, baik penduduk asli maupun pendatang. Sebenarnya, penduduk asli Sawahlunto sekitarnya juga kebanyakan hanya menjadi pekerja saja, sedangkan pemilik modal tetap saja dari luar. Beberapa kasus seperti PT Minang Malindo yang terlibat dalam bisnis batu bara ini memperlihatkan bukti nyata dari persoalan itu.

Setiap orang yang mau terlibat dalam bisnis, dapat saja menanamkan modalnya. Pada gilirannya, bermunculanlah ribuan tambang rakyat di berbagai tempat di sekitar Sawahlunto. Dominasi TBO menjadi hilang, salah satu buktinya adalah selama ini kalau kereta api sebagai pengangkut batu bara dipergunakan oleh TBO, maka penambang rakyat itu menggunakan truk. Puncaknya adalah ketika TBO harus mengalah dan dikalahkan, kemudian ditandai dengan berakhirnya angkutan kereta api, sebagai pengangkut utama batu bara ke Padang. “Tak ada lagi kereta api ke Padang yang akan lewat” membawa batu bara dari Sawahlunto ke Padang, setidaknya itulah bukti nyata dari bangkrutnya perusahaan tambang yang begitu megah dan jayanya sejak zaman kolonial Belanda. Sejak tahun 2002, simbol kejayaan batu bara, sekaligus penjajahan Belanda di Sumatera Barat kemudian berubah menjadi monumen sejarah. Sejak Juni 2002, kereta api yang membawa batubara dari Sawahlunto ke pelabuhan Telukbayur Padang berhenti beroperasi secara total. Semua angkutan batubara dialihkan dengan menggunakan truk (Surat kabar Mimbar Minang, Juni 2002)

Lantas, kalau sudah berproduksi itu, apakah buruh sudah mendapatkan kesejahteraan ataupun imbalan yang memadai dari kerja yang lakukan. Jawabannya adalah belum, karena upah yang mereka terima tetap saja belum dapat meningkatkan standar hidup mereka. Bahkan, dalam keseharian, jikapun ada berbagai lembaga seperti koperasi, maka lembaga itu hanya sekedar menambah beban mereka, karena kesempatan yang diberikan untuk mengutang kepada buruh, hanya memperkecil upah yang mereka terima setiap bulan, karena upah mereka dipotong untuk membayar utang. Erwiza Herman, dalam

wawancaranya dengan buruh tambang Ombilin menyatakan bahwa pada koperasi buruh dapat mengutang mengambil berbagai keperluan sehari-hari seperti beras, gula, susu, roti, minyak, dan lauk pauk. Hanya saja, barang yang mereka utang bukan untuk keperluan sehari-hari mereka, akan tetapi mereka jual kembali kepada toko-toko yang ada di Sawahlunto. Mereka mengharapkan dapat uangnya dari penjualan barang, yang mereka utang dari koperasi karawan TBO tadi (Erwiza Herman, 2005).

H. Tambang rakyat menghabisi tambang negara

Sejak era reformasi, di Sawahlunto ada tiga katogori dalam penyebutan penambangan yang tidak dikerjakan PT TBO yaitu Tambang Liar, Tambang tanpa izin dan tambang rakyat. Ketiganya memiliki karakter tersendiri, yang satu berbeda dengan lainnya.

Tambang liar adalah tambang yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pengusaha yang menambang diatas tanah konsesi yang telah dimiliki TBO. Kasus yang dihadapi oleh PT MM merupakan contoh yang tepat kasus tambang liar ini. Ada yang menyebutkan bahwa PT MM illegal, karena PT MM ini merupakan tambang illegal yang dilegalkan oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat, terutama melalui KP yang dibuat oleh Gubernur Zainal Bakar untuk anak dan koleganya. Hal ini menyangkut permainan dari elite Sumbar yang mencoba berbisnis batu bara. Dampak dari tambang yang illegal, yang dilegalkan ini akibatnya tidak tanggung-tanggung. Salah satu dampak utama adalah hilangnya armada kereta api pengangkut batu bara.

Sejak zaman Belanda samapai zaman Orde Baru, pengelolaan batu bara hanya berada dalam satu tangan yaitu PT BO, maka sekarang diambil oleh banyak orang. Konsekwensinya adalah kalau kereta api dikuasai oleh PT TBO, maka penambang diluar itu mernggunakan armada truk untuk mengangkut batu bara. Akibat yang tidak dapat dihindari adalah kererta api menjadi gulung tikar dari Sawahlunto ke Padang

Tambang tanpa izin sebenar eufemisme dari penyebutan tambang liar. Penyebutan ini terutama diarahkan pada penambang-penambang liar, yang berasal dari masyarakat. Masyarakat ini terutama menambang disekitar kampung-kampung mereka sendiri. Mereka yang selama ini tidak pernah menikmati batu

bara, kemudian mengetahui disekitar kampungnya ada batubara, maka mereka menambangnya.

Tambang rakyat, hal ini menyangkut soal penamaan saja. Mereka tidak pernah menyatakan masyarakat sebagai penambang liar, akan tetapi pertambangan rakyat. Ada banyak hal yang berlangsung sesungguhnya dalam proses tambang rakyat ini. Lebih dari 1 abad batu bara di Ombilin (jika diambil patokan 1891 sebagai awalnya), maka boleh dikatakan masyarakat yang secara langsung tidak pernah menikmati hasil kekayaannya itu. Mengenai hal ini, seringkali dikatakan bahwa antara pengusaha, penguasa dan rakyat melakukan penjarahan terhadap kekayaan alam. Hanya saja ketiganya memiliki perbedaan yang sangat besar. Pengusaha dan penguasa menjarah kekayaan alam, hutan ataupun tanah rakyat dilindungi oleh UU, yang mereka buat sendiri. Jadilah penjarahan mereka legal. Motivasinya pun berbeda, kalau pengusaha dan penguasa menjarah untuk memupuk kekayaan, maka rakyat menjarah hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hal itulah dilakukan oleh tambang rakyat, yang hanya sekedar untuk bertahan hidup. Apalagi proses penambangan rakyat itu berlangsung sejak krisis moneter yang melanda republik ini.

Kalau tambang rakyat digembor-gemborkan dapat merusak lingkungan oleh pemerintah. Realitas di lapangan memperlihatkan fakta yang berbeda. Dari 6 tambang rakyat yang pernah dilihat diberbagai tempat di Sawahlunto, mereka justru mengerjakan dengan alat-alat sederhana seperti linggis, cangkur, dan tembilang. Berbeda dengan tambang legal, yang menambang menggunakan alat-alat besar. Kasus terbaru adalah munculnya danau yang cukup besar di Salak, sekitar akhir april lalu.

Bermula dari penambangan yang dilakukan oleh PT Pama di Salak. Ketika melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat di lokasi penambangan di Salak, sebuah traktor menggali batu bara diatas aliran sungai bawah tanah. Karena terlalu dalam, traktor ini sampai pada permukaan sangai bawah tanah itu, sehingga traktor itu tercebur kedalam sungai bawah tanah itu. Akibat yang tidak dapat dihindari adalah traktor itu lenyap dan terbenam kedalam sungai bawah tanah itu. Dari lobang terbenamnya traktor itu, secara perlahan-lahan membentuk permukaan air, yang makin lama makin meluas. Hal yang dapat dicegah dari

kasus ini adalah munculnya danau yang sesungguhnya dan luasnya diperkirakan mencapai 3 ha. Sekarang ini, danau itu menjadi tempat hiburan bagi masyarakat. Persoalan berikutnya muncul adalah perselisihan antar masyarakat yang ingin mengklaim danau itu sebagai wilayah mereka. sudah bacakak banyak pula orang gara-gara ingin menguasai danau itu. Perselisihan itu muncul karena dari danau itu muncul mata pencaharian baru dalam bentuk menyewakan berbagai permainan diatas air seperti sampan, speda air.

I. Keringat Buruh dan Minyak Kelapa Sawit

Daerah Pasaman –terutama Pasaman Barat- merupakan salah satu wilayah yang banyak dilirik oleh pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta. Di masa Orde Baru, Pasaman merupakan wilayah yang penting yang didatangi oleh transmigran dari Jawa. Daya tarik wilayah ini terlihat dari banyaknya pengusaha nasioanl yang menanamkan modalnya, dan dengan sendirinya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Beberapa perusahaan besar yang terdapat di Pasaman adalah PT Bakrie Pasaman Plantation, PT Agro Wiratama, PT Gersindo, PT Trisna Guna, PT Pasaman Marama, PT Bintara Tani, PT Gonjong Limo, PT Tulas Sakti Jaya, PT Permata Hijau dan PTP VI. (Muchlis Muctar, 1995) Pada umumnya, perusahaan-perusahaan ini mendatangkan buruh dari pulau Jawa. Dengan bekerja sama dengan departemen Transmigrasi, mereka mendatangkan buruh-buruh untuk menggarap perkebunan-perkerbunan besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa sektor perkebunan inilah yang menjadi andalan pendapatan bagi pemerintah daerah. Contoh pada tahun pada tahun 1999, sektor pertanian menyumbang Rp 604 milyar lebih dari sekitar Rp 1,4 trilyun rupiah total kegiatan ekonomi Kabupaten Pasaman (Surat kabar Kompas, 08-05-2001).

Menurut Wakil Bupati Pasaman, Benny Utama, di daerahnya terdapat 21 investor besar perkebunan kelapa sawit. Ironisnya, rata-rata investor tersebut bermasalah sejak belasan tahun lalu. Masalahnya selama ini bagai lingkaran setan yang sulit diselesaikan. "Permasalahan investor itu terutama soal tidak duduknya pembagian uang silih jariah (ganti rugi) dan janji pembuatan lahan plasma untuk masyarakat," katanya. Perusahaan perkebunan sawit yang dinilai bermasalah antara lain PT AMP seluas 1.950 ha, PT TSJ 800 hektar, PT ASM 500 ha, PT

Puska 550 ha, PT Grasindo 2.800 ha, PT AW 3.899 ha, PT PM 2.104 ha, dan PT PMJ 3.118 ha, bahkan juga PT Perkebunan Nusantara 6. Persoalan lain, perusahaan kelapa sawit membeli sawit rakyat dengan harga di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Data yang dihimpun Kompas, harga tandan buah segar (TBS) sawit milik rakyat di Pasaman berkisar Rp 200 sampai Rp 210/kg. Sedangkan harga standar TBS Rp 430/kg. Wakil Bupati Pasaman menegaskan, kalau keberadaan investor perkebunan/pabrik di Pasaman ingin berlanjut, hendaknya memperhatikan kepentingan rakyat. Selain itu, investor harus menyelesaikan biaya ganti rugi (siliah jariah) dan membeli sawit petani sesuai harga standar (Surat kabar Kompas, 08-05-2001)

Faktor penting dari usaha pertanian adalah tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya. Perekonimian masyarakat Kabupaten Pasaman yang banyak bergerak bidang pertanian ditopang dengan sendirinya, masyarakat juga hidup dari bidang ini Angkatan kerja di Pasaman yang berusia 10 tahun ke atas, pada tahun 1999 tercatat sebanyak 256.354 jiwa. Dari jumlah itu, 247.294 orang atau sekitar 96 persennya telah bekerja. Dari total penduduk bekerja, 72 persennya bekerja di sektor pertanian. Penghasil rupiah terbesar di sektor pertanian berasal dari subsektor tanaman pangan.

Meski demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya, yang merupakan komoditas primadona subsektor perkebunan. Tanaman ini tersebar di 6 kecamatan, antara lain kecamatan Sungai Beremas, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Kinali, Ranah Bantahan, dan Pasaman. Di beberapa wilayah di kecamatan Bonjol dan Rao Mapat Tunggul (dua kecamatan sebelum dimekarkan menjadi kecamatan III Nagari dan Mapat Tunggul), beberapa waktu lalu juga mulai diusahakan untuk penanaman komoditas unggulan ini. Pada tahun 1999, produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasaman tercatat 566.957 ton. Jumlah tersebut dipanen dari areal seluas 63.249 hektar. Salah satu kecamatannya yaitu Pasaman, menjadi wilayah penghasil utamanya dengan menyumbang 65 persen dari total produksi. Kawasan Simpang Ampat yang terdapat di kecamatan ini, bahkan dikenal sebagai pusat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman. Di samping kelapa sawit, juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman, (selain yang

dihasilkan dari Kepulauan Mentawai) merupakan minyak nilam dengan kualitas terbaik di dunia. Bahkan, industri minyak nilam yang tergolong industri kecil di wilayah ini, termasuk dalam lima besar industri kecil di wilayahnya (surat kabar Kompas, 08-05-2001).

Hal yang penting adalah jumlah tenaga kerja yang banyak belumlah tentu juga meningkat kesejahteraan buruhnya. Walaupun modal asing masuk Pasaman melebihi daerah lain, bukan berarti jaminan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kenyataan selama ini di Kabupaten Pasaman Sumbar, sebaliknya. Masyarakat dibelit kemiskinan, dengan beragam dampak ikutannya. Data tahun 2000, di daerah seluas 7.835,40 kilometer persegi-terluas di Sumbar- dan berpenduduk 504.530 jiwa ini terdapat 23.885 kepala keluarga atau 92.033 jiwa (10.034 di antaranya anak balita) yang hidup dalam kemiskinan dan rawan pangan. Makanya, jangan heran daerah di bagian utara Padang dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara ini dilanda kasus gizi buruk (marasmus, kwashiorkor, dan marasmic kwashiorkor) dan kurang energi protein (KEP) yang berkepanjangan dan angkanya terbesar di Sumbar. Tahun 2000 (Juli 2000) terdapat 778 balita mengalami gizi buruk dan KEP, 159 anak di antaranya kategori berat dan sisanya sedang. Bila dimasukkan balita yang mengalami KEP kategori ringan, angkanya semakin besar. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 1999, di mana angka penderita gizi buruk (kategori berat dan sedang) mencapai 2.003 anak balita. "Bagaimanapun, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Pasaman, jika hendak mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apalagi dalam visi pembangunan Kabupaten Pasaman lima tahun ke depan yang dirumuskan akhir April 2001, mewujudkan masyarakat sejahtera dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan sumber daya manusia yang berkualitas," (surat kabar Kompas, 08-05-2001).

Catatan diatas memperlihatkan bahwa satu sisi daerah ini sudah dijarah oleh para kapitalis, namun disisi lain kehidupan masyarakat masih tetap dibawah garis kemiskinan. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah terjadinya konflik antara pihak pengusaha dengan masyarakat. Kasus Warga Pematang Sontang nagari Sungai Aua Kab. Pasaman Barat kembali memortal jalan masuk ke PT Pasaman Marama Sejahtera (PT.PMS). merupakan contoh konkrtik konflik yang terjadi.

Persoalan awal yang berasal dari persoalan ganti rugi tanah ulayat dan kebun plasma milik masyarakat yang di kelola oleh PT. PMS. Masyarakat Sontang menuntut kepada pihak perusahaan untuk memberikan ganti kerugian mulai dari hasil kebun plasma sebelum konversi, ribuan kubik koral, lahan pembibitan 70 hektar serta tanah ulayat yang dipakai selama ini oleh pihak perusahaan PT. PMS. (Singgalang 12 Januari 2005)

Sikap Perlawanan masyarakat ini akhirnya membuat terhentinya berbagai kegiatan pada perusahaan perkebunan itu. Sejak Selasa 11-1-2005 lalu masyarakat membuat pengumuman pada portal yaitu :

“ Mulai Januari 11 Januari 2005 dilarang lewat jalan ini Pertama; mobil solar milik PT. PMS. Kedua; Mobil CPO milik PT. PMS, mobil dinas /pribadi PT. PMS dan ketiga; mobil umum biasa. Atas tindakan warga sontang tersebut sejumlah aparat keamanan ikut siaga serta memantau dilokasi permotolan tersebut ”

Persoalan diatas sudah menjadi ciri khas dari bentuk perlawanan dari masyarakat. Namun tidak semua masyarakat bisa mengadakan perlawanan. Bahkan, mereka yang sudah masuk dalam sistem kapitalis sulit untuk keluar dari cengkraman kapitalis itu. Simak misalnya kutipan dibawah ini :

Tapi penulis lebih peduli pada bayi yang diberi nama Sawitri di Kinali, Pasaman Barat yang lahir ditengah-tengah kebun sawit. Bapak, ibunya, kakaknya hanyalah buruh di perkebunan milik cukong dimana penulis pernah jadi begundalnya. Tiga hari sesudah melahirkan Sawitri, emaknya sudah dikebun ikut membersihkan kebun. Kalau tidak keluarganya tidak makan. Tidak bisa membeli susu Sawitri. Tidak bisa membayar uang sekolah kakak Sawitri dan seterusnya. Kalau lahan diserahkan investor (baca : monster) secara bulat-bulat dan tanpa kontrol mereka yang berpihak pada masyarakat, akan lahir keluarga-keluarga baru jenis keluarga Sawitri. (Pabrik Cpo Skala Super Mini Versus Skala Besar Dikirim lehody_baswardojo Tuesday, 05 April 2005)

Realitas seperti ini sudah menjadi hal keseharian dalam kehidupan buruh perkebunan. Mereka tidak berdaya, karena kekuatan yang mereka miliki begitulah lemahnya, sedangkan organisasi buruhpun tidak sampai ke pelosok-pelosok perkebunan itu. Dari organisasi buruh yang ada, terdapat pula persoalan sendiri seperti organisasi yang dibentuk perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari pemilik modal, sedangkan organisasi yang sifatnya indenpenden juga tidak

memiliki daya dan dana untuk bergerak, sehingga lebih banyak bersifat pasif saja.

J. Dari Senin Kamis sampai Senin Selasa

Dalam perjalanan panjang sejarah kehidupan buruh di Sumatera Barat, ada hal yang tetap dan ada hal yang berubah. Hidup mereka yang serba kekurangan sudah menjadi bagian integral dari keseharian mereka, sehingga dalam kondisi apapun beratnya, mereka jauh lebih siap menerima keadaan yang ada. Sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki kekuatan dan daya tawar, mereka sulit untuk keluar dari persoalan yang ada. Buruh baru bisa keluar dari himpitan hidup sepanjang masa itu, jika ada kekuatan dari luar yang menariknya. Biasanya kelompok luar ini memiliki pemikiran yang lebih jernih dalam melihat ketimpangan yang ada, terutama meninjau ulang kembali struktur sosial dan ekonomi yang ada. Jika dibiarkan terus, maka selamanya mereka terbenam dalam jebakan kemiskinan itu. Dalam melihat jebakan kemiskinan itu, Chamber menyebutkannya jebakan kemiskinan, yang disebabkan oleh faktor yaitu kebodohan, kemiskinan, keterasingan, cacat fisik, dan tidak memiliki sumber daya alam (Robert Chambers, 1987).

Sementara itu, kekuatan lain seperti pemerintah seringkali pula tidak berpihak pada nasib buruh, sehingga menjadi kelompok yang seringkali tertekan oleh dua kekuatan yaitu pemerintah dan penguasa. Sementara, kelompok luar seperti politisi dan LSM juga seringkali memanfaatkan buruh sebagai alat perjuangan mereka, namun setelah sukses mereka dilupakan begitu saja.

Persoalan buruh tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat satu dengan lainnya. Jika diumpakan persoalan buruh ada 100 %, maka yang berasal dari buruh sendiri sesungguhnya tidak lebih dari 10 % sedangkan sisanya yang 90 % adalah diluar kekuatan dan kekuasaan buruh yaitu pada *political will* penguasa, kebijakan pengusaha dan niat baik tokoh-tokoh gerakan buruh.

Indonesia, dengan negara yang sangat kuat pengaruh budaya feodal memiliki pengaruh kuat terhadap semua lapisan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan buruh. Kebijakan-kebijakan yang dibuat penguasa seolah-olah sudah seperti sebuah kebijakan raja yang berusaha melindungi kawulanya.

Namun, dalam perjalanan kebijakan itu, terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dijalankan oleh para pengabdian pada raja. Artinya, jikapun kebijakan yang bersifat makro berusaha melindungi raja, namun implementasinya dilapangan bertolak belakang dengan kebijakan yang ada. Sebagai contoh, penguasa membuat kebijakan menetapkan batasan upah minimal seperti Upah Minimal Regional, Upah Minimal Propinsi sebanyak 540 ribu setiap bulan. Namun, dalam prakteknya upah yang diterima buruh.

Dalam persoalan hubungan buruh dengan majikan itu, pemerintah seringkali berpaling muka, karena telah terjadi pula persekutuan setan antara pengusaha dengan penguasa. Betapa tidak, buruh yang bekerja keras dari pagi sampai sore, semata-mata mengharapkan upah yang mereka terima itu untuk penyambung hidupnya. Sementara pengusaha, hanya dengan sebuah kebijakan kecil, ia mampu memotong gaji buruh secara keseluruhan, sehingga tanpa bersusah payahpun, ia dapat mengeruk keuntungan. Sementara itu, penguasa yang telah disogok oleh pengusaha membenarkan dan membela kepentingan pengusaha. Kedua kelompok ini, *Baladang dipungjung orang*, setidaknya begitulah ungkapan yang dikenal dikalangan buruh.

Kasus-kasus buruh perkebunan di Pasaman memperlihatkan kecenderungan demikian. Seorang petinggi perkebunan pernah menceritakan bahwa sesungguhnya dari perusahaan ada dana untuk pembangunan rumah bagi karyawan dan buruh. Namun yang mendapatkan rumah hanya karyawan saja, sedangkan rumah untuk buruh diambil dananya oleh karyawan untuk kepentingan pribadinya. Hebatnya, laporan yang diberikan adalah semua dana untuk perumahan telah dibagikan baik untuk karyawan maupun buruh. Dengan alasan buruh berasal dari penduduk sekitar perkebunan, maka dana untuk mereka diberikan dalam bentuk uang tunai. Pada hal, semua orang juga tahu diperkebunan bahwa satu senpun buruh tidak menerima dana itu sebab dananya telah di sunat oleh maneger perkebunan.

Jika sedang berlangsung krisis seperti kenaikan BBM sekarang ini, maka upah yang diterima buruh tidak secara otomatis juga naik. Pada hal, kebijakan pemerintah yang hanya menaikkan satu kebutuhan pokok saja, -entah diperhitungkan dampaknya bagi orang kecil atau memang tidak mau tahu-

membuat semua harga lainnya membumbung tinggi. Kenaikan BBM seperti bensin mencapai 95 % dan terutama minyak tanah yang mencapai 150 % membuat rakyat semain terjepit hidupnya. Jelas sekali, orang-orang seperti SBY, Yusuf Kalla, Sri Mulyani, Aburizal Bakrie maupun petinggi negara lainnya yang bertanggungjawab menaikkan dan mengurus persoalan ini tidak akan bergeming sedikitpun jiwanya, karena keberpihakan mereka terhadap nasib buruh boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sebagai kelompok yang memiliki latar belakang sebagai kapitalis, maka yang ada mereka pikirkan adalah bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya, tanpa harus memikirkan nasib rakyat. Tentu saja, kelompok yang berada disekitar mereka -dari atas sampai bawah- akan menikmati kebijakan itu, akan tetapi rakyat secara keseluruhan akan mengalami nasib yang bertolak belakang dari kebijakan yang mereka buat.

Melihat peta pengusaha yang terdapat di lokasi penelitian ini, sulit melihat ada niat baik dari pengusaha untuk memajukan kehidupan buruh. Baik perusahaan negara, apalagi swasta, kebijakan yang mereka buat diatas kertas memang seolah-olah ada niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, dalam prakteknya yang terjadi adalah kebijakan yang menyerasakan kehidupan buruh dan anak-anaknya.

Jelas sekali berbeda, jika mereka merupakan karyawan pada perusahaan itu, yang hidupnya memang serba mewah. Hanya saja yang disayangkan adalah kemewahan yang mereka dapatkan adalah hasil uang yang berasal dari keringat buruh. Betapa tidak, dengan cara pemotongan-pemotongan upah buruh dengan berbagai alasan dana kesehatan, dana sosial, dana jamsotek, dan dana-dana lainnya, pihak karyawan yang bertada pada lapisan atas berhasil memobilisasi dana buruh. Uang yang mereka kumpulkan itu bukannya untuk mensejahterakan buruh, akan tetapi justru sebaliknya, untuk kesejahteraan elite-elite pengusaha, elite penguasa dan bandit yang mendukung mereka. Apa yang terjadi dalam penjarahan dana Jamsotek oleh elite bangsa ini merupakan bentuk kongkrik jahatnya skap dan perilaku elite-elite yang mengaku memperjuangkan nasib buruh di republik ini. Pada hal, mereka sesungguhnya adalah para penjarah uang buruh, yang mereka kumpulkan dari keringat buruh.

Pada kasus tambang batu bara Ombilin, kejayaan kapitalis tumbang sejalan dengan tumbangnya dominasi pemerintahan Orde Baru dibawah rezim totaliter Suharto. Tambang sebagai simbol kekuasaan dan kapital itu tumbang oleh kekuatan-kekuatan rakyat, terutama karena rakyat yang selama satu abad tidak dapat langsung menikmati batu bara yang berada di tanah kaum mereka sendiri. Pada gilirannya, lebih satu abad kehadiran TBO di Sawahlunto, perbaikan ekonomi yang dapat diberikan TBO kepada buruh khususnya dan masyarakat Sawahlunto umumnya tidaklah terlihat secara jelas. Realitas historis memperlihatkan bahwa dari 3 rezim yang pernah berkuasa, sejarah buruh tambang batu bara Ombilin adalah sejarah kaum tertindas, sejarah perjuangan rakyat kecil untuk berusaha bertahan hidup. Siapapun yang menjadi tuan mereka, mereka tetap saja menderita, baik menderita karena kecilnya gaji maupun menderita karena sistem kerja yang diciptakan.

Penderitaan itu berakhir ketika “gulung tikarnya” TBO setelah reformasi 1998-an. Berbagai alasan dapat saja dikemukakan seperti lahan TBO diambil alih oleh berbagai perusahaan swasta, baik legal maupun tidak dan tambang rakyat yang menjamur di banyak tempat. Babak barupun muncul dari proses penambangan, yang selama ini dikuasai oleh sekelompok orang dibawah bendera TBO, maka sekarang ini bermunculan tambang-tambang rakyat, yang mencoba mencari peruntungan nasib pada batu bara itu. Namun, sejarah berulang kembali, karena kalau dulu buruh TBO menderita karena ditekan Belanda, Jepang dan sebangsa sendiri, maka tambang rakyatpun mereka juga hanya sekedar bertahan hidup saja. Kelompok yang mendapatkan keuntungan besar justru diperoleh pemilik modal, yang kebanyakan datang dari luar Sawahlunto. Entah hukuman, entah dosa, keterlibatan kelas bawah seperti tambang rakyat menggarap batu bara ternyata juga tidak mensejahterakan mereka.

Perjalanan hidup buruh tambang batubara Ombilin bedanya tipis-tipis saja sepanjang sejarah tambang itu sendiri. Artinya, jika dulu yang menjadi tuan mereka adalah orang Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh orang Jepang, namun sejak kemerdekaan tuan mereka adalah orang sebangsanya sendiri. Sementara nasibnya, tetap saja menderita. Meminjam ungkapan dari Tawne, sebagai mana dikutip oleh Scott ia menyatakan bahwa ada daerah dimana posisi

penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekali pun sudah cukup menenggelamkannya (James Scoot, 1985). Baik zaman kolonial Belanda, Jepang, Merdeka maupun tambang rakyat sekarang ini, nasib Buruh Tambang batu bara ombilin pun tidak lebih baik dari itu. Bahkan, pada era reformasi sekarang ini, rakyat secara langsung ikut dalam tambang ini kembali nasibnya tidak berubah lebih baik. Nasib mereka masih terletak pada tangan para pemodal-pemodal, yang lebih banyak menentukan kebijakan tentang upah dan harga batu bara di berbagai penggalian tambang rakyat di pelosok-pelosok Sawahlunto, tanpa melihat secara lebih realistis nasib buruh

Dari berbagai persoalan yang dihadapi buruh, sesungguhnya buruh tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Pada bidang kerja yang dilaksanakannya, barngkali ia mampu menyelesaikan pekerjaannnya, apalagi bentuk pekerjaannya adalah kerja yang membutuhkan tenaga. Namun persoalan-persoalan diluar dirinyalah yang jauh lebih berat dihadapi buruh, terutama kebijakan yang dibuat pengusaha dan penguasa. Bahkan, untuk yang ada sekarang ini, persentase persoalan yang muncul justru jauh lebih berat berasal dari kebijakan yang tidak memihak buruh yang dibuat pengusaha yang berlindung pada kebijakan yang dibuat penguasa. Batas minimal upah misalnya Rp. 540.000.-/bulan. Jika dilihat kebutuhan minimal satu keluarga, sesungguhnya upah yang ia terima itu hanya mencukupi kebutuhan pokok 15 sampai 20 hari saja. Hal ini belum dihitung lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya anak sekolah, berobat, apalagi jaminan di hari tua.

Pada kasus buruh yang bekerja di tambang rakyat, buruh semen Padang dan buruh perkebunan, persoalan ini menjadi persoalan yang laten sekali. Betapa tidak, posisi mereka yang lemah dimanfaatkan betul oleh pemilik modal untuk mengeksploitasi mereka. Pada kasus tambang rakyat di Sawahluto misalnya, dengan pekerjaan berat yang mereka lakukan dan juga hanya memakai alat-alat yang tradisional, jaminan keamanan kerja sesungguhnya tidak ada sama sekali. Bahkan belakangan ini, pola kerja tambang rakyat ini kembali memakai pola kerja orang rantai pada masa

kolonial Belanda. Hanya dengan mengandalkan alat-alat penggalian yang tradisional seperti linggis dan cangkul, mereka mengambil batu bara pada lapisan C, yang jelas sekali terletak pada lapisan paling bawah. Memang, lapisan A dan B tidak memiliki kualitas yang bagus dan letaknya dipermukaan tanah. Namun untuk menggali lapisan C, dibutuhkan peralatan yang canggih seperti buldozer ataupun ekavator. Jelas sekali, alat-alat berat ini tidak dimiliki tambang rakyat, kecuali tentu saja tambang rakyat yang dikuasai oleh pemilik modal yang berasal luar dari Sawahlunto. Dalam pola kerja dan kondisi yang demikian, buruh mempertaruhkan nasibnya, tanpa ada jaminan apapun dari pemilik modal. Karena sifatnya tambang rakyat dan kadangkala oleh TBO disebut tambang liar, maka mereka tidak memiliki organisasi buruh yang memperjuangkan nasib mereka.

Mereka bekerja pada kelompok-kelompok kecil seperti 10 sampai 15 orang. Dalam setiap kelompok ini, biasanya mereka memiliki induk semang masing-masing. Sementara itu, satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak ada hubungan sama sekali. Pada awal tambang rakyat, yang menjadi buruh berasal dari penduduk setempat, yang selama ini tidak merasakan manisnya uang batu bara itu. Namun masa-masa belakangan ini, buruh tambang rakyat itu banyak yang berasal dari luar Sawahlunto seperti Solok, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar.

Dengan pola seperti ini, tidak ada sama sekali organisasi buruh yang masuk ke wilayah tambang rakyat ini. Kalaupun ada, itupun hanya sebatas pada pemilihan-pemilihan anggota dewan ataupun gubernur, dan presiden. Dalam keseharian, tidak ada satupun organisasi sosial dan politik nan menjengut mereka. Mereka dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan untuk memilih pejabat baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Mereka dilupakan dan dicampakkan, ketika pesta demokrasi itu berakhir. Bahkan, ketika para pejabat itu menjanjikan kesejahteraan bagi buruh, namun ketika telah berkuasa, kebijakan yang dibuat justru menyengsarakan buruh itu. Simak dengan baik kebijakan BBM

misalnya yang dibuat SBY, maka kelompok yang paling teraniaya nasibnya adalah buruh dan kelompok pinggiran lainnya.

Sama halnya dengan tambang rakyat, pada pabrik PT Semen organisasi buruh juga tidak ada. Organisasi yang ada hanya milik karyawan semen Padang. Sementara itu, buruh bukanlah karyawan semen Padang, akan tetapi buruh yang dikontrak bekerja, baik harian maupun bulanan. Dengan sistem kerja seperti ini, maka mereka tidak masuk dalam organisasi yang terdapat di PT Semen Padang, karena organisasi yang ada hanya untuk karyawan saja. Dapat dipahami, ketika terjadi gonjang ganjing masalah Spin Off, maka keterlibatan buruh tidak ada sama sekali dalam berbagai demonstrasi, mogok kerja maupun gerakan lainnya yang memperjuangkan Spin Off.

Pada perkebunan-perkebunan di Pasaman juga tidak ada organisasi buruh. Bakrie Brothers Plantation misalnya, organisasi yang menampung keluhan buruh, memperjuangkan nasib buruh sama sekali tidak ada. Jikapun timbul masalah, maka buruh bergerak lebih bersifat spontan saja. Seperti masalah upah yang rendah, dana perumahan yang tidak sampai ketangan buruh, maka ketika buruh merasa tidak dapat memperjuangkan hak mereka, maka mereka lebih banyak bergerak secara diam-diam saja sebagaimana dikatakan oleh James Scott sebagai senjata orang-orang kalah (Scott, 2000).

Melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan, persoalan buruh sesungguhnya hanyalah persoalan kesejahteraan saja. Sudah mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari saja, bagi buruh sudah menjadi sebuah kepuasan bathin tersendiri. Impian-impian untuk kaya, punya rumah mewah, dan naik haji misalnya, hanya sebatas impian dan mainan tidur. Kalaupun itu ada impian seperti itu, maka harapan untuk kesuksesan hanya mereka harapkan dari judi seperti Togel. Mereka juga memiliki kesadaran penuh bahwa upah yang mereka terima hanyalah sekedar untuk dapat menyambung hidup anak dan istri saja.

Dengan pola yang kehidupan yang dimiliki buruh, mereka sesungguhnya juga tidak meminta sebuah kehidupan yang mewah. Hanya saja, dari upah yang mereka terima, selalu saja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka melibatkan anggota keluarga lainnya untuk bekerja, baik sambilan maupun serabutan. Baik buruh tambang rakyat, buruh perkebunan maupun buruh

perusahaan nasional, persoalan yang mereka hadapi sama saja yaitu upah yang mereka tidaklah mencukupi kebutuhan hidup minimal mereka sehari-hari. Jangankan mencukupi, mimpipun mereka tidak dapat, karena himpitan kehidupan yang berat, sehingga hal yang muncul adalah upaya bisa bertahan hidup saja.

Memahami secara seksama dalam melihat masalah yang dihadapi buruh di Sumatera Barat, ada dua hal pokok yang menjadi titik perhatian yaitu masalah internal buruh dan masalah eksternal. Kondisi internal buruh menyangkut skill yang dimiliki buruh itu sendiri. Sebagai kelompok kerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifat kasar dan mengandalkan tenaga, mereka tidak memiliki alat produksi, sehingga kerja mereka lebih mengandalkan tenaga. Selagi mereka memiliki tenaga yang baik, dan kemampuan yang prima, mereka dipakai dan dimanfaatkan serta di eksploitasi oleh majikannya. Namun, ketika tenaga mereka mulai berkurang, maka dengan gampang saja mereka bisa dicampakkan. Hal ini disebabkan tidaknya perlindungan hukum yang memadai diterima buruh. Hal inilah yang lebih besar pengaruhnya dari persoalan yang dihadapi buruh, yang berasal dari luar buruh itu sendiri.

Bagi buruh sendiri, masalah utama yang mereka hadapi adalah masalah tingkat kesejahteraan yang rendah. Jika dibandingkan misalnya dengan kondisi buruh zaman kolonial Belanda, kondisi yang mereka hadapi justru bertolak belakang. Walaupun sama-sama dieksploitasi tenaganya, namun masalah kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan papan dan pangan, justru sangat mendapat perhatian penuh pada zaman Kolonial belanda, sedangkan sekarang ini justru pada kasus buruh di Sumatera Barat buruh justru tidak mendapat perhatian yang memadai sama sekali. Niat baik dari pengusaha dan penguasa sangat dipertanyakan dalam merumuskan kebijakan mereka dan penerapan kebijakan yang seringkali tidak memihak kepada kepentingan buruh.

Persoalan eksternal yang dihadapi buruh terutama menyangkut masalah kebijakan yang dibuat oleh penguasa dan pengusaha. Berbagai kebijakan yang dibuat baik secara transparan, terutama yang tersembunyi menempatkan buruh pada pihak yang lemah. Maksud kebijakan

tersembunyi adalah kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh pihak pengusaha, yang tidak memihak pada kepentingan buruh. Pada banyak kasus, kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha menempatkan buruh pada posisi yang lemah, yang mudah dieksploitasi dan ditindas. Pengusaha membuat kebijakan yang merugikan buruh, namun ketika buruh mengadukan kepada penguasa, maka dengan modal besar yang dimiliki pengusaha, ia mampu membayar ataupun menyogok penguasa, sehingga buruh tidak berdaya dan dengan mudah ditindas dan dikalahkan. Tingkah laku pengusaha seperti ini menjadi hal yang biasa dalam bisnis mereka, terutama pada kasus –kasus buruh perkebunan.

Walaupun ada organisasi buruh, namun organisasi itu sendiri tidak memiliki daya untuk melawan karena pimpinan buruh itu berasal dari pihak majikan atau kaki tangan pengusaha. Artinya, organisasi buruh dibentuk sifat oleh pengusaha menempatkan orang-orangnya sendiri sebagai pimpinan organisasi sehingga ketika muncul persoalan buruh dengan majikan, maka pimpinan organisasi buruh secara nyata memihak pada kepentingan pengusaha dan pengusaha. Organisasi buruh pada pabrik dan industri memperlihatkan kecenderungan kuat yang demikian itu.

Bagi pengusaha, buruh hanya alat produksi yang harus dieksploitasi, sedangkan bagi penguasa, selama berjalan tenang dan lancar-lancar, sudah cukup. Hal yang penting adalah selagi tidak ada gejolak di perusahaan, maka persoalan dianggap tidak ada. Buruh tidak makan, tidak punya jaminan kesehatan, jaminan sosial ataupun kesejahteraan yang rendah, baik pihak pengusaha maupun penguasa tidak menjadi buah pikirannya.

Pada akhirnya, skenario pemecahan masalah buruh ini dapat dialkukan dengan 3 opsi yaitu : radikal, persuasif. Pola-pola perjuangan buruh yang bersifat radikal ini telah menjadi catatan panjang sejarah buruh di dunia. Walaupun ada juga yang berhasil, namun biaya sosial yang dikeluarkan dengan skenario ini terlalu tinggi. Hanya saja, skenario inilah yang lebih sering berhasil menyelesaikan persoalan buruh, terutama

melalui berbagai demonstrasi, mogok, revolusi buruh, yang intinya adalah mencoba merubah nasib buruh dengan jalan radikal.

Opsi kedua yaitu berbentuk persuasif berjalan dengan lamban., Bahkan, ada kesan kuat, pihak pengusaha bekerjasama dengan penguasa dan dibantu oleh aparat keamanan dan preman selalu saja mengulur-ngulur waktu dalam menyelesaikan persoalan buruh, sehingga jangan nasib buruh makin baik, bahkan mereka bisa saja di PHK tanpa mendapat pesangon.

Jalan tengah yang ditempuh dalam menyelesaikan persoalan buruh akhirnya tidak lepas dari political will dari penguasa dan pengusaha. Mau tidak mau, dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki keduanya, mereka justru sangat menentukan kesejahteraan buruh.

K. Rangkuman

Dari pembahasan diatas ternyata, upah buruh tidak bisa memenuhi kebutuhan minimalnya. Untuk dapat bertahan hidup, mereka mencari alternatif pekerjaan lain untuk menambah pendapatan seperti kerja lembur. Tidak hanya itu, mereka juga melibatkan anggota keluarganya bekerja sambilan seperti berjualan, pembantu rumah tangga, penjaga toko, bertani, dan berternak serta anak-panaknya menjajakan kue, es di komplek-komplek perumahan. Bahkan impian untuk mencapai sukses hanya ada dalam impian buruh melalui judi. *Toto Gelap* merupakan perjudian yang paling digemari oleh buruh.

Persoalan buruh sesungguhnya akan mudah diatasi, jika ada political will dari pihak penguasa dan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kunci kesengsaraan ataupun kesejahteraan buruh terletak pada kebijakan yang dibuat penguasa, yang kemudian dijalankan pengusaha. Jadi, skenario pemecahan masalah buruh sangat ditentukan kemauan berbagi keuntungan dari pengusaha kepada buruh.

L. Soal-soal Latihan

Situasi yang cukup krusial dihadapi buruh seharusnya oleh pengambil kebijakan memiliki kerangka berpikir yang sistematis. Namun, hasil penelitian yang memadai untuk mengatasi masalah buruh itu belum ada, disebabkan belum

adanya penelitian yang konprehensif. Berdasarkan pemikiran inilah, pertanyaan pokok yang harus diajukan dan dijawab adalah :

1. Mengapa buruh tetap miskin dan bagaimana mereka mempertahankan kelangsungan hidup?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap persoalan-persoalan buruh?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya gerakan buruh?
4. Bagaimana bentuk-bentuk gerakan yang dilancarkan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup?
5. Bagaimana pola skenario pencegahan dari setiap gerakan yang muncul maupun yang akan muncul dari gerakan buruh ?

Bacaan Pilihan

Abdul Muluk Nasition, 1981. **Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927**. Jakarta : Mutiara.

A.A Navis, 1986. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta : PT Grafiti press

Adeng Sunardi, 1991. **100 tahun Tambang Baru Bara Ombilin**. Sawah Lunto : Tanpa Penerbit.

Ala AB. (ed), 1996. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta : Liberty.

Bremen, 1997. **Menjinakkan Sang Kuli : Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20**. Jakarta : Grafiti.

Chambers, R. 1987. **Pembangunan Desa : Dimulai Dari Belakang**. Jakarta : LPES.

Erwiza, Miners, 1999. **Managers and the State: A Socio-Political History of the Ombilin Coal-Mines, West Sumatra 1892-1996**. **Phd. Disertation**. University Amsterdam.

Korten D. dan Sjahrir (ed),1988. **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan**. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Mubyarto, 1983. **Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan**. Jakarta : Sinar Harapan.

- _____, 1992. **Tanah dan Tenaga Kerja Kajian Sosial Ekonomi.** Yogyakarta : Adtya Media.
- Scott. James, 1985, **Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.** Jakarta: LP3ES, 1985.
- _____, 2000. **Senjatanya Orang-orang Yang Kalah.** Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sjahrir (ed), 1988. **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.** Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sajogyo, 1977. **Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan.** Bogor : LPSP-IPB, Bogor.
- Thee Kian Wie, **Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan.** Jakarta : Sinar Harapan, 1981.
- Zaiyardam Zubir, 2002. **Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan** Yogyakarta : Insist Press.
- _____, 2006. **Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai : Eksploitasi buruh Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto.** Padang : Unand Press.

BAB III

BACAKAK ANTAR KAMPUNG : SEBUAH GAMBARAN MASYARAKAT PRIMITIF DI MINANGKABAU

*Tagak ba kaum, mambela kaum
Tagak ba suku, mambela suku
Tagak ba nagari, mambela nagari*

A. Deskripsi

Bacakak banyak ini sesungguhnya tidak terlepas dari karakter budaya dan sejarah etnis Minangkabau yang mewajibkan setiap anggota masyarakat membela kampungnya. Ditinjau dari sudut sejarah misalnya, perang antarkampung merupakan pola perang yang pernah berkembang pada abad XVIII dan XIX yang lalu di Minangkabau. Jadi perang Paderi yang pernah terjadi lebih banyak perang mempertahankan nagari, ketika Belanda menyerang satu nagari, hanya agamalah sebagai tali perekat yang dapat menghasilkan kalaborasi kelompok Islam dari berbagai nagari (Christine Dobbin, 1992).

Perubahan pola ini mulai terjadi sepanjang abad XX, terutama semenjak Indonesia merdeka. Namun, di penghujung abad XX ini atau tepatnya sejak runtuhnya rezim Soeharto, pola perang kampung kembali tumbuh dengan suburnya di beberapa wilayah seperti Kabupaten Solok, Pasaman (Pecah menjadi dua kabupaten yaitu Pasaman Barat dan Pasaman Timur), Kota Madya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (kemudian kabupaten ini pecah menjadi Sawahlunto Sijunjung dan

Dhamasraya), Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Dalam konteks tersebut, makalah ini mencoba mengkaji kembali akar permasalahan *bacakak* antarkampung yang seringkali terjadi, terutama sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki era reformasi.

B. Manfaat

Manfaat utama dari bab ini adalah mahasiswa dapat memetakan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya menyangkut terjadinya *bacakak* antar kampung di pedesaan Minangkabau. Pemahaman kearifan lokal dari setiap peristiwa merupakan manfaat utama yang diharapkan untuk dipahami mahasiswa, sehingga mereka memiliki bekal dalam menghadapi persoalan-persoalan perkelahian antar remaja ataupun antar kampung.

C. Tujuan Instruksional khusus

Adapun manfaat dari materi kuliah ini adalah :

1. Mahasiswa dapat mengkaji penyebab munculnya tindakan kekerasan dan perilaku agresif yang menyebabkan terjadinya *bacakak* antarkampung
2. Mahasiswa dapat membahas faktor sentimen atau solidaritas yang dikembangkan dalam kelompok yang bertikai sehingga mobilisasi massa dengan sangat mudah dilakukan setiap terjadi *bacakak* antarkampung
3. Mahasiswa dapat menganalisis peranan institusi sosial yang ada dalam masyarakat untuk mencegah *bacakak* antarkampung
4. Mahasiswa dapat memahami strategi perumusan skenario pencegahan *bacakak* antarkampung

D. Prolog

Leni (23 tahun), seorang ibu rumah tangga yang masih muda belia tidak mengerti kejadian yang menimpa suaminya Samsul Bahri. Sambil menggendong si buah hatinya, Satria (2 tahun), ia hanya bisa bertanya-tanya dan menduga-duga, kenapa suami yang harus jadi korban dalam perang antar kampung antara Ujung

Gading dengan Air Bangis. Jumsari, sang suami sebagai tiang penyangga keluarga Leni dan Satria hanya membisu menghadapi malapetaka sebagai salah seorang korban dari perang antar kampung itu. Bagi Syamsul Bahri, sang suami, bahkan dengan sangat terpaksa meninggalkan seorang anak dan istri yang sedang hamil 4 bulan, sebagai akibat langsung dari perang antar kampung itu. (Surat Kabar *Padang Ekpress*, 18 Januari 2003).

Leni dan Satria bukanlah satu-satunya keluarga yang menjadi korban, masih banyak korban lain ketika perang itu berkecamuk. Iskak yang juga korban kerusuhan meninggalkan istri yang sedang hamil 3 bulan. Korban lain, Yuli Ftri Saputra, tragedi itu membuatnya meninggalkan tunangannya dengan deraian air mata. Keluarga Ishaq juga harus menerima kehilangan putranya, karena kematian dalam penyerbuan warga Ujung Gading ke Air Bangis itu. Sementara itu, di pihak Air bangis, seorang pemuda Yuhendra Afriza, juga kehilangan nyawa karena ditikam oleh warga Ujung Gading. Mereka merupakan korban dari Pasaman Berdarah, yang menyisakan derai air mata janda dan anak yatim karena *bacakak*¹ banyak antar kampung yaitu kampung Air Bangis dengan kampung Ujung Gading di Pasaman Barat. (surat kabar *Harian Singgalang*, 20 Januari 2003).

Setelah diamati latar belakang persitiwa di atas, ternyata persoalan hanya sederhana yaitu rebutan penumpang antara becak motor dengan mobil. Rebutan penumpang itu kemudian berlanjut dengan dibakarnya becak motor milik warga Ujung Gading. Kemudian, pada siang hari telah ada perdamaian kedua belah pihak, namun pembakaran becak ini tidak diterima oleh warga Ujung Gading. Malam harinya sekitar jam 23.45, sebanyak 300-an orang warga ujung Gading mendatangi camat dan wali nagari Air Bangis karena tidak puas dengan kesepakatan. Entah siapa yang memulai, warga Ujung Gading melempari dan membakar rumah warga Air

¹ Dalam bahasa Minangkabau, istilah *bacakak* banyak ini diambil dari ungkapan yang lazim digunakan ketika terjadi perkelahian massal antar kampung. *Bacakak* sama artinya dengan perkelahian massal atau tawuran. Perkelahian itu melibatkan orang satu kampung dan kadangkala kampung-kampung bersebelahan juga ikut membantu. Untuk selanjutnya, perang antarkampung akan disebut *bacakak* banyak.

Bangis. Tindakan ini tidak diterima oleh warga Air Bangis sehingga *cakak* banyak pun tak bisa dihindarkan, yang kemudian menelan korban 5 orang warga di kedua belah pihak, 4 diantaranya warga Ujung Gading dan 1 warga Air Bangis (Surat kabar Harian *Mimbar Minang*, 17 Januari 2003).

Di tempat lain dan dalam waktu yang berbeda, *bacakak* banyak juga terjadi di antara dua kampung yang bersebelahan yaitu antara sungai Dareh dengan Pulau Punjung. Menurut beberapa informan, ada sebuah skenario besar yang telah disiapkan untuk agenda itu. Skenario dibuat menjelang puasa tahun 1999. Pada awalnya, masyarakat Pulau Punjung berniat mengadakan acara dalam menyambut bulan suci itu. Adapun bentuk acara yang diadakan adalah orgen tunggal, yang sesungguhnya juga tidak bernuansa Islam, berhubungan acara seperti ini akrab dengan minuman keras, judi, dan obat-obatan. Dalam penyusunan agenda acara, tertua masyarakat Pulau Punjung sudah merencanakan bahwa jika ada orang Sungai Dareh yang mengacau, maka mereka siap untuk membalas. (Wawancara dengan Eri, tokoh masyarakat dan keluarga raja di Pulau Punjung)

Pemikiran ini disebabkan karena seringkali orang Sungai Dareh yang mengacau dan mengganggu acara-acara di Pulau Punjung. Terlebih lagi, anak-anak Pulau Punjung yang sekolah di Sungai Dareh seringkali menjadi korban perkelahian dan pengompasan. Direncanakan atau tidak, keramaian seperti itu sudah mejadi ajang pertempuran di kalangan anak muda sehingga ketika ada joget dangdut dan orang Sungai Dareh dilarang oleh pemuda Pulau Punjung untuk naik pentas, maka perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Perkelahian yang awalnya satu lawan satu berkembang menjadi lima lawan lima, yang awalnya masih melibatkan keluarga. Oleh karena belum puas dari hasil yang didapat, perkelahian berkembang menjadi perkelahian antar kaum. Jika sudah begini, *bacakak* antar kampung menunggu jamnya saja (Wawancara dengan Rahmat, pemuda Sungai Dareh).

Sebagai wilayah yang bersebelahan dan dibatasi oleh sungai Batang Hari, perseteruan kedua wilayah itu merupakan perseteruan yang sudah

berumur ratusan tahun. Sampai sekarang sikap seperti ini masih diwarisi oleh kedua belah pihak sehingga jikalau ada orang mengadakan keramaian, seperti orgen tunggal, olah raga, ataupun perkawinan, seringkali berakhir dengan *bacakak* banyak di kalangan pemudanya (Wawancara dengan Eri, tokoh masyarakat dan keluarga raja di Pulau Punjung).

Persoalan harga diri sering mengemuka dalam *bacakak* antar kampung ini. Seperti misalnya ungkapan tertua adat di bawah ini; *Jika kampung sudah dimasuki oleh orang lain, dan kemudian dia macam-macam tingkahnya dikampung kita, dimana letak harga diri. Adalah kewajiban setiap orang untuk membela kampungnya dari penghinaan orang lain.* Hal yang penting bagi mereka adalah *Tagak ba kaum mambela kaum, tagak ba suku mambela suku, tagak ba nagari mambela nagari.* Dalam konteks ini, pembelaan terhadap kampung menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Tidaklah heran, dalam banyak kasus, tertua kampung secara langsung maupun tidak langsung juga ikut terlibat dalam *bacakak* banyak antarkampung.

E. Pokok-pokok Masalah

Mengamati secara seksama kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini, seringkali memperlihatkan tanda-tanda hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah persoalan kecil bisa saja membuat nyawa melayang. Teriakan maling terhadap seseorang yang belum tentu melakukannya, bisa saja membuatnya dibakar massa. Ketidaksengajaan, persenggolan di jalan ataupun terinjak kaki dalam sebuah keramaian, bisa membuat perang antarkampung. Hal ini terlihat secara jelas dari berbagai perang antarkampung yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat .

Situasi ini diperparah dengan ketidakstabilan politik, terutama konflik di tingkat elite, yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi kehidupan di kalangan rakyat. Banyak pihak yang memprediksi bahwa terjadinya krisis yang melanda republik ini, jika tidak segera diambil langkah-langkah antisipatif sejak

dini, maka akan dapat membubarkan tatanan kehidupan bangsa yang telah susah payah dibangun oleh *the founding father*.

Kondisi sosial yang buruk dalam masyarakat, membawa dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah pengaruhnya terhadap tingkat produktifitas masyarakat. Pada sisi lain, perlu disadari bahwa daya tahan masyarakat terhadap kondisi tersebut kian hari, kian melemah. Alhasil, implikasi konkrit dari krisis tersebut adalah munculnya beraneka ragam masalah sosial, ekonomi, agama, dan krisis kepercayaan dalam masyarakat. Beberapa kasus nyata yaitu terjadinya perang antarkampung di berbagai kenagarian di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat.

F. Jaringan Kekerasan

Dalam perjalanan kehidupan bangsa dewasa ini, ada dua hal yang sungguh tidak dapat dipahami dengan akal sehat, yaitu masalah korupsi dan kekerasan. Faktanya masalah korupsi sudah jadi pemberitaan setiap hari dan telah mewarnai pengadilan dari Aceh sampai Papua (Dadang Trisasongko:2000). Begitu juga halnya dengan kekerasan, sudah menjadi sajian khusus di media elektronik, seperti TKP, Sergap, dan Buser ataupun koran-koran khusus berbicara tentang kekerasan. Mengacu kepada kejadian yang ada, maka semakin hilanglah rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat (Suryadi Radjab;2002). Ada apa di balik semua kekerasan yang tengah berlangsung itu? Hal ini merupakan sebuah tanda tanya besar yang muncul dalam kepala.

Setidaknya, tanda tanya besar itu berlangsung sejak 10 tahun belakangan ini. Banyak kejadian miris yang menggugah jiwa kemanusiaan terjadi di tanah air. Ketika peristiwa itu dipertontonkan di media cetak dan elektronik, rasanya sangat sulit dipahami dengan akal sehat. Seorang pencuri dibakar hidup-hidup. Tragedi Tri Sakti I dan II menelan korban jiwa. Puluhan orang hilang tak tahu rimbanya di Aceh. Ulama yang tidak tahu politik praktis seperti Teungku Bantaqiah di berondong peluru di Aceh. Pembunuhan etnis Cina terjadi di Jakarta dan Solo. Seorang gadis manis di mutilasi di Poso. Munir dihabisi di atas pesawat Garuda. Pembunuhan massal terjadi di Ambon dan Kalimantan Barat. Kepala manusia dikuliti di Kalimantan dan diarak keliling kampung dan kematian rakyat tak

berdosa di Papua. Kasus terbaru adalah konflik pasukan Marinir dengan rakyat di Pasuruan sehingga menewaskan 4 orang penduduk sipil. Belum lagi, ribuan kasus yang tak muncul ke permukaan. Prof. Dr. M. Syafii Maarif, Mantan pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, bahwa Bangsa ini sudah nyaris sempurna rusaknya (Surat kabar *Media Indonesia*, 16 Agustus 2006). Lantas, bagaimana dengan budaya Indonesia yang dikenal dengan lemah lembut, hidup rukun, dan damai, sebagaimana dikenal dalam slogan-slogan dan spanduk yang menghiasi jalan-jalan selama ini? Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan, santun, dan ramah tamah, secara tidak terduga berubah mejadi bangsa yang bringas, sadis, penuh dendam kesumat, dan suka ngamuk. Kesalahan kecil bisa berakibat perang antarkampung, antar etnis, dan antar- agama. Nurani waras sudah terkikis dari jiwa bangsa.

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi, ada sebuah gambaran semu bahwa pelaku kekerasan ini bukanlah murni dari masyarakat, akan tetapi ada tangan-tangan tersembunyi yang bermain di dalamnya. Pencaplokan tanah, penguasaan sumber daya alam dan kepentingan elite politik juga penyebab elite terlibat dalam konflik itu. Simak misalnya ungkapan seorang pengusaha nasional yang terlibat konflik tanah ketika diwawancara Liputan 6 Sore SCTV, Rabu, 6 Juni 2007. Pengusaha itu menyatakan “*jika masyarakat bertindak anarkis, maka saya bisa membalas dengan 100 kali lebih anarkis pada tanah yang mereka sengketakan*”. Ancaman pengusaha ini sesungguhnya sangat mematikan karena ia bisa menggunakan tangan-tangan lain untuk melawan rakyat, terutama tangan militer dan preman. Berbeda dengan aksi anarkis yang dilakukan masyarakat, yang hanya sebatas tindakan sporadis, dengan senjata yang mereka miliki senjata seperti demonstrasi, sabotase, menjelek-jelek nama atasan, fitnah, boycot, dan pembakaran, sebagai senjata orang-orang kalah (James C. Scott, 2000). Namun, seorang pengusaha bisa lebih anarkis lagi, karena mereka memiliki modal besar untuk menggerakkan berbagai kekuatan melawan rakyat. Dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa membeli penguasa, hukum, aparat keamanan, dan preman untuk melawan kekuatan rakyat. Jaringan antara pengusaha, militer, preman, dan penguasa bisa muncul secara samar dan bahkan secara terang-terangan dalam berbagai konflik.

Dalam setiap konflik yang muncul, dampak langsung bukanlah dirasakan oleh elite politik. Kelompok yang mengalami kerugian dan menjadi korban justru masyarakat sehingga membuat kehidupan yang sudah susah menjadi semakin parah. Hal yang tidak dapat dihindari adalah semakin memburuknya kondisi masyarakat. Konsekwensi logis adalah terjadinya penurunan kualitas kehidupan. Secara ekonomis, jelas sekali akan mempengaruhi produktifitas kerja karena energi mereka telah dihabiskan untuk konflik. Hal yang tak dapat dielakkan adalah kemampuan bertahan (*survival*) masyarakat makin lama makin lemah sehingga dapat menimbulkan rasa frustrasi baru. Implikasi konkrit dari konflik yang terjadi adalah munculnya masalah sosial, ekonomi, agama, dan krisis kepercayaan dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, persoalan kecil saja seperti seggolan ditempat keramaian ataupun pencurian, bisa berakibat fatal pada jiwa, harta, dan benda. Bahkan lebih parah lagi, bisa menjadi perang antar etnis, agama, dan golongan yang dapat menelan korban jiwa dan harta.

Tidak diragukan lagi, bahwa salah satu organisasi yang menjadi pelaku tindakan kekerasan adalah angkatan bersenjata dan polisi. Langkah untuk mengurangi tindakan kekerasan ini sudah dilakukan, terutama ketika akhir Orde Baru tentara di tarik kembali ke barak. Artinya, urusan sosial, politik, ekonomi dari ABRI dikurangi, sebagaimana masa Orde Baru, kelompok ini memainkan peranan penting dengan konsep Dwi fungsi ABRI.

Sungguh sulit membebaskan negara dari militer karena selama 32 tahun lamanya otoriter militer bercokol ternyata membuat mereka sulit keluar dari jejaring tersebut. Martin Shaw dalam bukunya *Bebas dari Militer* menyatakan bahwa tidak akan mudah menghapus begitu saja peranan militer dari kehidupan masyarakat karena struktur sosial yang terbangun selama ini menempatkan mereka pada posisi yang kuat (Martin Shaw:2001).

Kekuatan militer menjadi salah satu unsur dari luar yang memiliki pengaruh di daerah konflik. Hal ini dapat dilihat dari kasus DOM di Aceh, pertikaian Brimob dan Kopasus di Papua, Marinir di Pasuruan, dan

Brimob di Poso. Pertanyaan besar adalah bagaimana posisi mereka dalam setiap konflik dan kekerasan yang terjadi itu.

Persoalan ada yang membuat konflik dan ada yang mencegah atau menyelesaikan konflik merupakan suatu rangkaian dari sebuah persoalan yang terjadi wilayah konflik itu. Kekuatan yang begitu mengcengkeram dari luar, terutama negara, pengusaha, militer, polisi, dan preman membuat masyarakat semakin terdesak ke dalam jurang kekerasan. Sementara itu, politisi dan LSM juga seringkali memanfaatkan mereka setelah mereka menjadi korban. Alhasil, mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kemudian merambat pada lapisan bawah. Dalam konflik antarkampung, kadangkala juga menjurus menjadi konflik masyarakat dengan pengusaha, masyarakat dengan penguasa, pengusaha dengan penguasa yang didukung oleh aparat keamanan dan polisi. Kasus pencaplokkan tanah oleh pengusaha di Solok Selatan, Pasaman, perlindungan sarang walet oleh Kodim di Lintau dan Simarasok adalah bukti nyata jaringan kekerasan yang dipersiapkan oleh penguasa dan pengusaha untuk menguras kekayaan alam, yang secara hukum adat mereka tidak berhak di dalamnya.

G. Kaum Muda Sebagai Pemicu Bacakak Banyak

Di sebuah pertunjukan organ tunggal dalam acara pesta perkawinan di Malana Batusangkar, Rici, tewas ditikam oleh Irwan akibat kesalahpahaman. Harian Singgalang melaporkan bahwa Riki dan teman-temannya sedang duduk menonton acara organ tunggal. Di seberang kursinya, duduk pula Irwan dalam kelompok pemuda lain. Mereka tidak saling kenal. Tetapi, ketika Irwan melirik ke arah meja Rici, pandangan matanya berhenti pada Rici, yang duduk di sebelahnya. Entah apa sebabnya, Rici merasa dilecehkan, tidak senang atas perlakuan itu Rici langsung mendatangi meja Irwan dan menegur secara kasar, “apa yang kau lihat?” Ucapan itu juga membuat Irwan merasa tidak senang, Irwan menjawab, “mataku yang melihat, bukan mata kau.” Kemudian adu mulut itu berlanjut pada perkelahian. Dalam suasana itu, Irwan mengeluarkan pisau dan ia berhasil melukai Rici. Berdasarkan hasil visum, dokter menyebutkan bahwa ada 3 luka

robet yaitu di dada kiri, perut kiri, dan perut kanan. Walaupun koraban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa Rici tidak tertolong lagi. Akhirnya, Rici meninggal dunia hanya karena kesalahpahaman dalam sebuah acara pesta perkawinan, sebuah pesta yang seharusnya penuh kegembiraan kemudian berubah menjadi pesta kematian (Surat kabar Harian *Singgalang*, 6 Oktober 2004).

Jika perkelahian Irwan dengan Rici berlangsung begitu cepat sehingga orang di sekitar pun tidak sadar, bentuk perkelahian lain bisa saja direncanakan. Melihat dari contoh kasus di atas, emosional yang membabi buta menyebabkan nyawa orang melayang. Temuan Nurmina (dkk), menyebutkan bahwa kondisi emosi adalah sebagai penyebab utama perkelahian antar remaja (Lihat tabel 1).

TABEL 1
FAKTOR KONDISI EMOSI
SEBAGAI PENYEBAB TINGKAH LAKU AGRESI REMAJA

Faktor emosi	Sangat Sering	Sering	Kadang 2	Jarang	Tidak Pernah
Tidak ada teman	10%	6%	21%	13%	50%
Merasa bangga berkelahi	1%	4%	6%	10%	78%
Fisik mengecewakan	4%	13%	32%	18%	34%
Tak bisa menahan kecewa	6%	16%	24%	22%	29%
Tidak ada dibanggakan	4%	6%	24%	15%	50%
Tempat bercerita	10%	16%	33%	20%	16%
Tidak ada dapat dipercaya	5%	5%	26%	16%	48%

Sumber: Nurmina, Zaiyardam Zubir, Firman dan Ferawati, *Penanggulangan Tindakan Kekerasan dan Agresivitas Remaja di Sumatera Barat*. Padang, Balitbangda, 2003, hal. 68.

Contoh kasus perkelahian Rici di atas, berlangsung sedemikian cepat sehingga berakibat hilangnya nyawa, bandingkan misalnya jika terjadi perkelahian anatara kelompok atau kampung. Dalam perkelahian antar kelompok, biasanya segerombolan remaja – dengan berbagai senjata- mengejar

kelompok remaja lainnya. Remaja yang dikejar bukannya takut, namun mereka juga menanti dengan aneka senjata yang dimilikinya. Biasanya, dalam suasana seperti itu, *bacagak* banyak pun tidak dapat dihindari. Kelompok itu bisa saja berdasarkan antar sekolah, antar geng ataupun antar kampung. Dalam kelompok itu, jumlah yang terlibat bisa 5 orang, 10 orang, 100 orang atau bahkan sampai satu kampung. Dalam *bacagak* banyak itu, berbagai faktor bisa saja menjadi penyebabnya. Faktor itu bisa datang dari dalam diri ataupun dari luar diri individu. Jika diamati jenjang pergaulan dari dalam rumah tangga sampai di luar rumah, maka faktor utama bisa jadi berangkat dari ketidakhamonisan dalam rumah tangga. Simak tabel hasil penelitian Nurmina Dkk di bawah ini.

TABEL 2
FAKTOR KELUARGA SEBAGAI PENYEBAB
TINGKAH LAKU AGRESI REMAJA

Factor keluarga	Sangat Sering	Sering	Kadang 2	Jarang	Tidak Pernah
Pertengkaran orang tua	3%	6%	27%	37%	27%
Ayah memaki ibu	3%	4%	15%	22%	55%
Dimarahi orang tua	3%	4%	15%	20%	59%
Dipukul ayah	1%	3%	19%	30%	38%

Sumber: Nurmina, Zaiyardam Zubir, Firman, dan Ferawati, *Penanggulangan Tindakan Kekerasan dan Agresivitas Remaja di Sumatera Barat*. Padang, Balitbangda, 2003, hal. 58.

Berlaku atau tidak sebagai penyebab kekerasan, satu hal yang pasti adalah masalah kenakalan remaja memang berangkat dari kondisi internal yang dialami dalam rumahtangga. Konflik yang berlangsung dalam rumahtangga kemudian menjadi bagian dari emosi bagi anak dalam kehidupan di luar rumah. Mulai maki-makian yang ia dengan antara ibu dengan bapak, makian yang langsung ia terima ataupun sebuah pukulan dan tendangan yang didapatkan di rumah, menjadi modal pergaulan di luar rumah sehingga dalam pergaulannya, si anak hanya tinggal meledakkan saja

emosi yang tak terkendali itu. Dengan demikian, faktor yang berlangsung dari luar akan memudahkan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan. Beberapa faktor pencetus seperti putus pacar, terhina, dan membela kawan dan kampung sesungguhnya menjadi faktor mempercepat meledaknya emosi remaja (Lihat tabel 3).

TABEL 3
FAKTOR PENCETUS TINGKAH LAKU AGRESI REMAJA

Faktor pencetus	Sangat Sering	Sering	Kadang 2	Jarang	Tidak Pernah
Putus pacar	2%	4%	4%	7%	82%
Berebut daerah kekuasaan	1%	2%	5%	7%	84%
Merasa terhina	6%	20%	32%	23%	18%
Membela harga diri kampung	11%	13%	14%	18%	47%

Sumber: Nurmina, Zaiyardam Zubir, Firman, dan Ferawati, *Penanggulangan Tindakan Kekerasan dan Agresivitas Remaja di Sumatera Barat*. Padang, Balitbangda, 2003, hal. 51.

Berdasarkan tabel di atas, pencetus terjadinya *bacagak* banyak tidak terlepas dari persoalan ini. Asal muasal dimulai dari perkelahian dua remaja, kemudian berkembang menjadi perkelahian antar kelompok, suku, dan kampung. Dalam perkelahian itu, jatuhnya korban sudah hal biasa. Penelitian Nurmina memperlihatkan bahwa akibat akibat *bacagak* banyak di antaranya luka-luka, ditahan polisi, masuk rumah sakit, dan meninggal dunia (tabel 4).

TABEL 4
INTENSITAS AKIBAT TINGKAH LAKU AGRESI REMAJA

Akibat tingkah laku agresi	Sangat	Sering	Kadang-	Jarang	Tidak
----------------------------	--------	--------	---------	--------	-------

	sering		kadang		Pernah
Membunuh Orang				2%	98%
Korban masuk rumah sakit	2%	4%	4%	8%	82%
Korban Luka-luka	3%	5%	10%	15%	66%
Ditahan Polisi	1%	1%	5%	3%	92%
Diri sendiri luka-luka	1%	6%	15%	27%	51%

Sumber: Nurmina, Zaiyardam Zubir, Firman, dan Ferawati, *Penanggulangan Tindakan KeKerasan dan Agresivitas Remaja di Sumatera Barat*. Padang, Balitbangda, 2003, hal. 43.

Ketika korban berjatuhan, menggambarkan bahwa sesungguhnya masyarakat memiliki jiwa-jiwa bar-bar dalam menghabisi nyawa orang lain. Dengan demikian, tidak terlalu sulit menyatakan bahwa orang Minangkabau memiliki sifat yang suka dengan kekerasan. Mereka yang terdidik dalam budaya dialektika, setiap penyelesaian masalah dilakukan dengan jalan dialogis ataupun berunding, tetapi juga dengan kekerasan .

Dalam melihat *bacakak* banyak ini, biasanya terjadi antar dua nagari yang berbatasan. Alasan pokok perkelahian biasanya mereka memiliki berbagai akar persoalan yang bersifat laten, seperti batas nagari, tradisi yang turun temurun. Meminjam istilah Mario Puzo, dalam waktu tertentu mereka harus membersihkan darah kotor (Mario Puzo, 1994), yang kemudian ditandai dengan korban nyawa dalam setiap *bacakak* banyak.

Kejadian-kejadian seperti ini, sesungguhnya seingkali terjadi di dalam masyarakat seperti telah disinggung pada bagian awal. Seperti yang terjadi pada bulan Desember 1999 yang lalu itu, salah satu ruas jalur jalan Lintas Sumatera mengalami macet total selama 5 hari. Jalur yang mengalami macet itu berada pada dua kampung yaitu Sungai Dareh dan Pulau Punjung. Asal muasalnya adalah kedua kampung -yang dibatasi oleh Sungai Batang Hari dan dihubungkan dengan sebuah jembatan - sedang berlangsung *bacakak* banyak sehingga mobil-mobil yang melewati jalur itu dicegah oleh kedua belah pihak melanjutkan perjalanan. Dalam perang antarkampung itu, kedua pihak yang telah berseteru meminta bantuan pada kampung tetangganya sehingga melibatkan banyak orang di

dalamnya. Surat kabar Padang Ekspres melaporkan bahwa perang antara Pulau Punjung dengan Sungai Dareh melibatkan tiga puluh ribu orang, mereka menggunakan bermacam senjata, seperti pedang, parang, anak panah berapi, dan *gobok* (sejenis senjata api, yang biasanya digunakan untuk berburu babi), (Surat kabar Harian *Padang Ekspers*, 20 Desember 1999).

Ketika korban mulai jatuh, perang antarkampung pun tidak dapat dielakkan. Dalam waktu yang sama, rumah penduduk yang tak bersalah mulai dibakari oleh pihak yang bertikai dan bahkan pada puncaknya hilangnya 5 nyawa dari kedua belah pihak sehingga polisi terpaksa turun tangan. Selanjutnya, Kapolda Sumbar Brijen Polisi Dasrul Lamsudin, langsung menurunkan anak buahnya dari kesatuan Brimob Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh sebanyak 500 orang, guna mencegah korban nyawa dan harta yang semakin banyak. Setelah kesatuan Brimob itu turun tangan, proses perdamaian dapat berjalan (Surat kabar *Padang Ekspers*, 20 Desember 1999).

Dalam *bacakak*, setiap kelompok memiliki kode masing. Kode yang lazim digunakan dalam *bacakak* banyak adalah;

1. 1 kali kentungan, berarti aman.
2. 2 kali kentungan, berarti siaga
3. 3 kali kentungan bersiap menyerang
4. Kentungan terus menerus, musuh menyerang

(Wawancara dengan Datuak Gadang)

Menurut tetua adat di Sikabau, kode ini telah lama mereka pahami, terutama ketika suasana panas, suasana adanya gejala-gejala akan terjadi *bacakak* banyak. Munculnya suasana panas, juga sangat sulit diduga, hal ini bersifat spontanitas saja. Ada beberapa hal yang membuat suasana mudah panas, seperti keramaian, pemakai narkoba, peminum alkohol, perjudi, maling, dan sikap penyimpangan lain yang terjadi di kalangan anak muda. Bahkan, khusus untuk minuman keras di kawasan pedesaan Minangkabau mendapatkannya semudah mendapatkan permen. Di beberapa daerah, terkadang anak dengan orangtua minum segelas berdua tidak obahnya seperti minum kopi saja. Gelar-gelar orang pun terkadang disesuaikan dengan nama minuman,

seperti *Ad Vodka*, sebab minum paginya *Vodka*, *Tommy TKW* karena minuman utamanya *TKW*, dan *Jhon Walker* karena kesukaannya minum *Joni walker*.

Dalam bahasa peminum, 'minum seloki mabuk sebotol', merupakan ciri khas remaja yang mencoba bersinggungan dengan minuman keras. Gaya ini hanya gaya gagah-gahan saja supaya dianggap sebagai jagoan sehingga orang lain sering dianggap kecil. Dengan demikian, tentu saja akibat yang ditimbulkan tidaklah terlalu besar. Tetapi, setelah terjadi perkelahian massal, barulah akibat yang ditimbulkan cukup berat. Jika perkelahian hanya sebatas beberapa orang saja, dampak yang ditimbulkan tidaklah terlalu besar dan fatal.

Bacakak banyak dianggap sebagai penyakit sosial masyarakat yang krusial tidak obahnya seperti api dalam sekam. Memang dalam keseharian terlihat perkembangan yang wajar-wajar saja, tetapi sesekali muncul ledakannya sulit diduga, tidak obahnya seperti granat yang lepas kendali. Dalam konteks penanggulangannya, berbagai kebijakan yang berkembang selama ini sudah sepatutnya ditinjau ulang kembali. Langkah kongkrit yang dapat dilakukan adalah melalui analisa kebijakan, sebab kebijakan yang sudah ada belum sepenuhnya dapat menaggulangi persoalan yang sedang terjadi (Soedjatmoko, 1984).

Dalam melihat tindakan konflik *bacakak* banyak di kalangan masyarakat, persoalan ini sesungguhnya tidaklah berdiri dengan sendirinya. Ia memiliki banyak dimensi yang harus diuraikan sehingga dapat melihatnya dalam perspektif yang beragam. Artinya, dari setiap persoalan dari kelompok yang bertikai, terlebih dahulu diuraikan kembali unsur-unsur yang menjadi penyebab terjadinya konflik.

Fenomena *bacakak* antarkampung merupakan gejala yang sering terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Gejala ini sesungguhnya semakin kuat ketika diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979 mengenai pemerintahan desa. Ketika pemerintah desa terbentuk, maka batasan-batasan geografis yang dianggap sebagai kesatuan nagari menjadi pudar. Hal ini juga diikuti demam tinggi emosional antar desa sehingga alasan-alasan kecil dapat menuai perang antarkampung. Persoalannya tidak hanya pada masalah tanah

ulayat saja, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, elite, dan kesatuan politik lokal. (Zaiyardam Zubir, 2007).

Menurut hasil survey majalah *Tempo*, “Setelah Wali Nagari Hapus”, menyebutkan bahwa bersamaan dengan lahirnya UU No. 5/1979. Kepemimpinan kharismatik itu telah digeser oleh Kepala Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut partisipasi rakyat semakin berkurang dan mereka terkurung dalam sistem birokrasi nasional, tanpa memperhatikan aspirasi lokal. Kepala Desa tidak begitu dekat dengan masyarakat dan kurang dikenal apalagi yang duduk di LKMD, bukan lagi elite nagari dulu (majalah *Tempo*, No.14 th XIX-3 Juni 1989).

H. Sekolah : Untuk Apa, Toh Banyak Juga Sarjana Yang tak Kerja

Kalau sekolah mencari uang, tanpa sekolah pun juga dapat uang. Lantas sekolah untuk apa sekolah? Setidaknya begitu ungkapan keseharian yang ditemukan di kalangan anak-anak di peesaan Kecamatan Pulau Punjung, terutama mereka yang tidak berminat untuk sekolah. Dunia pendidikan sendiri memang baru berkembang di wilayah itu. Tingkat pendidikan yang tertinggi adalah SMA, itupun baru dalam sepuluh tahun belakangan ini. Masalah minat belajar anak merupakan suatu persoalan sendiri. Rendahnya minat belajar membuat mereka enggan untuk sekolah. Apalagi kondisi alam yang berkecukupan sangat berpengaruh pada keinginan mereka untuk sekolah. Yang ingin disampaikan adalah sebuah gugatan yaitu ‘apalah artinya sekolah’, jika tanpa sekolah pun mereka dapat menikmati hidup serba berkecukupan. Hal ini, sangat berpengaruh bagi perilaku dan mentalitas sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat asli. Bagi mereka ekonomi adalah nomor satu sehingga masalah lain menjadi nomor dua, tiga, dan seterusnya. Akibatnya, pendidikan bagi mereka tidaklah terlalu penting, yang lebih penting bagi mereka adalah uang. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya mencari pekerjaan susah dan harus kembali bekerja “menakik getah” atau “masuk hutan” dan panen sarang walet.

Dapat dikatakan, bahwa faktor pendidikan adalah faktor yang menentukan pola dan tingkah laku anggota masyarakat. Menurut Asmiar salah seorang guru di

Pulau Punjung, bahwa faktor pendidikan adalah faktor penyebab utama munculnya tindakan agresifitas remaja dan masyarakat secara umum. Menurutnya, bersekolah kita dapat memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami hidup. Rendahnya motivasi anak untuk bersekolah juga disebabkan beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan dan apatis melihat kondisi banyaknya sarjana yang menganggur. Materi lebih penting dibandingkan dengan sekolah tinggi. Oleh karena itu, anak-anak sejak kecil sudah mulai diajak ke hutan atau ke kebun untuk *manakiak gatah*. Pemandangan umum, jika terdapat anak yang bersekolah biasa beli motor dari uang sendiri (Wawancara dengan Asmiar).

Satu hal yang pasti, anak dalam masa pertumbuhannya mudah terseret ke dalam pergaulan yang negatif. Bahkan tontonan saja dapat dengan mudah memengaruhi mereka. Sering terjadi hayalan-hayalan yang mereka lihat di media elektronik ataupun media cetak dipraktekannya dalam keseharian. Misalnya, dalam bergurau sering mengatakan jurus apa yang disukai; *Steven Siegel*, *Bruce Lee* atau *smack down* (Wawancara dengan Ronald di Sikabau).

Kembali kepada pijakan pemikiran sebelumnya, bahwa tingkat pendidikan di kalangan remaja sangat tergantung pada tingkat hubungan sosial, ekonomi, tontonan, dan lingkungan rumah tangga keluarga remaja yang bersangkutan. Dalam arti kata, idealnya tingkat pendidikan, pergaulan, bacaan, dan tontonan pada remaja berbanding lurus dengan tingkat sikap hidup sehari-hari remaja yang bersangkutan. Seyogyanya hubungan kekeluargaan dan keharmonisan rumah tangga sangat menentukan tingkah laku dan agresivitas remaja. Hal yang terburuk adalah pelarian-pelarian yang mereka lakukan sehingga dapat merusak diri mereka sendiri, seperti pergaulan bebas, narkoba, dan PSK.

I. Agama (Islam): Masih kah sebagai penawar sitawa sidingin (Penyejuk)

Berkumandangnya azan magrib sesungguhnya menyeruak sampai ke pelosok *nagari*. Bahkan sudah dibantu oleh pengeras suara sehingga suara azan mencapai radius 3 km. Artinya, satu mesjid itu cukup mengingatkan orang kampung untuk shalat ke mesjid. Namun, anehnya ketika menginjakkan kaki di mesjid, (sebuah mesjid yang megah dan besar, barangkali dapat menampung 100 jamaah), yang ditemui hanyalah orang – orangtua yang sedang sembahyang dengan 14 laki-laki, dan 7 perempuan, hanya inilah para jamaah yang mengisi

shalat magrib di masjid Sikabau. Lantas, yang lainnya bagaimana? Satu hal yang pasti, anak-anak muda masih asyik di warung-warung dan kaum ibu asyik mengasuh anak-anak mereka. Sementara itu, sebuah surau kecil yang jaraknya 50 meter dari rumah dan warung itu para jemaahnya menunaikan sholat magrib berjamaah. Sekarang timbul pertanyaan, masih bisakah agama menjadi penawar yang menarik bagi masyarakat?

Pertanyaan di atas agaknya tepat diajukan, karena keber- agamaan kian hari semakin memudar. Negeri yang konon katanya *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* hanya ada dalam spanduk saja. Artinya, walaupun pada umumnya masyarakat memeluk agama Islam, tetapi masih sebatas kulit luarnya saja. Padahal, berbagai fasilitas keagamaan cukup memadai. Namun, Mesjid lebih banyak diisi oleh orang-orang tua saja. Agama yang seharusnya dapat dijadikan filter bagi kemaksiatan telah gagal, apalagi untuk menjadikannya sebagai sebuah ideologi. Akibatnya, berbagai persoalan kemanusiaan yang timbul dalam masyarakat gagal pula diperbaiki.

Ilustrasi di bawah ini memberi gambaran tentang keberagamaan masyarakat Minangkabau (Zaiyardam Zubir:2002): pada sebuah kompleks perumahan yang mana dalam kompleks itu berlangsung berbagai tindakan *deviant*, seperti pelacuran, minuman keras, judi siang malam, kondom, ganja, opium, narkotika, sabu-sabu, dan pil kaplo dijual disudut-sudut rumah. Sementara di lokasi yang sama berdiri sebuah musala berukuran 2 x 3 menjulang di bagian sudut paling belakang kompleks. Kemudian, pada pintu gerbang -yang bernuansa atap bergonjong- sebagai pintu masuk kompleks itu, terpampang sebuah spanduk besar yang ditulis dengan huruf kapital:

“DI TANAH KOMPLEK PERUMAHAN INI BERLAKU HUKUM”
“ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH ”

J. Kufur Nikmat

Baik di Kabupaten Pasaman maupun Kabupaten Sawahlunto termasuk kabupaten yang kaya di Sumatera barat. Contoh kasus yaitu kondisi ekonomi Pulau punjung, terdapat dua kisah yang menarik untuk diceritakan. Pertama,

“Berapa harga Ikan paten Sekilo”, suara seorang ibu menanyakan harga ikan kepada seorang pedagang. Dijawab oleh pedagang harganya Rp. 30.000.- Sang ibu yang pegawai negeri (terlihat dari pakaian seragamnya) menawar Rp. 25.000.- Sebelum pedagang menjawab, seorang ibu lain (perempuan kampung biasa, terlihat dari pakaiannya) menanyakan berapa kilo ikan yang ada. Sang pedagang menjawab 5 kilo. Kemudian, ibu tersebut tanpa menawar-nawar langsung memborong semua ikan yang ada. Kebetulan sekali ibu itu baru saja panen sarang burung walet. (Wawancara dengan Betriza Handayani, guru SMPdi Sikabau). Kedua, seorang *toke* (pedagang) emas bercerita bahwa seorang ibu, yang kebetulan penduduk kampung menanyakan harga sebuah kalung dengan berat 20 emas. Kemudian si *toke* (pedagang) menjawab harganya Rp.5 juta. Tanpa menawar-nawar, si ibu langsung membayar dan kemudian si ibu juga memberi bonus sebanyak Rp. 100,.000,- (Wawancara dengan Zulhery, pedagang emas di Pulau Punjung).

Dua kisah di atas menggambarkan bahwa Pulau Punjung sebagai wilayah penelitian memperlihatkan tingkat ekonomi yang cukup bagus. Potensi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pulau Punjung dapat dikatakan sangat baik. Potensi utama terletak pada dukungan sumber daya alam terutama karet, kebun kelapa sawit dan sarang walet. Khusus untuk yang terakhir ini, mereka mampu memanen sekali empat bulan, inilah yang membuat ekonomi masyarakat semakin hidup. Seorang tokoh terkemuka di Pulau Punjung menyatakan “bahwa potensi sumber daya alam yang memadai tersebut menyebabkan daerah ini disebut sebagai daerah dollar”. Uang banyak beredar sehingga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat relatif baik. Hal ini secara kasat mata dapat dibuktikan dengan perilaku dan pola kehidupan masyarakat, seperti pola kehidupan konsumtif menjadi ciri khas masyarakat Pulau Punjung dan juga Sungai Dareh. Hal ini terlihat ketika datangnya hari pasar di Pulau Punjung.

Baiknya tingkat ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari sektor perilaku sosial. Dimana pada umumnya masyarakat mulai dari orang tua sampai kepada anak-anaknya memperagakan dalam bentuk barang berharga seperti emas. Di leher, pergelangan tangan dan jari mereka senantiasa dihiasi dengan emas dan berlian. Ini tidak hanya dipakai oleh kaum perempuan, akan tetapi juga dipakai

oleh kaum laki-laki. Di samping perhiasan juga dapat dilihat dari pakaian mereka. Pakaian anak gadis dan anak perjaka di sini tidak kalah dengan pola berpakaian anak-anak remaja yang tinggal di kota.

Kemapanan sektor ekonomi masyarakat berpengaruh juga terhadap pola dan perilaku kawula remajanya secara lebih khusus, terutama yang berasal dari penduduk asli. Sebahagian besar mereka lebih memilih untuk bekerja untuk mencari uang dibandingkan untuk bersekolah tinggi, umumnya pendidikan mereka rata-rata tamat SD dan SLTP. Setelah tamat SD atau SLTP mereka lebih memilih bekerja “menderes karet, kebun sawit atau karet, walet ataupun mengambil kayu ke hutan sehingga uang mudah didapatkan.

Dukungan sumber daya alam itu yang kemudian menjadi daya tarik bagi pedagang dari luar Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Mereka berdatangan dan tinggal untuk menjadi pelaku ekonomi. Biasanya pendatang tersebut sebahagian besar bekerja sebagai pedagang. Pada umumnya pendatang berasal dari Batusangkar, Bukittinggi, Padang Pariaman, Solok, Padang Panjang dan Payakumbuh. Ada juga yang sebahagian yang berasal dari luar Sumatera Barat seperti Jambi dan Jawa. Untuk sebuah kecamatan di Sumatera Barat, pulau punjung memperlihatkan tingkat kemajuan yuang besar. Komplek pertokoan yang baru dibangun mencapai 500 pintu, beberapa Bank seperti BRI, bank Nagari dan BNI dan beberapa dealer sepeda motor seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha. Dua indikator ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk asli dan pendatang hampir berimbang. Kira-kira 50% penduduk asli dan 50% pendatang. Hubungan antara pendatang dengan masyarakat asli berjalan dengan baik. Sangat jarang terjadi perselisihan antara pendatang dengan masyarakat asli. Hal ini di sebabkan oleh faktor keterbukaan antara kedua kelompok tersebut. Kalaupun ada perselisihan antara pendatang dengan masyarakat asli, penduduk pendatang cenderung mengambil posisi mengalah.

K. Kebijakan Penguasa : Menunggu Jatuh Korban

Salah satu penyebab yang menyebabkan “kejadian sepele” menjadi peristiwa besar atau “bacagak banyak” adalah ketidakcakapan pemimpin dan pemuka masyarakat dalam menghadang solidaritas ditingkat anak muda. Peristiwa itu sering terjadi secara spontanitas dan tidak reaksioner. Kejadian itu sangat susah untuk diredam ketika solidaritas massa sudah terbentuk. Misalnya pada suatu acara pemuda di Pulau Punjung khalayak banyak datang dari Sungai Dareh, Sikabau, Tabing Tinggi, dan daerah lainnya. Di sini pada umumnya anak muda minum dan mabuk-mabukan, tanpa disengaja terinjak kaki salah seorang pemuda Pulau Punjung, maka hal-hal seperti inilah yang dapat memicu terciptanya perkelahian massal.

Hal itu diakui pihak kepolisian setempat, “untuk menangani kasus perkelahian massal, minum-minuman, ngebut di jalan tanpa helm, menghisap ganja, dan pegi ke “bombay”, sebuah lokasi tempat bermain dengan “pekerja seks”, mereka harus menyiapkan uang minimal Rp. 300.000,- membeli minuman Rp.100.000,-. Ditambah dengan “main” dengan perempuan”. (Bombay ini menjadi kompleks pelacuran yang terletak perbatasan Sumbar dengan Riau). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kalau anak kemenakan ditangkap atau tertangkap basah dan di bawa ke kantor polisi maka bisa saja masyarakat secara bergerombolan datang ke sini. Bisa-bisa kantor ini dilempar dan dibakar, sedangkan kita punya anggota terbatas. Kondisi itulah yang menyebabkan susah bagi kita untuk menegakkan hukum di daerah ini” ujarnya.

Akan tetapi, sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Wali Nagari Sungai Dareh “bahwa terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat masyarakat disebabkan oleh kaburnya nilai dan pemahaman adat di tingkat pemegang adat dan masyarakat, sebagai akibat diberlakukannya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat.” Dengan diberlakukannya kembali sistem pemerintahan nagari peristiwa “konflik massal” semakin jarang terjadi. Peran tokoh adat dan tokoh ulama yang selama ini terpinggirkan mulai mendapatkan perannya. (Wawancara dengan Mursal)

Faktor kenakalan remaja ini menurut mereka bukan hanya disebabkan oleh diri mereka sendiri. Menurut Robbi salah pemuda di Sungai Dareh mengatakan,

“bahwa kenakalan kami juga disebabkan oleh orang tua dan lingkungan kami tinggal, kami merasa kurang diperhatikan dan kurang dikontrol oleh orang tua sehingga kami akhirnya dapat melakukan apa yang kami inginkan. Begitu juga dengan kontrol dalam masyarakat. Para tokoh masyarakat dan agama kadang-kadang tidak dapat memberikan contoh yang baik. Mereka menyuruh kami rajin bersekolah, rajin ke mesjid atau jangan minum-minum. Kadangkala mereka melakukan hal itu. Jadi, gimana kami harus patuh terhadap mereka.” (Wawancara dengan Roby).

Pornografi tersebut erat kaitannya dengan masalah prostitusi. Pornografi masih dalam taraf mengenal atau ingin mengetahui, namun prostitusi berarti orang yang bersangkutan telah jatuh ke tahap yang lebih jauh. Hal itu bisa terlihat dari cara pergaulan sehari-hari pada kalangan remaja. Untuk kasus Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, kunjungan-kunjungan ke Bombay (Komplek Pelacuran diperbatasan Sumbar Riau) menjadi wilayah yang rajin dikunjungi kalangan masyarakat, dari berbagai lapisan. Berbagai anekdot muncul di sini, seperti ketika seorang remaja akan memasuki kamar seorang PSK, ternyata yang keluar dari kamar itu bapaknya, yang baru saja melampiskan nafsu kepada PSK. Kisah lain seperti seorang menantu bergantian dengan mertua main di komplek itu. Cerita seperti ini menjadi guyonan di kalangan masyarakat (Wawancara dengan Mansur).

Krisis kepanutan, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat itu tidak hanya terhadap tokoh dan pemuka masyarakat akan tetapi juga terhadap lembaga pemerintahan secara kelembagaan seperti wali negeri kecamatan, pemerintahan nagari. Mereka tidak akan menerima begitu saja saran dan bimbingan dari pemerintah jika yang dilakukan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya. Akan tetapi, jika sebuah ide dan saran yang diberikan tersebut sangat baik menurut masyarakat terutama bagi pemudanya maka tingkat solidaritas mereka sangat tinggi dalam mensukseskan acara tersebut.

L. Tanah Sebagai sumber konflik utama

Konflik tanah merupakan faktor penting dari persoalan tanah di Sumatera Barat. Sebagai contoh laporan Kanwil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat

tahun 2002 menyebutkan bahwa dari 310 kasus yang masuk, 245 kasus adalah masalah tanah (Kanwil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2003). Contoh kasus di bawah ini memperlihatkan tanah sebagai terjadi perang terbuka dalam masyarakat.

Sabtu Sore, 12 Febuari 2005 lalu, sebanyak lebih kurang 50 orang dari Pasaman Barat mendatangi PBHI Wilayah Sumbar. Mereka mengadukan dua hal yaitu tanah pusakanya diambil oleh pengusaha untuk dijadikan perkebunan besar dan penangkapan 20 orang anggota keluarganya oleh polisi. Proses pembebasan tanahnya dari awal sudah diliputi dengan penipuan yang dilakukan oleh penghulu atau kepala adat setempat. Penghulu menyatakan bahwa penyerahan tanah sudah disetujui oleh semua kaumnya dan itu diperlihatkan dengan tanda tangan anak kemenakannya. Pada hal, inisiatif untuk menyerahkan tanah datang dari penghulu saja dan kemudian sang penghululah yang menikmati ganti rugi atas tanah yang dijual itu.

Persoalan ini kemudian membuat heboh dan terjadi demonstrasi oleh anak kemenakannya terhadap perusahaan perkebunan itu. Demonstrasi itu berakhir dengan tindakan anarkis seperti penyerbuan ke perusahaan, pembakaran gudang dan bibit tanaman. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah terjadinya penangkapan terhadap kelompok yang menyerang dan membakar perusahaan itu (PBHI Wilayah Sumbar, *Laporan Pengaduan Masyarakat Kinali Pasaman Barat*, 12 Februari 2005). Akar persoalan berawal dari proses penyerahan tanah itu. Ternyata, tidak semua anggota kaum yang mendapatkan ganti rugi. Bahkan, parahnya lagi juga tidak semua yang mengetahui adanya transaksi jual-beli tanah itu. Bahkan, penghulu melakukan pemalsuan tandatangan anak kemenakannya, sehingga menimbulkan perlawanan terbuka terhadap penghulu dan perusahaan.

L. Epilog

Bacakak banyak antar kampung sesungguhnya bukanlah hal baru dalam budaya Minangkabau. Belakangan ini, *bacakak* antar kampung itu menjamur kembali. Jika dilihat asal muasalnya, setidaknya dapat dikategorikan atas dua hal pokok yaitu yang bersifat laten dan temporal. Persoalan yang bersifat laten adalah tanah dan penguasaan sumber daya alam dan tanah seperti sarang walet seperti di

Pulau Punjung kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Tinggam Kabupaten Pasaman. Persoalan hasil tambang seperti tambang emas dan batu bara di kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Persoalan batasan tanah yang tidak tegas sesungguhnya merata terjadi di setiap kampung di Sumatera Barat. Batasan yang tidak tegas satu kampung dengan kampung lainnya seringkali menjadi sumber utama konflik.

Sumber : Surat kabar harian **Singgalang**, 20 Desember 20003

Konflik ini yang sudah terjadi secara turun temurun, kemudian menjadi warisan dalam masyarakat sebagai potensi besar sumber konflik. Bahkan konflik sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas dan seringkali dengan tindakan kekerasan, seperti *bacagak* banyak. Hal inilah yang menjadi persoalan besar di dalam masyarakat perkampungan di Sumatera Barat, yang ditandai kualitas dan kuantitas dari korban *bacagak* banyak.

Persoalan laten di atas dengan mudah dipacu oleh hal-hal yang sifatnya sangat sederhana. Menggoda perempuan di jalan, terinjak di keramaian, pertandingan sepakbola, pesta, pasar, dan tempat umum lainnya merupakan arena perkelahian. Polanya sederhana saja dan sangat cepat. Seorang pemuda terinjak kakinya oleh pemuda lain dalam keramaian, maka angung terjadi perkelahian. Setelah dipisahkan dan kemudian mengalah salah satu, perkelahian berhenti. Biasanya, 1 - 2 jam kemudian, terjadi perkelahian antar kelompok pemuda. Jika sudah demikian, maka potensi *bacagak* antarkampung semakin luas. Pencegahan harusnya dilakukan ketika api masih kecil, ketika korban masih belum ada dan ketika pembakaran belum terjadi.

Selama ini, dalam mengantisipasi masalah-masalah yang berkembang, pihak-pihak yang terlibat juga tidak memiliki kerangka berpikir yang terarah dan sistematis. Ironisnya lagi, informasi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut masih sangat tidak memadai. Hal ini disebabkan karena tidak lengkapnya informasi dan data yang siap pakai, serta mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya.

Sementara itu, pendekatan yang dikembangkan selama ini dalam pencegahan konflik sesungguhnya tidak ada. Hal yang ada hanya kalau sudah terjadi *bacakak* banyak, maka pihak berwenang turun tangan. Artinya, keterlibatan pihak luar biasa setelah meletusnya konflik. Pada hal, jika ada *political will* dari pihak pemerintah misalnya, maka *bacakak* banyak antar kampung itu tidak harus terjadi, jika sudah ada upaya pencegahan dan penanggulangan sebelum jatuh korban. Dari pendekatan yang dikembangkan selama ini, kesan kuat yang muncul adalah bersifat *top down*. Ternyata, hal ini hanya dapat menghentikan *cakak* banyak yang tengah berlangsung, bukan mencegah konflik yang akan terjadi.

Pada gilirannya, dalam merumuskan skenario mencegah dan menanggulangi *bacakak* banyak harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Mau tidak mau, pendekatan *botton up* agaknya menjadi alternatif yang lebih baik untuk menghindari terjadinya pembakaran rumah penduduk yang tak bersalah, pertumpahan darah sampai kematian yang tidak diinginkan.

Beberapa pemikiran pencegahan konflik seharusnya diselesaikan persoalan dasar. Ibarat seorang yang tinggal di pinggir sungai, tiap hari ada saja orok bayi yang hanyut. Rasa hati ingin jadi orang baik, maka setiap bayi yang hanyut itu diambil dan dikubur. Pada hal, penyelesaian yang efektif bukan demikian, tapi lihat asal bayi itu. Mungkin saja di atasnya ada dukun bayi atau komplek pelacuran, maka itulah yang harus dibenahi. Begitu juga dalam *bacakak* banyak itu, seharusnya dilihat dari persoalan dasar untuk mencegah terjadi *bacakak* banyak. Catatan akhir yang dapat dibincangkan dengan kelompok yang bertikai sebagai suatu skenario pencegahan awal dari *bacakak* banyak adalah :

1. Selesaikan masalah tanah rakyat, terutama yang dicaplok oleh pemerintah dan pengusaha. Konflik tanah menjadi persoalan yang krusial, terutama tanah-tanah ulayat yang diambil paksa ataupun dijual, yang hanya melibatkan penghulu saja, tanpa melibatkan anggota kaumnya pada masa Orde Baru. Setelah reformasi, masyarakat kemudian menuntut tanah mereka untuk dikembalikan.
2. Setiap nagari seharusnya membuat dan menerapkan Perna atau Perda larangan minuman keras dan judi. Tidak disangsikan lagi, bahwa *bacakak*

banyak terjadi setelah mereka mabuk ataupun untuk menyerang kampung lain, mereka minum terlebih dahulu.

3. Ketika ada perkelahian dalam skala kecil, aparat keamanan mengawasi setiap kelompok yang bertikai dan bertindak secara tegas. Pengawasan dan tindakan ini menjadi sangat penting, karena dalam masyarakat pedesaan memiliki kesadaran solidaritas primitif yang tinggi (Ibnu Khaldun, 19xx), sehingga sangat mudah dipancing dengan alasan-alasan pembelaan terhadap kaum, suku ataupun nagari.
4. Libatkan elite lokal dalam setiap persoalan kampung yaitu penghulu, *cadiak pandai*, dan ulama. Walau disadari bahwa elite ini semakin memudar dan tidak memiliki peran lagi, namun ada juga di antara mereka yang masih memiliki pikiran yang luas dan bijak, yang dapat memberi pengaruh pada orang kampungnya.
5. Libatkan orang yang disegani dalam berbagai persoalan kampung, terutama ketua preman. Jika diberi perhatian dan kepercayaan, ia jauh lebih berpengaruh dan bertanggungjawab dibandingkan dengan elite lokal lainnya dalam penyelesaian *bacakak* banyak. Diandingkan dengan elite lain -baik formal maupun informal-, pengaruh preman jauh lebih kuat dalam kelompok pemuda. Mereka segan, hormat, dan takut pada preman, karena tindakan-tindakan preman yang lebih mematikan. Dalam *bacakak* banyak, pengaruh preman ini sangat penting, karena yang suka *bacakak* banyak ini adalah preman-preman, yang ada di setiap kampung. Jika ketuanya sudah dipegang, pengendalian massa akan mudah dilakukan.
6. Dalam mencari rumusan perdamaian, semua pihak di atas, pemuda, preman, ulama, *cadiak pandai*, dan penghulu dari pihak-pihak yang bertikai duduk satu meja merundingkan jalan keluar dari konflik yang. Dengan memberi penghormatan yang layak, maka jelas sekali setiap orang akan mendukung penyelesaian konflik. Jadi pola yang dikembangkan dalam setiap penyelesaian *bacakak* banyak haruslah mencari nilai kebenaran melalui perundingan itu. Nilai-nilai perdamaian akan muncul dari dialog dan runding yang terjadi. Jadi, generalisasi dalam penyelesaian konflik tidak mungkin. Akan tetapi, mengembangkan lokal genius dalam setiap persoalan

yang ada. Setiap persoalan hanya dapat diselesaikan secara kausistik. Jika tidak akan muncul watak asli Minangkabau :

*Kok kayo, kayo surang, aden ndak ka maminta
kok pandai, pandai surang, aden ndak ka batanyo,
kok bagak, bagak surang, aden ndak ka takuik*

M. Rangkuman

Cakak banyak di pedesan Minangkabau sesungguhnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Dikatakan budaya, karena cakak banayak ini seperti dikenal disemua kampug, sehingga setiap kampung pernah melakukannya. Dalam cakak banyak itu, pokok persoalan biasanya adalah masalah anak muda. Namun persoalan latin dari semuanaya adalah persoalan tanah, penguasaan sumber daya alam dan batas nagari.

N. Soal-soal Latihan

Untuk mempertajam analisis, maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

5. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya tindakan kekerasan dan perilaku agresif yang menyebabkan terjadinya *bacakak* antarkampung ?
6. Sentimen atau solidaritas apakah yang dikembangkan dalam kelompok yang bertikai sehingga mobilisasi massa dengan sangat mudah dilakukan setiap terjadi *bacakak* antarkampung ?
7. Bagaimana peranan institusi sosial yang ada dalam masyarakat untuk mencegah *bacakak* antarkampung ?
8. Bagaimanakah strategi perumusan skenario pencegahan *bacakak* antarkampung?

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, 1986. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta : PT Grafiti press
- _____, (ed.), 1988. **Dialektika Minangkabau**. Padang : PT Singgalang Press.

- Bell, David, V.J., 1973. **Resistance and Revolution**. Boston : Hontoun Miflin Company.
- Brinton, Crene, 1984. **Anatomi Revolusi**. Jakarta : Bharatara.
- Burke, Peter, 1992. **History and social Theory**. Cambridge, Polity Press.
- Dadang Trisasongko (ed), 2006. **Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua : 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia**. Jakarta : Kemitraan.
- Debray, R., 1969. **Strategy for Revolution**. New York : Monthly Review Press.
- Dobbin, Christine, 1992. **Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847**. Jakarta : INIS.
- Efrem Silubun dan Pieter Elmas, 2004. **Ken Sa Faak : Benih-Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei**. Yogyakarta : Insist Press
- Hefner, Robert W., 1999. **Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik**. Yogyakarta : LKIS.
- Scott. James, 2000. **Senjatanya Orang-orang Yang Kalah**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suryadi Radjab, 2002. **Indonesia : Hilangnya Rasa Aman**. Jakarta : The Asia Foundation dan PBHI.
- Taufik Abdullah, 1987. **Islam dan Masyarakat**. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak Gerakan** Yogyakarta : Insist Press, Desember 2002.
- _____ dan Herwandi (ed), **Menggugat Minangkabau**. Padang : Unand Press, 2006

B IV

ANGKU DATUAK, DATUAK GAUL DAN DATUAK DATUAK-AN

*Kayu gadang ditangah Padang
Daunnya tempat berlindung
Batangnya tempat bersandar
Uratnya tempat duduk*

A. Deskripsi

Fokus bab ini adalah eksistensi penghulu sebagai elite tradisional Minangkabau. Penghulu adalah elite tradisional Minangkabau. Kududukan penghulu sebagai elite tradisional ini adalah dipegang oleh seorang Datuak. Jadi, elite penghulu Suku Piliang misalnya maka jabatan itu akan dipegang oleh Datuak Sari Paduko.

Penghulu ini merupakan bagian yang integral dari 4 elite tradisional (orang 4 jinih/pimpinan) yaitu datuak/penghulu, Ulama, Cerdik Pandai dan Bundo Kanduang (pimpinan dari kaum perempuan). Dari keempat elite ini, pusaran perebutan kekuasaan biasanya upaya untuk menguasai sektor produksi yaitu tanah. Dalam sejarahnya, tanah ini lebih banyak dimainkan antara penghulu dan bundo kanduang, sedangkan ulama dan cerdik pandai tidak memiliki akses pada wilayah tanah.

Menyebutkan tanah sebagai hal penting adalah eksistensi penghulu/datuak yang memimpin suku/kaum sangat ditentukan oleh tanah pusaka yang dimilikinya. Mereka tidak akan dianggap sebagai bagian suatu kampung, jika tidak memiliki tanah pusaka. Dalam konteks inilah, penelitian ini mengkaji tarik menarik penghulu, perempuan dan tanah pusaka di Minangkabau.

B. Manfaat

Kontribusi penelitian adalah memetakan elite tradisional penghulu Minangkabau. Dalam banyak tulisan, gambaran tentang penghulu masih bersifat normatif. Secara akademis sulit dipertanggungjawabkan, karena tidak berangkat dari realitas, tetapi dari pepatah petiti Minangkabau. Untuk mengisi kekosongan itu, penelitian ini sangat penting untuk memetakan realitas sosial politik elite penghulu di Minangkabau.

C. Tujuan Instruksi Khusus

Studi ini mencoba menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif atau multidimensional approach. Dengan sendirinya, berbagai teori-teori ilmu sosial akan digunakan dalam membedah peran penghulu seperti ilmu politik, Antropologi, Sosiologi, Sejarah dan psikologi. Tujuan pokok dalam pendekatan ini adalah dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan tajam, sehingga dari persoalan penghulu yang berlangsung terus menerus di Minangkabau seharusnya memiliki pemecahan yang lebih bijaksana. Alternatif dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan kembali nilai-nilai lokal yang pernah dimiliki masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan itu. Dalam konteks inilah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran :

1. Untuk membangun suatu landasan pengetahuan yang mendalam tentang permasalahan datuak/penghulu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga akan dapat ditemukan sebuah gambaran yang jelas dan tegas tentang datuak/penghulu Minangkabau.
2. Memetakan peta persoalan penghulu, sehingga melalui penelitian ini akan dapat memberikan gambaran tentang eksistensi peranan datuak/penghulu di Minangkabau
3. Menghimpun dan merumuskan kearifan lokal tentang seharusnya yang dimiliki dan dikerjakan oleh seorang datuak/ penghulu
4. Secara akademik, hasil akhir yang diharapkan adalah lahirnya sebuah buku yang komprehensif tentang pemetaan Eksistensi Kekuasaan Elite Tradisional datuak/Penghulu Minangkabau.

5. Menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan dalam berbagai persoalan yang terjadi seputar persoalan adat/penghulu.

D. Elite dan Elite Penghulu Yang Semakin Tak bermakna

Kebakaran istana Basya sebagai simbol kerajaan Pagaruyung ternyata tidak hanya menimbulkan kerugian secara material. Lebih jauh lagi, kebakaran itu ternyata kemudian membongkar eksistensi keluarga istana itu sendiri. Apakah betul keluarga yang mengaku keturunan raja-raja Pagaruyung itu memiliki kekuasaan, ataukah hanya sebagai simbol saja ?. Dalam konteks inilah, penelitian ini akan mengkaji pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, pola kepemimpinan dibatasi oleh pola Adat Salingka nagari (desa). Adat Istiadat satu nagari hanya sebatas pada nagari itu, termasuk juga dalam soal kepemimpinan. Tidak ada seorang penghulu nagari A akan memiliki wewenang dengan negeri tetangga B misalnya. (Emraldi Catra, 2001). Jadi, kekuatan di luar suatu nagari tidak diakui keberadaannya. Begitu juga dengan Pagaruyung, sebagai sebuah simbol kerajaan. Sesungguhnya kerajaan ini tidak memiliki wewenang apapun termasuk nagari-nagari di Minangkabau, sehingga dari fenomena dewasa ini seperti pemberian gelar adat pada politisi bangsa seperti Susilo Bambang Yudoyono, Taufik Kemas, Yusril Ihza Mahendra, Amin Rais, dan lainnya menjadi fenomena tersendiri dalam masyarakat. Sah atau tidak sahnya (karena perdebatan persoalan pemberian gelar kepada orang luar masih hangat dilakukan), Pengangkatan penghulu itu hanya sebatas pada suku atau nagari yang memberikannya. Walaupun ia seorang presiden misalnya, maka gelar penghulu yang dipegangnya sebatas pada nagari itu sendiri. Persoalan pokok adalah apakah pemberian gelar itu akan meningkat citra penghulu dalam masyarakat atau makin membenamkannya. Pemberian gelar inilah menjadi salah satu pokok persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Persoalan lain yang ingin dikaji adalah keberadaan penghulu dewasa ini.

Salah satu unsur penting dari kekuasaan penghulu terletak pada pola penguasaan tanah di Minangkabau. Sektor produksi ini sangat menentukan wibawa dan pengaruh penghulu di mata anak kemenakannya. Namun, ketika tanah ini terjual atau digadaikan, maka sumber kekuasaan penghulu itu

kemudian menjadi pudar. Sementara itu, banyaknya penghulu yang pergi merantau juga menyisakan banyak persoalan di kamoung halamannya, sehingga eksistensi penghulu semakin menjadi rontok. Dalam konteks inilah, Studi ini mengkaji pemetaan eksistensi penghulu sebagai elite tradisional di Minangkabau.

Penelitian ini memiliki makna yang signifikan dalam memberikan pemikiran alternatif persoalan elite bangsa. Pemikiran alternatif yang dihasilkan adalah meneliti kearifan lokal dalam sistem kepemimpinan di Minangkabau. Ungkapan adat seperti (Datuak tuah, 1986). :

Kemenakan berajo ke mamak

Mamak berajo penghulu

Penghulu berajo ke kebenaran

Kebenaran berdiri sendiri

Pertanyaannya adalah apakah ungkapan itu hanya ada dalam patatah petitih saja, atau masih melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya penghulu. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fenomena penghulu di Minangkabau.

Penghulu merupakan pimpinan dalam sebuah suku/kaum. Misalnya suku Piliang akan dipimpin oleh seorang penghulu. Kekuasaan penghulu ini sebatas sukunya saja, sehingga jika seorang presiden sekalipun diangkat menjadi penghulu, ia hanya sebatas menjadi pimpinan pada sukunya itu saja. Seorang penghulu diberi gelar datuak. (Idrus Hakimi, 1988). Misalnya, Burhan, setelah diangkat jadi penghulu suku Piliang, maka ia bernama lengkap Burhan Datuk Mojo Indo. Untuk selanjutnya, mereka akan dipanggil datuak atau pak datuak oleh anak kemenakan dan orang kampung dan menjadi pemimpin dalam sukunya. Kekuasaan atas tanah biasanya berada di tangan Burhan Datuk Mojo Indo ini.

Dalam perkembangan dewasa ini, datuak ini beragam pula bentuknya. Setidaknya ada 3 bentuk yaitu angku datuak, datuak gaul dan datuak-datuak-an. Angku datuak adalah datuak yang mengikuti jalur sesuai dengan aturan seorang penghulu. Datuak gaul adalah seorang datuak yang tidak memahami kedudukannya sebagai seorang yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah, sedangkan datuak-datuak-an adalah seorang datuak yang diangkat berdasarkan

pertimbangan politis, sehingga ia tidak memainkan peranannya dalam kaumnya. Pengangkatan elite politik seperti Taufik Kemas, Sosilo Bambang Yodoyono, Yusril Ihza Mahendra dan Amin Rais merupakan pol penghulu yang datuk-datukan ini (Zaiyardam Zubir, 2006).

Menyimak persoalan datuak/penghulu di Minangkabau dewasa ini, sesungguhnya memiliki berbagai fenomena yang menarik untuk dikaji. Berbagai cerita yang ditemukan dalam kejadian sehari-hari, lebih banyak menempatkan penghulu sebagai elite yang telah kehilangan eksistensinya dalam masyarakat. Bahkan, biasanya kelompok ini sangat dihormati, dalam banyak kasus menjadi kelompok yang kontrak produktif dalam masyarakat. Misalnya seorang datuak yang harus menjaga harta pusaka di rumah kaumnya, namun merekalah yang menjadi tokoh utama dalam jual beli tanah pusaka (Zaiyardam Zubir, 2006). Simak 3 kisah dibawah ini mencoba mengantarkan pada pokok persoalan tentang eksistensi penghulu itu sendiri.

Kisah 1. Al, Kisah, karena ibunya telah tua dan tidak mau diajak merantau ke Jakarta, Jufri membelikan telepon untuk ibunya, supaya tiap hari dapat mengontak ibunya. Untuk memelihara ibunya yang sudah 70-an itu, Jufri minta Ema, adik sepupunya untuk menjaga orangtuanya yang sakit-sakitan itu. 2 tahun dibawa asuhan Ema, ibu tua itu meninggal. Akhirnya, Jufri memberikan telepon itu untuk Emna. Sebulan setelah meninggal ibunya, Jufri menelepon Ema tadi. Namun yang menjawab adalah Liza, seorang gadis yang berumur 20 tahun, yang rumahnya sekitar 300 meter dari rumah orang tua Jufri. Ketika ditanya Ema oleh Jufri, Liza menjawab lain bahwa ini tidak lagi nomor telepon Ema, karena telepon telah di Jual Safri Datuak Sari Paduko, yang kebetulan kakak kandung Jufri dan penghulu di kaumnya. Mendengar jawaban Liza itu, Jufri hanya urut dada saja, karena tiada henti-hentinya Datuak Paripaduko itu menjual apa yang dapat dijualnya. Penyakit datuaknya itu ternyata tidak pernah sembuh.

Kisah 2. Terberita Datuak Mahartajo Dirajo, penghulu suku Piliang Sani meninggal dunia. Berhubung mereka menganut sistem Koto Piliang,

maka yang berhak menggantikan adalah kemenakan kanduangnya. Sayangnya, Burhan, 6 tahun, kemenakan kanduangnya tidak berada di kampung, akan tetapi di rantau. Sejak ibunya dulu menikah, telah diajak suaminya merantau ke Jawa dan Burhanpun lahir di rantau dan belum pernah menginjak kakinya di kampung halamannya. Namun, garis adalah keturunan berada di tangan Burhan, sehingga ketika selesai pemakaman sang datuk secara adat istiadat penghulu, maka ditopangkan gelar itu kepada Burhan – melalui orang lain – karena Burhan tidak bisa pulang. Sejak itu, Burhan resmi bergelar Burhan Datuak Mahartajo Dirajo. Namun sayangnya, habis musim baganti, Burhan tidak pernah menginjak kakinya di kampung halamannya. Karena berbagai persoalan yang dihadapinya dirantau.

Kisah 3. Syahdan, menjelang pemilihan presiden 2004 lalu, salah seorang calon presiden menjanjikan perbaikan total sebuah pusat pengembangan agama Islam. Sebagai bukti niat baiknya, ia kemudian memberikan dana awal atau tando jadi dan minta diangkat menjadi penghulu atau diberi gelar adat. Keduanya dibuktikannya, yang ditandai dengan pemberian dana awal dan dilewakannya gelar adat. Sayangnya, ia tidak menang dalam pemilihan presiden. Namun gelar adat tetap disandanginya, sedangkan bantuan untuk pusat ibadah menjadi cerita masa lalu. Mesjid terbengkalai, umat menjadi terganggu ibadahnya. Itulah hasil yang diterima masyarakat.

Bukan bermaksud mengarang cerita ekstrem tentang penghulu, akan tetapi menceritakan sebuah realitas ditengah masyarakat Minangkabau. Pada hal, dalam banyak pepatah petitihi disebutkan bahwa seorang penghulu itu adalah (Datuak Teah, 1976) :

Kayu gadang ditengah Padang
Daunnya tempat berlindung
Batangnya tempat bersandar
Uratnya tempat duduk

Ungkapan pepatah petiti di atas memperlihatkan betapa mulianya peran seorang penghulu. Namun yang ditemukan dalam masyarakat adalah sebagaimana 3 kisah di atas, sehingga percepatan proses rontoknya peranan penghulu semakin kencang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini ini.. Mengambil contoh peranan tanah dalam sistem masyarakat Minangkabau misalnya, maka tanah memiliki peran besar dan dianggap sebagai barang pusaka yang tidak bisa diperjualbelikan. (Zaiyardam Zubir, 2006).

Tidaklah diakui sekelompok orang dalam masyarakat Minangkabau, jika ia tidak memiliki tanah pusaka. Namun, oleh penghulu, tanah pusaka ini sejak zaman kolonial Belanda sampai dewasa ini telah diperjual belikan, sehingga keberadaan harta pusaka itu sudah lenyap. Christine Dobbin menyebutkan bahwa yang paling getol mengadaikan dan menjual tanah pada masa Kolonial Belanda adalah penghulu. (Christine Dobbin, 2001). Pada hal, dalam aturan seorang penghulu, ada ungkapan seorang penghulu tidak memiliki saku atau sakunya koyak. Artinya, seorang penghulu tidak boleh membawa hasil pencaharian di tanah kaumnya, ataupun ia ambil, maka karena sakunya koyak, akan tinggal kembali pada kemenakannya (Datuak Batuah Sango, 1954). Realitasnya tidak seperti itu, sebagaimana disampaikan pada kisah 1 di atas tadi. Hal inilah menjadi kajian utama dari penelitian ini terutama melihat penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan nyata dari seorang penghulu.

Dalam bahasa gaul diantara penghulu, terutama datuk-datuk gaul, ketika pemberian gelar adat kepada elite politik bangsa ini, karena hanya itu yang bisa diberikan, karena tanah yang selama ini menjadi harta yang paling berharga tidak dapat lagi diberikan, karena sudah dijual dan diberikan sebagai upati kepada penguasa pusat oleh penghulu sejak zaman Belanda sampai orde baru. Hal yang tidak dapat dihindari adalah munculnya konflik tanah dalam masyarakat, yang dipicu oleh penyakit jual beli tanah oleh penghulu. (Alfan Miko (ed), 2006)

Pembahasan utama dari keberadaan seorang penghulu berangkat dari pola kepemilikan tanah. Tanah menjadi penting bagi seorang penghulu, karena dari modal produksi yang ada itulah, ia memiliki peranan dalam mengatur anak

kemenakanya. Namun, ketika tanah itu habis terjual atau tergadaikan, maka pada saat yang sama, penghulu tidak ada lagi yang diurusnya. Pada gilirannya, tanah itu menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Buku yang diedit Alfian Miko Pemerintahan *Nagari dan Tanah Ulayat* (Alfian Miko : 2006) memperlihatkan persoalan tanah yang terjadi di pedesaan Minangkabau. Buku ini mencoba membahas berbagai persoalan tanah dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan nagari. Namun, krusial soal tanah yang bertitik tolak dari persoalan penghulu tidak dimunculkan. Buku yang masih berangkat dari nilai-nilai normatif dan bukan temuan lapangan ini hanya memperlihatkan segi indah dari tanah Minangkabau (Alfian Miko, 2006, hal. 3-19).

Buku yang mencoba menempatkan persoalan penghulu dalam konflik tanah adalah karya Zaiyardam Zubir (dkk) , *Rekana : Mande Rubiah, Penerusan Kebesaran bundo Kanduang. Dalam Penggerogotan Tradisi*. Buku Rakena ini memperlihatkan peranan datuak dalam penjualan harta pusaka di Lunang. Dampak penjualan itu adalah ketika sang datuak tidak dapat membagi hasil penjualan kepada semua kemenakannya, ia kemudian di demo kemenakannya yang berakhir dengan dipecatnya seorang datuak menjadi penghulu dalam kaumnya (Zaiyardam Zubir, 2006. hal. 101-118).

Buku menarik lainnya adalah *Gamggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat*. Oleh Kurniawarman Tinjauan hukum dari buku ini memperlihatkan bahwa tanah milik komunal ini sesungguhnya memiliki peranan penting dalam pendistribusian tanah untuk dikelola secara bersama. Berkaitan dengan tema riset ini, buku ini tidak memperlihatkan peranan penghulu dalam pengaturan tanah itu. Pada hal, penghulu merupakan elite tertinggi dalam pengurusan tanah di Minangkabau, sehingga studi ini belumlah lengkap, karena tidak memasukan penghulu dalam pengurusan tanah itu (Kurniawarman, 2006, 22-65).

Buku penting lainnya adalah karya Erwin yang berjudul *Tanah Komunal : Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Buku ini membahas tentang perubahan yang tengah berlangsung dalam masyarakat, karena kepemilikan tanah yang berubah. Tanah yang seharusnya berada di tangan kaum dan dalam realitasnya berubah karena diperjual belikan

ataupun digadaikan oleh penghulunya. Pada akhirnya, penghulu yang seharusnya dapat memegang dan mengendalikan kemenakannya karena penguasaannya atas tanah berubah menjadi tidak berperan. Berkaitan dengan tema penelitian, menurut Erwin, penghulu menjadi penyebab dari jual beli tanah di Minangkabau (Erwin, 2006 : 272-279).

Konflik tanah dan elite ini tidak saja milik orang Minangkabau, akan tetapi merata diseluruh Indonesia. Simak beberapa studi yang membahas tentang konflik tanah dibawah ini. Noer Fauzi dalam bukunya *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria* menuturkan bahwa tanah petani dirampas dan pemerintah tidak melindunginya. Sebaliknya, petani yang ingin mengambil tanah kepunyaannya justru ditangkapi oleh polisi dan dipenjarakan (Noer Fauzi, 2003, 67-80). Hukum negara menjadi tidak berlaku karena kekuasaan yang otoriter lebih bertangan besi sehingga pemerintah dan aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha dan penguasa untuk menidas rakyat.

Studi penting lainnya tentang konflik tanah adalah buku yng diedit oleh Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, *Berebut Tanah*. Studi yang sangat kritis ini memaparkan konflik tanah yang selalu berdampingan dengan kekuasaan negara dan modal. Pada Masa Orde Baru, negara menggunakan tanah dengan alasan kepentingan umum. Kepentingan umum ini hanya sebuah pembenaran sepihak, yang sesungguhnya berlawanan dengan kebutuhan rakyat. Ketika formasi dan struktur sosial ditikam oleh kepentingan kapitalisme global, tanah menjadi sebuah komoditas, sehingga masyarakat dipaksa meletakkan tanah sebagai hukum pasar demi kepentingan kapitalis. Dalam hal inilah, buku ini menyoroti keterlibatan masyarakat dengan pengusaha yang didukung oleh aparat keamanan dan preman dalam konflik tanah (Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, 2002),

Buku yang secara khusus melihat ekspansi kapitalisme terhadap tanah rakyat adalah karya Rikardo Simarmata dalam *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara* (Ricardo, 2002). Buku ini lebih menitikberatkan pada kapitalisme perkebunan di mana dalam berbagai kasus pembebasan tanah untuk perkebunan, sekali lagi rakyat menjadi pihak yang dirugikan. Dengan bantuan negara, perkebunan besar menguasai tanah yang luas, tak terbatas atau tak dibatasi. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu, negara sendiri

merupakan tuan dari perkebunan besar itu sendiri, sehingga dengan kekuatan yang mereka miliki mereka bisa mengatur tanah tanpa mengindahkan kepemilikan masyarakat. Bahkan, lebih dari itu, birokrasi perkebunan tidak terjangkau oleh kontrak sosial karena mereka merupakan negara dalam negara yang memiliki undang-undang sendiri, dan seringkali juga bertentangan dengan undang-undang negara yang resmi sehingga birokrasi perkebunan itu cenderung bengis atau sering juga disebut plantokrasi. Studi tentang konflik tanah pada pokoknya tidak bisa dipisahkan dengan petani

Pandangan nilai lokal dalam melihat pemilikan tanah diuraikan dengan baik oleh Nurdin Yakob. Melalui bukunya *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Nurdin mengungkapkan bahwa menyoroti tanah di Minangkabau memiliki aturan adat tersendiri. Tanah merupakan harta warisan yang didapatkan secara turun temurun. Sebagai harta warisan, tanah warisan tidak boleh diperjualbelikan, tetapi boleh digadaikan. Hanya ada 4 kasus berat sehingga tanah warisan boleh digadaikan. Keempat kasus pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya adalah pertama, rumah adat bocor, kedua, perempuan tua belum bersuami, sehingga untuk mendapatkan suami, harta warisan dapat digadaikan. Ketiga, mayat di rumah yang belum bisa dikuburkan karena tidak ada biaya. Keempat, *mambangik batang tarandam* atau untuk mehidupkan kembali gelar adat yang sudah tenggelam. Namun, dalam realitasnya tanah pusaka itu banyak diperjualbelikan sehingga menjadi sumber konflik yang laten di Minangkabau. (Nurdin, 1995, hal. 29-68).

Zenwen Pador, dalam bukunya *Batuka Baruak Jo Cigak* secara kritis menyoroti perubahan sistem pemerintahan kembali ke bentuk pemerintahan nagari yang tidak membawa perubahan besar dalam masyarakat. Kondisi yang tidak terelakkan dari perjalanan nagari selama ini menempatkan nagari kehilangan pamor dalam mengelola aset nagari karena hegemoni yang kuat dari negara. Melemahnya akses nagari diikuti dengan ketidakberdayaan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga pada nagari yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti perkebunan, sarang burung walet, pemerintah dengan bantuan aparat keamanan menguasai tambang emas itu. (Zenwen Pador, 2002, hal, 56-76).

Walaupun telah banyak tulisan tentang konflik tanah untuk kasus Sumatera Barat, namun pembahasan mengenai keterlibatan elite tradisional belumlah ada dilakukan secara khusus. Sejauh ini, kajian ilmu sosial tentang elite tradisional itu belum dilaksanakan secara lebih komprehensif. Bahkan belum ada ilmu sosial di Sumatera Barat yang secara spesifik mengembangkan penghulu sebagai bidang keahliannya. Untuk mengisi kekosongan itu, secara akademik penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan secara lebih proporsional tentang Angku Datuak, Datuak gaul dan Datuak-datuak-an.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang elite tradisional Minangkabau lebih menyangkut pada elite ulama, intelektual dan perempuan. Elite Intelektual melahirkan buku yang berjudul *Kecelakaan Intelektual di Sumatera Barat*. Pada pokoknya buku ini membahas tentang keberadaan Intelektual dalam semua lapisan masyarakat seperti dari pedesaan sampai kalangan pemerintahan. Temuan yang menarik dari buku ini adalah kecenderungan kuat dari intelektual atau cadik pandai Minangkabau untuk mencari kekuasaan dan kekayaan dari kecerdasan yang dimilikinya, sehingga seringkali nilai-nilai moral terabaikan dan diabaikan. Kasus korupsi dari berbagai lapisan intelektual memberi bukti persoalan itu.

Studi penting lainnya tentang elite perempuan atau bundo kanduang. Penelitian tentang masalah perempuan dan tanah di Minangkabau didanai oleh The Asia Foundation yang berjudul *Partisipasi Politik Perempuan di Minangkabau* diterbitkan oleh Yogyakarta: Insist Press, 2003. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah walaupun dikatakan bahwa perempuan memiliki kekuasaan terhadap tanah, namun kekuasaannya sirna ketika kepala suku atau penghulu menjual harta warisan. Pada gilirannya, lanjutan penelitian ini kemudian melahirkan karya lain yang berjudul *Tujuh abad Penindasan Perempuan di Minangkabau*, terutama menyoroti lemahnya perempuan dalam mempertahankan warisan yang dimilikinya, khususnya dari harta warisan tinggi.

Buku penting lainnya yang telah dihasilkan tentang kepemimpinan perempuan adalah *Rakena, Mande Rubiah: Penerus Kebesaran Bundo Kanduang dan Dalam Penggerogotan Tradisi*. Padang : PSH Unand, 2004. Temuan penting dari penelitian ini adalah gurita kapital menyerbu pelosok terpencil di Lunang

Silaut karena tanah dijadikan sebagai perkebunan besar. Kapitaisme ini bisa menyerbu pedelosok pedesaan, karena mereka menggunakan tangan-tangan elite lokal seperti penghulu untuk menbebaskan tanah yang mereka inginkan.

Studi lain adalah perilaku elite dalam masyarakat, terutama dalam perebutan kekuasaan. Penelitian ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Issue, Strategi, dan Dampak Gerakan*, yang diterbitkan atas bantuan Fellowships Insist Yogyakarta. Temuan penting dari buku ini adalah radikalisme yang terjadi di kalangan masyarakat sebenarnya lebih banyak dipicu oleh tingkah laku elite, yang banyak merugikan masyarakat.

Buku terbaru adalah *menggugat Minangkabau*. Buku ini mencoba menyoroti secara tajam berbagai perilaku elite di Minangkabau, terutama tingkah laku politik dan masalah korupsi yang terjadi dalam berbagai lapisan pemerintahan. Sorotan lainnya adalah pemberian gelar kepada elite politik, yang kadangkala dipaksakan untuk kepentingan sesaat para politisi itu.

E. Rangkuman

Keberadaan penghulu di Minangkabau dewasa ini sesungguhnya semakin memudar saja. Jikapun ada, maka yang benar-benar memperlihatkan sosok penghulu sebagai tempat mengadu bagi anak kemenakan dan orang kampung semakin sulit ditemukan. Jika memang penghulu ibarat kayu gadang di tengah padang, akarnya tempat duduk, batangnya tempat bersandar, dan daunnya tempat berteduh, maka itu hanya ditemukan dalam ungkapan saja.

F. Soal-soal latihan

Pokok persoalan yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut eksistensi penghulu dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Sehubungan dengan persoalan penghulu ini juga terkait masalah lainnya seperti tanah sebagai sumber utama kekuatan kaum, maka carut marut masalah tanah menjadi pertanyaan pokok yang menjadi titik tolak penelitian. Untuk memudahkannya, maka pokok persoalan yang akan diteliti meliputi 5 masalah utama yaitu :

1. Mengapa tanah pusaka/kaum dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini semakin hilang ?

2. Kenapa peranan datuak/penghulu semakin menciut dalam masyarakat Minangkabau ?
3. Sejauhmana terjadi perubahan dari sistem masyarakat yang matrilineal kearah masyarakat yang patrilineal dalam realits sosial masyarakat ?
4. Bagaimana persoalan seputar pengangkutan datuak/penghulu di ranah dan dirantau ?
5. Bagaimana persoalan pemberian gelar sako dan pusako adat Minangkabau pada elite politik bangsa ?

BACAAN PILIHAN

A.A.Navis, 1986. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta: PT Grafiti press.

_____, (ed.), 1988. **Dialektika Minangkabau**. Padang : PT Singgalang Press.

Alfan Miko (ed), 2006. **Pemerintahan Nagari dan tanah Ulayat**. Padang : Andalas University Press.

Datuak Batah Sango, 1954. **Tambo Adat dan Alam Minangkabau**. Pajakumbuh : Percetakan Lembago.

Datuak Sanggono Diradjo, 1955. **Mustika Adat Alam Minangkabau**. Djakarta : Balai Pustaka.

Datuak Toeah, 1976. **Tambo Alam Minangkabau**. Bukittingg : Pustaka Indonesia.

Dobbin, Chritine, 1992. **Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847**. Jakarta : INIS.

Emraldi Catra, 2001. **Adat Salingka Nagari**. Padang : FISIP Unand.

Erwin, 2006. **Tanah Komunal dan Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau**. Padang : Andalas University Press.

- Hasrul Piliang, Zaiyardam Zubir dan Firman, 2003. **Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Di Minangkabau : Studi kasus di Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok Kabupaten Sawahlunto Sijunjung**. Padang : Balitbangda.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, 1988. **Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Palito Alua Pasambahan Adat Minangkabau**. Bandung : Remadja, Karya.
- Kurniawarman, 2006. **Gamggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat**. Padang : Andalas University Press.
- Muchtar Naim, 1968. **Mengenai Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Padang : Center for Minangkabau Studies Press.
- Muhammad Radjab, 1969. **Sistem Kekerabatan di Minangkabau**. Padang : Center for Minangkabau Studies Press.
- Nurdin Yakob Dt. Bandaro, 1995. **Hukum Kekerabatan Minangkabau** (jilid I dan II), Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia.
- R. Soehadi, 1980 **Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria**. Surabaya : Usaha Nasional.
- R.Yando Zakaria, 2000. **Abieh Tandeh : Masyarakat Desa Dibawah Rezim Orde Baru**. Jakarta : LSAM.
- Sajuti Thaib, (editor), 1985. **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau**. Jakarta : Bina Aksara.
- Zaiyardam Zubir, 2004. **Tujuh Abad Penindasan Perempuan di Minangkabau**. Padang : PSH Unand.
- _____ dan Herwandi, 2006. **Menggugat Minangkabau**. Padang : Andalas University Press.
- Zenwen Pador (ed), 2002. **Kembali Ka Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak ?** Padang : LBH Padang.

BAB V

TANAH : KONFLIK YANG TAK BERKESUDAHAN

*Tanah yang subur alam nan indah
Jadi sumber bencana
Antara mamak kemenakan
orang sekampung
ataupun dengan kampung tetangga*

A. Deskripsi

Bab ini mengkaji pemetaan potensi konflik tanah dan model-model penyelesaiannya berbasis perdamaian adat minangkabau. Pemikiran dasar penelitian ini berdasarkan tingginya konflik tanah di Minangkabau. Sebagai contoh, laporan Kanwil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 menyebutkan bahwa dari 310 kasus yang masuk, 245 kasus adalah masalah tanah (Kanwil Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat tahun 2003). Surat kabar *Haluan* melaporkan bahwa hampir 70 % pembunuhan yang terjadi di Sumatera Barat berawal dari konflik tanah (Surat kabar *Haluan*, 12 Mei 2003). Bertitik tolak dari kedua laporan tersebut, penelitian ini mengkaji tiga wilayah, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang.

B. Manfaat

Untuk dapat memetakan konflik tanah yang terjadi di Minangkabau seharusnya akar persoalannya dapat dilihat. Dari akar persoalan yang ada itulah kemudian dikaji secara lebih komprehensif, yang melibatkan berbagai pendekatan seperti sosial, budaya, hukum, dan hukum adat. Bagi pihak yang bertikai, seperti mamak dengan kemenakan, kaum dengan

pengusaha dan penguasa seharusnya mulai menghormati hak-hak orang lain sehingga dalam penyelesaian yang ada tidak berdasarkan pada kekuatan, akan tetapi kebenaran.

Konflik tanah yang telah berlangsung terus menerus di Minangkabau seharusnya memiliki pemecahan yang lebih bijaksana. Alternatif dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan kembali nilai-nilai lokal yang pernah dimiliki masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik tanah. Hal ini menjadi teramat penting karena dalam setiap konflik tanah, *sosial cost* dan *economic cost* yang dikeluarkan teramat tinggi. Pihak yang menang maupun pihak yang kalah selalu saja akan mengeluarkan banyak energi, emosi, dan biaya. Dalam konteks inilah, hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat :

1. Untuk membangun suatu landasan pengetahuan yang mendalam tentang permasalahan konflik tanah yang terjadi dalam masyarakat. Dari pemetaan konflik itu, akan dapat ditemukan sebuah gambaran yang jelas, tegas, dan luas tentang konflik tanah yang terjadi di masyarakat.
2. Memetakan corak perlawanan masyarakat dalam konflik tanah sehingga penelitian ini akan dapat memberikan gambaran tentang strategi dan taktik perlawanan dari pihak yang bertikai dalam konflik tanah.
3. Melahirkan kebijakan yang bersifat menyeluruh dalam menata kebijakan terhadap konflik tanah sehingga kebijakan yang muncul bukan lagi bersifat *simplistic solution*.
4. Menghimpun dan merumuskan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di Minangkabau Sumatera Barat.
5. Secara akademik, hasil akhir yang diharapkan adalah lahirnya sebuah buku mengenai Penyelesaian Konflik Tanah Berbasis Perdamaian Adat Minangkabau di Sumatera Barat.

C. Tujuan Instruksional Khusus

Adapun tujuan instruksional khusus dari bab ini adalah :

1. Mahasiswa dapat memahami pola pemilikan tanah di Minangkabau

2. Mahasiswa dapat memetakan akar permasalahan konflik tanah di Minangkabau
3. Mahasiswa dapat memahami kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tanah

D. Latar Belakang

Sabtu Sore, 12 Februari 2005 lalu, sebanyak lebih kurang 50 orang dari Pasaman Barat mendatangi PBHI Wilayah Sumbar. Mereka mengadukan dua hal yaitu tanah pusakanya diambil oleh pengusaha untuk dijadikan perkebunan besar dan penangkapan 20 orang anggota keluarganya oleh polisi. Proses pembebasan tanahnya dari awal sudah diliputi dengan penipuan yang dilakukan oleh penghulu atau kepala adat setempat. Penghulu menyatakan bahwa penyerahan tanah sudah disetujui oleh semua kaumnya dan itu diperlihatkan dengan tanda tangan anak kemenakannya. Pada hal, inisiatif untuk menyerahkan tanah datang dari penghulu saja dan kemudian sang penghululah yang menikmati ganti rugi atas tanah yang dijual itu.

Persoalan ini kemudian membuat heboh dan terjadi demonstrasi oleh anak kemenakannya terhadap perusahaan perkebunan itu. Demonstrasi itu berakhir dengan tindakan anarkis seperti penyerbuan ke perusahaan, pembakaran gudang dan bibit tanaman. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah terjadinya penangkapan terhadap kelompok yang menyerang dan membakar perusahaan itu (PBHI Wilayah Sumbar, *Laporan Pengaduan Masyarakat Kinali Pasaman Barat*, 12 Februari 2005). Akar persoalan berawal dari proses penyerahan tanah itu. Ternyata, tidak semua anggota kaum yang mendapatkan ganti rugi. Bahkan, parahnya lagi juga tidak semua yang mengetahui adanya transaksi jual-beli tanah itu. Penghulu melakukan pemalsuan tandatangan anak kemenakannya, sehingga menimbulkan perlawanan terbuka terhadap penghulu dan perusahaan.

Sementara itu, di Padang sendiri banyak terjadi konflik atas tanah masyarakat. Terminal Regional Bingkuang misalnya, setelah 6 tahun dioperasikan, ternyata masih mengandung konflik tanah. Pada waktu pembebasan dulu, calo-calo tanah ternyata bermain dalam harga dan ukuran, sehingga ganti rugi yang diterima masyarakat kecil sekali. Selain itu, janji-jani yang diberikan

waktu pembebasan tanah seperti kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya tidak berlangsung, dan terminal itu sendiri kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Surat kabar *Singgalang*, 5 Agustus 2004). Belum lagi berbagai konflik pembebasan tanah lainnya, seperti Terminal Lintas Andalas, terminal Goan Hoat, dan pelebaran jalan yang proses ganti ruginya tidak berjalan dengan semestinya. (Harian *Haluan*, 12 Desember 2003).

Bahkan, pada beberapa kasus tanah di Padang, putusan Mahkamah Agung pun tidak diikuti. Konflik antara Suku Sikumbang dengan Suku Caniago di tanah yang terdapat di Jalan Khatib Sulaiman Padang misalnya, walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung, tanah sengketa itu sampai saat ini tidak bisa dimanfaatkan karena pihak yang kalah selalu membuat konflik atas tanah yang disengketakan itu (Surat kabar *Padang Ekspres*, 21 April 2003).

Berbeda dengan Kabupaten Pasaman dan Kota Padang yang lebih didominasi kepentingan tanah untuk bisnis, di Kabupaten Tanah Datar dominasi konflik tanah adalah untuk kepentingan pribadi, terutama penghulu dan batas nagari. Untuk kepentingan penghulu, konflik seringkali terjadi antara penghulu dengan kaumnya karena penghulu menjual tanah untuk kepentingan pribadinya. Kasus batas nagari berlangsung karena tidak ada patokan batas nagari yang tegas. Dapat dipahami, sebagai daerah pusat kebudayaan Minangkabau, sensitifisme masyarakat tentang tanah lebih tinggi sehingga sumber konflik dari tanah tinggi sekali. Perang antarkampung yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar ini lebih banyak disebabkan persengketaan tanah batas antar nagari. (Zaiyardam Zubir, 2004).

Dari ketiga wilayah kajian di atas, hal yang menjadi pokok bahasan adalah dalam proses pembebasan tanah, sejauhmana perjanjian jual beli, sewa gadai ataupun bentuk lainnya sesuai dengan aturan adat yang dianut masyarakat Minangkabau. Artinya, jika dipahami pola pemilikan tanah di Minangkabau adalah pemilikan tanah yang bersifat komunal. Tanah pusaka -terutama pusaka tinggi- tidak dimiliki oleh seseorang, akan tetapi tanah itu milik kaum, ulayat, atau nagari. Dengan demikian, kepemilikan tanah tidak dikuasai oleh satu orang akan tetapi oleh banyak orang.

Dalam Hal jual beli tanah misalnya, tanah baru dianggap syah dijual, jika semua anggota keluarga menyetujui penjualan tanah itu. Jika ada satu orang saja anggota kaum tidak setuju, jual beli tanah menjadi tidak syah. Dari konteks inilah, konflik tanah seringkali terjadi, terutama karena adanya pengaduan dari mereka yang tidak setuju dari jual beli tanah. Surat kabar *Padang Ekspres* 13 Mei 2002 melaporkan dari temuan Prof. Dr.Syahmunir bahwa jumlah kasus perdata yang paling besar masuk ke pengadilan berasal dari persoalan konflik tanah. Pertanyaan pokok adalah kenapa tanah menjadi sumber konflik yang abadi dalam masyarakat Minangkabau ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut haruslah dirumuskan pola kepemilikan tanah Sumatera Barat. Sumatera Barat, yang didominasi oeh budaya Minangkabau memiliki corak tersendiri dalam pola pemilikan tanah. Ada 3 corak kepemilikan tanah yaitu tanah kaum, tanah ulayat, dan tanah nagari (Muchtar Naim, 1968). Tanah Kaum adalah tanah yang dimiliki satu kaum. Satu kaum ini biasanya beberapa keluarga yang memiliki rumah gadang bersama. Satu kaum ini mengacu pada satu keluarga inti Minangkabau yaitu mamak, ibu dan anak. Namun, kaum ini makin lama makin berkembang, sehingga terdapat banyak anggota keluarganya. Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki satu suku. Misalnya suku Piliang, suku ini akan memiliki secara bersama tanah kaum suku Piliang. Kemudian tanah nagari, yang biasanya terletak berbatasan dengan nagari tetangga. Namun belakangan ini, tanah nagari ini oleh pemerintah diklaim sebagai tanah negara, sehingga merupakan salah satu pemicu konflik tanah di Minangkabau.

Dari gambaran di atas, kepemilikan pribadi atas tanah tidak ada dalam budaya Minangkabau. Jika di Jawa Tanah milik raja, maka di Minangkabau tanah milik kaum, sehingga apapun yang dilakukan atas tanah haruslah persetujuan semua anggota keluarga yang telah dewasa. Untuk mendapatkan persetujuan orang banyak inilah yang paling sulit, karena setiap orang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda atas tanah kaum itu.

Walaupun secara adat tidak dikenal istilah jual beli, namun ada cara lain yang dibolehkan yaitu *pegang gadai*. Hal itu hanya dalam kasus-kasus tertentu

tanah warisan dapat digadaikan. Ada empat keadaan tanah warisan boleh digadaikan yaitu :

1. Rumah Gadang rusak berat, sehingga membutuhkan biaya besar untuk memperbaikanya.
2. Perempuan yang telah mencapai umur, tapi belum menikah, sehingga harta warisan digadaikan untuk mencari suaminyanya. Sebab, akan jadi tabu atau rendah bagi seorang perempuan bila tidak menikah.
3. Mayat terbujur di atas rumah, dan tidak ada biaya untuk menguburkannya.
4. Mengangkat penghulu baru yang telah lama tidak ada. (*mambangik batang tarandam*) (Emraldi Catra, 2001).

Tentu saja, tidak semua gadai berlangsung karena empat alasan tersebut. Banyak juga terjadi kasus lain seperti biaya sekolah, biaya hidup ataupun seorang penghulu yang kawin lagi. Bahkan, yang lebih parah adalah dalam hal jual beli tanah yang jelas sekali melanggar hukum adat Minangkabau, sebab dalam pandangan adat, jual beli tanah tidak dikenal. Yang dikenal adalah gadai. Namun ketika terjadi juga jual beli tanah, persetujuan semua anggota kaum menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Jika ada saja satu orang yang tidak menyetujui, konflik pun tidak dapat dihindari.

Kasus jual beli ini biasanya dilakukan kepala adat yaitu penghulu. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, penghululah yang menjualbelikan tanah kepada bangsa asing itu. Young menyatakan bahwa jika ulama merupakan kelompok yang ditakuti oleh Belanda, penghulu merupakan kelompok yang diajak kerjasama (Young, 1988). Untuk memperoleh tanah di Minangkabau, jalan yang paling mudah bagi Belanda adalah mendekati penghulu itu. Beberapa kasus seperti, tanah batu bara Ombilin dan tanah untuk perkebunan besar, penghulu berjasa besar kepada Belanda karena telah memberikan tanahnya. Pada saat penghulu menikamti gulden dari konsesi tanah yang dipinjamkan itu, anggota kaumnya malahan kelaparan (Zaiyardam Zubir 2002). Untuk zaman sekarang, misalnya di Lunang, ketika Penghulu nan Tujuh mendapatkan uang sebanyak Rp 200 juta dari pembebasan tanah ulayat Lunang untuk perkebunan. Setelah itu, justru terjadi konflik besar dilingkungan masyarakat, karena tidak meratanya

pembagian uang penjualan tanah itu. Bahkan, seorang penghulu dipecat oleh kemenakannya (Zaiyardam Zubir 2004)

Kebijakan negara tentang tanah juga memiliki kontribusi besar dalam memunculkan konflik. Beberapa kebijakan seperti, Undang-undang Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria membawa fenomena tersendiri bagi masyarakat Minangkabau karena memiliki aturan adat sendiri. Persoalan ini dipicu lagi dengan keluarnya PP No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran semua tanah yang ada. Melalui Keputusan Mendagri No. 16 tahun 1975 mengenai penggiatan pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat menjadi bom waktu bagi tanah ulayat yang memang tidak dimiliki satu orang. Persoalan mendasar adalah jika disertifikatkan, jual beli tanah akan semakin mudah. Menurut Sayuti Thalib (1985 : 9), dengan sendirinya tanah adat yang merupakan harta pusaka dan tidak mempunyai bukti tertulis mulai disertifikatkan dengan tujuan agar tanah tersebut memiliki kepastian hukum. Dampak yang ditimbulkannya justru lebih menakutkan bagi masyarakat Minangkabau karena sertifikat tanah itu atas nama penghulu, sedangkan dalam sejarah telah membuktikan bahwa penghululah yang paling banyak menimbulkan perkara tanah sehingga aturan-aturan seperti ini mendapat tantangan besar di Sumatera Barat. Selain itu, jika tanah sudah disertifikatkan, jual beli tanah akan semakin mudah karena nama yang tertera dalam sertifikat itu berhak menjual tanahnya, tanpa persetujuan dari kaumnya.

Peta konflik tanah itu kemudian melibatkan banyak pihak. Pada awalnya hanya antar kelaurga saja seperti mamak dengan kemenakan, pada tahap selanjutnya bisa melibatkan pihak luar. Dalam konflik itu biasanya tanah yang diperjualbelikan itu melibatkan modal besar, seperti untuk perkebunan. Pada kasus-kasus seperti itu banyak pihak yang bermain seperti penguasa, pengusaha, preman, tentara, penghulu dan masyarakat, serta LSM.

Dari berbagai konflik tanah yang terjadi tersebut, pengadilan negerilah yang menjadi tempat penyelesaiannya sehingga tidaklah heran, jika jumlah konflik tanah mencapai ratusan banyaknya. Dari kondisi ril itu, agaknya diperlukan media pengadilan lain untuk menyelesaikan konflik tanah yaitu perdamaian adat. Dalam perdamaian adat, ada beberapa cara yang lebih

manusiawi yaitu menghargai setiap kelompok yang bertikai. Dapat dipastikan bahwa jika konflik tanah diselesaikan dengan pengadilan negara, dapat dipastikan sebagian besar atau malahan semuanya telah berakibat terjadinya perselisihan lanjutan bahkan tindakan kriminal antara sesama kaum dan sanak saudara. Dengan kata lain, kasus perdata tanah secara formal memang telah selesai tapi kasus dendam kesumat memasuki area yang semakin dalam.

Kegagalan yang terjadi dalam menyelesaikan konflik tanah itu kemudian banyak menjadi bumerang bagi kemajuan masyarakat, baik pemilik tanah maupun bagi pengusaha dan penguasa. Disadari bahwa hukum positif yang menjadi landasan hukum penyelesaian konflik tanah seringkali tidak memadai sehingga dalam setiap konflik yang terjadi tidak saja merugikan berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dan pengusaha. Ungkapan yang sangat populer dalam konflik tanah adalah *menang jadi bara, kalah jadi abu*. Dalam wilayah konflik tanah, baik pihak yang menang maupun pihak yang kalah selalu saja akan mengalami kerugian. Dalam konteks inilah, nilai perdamaian yang berbasis nilai adat agaknya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Minangkabau sehingga dari setiap konflik yang terjadi tidak merugikan masyarakat.

Pemikiran dasar dari perdamaian berbasiskan adat ini adalah bahwa konflik tanah yang terjadi diselesaikan pada tingkat tetua adat dan lembaga atau yang lazim disebut *orang empat jini* (orang terhormat), yaitu penghulu, bundokandung, cerdik pandai, dan alim ulama. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul tidak perlu sampai ke pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Sangat disadari bahwa setiap persoalan tanah yang muncul di pengadilan memakan biaya yang tinggi, sikap emosional, meledak-ledak, sampai pada tahap keresahan dan ketegangan yang memudahkan munculnya konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal di masyarakat.

Masalah Yang Diteliti dalam penyelesaian kasus tanah pusaka menurut hukum adat ada hukum adat yang mengatakan "*Indak bulieh surang tagalak surang tatangih*". Artinya, tidak boleh pihak yang menang melakukan pesta pora, sedangkan pihak yang kalah menangis sedih (Hasrul Piliang, 2003). Dalam setiap

penyelesaian perkara tanah, pihak yang menang menghargai pihak yang kalah sehingga rasa iri, cemburu dan benci haruslah dihilangkan.

E. Peta Konflik Tanah

Belakangan ini, pemerintah pusat melontarkan gagasan untuk membagi tanah gratis buat masyarakat didaerah kantong-kantong miskin, terutama di Jawa. Kebijakan ini bisa saja berlaku untuk tanah-tanah negara, namun tidak akan dapat diterapkan di Minangkabau. Bertitik tolak dari pola pemilikan tanah yang terdapat di Minangkabau, dimana setiap tanah merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh milik kaum atau nagari, sehingga setiap jengkal tanah sudah ada pemiliknya. Keinginan-keinginan berbagai pihak terutama penguasa membuat kebijakan tanah gratis, akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sumatera Barat akan hancur, demikian komentar Syafmunir, seorang Prof. Dari Unand melihat gejala ini (Padang Ekspres, Jumat 25 Mei 2007).

Persoalan pokok adalah jangan membagi tanah yang ada, warisan persoalan dari konflik tanah yang terjadi selama ini saja belum dapat diselesaikan dengan memuaskan oleh masyarakat. Tambahan gagasan ini hanya akan membuat persoalan yang sudah ada semakin menjadi runyam. Berbagai kasus di Pasaman barat misalnya, ketika terjadi pengembangan perkebunan besar-besaran oleh orang kaya Jakarta, maka berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dan pengusaha banyak merugikan masyarakat. Tanah pancang merah yang dimiliki oleh suatu kaum, oleh pihak pengusaha seenaknya digeser, sehingga batas tanah berubah yang menguntungkan pengusaha. Pemerintah juga mendukung hal itu, karena adanya aliran dana dari pengusaha ke kantong-kantong pejabat, sehingga rakyat yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah justru ikut berperan aktif menekan dan menghilangkan hak-hak atas tanah masyarakat. Bekerja sama dengan elite lokal seperti penghulu, pihak yang membutuhkan tanah seperti pemerintah dan pengusaha dengan berbagai jalan berusaha mendapatkan tanah dan hasilnya dengan biaya rendah. Dengan demikian, penghulu dan pemerintah berperan aktif dalam persoalan tanah yang merugikan masyarakat. Jika ditarik benang merahnya, maka sejak zaman kolonial, persoalan seperti ini sudah terjadi dalam masyarakat di Minangkabau, dimana pihak elite lokal

secara aktif memberikan atau menjual tanah pada pihak kolonial Belanda. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa sejak zaman awlanya masuknya Belanda ke Minangkabau, tepatnya mereka untuk bekerja sama adalah penghulu. Kenneth Young menyatakan bahwa, jika ulama merupakan kelompok yang ditakuti Belanda, maka penghulu merupakan kelompok yang dapat diajak kerjasama, untuk menguasai tanah dan seisinya (Young, 1992).

Pola yang dimiliki pada zaman Kolonial Belanda dan Indonesia merdeka sama saja. Artinya, persoalan tanah selalu menyangkut pada kepentingan pengusaha-pengusaha besar, terutama untuk perkebunan dan pertambangan. Kasus tanah Bakrie Brothers Plantation di Pasaman memperlihatkan contoh kasus tanah yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Pembebasan tanah yang tidak jelas, membuat masyarakat sekitar perkebunan merasa dirugikan. Pada masa Orde baru, para pengusaha bisa dengan leluasa bergerak dan mengambil tanah rakyat, karena dengan uang yang ada, mereka bisa membayar pihak tentara ataupun polisi menjaga perkebunan mereka. Dominasi dan kerasnya militer terhadap masyarakat menjadikan nyali masyarakat ciut menuntut atas tanah mereka yang diserobot oleh pengusaha-pengusaha besar. Namun, sejak reformasi, masyarakat menjadi lebih berani dan kemudian menuntut tanah mereka kembali. Tidaklah heran, pada banyak kasus perkebunan-perkebunan besar di Pasaman, konflik tanah muncul dengan ramainya setelah era reformasi. Daerah yang memiliki perkebunan mencapai 102.00 ha, dan sekitar 77.000 ha merupakan perkebunan inti dan plasma dan sisanya perkebunan rakyat menyimpan potensi konflik yang besar, terutama pada perkebunan plasma dan perkebunan inti . Kasus yang menarik adalah warga Pematang Sontong dengan perusahaan Sawit PT PMS.

Untuk menuntut ganti rugi atas tanah mereka yang dikelola PT PMS, mereka membuat portal jalan ke perusahaan Sawit itu. Penghadangan ini sebagai bentuk panajang dari persoalan ganti rugi tanah yang diambil oleh PT PMS. Tarik menarik ganti rugi ini cukup alot, karena pihak perusahaan tidak mau mengganti tanah, sebab mereka sudah MOU sebelumnya. Tuntutan masyarakat terhadap PT ini diantaranya Mulai 11 Januari 2005, dilarang lewat jalan ini, pertama : Mobil Solar milik PT PMS, kedua : Mobil CPO milik PT PMS, mobil dinas/pribadi PT PMS dan ketiga, mobil umum biasa (harian Singgalang, 12 Januari 2005).

Sebagai jalan keluarnya, mereka mau membayar *Siliah Jariah* kepada ninik mamak sebanyak Rp., 100 juta. Namun, masyarakat menuntut dalam jumlah yang besar yaitu Rp. 4.2 miliar. Perbedaan ganti rugi dengan siliah jariah ini memperlihatkan bahwa pihak perusahaan menggunakan pendekatan elite lokal atau penghulu sebagai kelompok yang dirangkul. Jika penghulu bisa dijinakkan dengan uang Rp. 100 juta, maka perusahaan tidak perlu lagi membayar masyarakat dengan jumlah yang jauh lebih besar yaitu Rp. 4.2 miliar. Ujung dari persoalan itu berakhir dengan tidak jelas saja.

Persoalan lainnya seperti konflik antara masyarakat dengan PT PHM. Konflik itu berakhir dengan ditahannya tiga orang masyarakat yaitu Zulkifli, Jalinar dan Mardiana. LBH dalam siaran persnya menyatakan bahwa penahanan ketiga orang ini oleh Polres Pasaman Barat tidak adil dan diskriminatif dan terindikasi ada jual beli hukum. Asal muasal perkara adalah kelompok tani Sidodadi pimpinan Bahar, merampas tanah miseluar 265 ha. Dibantu pihak brimob, mereka menanam paksa kelapa sawit pada lahan kelompok tani Tunas Mekar. Tidak itu saja, mereka juga membakar pondok-pondok dan merusak tanaman milik kelompok tani Tunas Mekar itu. Lebih lanjut LBH menilai bahwa persoalan ini tidak lah berdiri sendiri, akan tetapi melibatkan banyak pihak seperti bupati Pasaman, PT Permata Hijau Pasaman dan Group Wilmar Plantation dan Bank Nagari Cabang Simpang Empat juga terlibat dalam pengucuran dana. (“Perjuangan Tanah Ulayat Berujung Kriminalisasi” siaran Pres LBH Padang, 27 Juni 2006.). Dalam akhir siaran persnya, Masyarakat tani Kapa yang tergabung dalam Organisasi Tani Tunas Mekar, P3TANTRA Sumbar dan LBH Padang menyatakan sikap yaitu :

1. Mengecam tindakan Polres Pasaman Barat terlibat kasus tanah ulayat Kapa dan bersikap tidak adil, diskriminatif serta tidak indenpenden dalam menjalankan proses hukum terutama terhadap Zulkifli, Jalinar dan Mardiana yang dinyatakan sebagai tersangka
2. Mempertanyakan Indenpendsi Polres Kabupaten Pasaman Barat sebagai aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan menyangkut penangguhan penahanan Zulkifli, Jalinar dan Mardiana yang terkesan tergantung kepada Bahar A.

3. Mendesak Kapolda Sumbar untuk mengawasi dan penyelidikan proses hukum terhadap tiga (3) orang masyarakat Kapa atas nama Zulkifli, Jalinar dan Mariana yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat. Kuat dugaan telah terjadi proses hukum yang tidak adil dan diskriminatif.
4. Meminta Kapolda Sumbar untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap Zulkifli, Jalinar dan Mariana beserta hak-haknya termasuk pengambilalihan proses hukumnya oleh Pola Sumbar.
5. Meminta DPRD Kab. Pasaman Barat agar menjadikan kasus tanah ulayat sebagai agenda prioritas DPRD dengan membentuk Panitia Khusus (PANSUS). Agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas, tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak luas yang memperpanjang daftar pelanggaran hak azazi manusia (HAM) sekaligus mengungkap pelaku utama yang terlibat dalam kasus ini. (“Perjuangan Tanah Ulayat Berujung Kriminalisasi” *siaran Pres LBH Padang*, 27 Juni 2006.).

Catatan penting yang diberikan adalah, ternyata pihak keamanan, yang dalam hal ini Brimob masih ikut terlibat dalam konflik tanah ini. Artinya, jika pada masa Orde Baru, konflik ini demikian tajamnya, maka pada masa refoiriasi, kelompok bersenjata ini belum bisa melepaskan diri dari konflik yang melibatkan masyarakat dan pengusaha ini. Sayangnya, mereka masih mendukung kelompok penguasa, bukan pada rakyat yang telah ditindas dan diberlakukan tidak adil oleh pengusaha yang bekerjasama dengan penguasa itu.

Berbeda dengan Pasaman yang melibatkan pengusaha besar dan pemerintah, maka untuk kabupaten Tanah Datar konflik tanah lebih bersifat konflik antara orang satu kaum, mamak dengan kemenakan, dan perbatasan nagari. Disadari bahwa luas daerah yang terdapat di kabupaten Tanah Datar tidak seluas daerah di kabupaten Pasaman, sehingga tanah yang diperebutkan itupun kecil jumlah. Lagi pula, struktur tanah yang tidak datar mengakibatkan lahan yang ada tidak menarik investor untuk menggarapnya. Tanah datar bukanlah daerah yang menjadi incaran para oprang kaya di Jakarta, sehingga ekspansi modal besar tidak ada di Tanah Datar. Kabupaten ini termasuk yang rendah income

perkapitanya, sehingga masalah tanah yang melibatkan pemerintah dan pengusaha yang ingin menjadikan kabupaten Tanah Datar sebagai tempat penanaman modal tidak ada.

Persoalan tanah yang muncul di Tanah Datar hanyalah sebatas persoalan perebutan sawah sepiring ataupun tanah perbatasan. Pada kasus yang muncul, perebutan ini jarang sekali sampai ke pengadilan, karena mereka menyadari bahwa tanah yang diperebutkan itu secara ekonomis tidaklah menguntungkan. Di Sumanik misalnya, persoalan tanah itu tidak muncul ke permukaan. Pada hal, beberapa tanah yang ada menyimpan potensi konflik. Salah satu kasus tanah kaum Datuak Sari Paduko, dimana tanah kaumnya telah digarap secara turun temurun oleh pendatang. Namun, konflik ini hanya bersifat letupan kecil saja, sehingga tidak persoalan sama sekali. Ketika keluarga Datuak Sari Paduko ini mendatangi penghuni, yang kemudian mengklaim miliknya dan bahkan sebagian telah dijualnya, maka pertengkaran kecil saja yang terjadi. Keluarga Datuak Sari Paduko terkesan tidak mau memperpanjang masalah ini, sehingga pendatang itulah yang berkuasa atas tanah itu. Hal yang digemborkan akan membawa persoalan ini ke pengadilan, tidak berjalan sama sekali, sebab yang dipertahankan bukanlah tanah itu, akan tetapi masalah harga diri kaum datuak Sari Paduko. Disebabkan dalam keluarga itu tidak ada orang yang bagak, maka persoalan tanah itu hilang begitu saja. (Wawancara dengan Akyar, anggota kaum Datuak Sari Paduko)

Di Nagari Lawang Mandahiling, persoalan konflik tanah justru dapat diselesaikan dengan mekanisme perdamaian adat. Oleh KAN setempat, kedua belah pihak yang bertikai dipertemukan dan kemudian diselesaikan konflik tanah itu dengan membagi tanah yang ada. Justru pola penyelesaian seperti ini tidak menjadi api dalam sekam, yang setiap waktu bisa saja meledak. Pola-pola penyelesaian konflik tanah dengan perdamaian ini bisa dijalankan karena tanah yang diperebutkan terbatas dan pihak yang berkonflikpun masih memiliki hubungan keluarga. Terlihat jelas bahwa tanah yang diperebutkan terbatas sawah dan ladang. Namun, penyelesaian yang didasarkan perdamaian adat dan agama Islam ini terutama melalui sumpah yang diucapkan membawa dampak positif bahwa perkara tanah itu tidak sampai ke pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan

di tingkat nagari dengan melibatkan Majelis Peradilan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dapat menyelesaikan perkara ini dengan biaya rendah. (Lihat surat perdamaian Perkara Perdata adat di Lawang Mandahiling).

Persoalan akan menjadi berbeda, jika konflik tanah itu terjadi perkotaan. Masalah harga tanah yang tinggi diperkotaan, mengakibatkan konflik tanah itu tinggi di perkotaan seperti di Padang. Pihak yang bertikai di perkotaan biasanya antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dengan berbagai proyek pembangunannya seringkali berhadapan dengan tanah masyarakat, sehingga masalah ganti rugi yang menjadi pokok persoalan. Selain itu, penyerobotan tanah milik masyarakat dengan dalih sertifikat sudah menjadi persoalan mendasar, terutama disepanjang *by pass*. Persoalan ini sudah bermula sejak awal pembebasan tanah dilakukan. Tanah yang awalnya tidak bernilai dan merupakan tanah rawa-rawa, namun ketika perencanaan pembuatan *by pass* dilakukan, tanah ini melonjak harganya. Hanya saja, selama proses pembebasan tanah untuk jalan, penjualan tanah, pembuatan terminal Air Pacah, berbagai tipu muslihat berlangsung didalamnya yang merugikan masyarakat secara langsung. Berbagai kasus lainnya yang dilaporkan LBH seperti di Simpang Haru, jalan ke kampus Unad, jalan ke Indarung dan Malvinas, kasus PT Semen Padang, dan belum lagi termasuk konflik tanah antar suku seperti di Palimo dan di Khatib Sulaiman yang memperlihatkan tingginya konflik tanah yang terjadi di kota Padang (LBH, 2005).

Dalam berbagai perkara tanah yang terjadi, setidaknya ada tiga pihak yang bertikai yaitu *pertama*, Antara mamak dengan kemenakan, orang satu suku dan ataupun satu kampung. *Kedua*, antara masyarakat dengan penguasa. *Ketiga*, antara masyarakat dengan pengusaha. Disadari bahwa, dalam konflik antara mamak dengan kemenakan, satu suku ataupun satu kampung, penyelesaian seringkali terjadi dengan berbagai tindakan anarkis dan bahkan pembunuhan. Bahkan, jika dibawa ke pengadilan, maka hal yang tidak dapat dielakkan adalah benang jadi arang kalau jadi abu. Artinya adalah, setiap konflik tanah yang dibawa ke pengadilan negeri, maka selalu saja berakhir dengan kerugian pada kedua belah pihak yang bertikai. Andiko, melihat fenomena ini menyatakan

bahwa hukum memperlemah perlindungan hak adat atas nama kepentingan nasional. Lebih jauh dikemukakan :

bahwa kesenjangan antara prinsip hukum dan kenyataan di lapangan juga ditemukan dalam isu hak-hak atas tanah. Di satu sisi hukum mengakui hak masyarakat atas tanah mereka, sementara disisi lain prosedur pengukuhan status hukum atas tanah adat sangat jarang diterapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tata cara pengukuhan status hukum kepemilikan perorangan di Indonesia juga sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kepemilikan baru atas tanah yang dibuat. Sementara reformasi hukum di bidang kehutanan dan agraria sebagaimana diamanatkan oleh MPR yang telah ditetapkan lima tahun yang lalu (TAP MPR IX/2001) masih belum menunjukkan dampak significant (Andiko, 7 Desember 2006).

Realitas ini akan tergambar pada konflik tanah adat yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, dalam konflik antara masyarakat dengan penguasa dan pengusaha, masyarakat selalu saja berada pada pihak yang kalah. Lemahnya pengetahuan dan kekuatan-kekuatan dibalik pengusaha dan penguasa –terutama pihak keamanan- menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dalam tawar menawar ganti rugi. Pada kasus tanah rakyat yang diserobot pihak berkuasa dan pengusaha yang mampu membayar pengadilan dan pihak keamanan, rakyat hanya bisa gigit jari saja.

Kebijakan yang dibuat pemerintah seperti rencana pemberian tanah gratis juga menyimpan potensi konflik yang besar. Satu sisi memang tanah ulayat dapat diberikan kepada anak kemenakan yang miskin ataupun, sedangkan terhadap pendatang –baik dalam satu kampung sekalipun, hanya hak pakai yang bisa diberikan. Namun yang harus disadari adalah tanah yang mau diberikan itu semakin sempit saja dan jumlah anak kemenakan yang lahir semakin banyak. Dengan sendirinya, jangan untuk orang lain, untuk anak kemenakan saja tidak mencukupi lahan yang ada. Tentu saja berbeda kondisinya dengan tahun 1970-an, ketika beberapa lokasi tanah ulayat diberikan kepada pendatang seperti di Sitiung, Pasaman, dan Pesisir Selatan -terutama transmigrasi-, maka lahan yang ada sekarang di Minangkabau semakin sempit saja. Lahan terasa semakin sempit juga disebabkan faktor lainnya seperti penyerobotan yang diambil oleh pihak pengusaha besar terhadap tanah ulayat seperti yang terjadi di Pasaman Barat dan sampai sekarang masih menyimpan potensi konflik dalam masyarakat, yang

seaktu-waktu pecah menjadi berbagai tindakan kekerasan dan anarkis. Untuk menghindari korban dan biaya yang lebih besar, maka kebijakan diperlukan solusi yang tidak melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan. Salah satu cara adalah mencari kembali akar-akar perdamaian adat dalam penyelesaian konflik tanah itu.

F. Adat dan Konflik Tanah : Mencari titik temu

Bertitik tolak dari hasil penelitian diatas tergambar bahwa dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Minangkabau, unsur-unsur nilai adat terlihat semakin memudar. Pilihan-pilihan untuk penyelesaian melalui pengadilan adat banyak terbentur pada ketidakmampuan petinggi adat seperti penghulu untuk menjadikan nilai-nilai adat sebagai titik tolak penyelesaian. Ketidakmampuan ini membawa akibat pada penyelesaian yang diupayakan dengan cara-cara perdamaian adat justru menjadi bumerang, dengan berbagai tindakan anarkis ataupun sampai ke pengadilan. Jika sudah sampai ke pengadilan, maka siapkan uang segoni, untuk memenangkan perkara itu, sehingga kadangkala menjadi tidak masuk akal, karena konflik tanah dengan harga 100 juta misalnya, namun ketika berhadapan di meja pengadilan, biaya yang harus dikeluarkan menjadi 150 juta. Artinya, diharapkan kekemangan yang dicapai, namun yang diterima adalah kerugian berbagai biaya pengadilan, seperti biaya sidang, biaya saksi, pengacara ataupun sogok menyogok lainnya.

Dalam kasus seperti ini, biasanya faktor harga diri yang dominan. Artinya, tanah sebagai simbol suatu kaum harus dibela dan dipertahankan. Namun dalam pembelaan atas tanah itu, mereka seringkali tidak rasional, sehingga apapun jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya kembali. Mengacu pada pepatah petitiyah yang berkembang dalam masyarakat : Tiba pada familik- famili dibela, pada kaum kaum dibela dan tiba pada kampung kampung dibela, maka berbagai persoalan menyangkut tanah menjadi persoalan satu kaum atau satu kampung. Sementara titik tolak persoalan itu juga berangkat dari perkara yang dibuat oleh kaum itu sendiri, terutama penghulunya.

Menempatkan para penghulu yang menjadi titik pangkal munculnya persoalan tanah karena mereka sesungguhnya yang paling berkuasa atas tanah yang ada. Hanya dalam cerita yang ditemukan bahwa perempuan memiliki kekuasaan atas, sementara penghulu hanya menjaganya. Dalam realitas di lapangan, penguasaan atas tanah lebih banyak dikuasai, oleh penghulu. Jika seorang penghulu berkehendak menjual atau menggadaikan harta pusaka, maka dengan berbagai cara ia akan lakukan – baik halus maupun kasar, baik lemah lembut maupun kekerasan, untuk menjual harta pusaka yang dimiliki kaum itu. (Zaiyardam Zubir, 2003).

Jadi, janganlah heran, jika sekarang ini jumlah harta pusaka yang dimiliki oleh suatu sudah banyak yang terjual. Akan sangat sulit menemukan masih adanya tanah pusaka tinggi yang dimiliki seorang suatu kaum, karena sudah banyak yang digadaikan, diperjual belikan ataupun dibagi sesama kaum. *Habi tande*, begitu judul buku Yando Zakaria dalam menyoroti fenomena harta pusaka yang terdapat di berbagai daerah, termasuk di Minangkabau dewasa ini. (Yando Zakaria, 2002).

Upaya penyelesaian konflik tanah melalui mekanisme perdamaian adat itu bertujuan untuk menghindari perkara tanah memakan biaya besar. Sebab, jika sudah masuk pengadilan, maka atau diselesaikan berdasarkan hukum negara, banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan, putusan Mahkamah Agung pun tidak dipatuhi seperti dalam konflik antara Suku Sikumbang dan Suku Caniago di tanah yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Padang. (surat kabar *Padang Ekpress*, Juni 2004). Kasus lain misalnya, walaupun sudah 15 tahun Bakrie Brother Plantation beroperasi di Pasaman Barat, konflik tanah dengan masyarakat masih berlangsung (Surat kabar *Singgalang*, 12 April 2004).

Dalam konflik tanah itu, persoalan harga diri sebenarnya menempati rating tinggi juga. Simak misalnya pertikaian tanah dibawah ini. Afni, sebut saja begitu namanya, mengumpulkan kaumnya untuk membicarakan perkara tanah seluas 1000 meter. Pada waktu itu, ia menjabat sebagai wakil kepala Badan Pertanahan Sumatera Barat, dan

menyampaikan bahwa kalau perkara tanah ini dibawa ke pengadilan, maka biaya yang akan dikeluarkan melebihi nilai tanah itu. Namun kaumnya bersikeras dalam rapat membawa perkara ini ke pengadilan, karena harga diri kaumnya telah diinjak-injak oleh orang yang menempati tanah mereka. Asal muasal mereka menempati tanah itu, karena tahun 1950-an, penghulu mereka dulu menyuruh untuk mengelola tanah itu kepada keluarga pihak yang menempati sekarang. Namun, karena mereka telah menempati puluhan tahun, tanah itu seolah-olah telah milik mereka dan bahkan sudah ada yang dijual. Namun, karena tidak ada bukti tertulis atas tanah itu, pihak yang menempati mengklaim tanahnya sendiri, sehingga berakhir dengan konflik itu. Entah memiliki kesadaran rasional ataupun tidak mau uang habis untuk perkara, yang jelas walaupun dalam rapat diputuskan untuk memeperkarakan, namun tidak ada kelanjutan, sehingga tanah itu tetap saja dimiliki oleh yang menempati sekarang ini, pada hal, dalam kampung itu statusnya adalah pendatang dan kemenakan di bawah lutut dari kaum itu.

Hal yang perlu disadarkan pada setiap kelompok yang bertikai adalah bahwa jika sudah perkara dibawa pengadilan, maka siapkanlah segopok uang, yang jumlahnya tidak sangat mungkin melebihi perkara tanah itu sendiri. Sebab, dalam setiap konflik yang ada, maka kekuatan uang akan sangat menentukan kemenangan pihak yang bertikai. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mafia pengadilan menjadikan perkara tanah ini sebagai salah satu lahan empuk yang digunakannya untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Praktek hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa kekuatan uang menjadi penentu vonis di pengadilan. Dalam banyak perkara tanah, kelompok yang memiliki jumlah dana yang besarlah yang dapat memenangkan perkara. Apalagi jika berhadapan dengan pengusaha=pengusaha besar seperti pada perkebunan besar di Pasaman, dalam setiap perkara yang ada, tidak satupun yang dimenangkan oleh masyarakat. Hal yang tertinggi paling hanya mereka mendapatkan tambahan ganti rugi, yang jumlahnya jauh dibawah nominal yang sebenarnya.

Gambaran kasat nyata dari pengadilan di Indonesia tidak lagi memeperlihat rasa keadilan. Pada banyak kasus, seorang koruptor agung bisa memegang jabatan tinggi, namun seorang maling ayam, yang hanya untuk bertahan hidup, dipenjarakan. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat yang tak berdaya dan tak punya uang. Begitu juga halnya dengan konflik tanah antara pengusaha dan penguasa dengan rakyat. Rasa keadilan ditentukan oleh jumlah uang yang diberikan kepada pengadil. Bahkan, bukti-bukti nyata dapat saja dihindarkan atau dihilangkan dari bukti, sehingga permainan kata yang berdasarkan pasal-pasal dengan mudah diselewengkan. Hal yang tidak dapat dihindarkan adalah kekalahan pihak yang tidak memiliki dukungan dana yang besar untuk menyogok pada pengadil itu.

Melihat persoalan seperti ini, sudah saatnya ada aturan-aturan atau yang sifat lokal untuk mengatur perkara tanah ini. Para penmbuat kebijakan harusnya mumlai mnemikirkan cara untuk tidak membawa perkara tanah ke pengadilan, sehingga dari setiap konflik tanah yang ada tidak selalu merugikan masyarakat, yang bnuta hukum dan tidak memiliki dukungan dana untuk memenangkan perkara. Dengan demikian, bukannya program sertifikasi tanah ulayat itu dibuat, akan tetapi bagaimana tanah yang tersisa ini masih dapat dinikmati oleh anak cucu. Dengan demikian, Perda tentang tanah, yang berdasarkan hukum Adat dapat melindungi tanah pusaka dari berbagai konflik, penjualan dan penggadaian yang dilakukan secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan kaum itu sendiri.

G. Rangkuman

Pelajaran penting yang dapat ditarik dari konflik tanah di Minangkabau haruslah memahami secara seksama dari awal tentang sistem pemilikan tanah itu sendiri. Pola pemilikan tanah di Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya seperti di Jawa, sehingga dalam menuangkan kebijakan tentang tanah tidaklah bisa digeneralisasikan. Bahkan untuk setiap negeri pun memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pemilikan tanah itu, sehingha muncul ungkapan adat selangka nagari, dimana adat istiadat –termasuk didalamnya tanah-hanya berlaku pada batas-batas nagari itu.

Jika di Jawa tanah milik raja, maka di Minangkabau tanah merupakan milik satu kaum atau suku. Bahkan, kepemilikan tanah yang bersifat pribadi sesungguhnya tidak dikenal dalam budaya, sebab setiap tanah merupakan milik komunal. Namun dalam perkembangannya, tanah itu mulai digadaikan dan dijual oleh kaum itu, terutama oleh penghulunya. Suku dibawah komando kepala suku atau penghulu memegang peranan penting dalam pengendalian tanah itu, sehingga otoritas seorang penghululah yang menyebabkan terjadinya jual beli tanah itu.

Hal yang tak dapat dihindari dari persoalan penjualan atas tanah ulayat ini kemudian adalah menyimpan potensi konflik dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari peta konflik tanah, yang menjadi persoalan yang paling banyak menyita perkara di pengadilan.

Kegagalan dalam menyelesaikan konflik tanah kemudian menjadi bumerang bagi masyarakat, pengusaha, dan penguasa sehingga dibutuhkan alternatif lainnya seperti perdamaian adat. Pemikiran dasar dari perdamaian berbasis adat ini adalah bahwa dalam konflik tanah yang terjadi diselesaikan pada tetua adat dan lembaga-lembaga atau lazim disebut *urang empat jini* (orang-orang terhormat) yaitu Penghulu, bundokandung, cerdik pandai, Alim Ulama. Dengan demikian, setiap konflik tanah yang diselesaikan melalui perdamaian adat melibatkan keempat elite lokal.

Dalam beberapa penyelesaian konflik yang ada, beberapa daerah seperti Lawang Mandailing Tanah Datar sudah mencoba menyelesaikan konflik ini berdasarkan perdamaian adat. Memang, penyelesaian konflik tanah berbasis perdamaian adat menjadikan elite tradisional penghulu berperan besar dalam mengatasi konflik yang ada. Menempatkan mereka kembali kepada posisi sebagai tetua adat yang harus dihormati anak kamanakan dan orang kampung menjadi hal penting yang harus segera dibenahi sebab sumber konflik tanah itu justru seringkali berasal keinginan-keinginan penghulu itu menjual tanah ulayat yang dimiliki kaumnya. Dalam konisi yang demikian, mengembalikan peran penghulu dalam penyelesaian konflik tanah semakin berat, karena eksistensi penghulu sendiri dalam masyarakat menjadi faktor yang tidak dominan dan semakin memudar. Bahkan, dalam banyak nagari, penghulu dalam jumlah yang besar

berada di perantauan, sehingga melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik tanah semakin sulit.

Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah berbasiskan perdamain adat hanya bisa dilakukan pada konflik tanah yang dalam skala kecil. Namun dalam skala besar dan melibatkan pihak luar orang kampung, maka penyelesaian lebih banyak bersifat hukum negara, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghabiskan banyak energi dan keuangan dalam menghadapi perkara di pengadilan.

1. Perlu dilakukan penguatan masyarakat untuk menimbulkan kesadaran tentang kepemilikan tanah, sehingga dalam kasus yang muncul, masyarakat tidak dirugikan.
2. Dalam setiap konflik tanah yang ada, selesaikan secara musyawarah adat, dengan melibatkan penghulu atau cadiak pandai dan ulama yang masih memiliki wawasan yang luas dan dalam.
3. Hindari keterlibatan pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan.
4. Jangan sekali-kali membawa perkara tanah ke pengadilan, karena begitu perkara masuk pengadilan, tidak ada yang menang dan yang kalah sebab menang jadi bara, kalah jadi abu.
5. Gara-gara ingin mendapatkan sebuah penjahit, kapak yang hilang. Selalu saja begitu akhir setiap perkara tanah di pengadilan negeri.
6. Jika menang jangan terlalu memperlihatkan kegembiraan, supaya kelompok yang kalah tidak terlalu berkecil hati
7. Kelompok yang kalah jangan memperlihatkan kesedihan yang besar dan belajar menerima kekalahan yang ada.
8. Pengadilan tidak menerima perkara tanah, tanpa ada usaha maksimal melalui perdamaian adat.
9. Hormati setiap kesepakatan yang telah dibuat

Ternyata, dalam banyak konflik yang terjadi di Minangkabau, konflik tanah menempatkan posisi teratas. Titik tolak persoalan berakar dari pola

pemilikan tanah yang dimiliki secara komunal atau suku, sehingga ketika terjadi jual beli tanah, maka keterlibatan semua anggota suku menjadi hal mutlak. Praktek dilapangan adalah jual beli lebih melibatkan kalangan elite penghulu, sehingga protes keras sampai terjadi konflik berdarah dan pembunuhan tidak dapat dihindarkan.

H. Soal-soal Latihan

1. Bagaimana pola kepemilikan tanah berdasarkan adat Minangkabau?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya konflik tanah?
3. Mengapa pemerintah dan pengusaha terlibat dalam konflik tanah?
4. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam konflik tanah?
5. Bagaimana penyelesaian konflik tanah berdasarkan perdamaian adat Minangkabau?

Bacaan Pilihan

A.A.Navis, **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta: PT Grafiti press, 1986

Anu Lounela, R. Yando Zakaria (ed), **Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung**. Yogyakarta : Insist Press, 2002.

Burke, Peter, **History and social Theory**. Cambridge, Polity Press, 1992.

Chambers, R. **Pembangunan Desa : Dimulai Dari Belakang**. Jaklarta : LPES, 1987.

Chesney, Allan Mc., **Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, sosial, dan Budaya**. Yogyakarta : Insist Press, 2004.

Emraldi Catra, **Adat Salingka Nagari**. Padang : FISIP Unand, 2001.

Geertz. C., **Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia di Indonesia**. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1976.

Hasrul Piliang, Zaiyardam Zubir dan Firman, **Penyelesaian Sangketa Tanah Pusaka Di Minangkabau : Studi kasus di Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok Kabupaten Sawahlunto Sijunjung**. Padang : Balitbangda, 2003.

- Loekman Sutrisno, **Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan**. Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- Mansour Fakih, **Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi**. Yogyakarta : Insist, 2001, hal.198.
- , **Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- McChesney, Allan, **Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**. Yogyakarta : Insist Press, 2003
- Muchtar Naim, **Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Padang : Center for Minangkabau Studies Press, 1968
- , *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, Jakarta, **Makalah**, 1997.
- Muhammad Radjab, **Sistem Kekerabatan di Minangkabau**. Padang : Center for Minangkabau Studies Press, 1969.
- Noer Fauzi, **Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia**. Yogyakarta : INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999.
- , **Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria : Dari tututan Lokal Hingga Kecenderungan Global**. Yogyakarta : Insist, 2003
- Nurdin Nurdin Dt. Bandaro, **Hukum Kekerabatan Minangkabau** (jilid I dan II), Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia, 1995.
- R. Soehadi, **Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria**. Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- R.Yando Zakaria, **Abieh Tandeh : Masyarakat Desa Dibawah Rezim Orde Baru**. Jakarta : LSAM, 2000.
- Rikardo Simarmata, **Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara**. Yogyakarta : Insist Press, 2002.
- Sajuti Thaib, (editor). **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau**. Jakarta : Bina Aksara, 1985.

S. Soetomo, **Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Pertanian**. Yogyakarta : Kanisius, 1997

_____, **Perang Petani**. Yogyakarta : Insist, 2004.

Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan**. Yogyakarta : Insist Press, Desember 2002.

_____, Dwi Bertha, Lusi Herlina dan Lani Fitrianti, **Partisipasi Politik Perempuan di Minangkabau**. Yogyakarta: Insist Press, 2003

_____. **Tujuh Abad Penindasan Perempuan di Minangkabau**. Padang : PSH Unand, 2004.

BAB VI

HERO ATAU PECUNDANG SAMA BOHONGNYA

*Kepada segenap warga bangsa
Jika ada seseorang
Ataupun sekelompok orang
Mahasiswa sekalipun
Berkotbah :*

*Demi rakyat
Bahwa
Kami
Sedang memperjuangkan
Nasibmu
Meningkatkan harkatmu*

*Sesungguhnya
Mereka bohong
Pendusta agung*

*Mereka sedang berlomba
Memperkaya diri
Berebutan jabatan
Dan kekuasaan*

A. Deskripsi

Bab ini mengkaji tentang tingkah laku elite yang terdapat di Indonesia khususnya Sumatera Barat. Pokok persoalan terletak pada orientasi mereka untuk naik menjadi pimpinan. Tidak diraguskan lagi bahwa beberapa waktu belakangan ini, moboilitas vertikal yang mereka lakoni, juga untuk meningkatkan mobilitas ekonomi mereka, dan kelompok mereka. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan gagasan pendidiri republik ini, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat

dibandingkan dengan kepentingan pribadi, sebagaimana telah diperlihatkan oleh Bung Hatta, Sahrir, Agus Salim dan M. Natsir.

B. Manfaat

Bab ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa untuk memahami peta gerakan mulai dari mahasiswa sampai elite politik. Dalam gerakan yang mereka lakukan, ternyata memiliki motivasi yang beraneka ragam, mulai untuk memang memperjuangkan nasib rakyat sampai memperjuangkan nasib pribadi. Karakteristik seperti ini tergambar secara jelas dari berbagai tokoh yang terdapat dalam masyarakat.

C. Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa dapat memahami corak gerakan dari tokoh-tokoh bangsa di awal pergerakan nasional
2. Mahasiswa dapat menganalisis ideologi dari tokoh gerakan mahasiswa dan elite politik
3. Mahasiswa dapat mengkaji fakta bahwa dalam setiap generasi melahirkan tokoh besar dan sekaligus juga pecundang besar

D. Warisan Sejarah yang Terlupakan

Dalam majalah “Jakarta-Jakarta” Agustus 1988 lalu, ada kutipan kisah dialog yang sangat menyentuh nurani antara Bung Hatta dengan Mutia Farida Hatta. Mutia menceritakan bahwa dengan mata berkaca-kaca Bung Hatta mengatakan “sebagai pensiunan Wakil Presiden, ayah mendapat pensiun sebanyak Rp. 90.000,- ayah tidak ada meninggalkan warisan apa pun juga, kecuali buku-buku. Jika ayah meninggal nanti, janganlah buku ayah dijual” (Majalah Jakarta-Jakarta, Agustus 1988). Di lain waktu Halida Hatta bercerita bahwa listrik di rumahnya diputuskan oleh PLN karena menunggak membayarnya. Satu pertanyaan ingin dikemukakan, betulkah pernah ada pejabat tinggi negara di republik ini yang sedemikian miskinnya, sehingga untuk membayar listrik, seorang mantan wakil presiden terpaksa menunggak.?

Bung Hatta merupakan citra pendampingan rakyat yang ideal. Idealnya terutama terletak mulai dari ide, sikap, tindakan dan kebijakan yang dibuatnya serta kehidupan kesehariannya, sehingga citra seorang pendamping rakyat model Bung Hatta merupakan contoh yang menarik. Persoalannya adalah, manusia seperti Hatta merupakan barang langka di republik ini. Artinya, realitas dalam masyarakat bertolak belakang dengan watak yang dimiliki oleh Bung Hatta. Hal ini dapat diamati melalui tingkah laku elite di Indonesia.

Dalam kondisi terakhir ini, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, sesungguhnya hal itu hanya menimpa rakyat kecil dan negara, sedangkan pejabat-pejabat di Republik ini sesungguhnya tidak terkena imbas krisis itu. Mereka masih sempat melakukan korupsi, memanipulasi, dan sejenisnya. Walaupun teriakan reformasi telah menembus ke tulang sumsum, akan tetapi dampaknya tidak sesuai dengan gemanya. Perilaku elite tidaklah berubah, bahkan ada kesan membabi buta.

E. Republik Ratu Adil

Untuk dapat mengorganisir, mendampingi ataupun sebagai upaya menggerakkan rakyat, diperlukan pemahaman terhadap tatanan sosial masyarakat itu. Pemahaman itu haruslah dalam skala mikro. Bahkan, pengkajian tidak hanya dalam satu sudut pandang, akan tetapi diperlukan multidimensional approach. Regis Debray menyatakan bahwa untuk melakukan sebuah revolusi, terutama untuk memobilisasi massa, pemahaman mendalam terhadap pengikut sangat dibutuhkan (Robert Gurr, 1969). Dapat dipahami mengingat bangsa ini memiliki keragaman yang sangat kompleks, sehingga dibutuhkan analisis-analisis spesifik ataupun lokal yang mendalam untuk memahami berbagai persoalan ataupun keinginan masyarakat di tingkat lokal. Bandingkan misalnya pemeluk Islam di dalam masyarakat Aceh, Minangkabau dan Jawa. Walaupun daerah ini sama-sama pemeluk agama Islam misalnya, namun masyarakat Aceh, Minangkabau dan Jawa memiliki karakter keIslaman yang berbeda.

Di Aceh misalnya, dengan ucapan Assalamu'alaikum, mereka bisa dengan mudah merebut kepercayaan karena sebagai sesama umat seiman. Namun, teriakan Allahu-Akbar, bisa dengan mudah memancing orang Aceh untuk berperang. Mereka beranggapan bahwa berperang di jalan Allah bisa merupakan

jalan menuju surga (Ibrahim Alfian, 1985). Tidaklah mengherankan bahwa dalam sejarah Aceh mereka sesungguhnya tidak pernah menyerah pada lawan-lawannya, baik kepada Belanda maupun kepada Indonesia. Orang-orang Aceh tidak dapat ditundukkan dengan senjata ataupun peluru. Mereka akan mudah ditundukkan lewat meja perundingan.

Mengherankan, bahwa sesungguhnya pertumpahan darah yang terjadi di Aceh dewasa ini tidak henti-hentinya. Pengalaman menyatakan bahwa untuk menaklukkan bangsa Aceh sesungguhnya tidak perlu dibutuhkan pertumpahan darah. Medan perundingan bahkan jauh lebih efektif dibandingkan dengan peluru. Pola yang dibuat oleh C. Snouck Hurgronje agaknya lebih efektif dalam penyelesaian masalah Aceh. C. Snouck Hurgronje, terutama dengan segala daya intelektualnya berusaha untuk memahami masyarakat Aceh. Bahkan secara mendalam C. Snouck Hurgronje mencoba memasuki relung-relung yang terdalam dari kehidupan masyarakat Aceh melalui ajaran Islam itu sendiri. Untuk sampai ke sana, ia menukar namanya dengan Haji Abdul Gaffar. Artinya bahwa untuk dapat menaklukkan Aceh, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan keberagaman dalam suatu masyarakat. Salah satu nasehat C. Snouck Hurgronje adalah untuk menaklukkan Aceh, rebutlah kepercayaan, selanjutnya terserah (C. Snouck Hurgronje, 1992).]

Begitu juga dalam kasus DI TII. Setelah berperang sekian lama, Aceh sesungguhnya tidak pernah tunduk kepada Indonesia. Penyelesaian baru dapat berjalan setelah meja perundingan. Melalui meja perundingan, tokoh DI TII Daud Beureh baru menyerah pada Soekarno.

Anehnya, Habibie yang seorang sipil menggunakan pola *security approach*, -cara yang populer di zaman Soeharto-dalam penyelesaian di Aceh. Pada gilirannya, persoalan Aceh tidak kunjung selesai. Hipotesa yang muncul adalah pemahaman tentang tentara diciptakan untuk berperang dan membunuh, sehingga dibutuhkan wilayah untuk ajang latihan berperang. Akan tetapi janganlah diciptakan wilayah latihan berperang dikalangan rakyat sendiri.

Di lain pihak walaupun sama-sama pemeluk Islam dengan masyarakat Aceh, namun masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda. Minangkabau penganut “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”, namun

ungkapan ini hanya dikemukakan dalam cerita-cerita tambo. Dalam realitasnya, hal itu tidak akan ditemui. Masalah kristenisasi yang hangat belakangan ini tidak menimbulkan reaksi yang keras dalam masyarakat-kecuali tentu saja oleh koran-untuk menaikkan oplahnya.

Gambaran kehidupan masyarakat Minangkabau lebih bersifat materialistik. Bahkan bisa sangat materialistik, sehingga faktor tanah pusaka misalnya dalam masyarakat bisa terjadi pembunuhan. Majalah *Tempo* pernah melaporkan bahwa pembunuhan tertinggi di Minangkabau bersumber pada masalah harta pusaka. Jadi untuk dapat memasuki wilayah budaya masyarakat ini, faktor-faktor materialistik jauh lebih mudah dibandingkan dengan faktor agama itu sendiri.

Sikap terhadap elite pun dalam masyarakat Minangkabau tidak terlalu istimewa. Pemimpin, baik formal maupun informal bisa saja dikritik ataupun dibantah. Mereka menganggap pemimpin itu hanya *didahulukan salangkah* dan *ditinggikan sarantiang*. Jadi pemimpin bukanlah seorang yang benar selamanya. Dalam konteks yang lain dongeng Malin Kundang tidak hanya ditunjukkan pada orang tua, tetapi juga pembangkangan terhadap elite dan nilai yang ada.

Budaya konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam idiom budaya Minangkabau. Konflik merupakan suatu kompetisi untuk mencapai tujuan. Taufik Abdullah menyatakan bahwa, konflik tidak hanya diakui tetapi dikembangkan dalam sistem sosial itu sendiri. Konflik dilihat sebagai dialektis, sebagai unsur hakiki untuk tercapainya integrasi dalam masyarakat Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987). Tidaklah heran apabila Minangkabau menghasilkan tokoh-tokoh yang beragam seperti Hamka dan Natsir seorang yang Islamis, Yamin dan Hatta seorang nasionalis, Syahrir seorang sosialis, maupun Aidit dan Tan Malaka seorang komunis.

Semua diterima dalam masyarakat secara terbuka. Keterbukaan ini menimbulkan dialog kebudayaan dalam masyarakat. Umar Kayam, dalam pidato pengukuhan nya membandingkan antara Minangkabau dengan Jawa yaitu mengatakan bahwa segera kita melihat perbedaan yang jelas antara Jawa dan Minangkabau. Di Jawa, upaya dialog budaya lewat priyayi atau elite birokrasi.

Sementara itu, di Minangkabau dialog budaya lewat jalur yang bebas (Umar Kayam, 1989).

Dalam hal ini, sikap terbuka dan rasionallah yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam transformasi budaya. Artinya, budaya maupun politik bersifat terbuka, tanpa adanya ikatan dengan elite-elite yang ada. Namun sikap ini pernah selama 40 tahun terbenam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama sejak PRRI-mengalami kekalahan. Bahkan ada satu masa, melihat *baju hijau* saja masyarakat langsung terbirit-birit ketakutan. Sikap seperti ini sesungguhnya bertolak belakang dengan karakter dasar dari masyarakat Minangkabau yang mengembangkan budaya konflik. Sikap ini baru tumbuh lagi setelah Soeharto jatuh. Kemenangan PAN di Minangkabau disebabkan sikap rasional masyarakat dalam melihat elite yang dipilihnya. Koran-koran lokal menyatakan bahwa Minangkabau sebagai “propinsi reformis dan sekaligus propinsi busung lapar” (Sumatera Barat merupakan propinsi busung lapar nomor satu di Indonesia).

Dalam masyarakat Jawa, mereka juga memiliki keragaman yang kompleks. Misalnya dalam masalah mistik, sentuhan mistik memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat Jawa. Namun dalam hal ini tidak bisa digeneralisasikan. Masyarakat Jawa yang berasal dari pedalaman jauh lebih kuat mistiknya dibandingkan dengan daerah pantai (Clifford Geertz, 1982). Walaupun mereka telah meninggalkan Jawa, pengaruh mistik tidak bisa hilang dalam masyarakat. Generasi kedua transmigran Jawa yang ikut ke Suriname, dan kemudian ikut kembali transmigrasi ke Tongar-Pasaman misalnya, mereka tidak bisa menghilangkan watak-watak mistik dalam kehidupannya. Hal-hal seperti inilah yang mendominasi budaya politik di Indonesia.

Contoh kontemporer adalah kemenangan PDIP dalam pemilu lalu. Tidak diragukan lagi, PDIP merupakan partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu 7 Juni lalu. Di bawah komando Megawati Soekarno Puteri, partai ini menjadi partai pemenang pemilu. Hal yang menarik adalah *bisunya* sikap Mega bisa diartikan banyak. Jika mahasiswa mengartikan segi negatif, maka pengikutnya dapat saja melihatnya sebagai hal yang positif. Mereka telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mega, sehingga apa pun sikap Mega secara mutlak mereka tetap mengikutinya. Tidak heran misalnya muncul

tindakan-tindakan yang irrasional oleh pengikutnya. Contoh yang aktual adalah sumpah darah yang dilakukan oleh pengikut Megawati Seokarno Puteri. Mereka begitu berkehendak untuk menjagokan calonnya untuk menjadi penguasa di Republik ini, sehingga melakukan sumpah darah.

Sikap yang diperlihatkan seperti ini adalah sikap politik yang berkembang abad lalu. Titik awalnya adalah ketidakpercayaan yang telah mendalam terhadap pemimpin yang ada, membuat mereka melakukan apa pun juga untuk mendorong pimpinan mereka untuk menduduki jabatan yang dinginkannya. Dalam keputusan, mereka mengangankan akan datangnya seorang Ratu Adil, seorang pimpinan yang akan dapat menyelamatkan hidup mereka (Sartono Kartodirdjo, 1984). Melihat hal-hal yang dilakukan pengikut Megawati, ibaratnya Megawati sudah seperti Ratu Adil, seorang ratu yang akan dapat menyelamatkan kehidupan manusia.

Perlakuan pengikut Abdurrahman Wahid juga tidak berbeda jauh dengan pengikut Megawati. Para pengikut Abdurrahman Wahid, terutama yang berasal dari latar belakang NU-khususnya di Jawa Timur-bisa saja menganggap Abdurrahman Wahid manusia setengah dewa, sehingga tanpa berpikir panjang, mereka akan mengikuti apa pun juga semua perkataannya. Walaupun perkataan pagi dengan siang berbeda ataupun sore dengan malam bertentangan, maka oleh pengikut setia Abdurrahman Wahid tetap saja dianggap benar dan selamanya benar (Claire Holt, 1972).

Bagi pengikut Megawati, terutama dengan latar belakang masyarakat Jawa, Megawati dapat saja dianggap sebagai Ratu Adil, ataupun Abdurrahman Wahid bisa sebagai setengah dewa. Namun, di tempat lain Megawati bisa saja dianggap sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa senyum-senyum saja, sedangkan Abdurrahman Wahid seorang kyai yang seringkali terlihat sebagai makhluk yang membingungkan.

C. Wright Mills dalam bukunya *The Power Elite* mengatakan bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada kepintaran, akan tetapi banyak faktor-faktor lain yang sangat mendukung seperti kultural, kapital, dan struktural capital (C. Wright Mills, 1988). Jika kultural kapital diartikan sebagai modal budaya dengan segala pernik-perniknya, maka struktural kapital dapat diartikan sebagai

jaringan yang telah terbentuk dalam diri seseorang atau kelompok. Walaupun tidak memiliki kepintaran, namun Mega memiliki dua faktor di atas, faktor-faktor yang tidak dimiliki oleh kelompok Politik lainnya seperti PRD di bawah komando Budiman Soedjatmiko.

Dalam melihat perilaku elite politik, menarik juga disimak sosok Budiman Sudjadmiko yang bertahan dalam penjara. Dengan latar belakang budaya Jawa, apakah dikap ini sebagai upaya membentuk dirinya sebagai seorang *Imam Mahdi* ataupun sebagai ungkapan keyakinan politik pribadinya atau kelompoknya?. Jika anggapan pertama yang benar, maka untuk membentuk citra seorang manusia setengah dewa, memang harus melakukan pertapaan. Pertapaan dalam dongeng biasanya berlangsung di gua-gua, sedangkan pertapaan modern yang dilakukan oleh Budiman berlangsung di penjara.

Namun jika ungkapan kedua sebagai keyakinan politik kelompoknya, sulit juga sebab banyak elit di luar tokoh ini sedang menikmati hidup enak di luar sebagai elite-elite politik dalam kelompoknya. Masalah solidaritas dan sikap kelompok juga perlu dipertanyakan di sini, karena ketika jiwa dan raga Budiman terkurung, maka sebagian menikmati udara bebas dengan segala fasilitasnya. Sang Hero tetap memiliki nasi patri di pertapaannya.

Dalam dialog dengan Herbet Feith, berkali-kali ia menyatakan bahwa PRD sebagai kekuatan angkatan muda yang diharapkan sebagai elite masa depan. Kemampuan intelektual dan spirit yang dimilikinya menempatkan kelompok ini sebagai elite terdepan dalam generasinya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mereka merupakan “Syahrir-Syahrir Muda” yang dapat membangun masa depan Indonesia yang lebih beradab. Sebagai kelompok radikal/revolusioner, mereka seharusnya berada di luar sistem yang ada. Herbet menyatakan bahwa seharusnya mereka berada sebagai pihak oposisi, sehingga dapat bergerak secara bebas tanpa diikat oleh rambu-rambu. Namun, begitu mereka memasuki dunia politik formal, maka tamatlah riwayat mereka.

F. Hero Atau Pecundang

Tiba-tiba saja, kata “Reformasi” menjadi dewa baru di bumi Nusantara ini, sebagaimana kata-kata “Orde Baru ataupun Pembangunan” di masa orde yang lalu. Semua orang berlomba-lomba memakainya dan berbagai kelompok menjadikan

kata ini sebagai Tuhan Baru. Dapat dikatakan, jika memakai kata-kata Reformasi, maka dapat menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang. Dalam konteks ini, muncullah hal-hal yang aneh dan lucu dan kadangkala menyedihkan.

Tidak dapat diragukan lagi, mahasiswa merupakan ujung tombak dari gerakan Reformasi. Bahkan untuk wilayah yang tidak mengenal gerakan mahasiswa seperti di Sumatera Barat, bias reformasi juga meresapi kehidupan mahasiswanya. Gerakan mahasiswa era reformasi ini seperti kembali “membangkit batang tarandam” karakter asli masyarakat Minangkabau. Betapa tidak, etnis yang selama ini memiliki dinamika politik yang tinggi, namun melorot ke titik nol, terutama karakter politiknya yang bersifat konflik. Bahkan, episode ini melahirkan hero-hero baru, hero yang sudah lama hilang dalam percaturan dunia mahasiswa. Sayangnya, masa-masa manis ini hanya berlangsung sesaat. Ketika perjalanan sejarah terus berjalan, mereka pun terlibat dalam berbagai aktivitas yang melunturkan gelora gerakan mahasiswa itu sendiri. Tidak heran misalnya, muncul issue-issue demonstrasi bayaran di kalangan mahasiswa.

Sama seperti PRD yang juga memasuki politik formal, ketika mahasiswa harus memasuki sebuah sistem yang lebih besar seperti pemantau pemilu, maka mereka pun harus mengikuti alur permainan di dalamnya. Dalam sistem yang terdapat aturan-aturan main yang harus disepakati. Apalagi sudah ada imbalan di dalamnya, sehingga membuat gerak semakin terbatas.

Disadari atau tidak, pentolan-pentolan aktivitas mahasiswa sepertinya harus berhadapan dengan gaya permainan orde baru. Mengalirnya dana ke lembaga-lembaga pemantau yang membuat mahasiswa menjadi fenomena baru yang harus dihadapinya. Seorang teman terlibat dalam pemantauan pemilu menceritakan “ibarat anak SD, yang biasanya belanja Rp. 1000,- dalam satu hari, sekarang dikasih uang Rp. 100.000,- harus dihabiskan dalam satu hari yang membuatnya kebingungan”. Permainan pun tidak dapat dielakkan, sehingga apa pun komentar pemantau pemilu tidak ada pengaruh dalam perhitungan hasil.

Dalam kondisi sekarang ini dibutuhkan sekelompok mahasiswa yang harus berada di luar sistem politik yang ada. Artinya sang mahasiswa itu betul-betul tidak terlibat dalam aktifitas politik formal dan hanya sebagai gerakan moral. Terlepas dari kekurangan yang dimilikinya, agaknya kelompok seperti FORKOT

merupakan bentuk ideal dari gerakan mahasiswa. Pada gilirannya, apakah sesungguhnya masyarakat memiliki Robin Hood atau bahkan sebaliknya mereka itu sebagai Don Qisot saja.

G. Hubungan Patron-Client, Pendamping Rakyat Atau Proyek

Sebuah pertanyaan mendasar ingin dikemukakan apakah rakyat membutuhkan seorang pendamping atautkah mereka hanya dijadikan sebagai tumbal untuk mencapai tujuan elite. Persoalannya adalah siapa yang super hero itu sesungguhnya. Dalam melihat hubungan keduanya, maka yang menarik dilihat adalah motivasi-motivasi yang menghubungkan antara patron-client. Dalam bidang politik, Legg menyatakan bahwa motivasi hubungan patron dengan client, patronlah yang sangat berkepentingan, sedangkan kedudukan client hanya untuk melegitimasi kedudukan patron saja. Setelah itu, client yang bekerja untuk kebesaran patronnya dapat ditinggalkan begitu saja (Keith R. Legg, 1983).

Memahami peta politik kontemporer dewasa ini, sulit kiranya ada kelompok yang secara murni memperjuangkan nasib rakyat. Walaupun semua memakai ungkapan memperjuangkan nasib rakyat, demi rakyat ataupun demi kelaparan, namun dibalik itu ada tujuan-tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan ungkapannya. Partai politik memerlukan rakyat sebagai pijakan dan legitimasi untuk memakai kekuasaan. Mahasiswa menggunakan penderitaan rakyat sebagai simbol perjuangan. Sementara itu, rakyat sendiri tetap dalam kemelaratan yang tak tertahankan.

Dalam konteks ini, pelatihan pendamping rakyat ini apakah sebuah proyek yang dikerjakan oleh PB HMI. Barangkali perlu dipertanyakan (juga debat calon presiden yang gagal diadakan HMI, dari umatkah sumbernya atau kemana pergi uangnya?). Hal yang ditakutkan adalah berbagai proyek yang mengatasnamakan rakyat tidak lebih dari proyek untuk memperkaya sekelompok elite saja.

Trend yang berkembang adalah seminar di hotel berbintang membicarakan orang-orang kelaparan, sambil makan enak dan tidur nyenyak. Sambil melucu, tertawa-tawa, memperdebatkan, kenapa mereka miskin, kenapa mereka bodoh, dan tidak berubah nasibnya. Ironis. Ketidak-konsistenan antara ucapan dan

tindakan merupakan kontradiksi dari yang diucapkan. Suka atau tidak, aktifitas yang dilakukan oleh anggota HMI juga memperlihatkan gejala-gejala itu, sehingga HMI tidak hanya melahirkan super hero (itu pun jika ada), akan tetapi juga ajang latihan yang menghasilkan pecundang-pecundang di bumi nusantara ini.

H. Orang-orang Pergerakan

Why Men Rebell demikianlah judul buku yang ditulis oleh Robert Gurr yang diterbitkan oleh Princeton University (Robert Gurr, 1970). Sesuai judulnya yaitu “Mengapa Orang Memberontak”, maka buku ini mencoba mengkaji secara seksama faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang memberontak. Salah satu alasan pokok yang dikemukakan oleh Gurr adalah adanya kesenjangan antara keinginan dengan harapan dan realitas yang dikemukakan dalam kehidupan. Kesenjangan seperti ini menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Lama kelamaan orang menjadi frustrasi dan pada puncaknya adalah memberontak terhadap lembaga-lembaga yang sedang berkuasa.

Pemberontakan memiliki tingkatan-tingkatan. Robert Gurr merumuskan tingkatan pemberontakan atas 3 yaitu *Turmoil*, *conspiration* dan *Internal War* (Robert Gurr, 1970). Tingkatan dari pemberontakan ini sangat dipengaruhi oleh pendukung-pendukung gerakan, baik tokoh utama maupun pengikutnya. Contohnya gerakan yang dibuat oleh petani akan berbeda dengan gerakan yang dibuat mahasiswa.

Gerakan petani biasanya lebih bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan petani selalu diikuti oleh letupan sesaat, spontan, tak terencana dan tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas. Gerakan seperti itu lebih mudah dipadamkan oleh penguasa (Sartono Kartodirdjo, 1984). Gerakan petani lebih berarti banyak, jika ada pengaruh ideologi dan tokoh-tokoh yang memasuki gerakan itu. Dalam percaturan politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang sedang bertarung.

Dalam gerakan mahasiswa, ada juga persamaan dengan gerakan petani yaitu mahasiswa melakukan aksi-aksi seperti yang dilakukan petani. Hanya saja, gerakan mahasiswa tidak berhenti sampai di sini saja, ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang besar, gerakan mahasiswa biasanya cenderung melawan arus zaman, arus dari status quo rezim yang berkuasa (Fraois Raillon, 1985).

Hal yang penting dari gerakan mahasiswa adalah setiap gerakan diikuti oleh gerakan pemikiran atau ide. Baik gerakan petani maupun gerakan mahasiswa, keduanya memiliki karakter yang revolusioner. Tentang gerakan ide misalnya Kuntowijoyo menyatakan bahwa ilmu ini sesungguhnya memiliki kekuatan yang revolusioner. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah (Kuntowijoyo, 1985). Dalam konteks inilah dicoba dikaji tentang gerakan mahasiswa, kelompok intelektual yang menjadi harapan dan tumpuan dari kaum lemah ataupun kaum dhuafa untuk memperjuangkan nasibnya.

Tatkala belajar agama di Mekkah pada Akhmad Khatib, Hamka dilarang belajar agama berlama-lama di Mekkah. Terlalu lama di Mekkah hasilnya akan menghapuskan doa-doa yang panjang. Pelajaran yang sesungguhnya haruslah pulang ke Hindia Belanda, tempat yang penuh persoalan dan memiliki tantangan berat. Wilayah yang akan dapat membesarkan dirimu. (Hasilnya adalah Hamka yang kita kenal bersama). Saya tidak bermaksud menyatakan untuk tidak perlu berlama-lama belajar di IAIN, akan tetapi persoalan yang sesungguhnya ada di sekitar kita, dalam masyarakat kitalah yang harus dipahami dan dimasuki.

I. Peta Gerakan Mahasiswa

Ketika Kedung Ombo menjadi salah satu topik dari persoalan bangsa, sekelompok mahasiswa di Boelovard UGM mencoba mengeluarkan pikirannya. Dengan menggelar sebuah aksi yang bertemakan *Non Violent Movement*, (Mingguan *Eksponen* Oktober 1986), mereka mencoba menyerukan keinginan mereka pada penguasa republik ini yaitu dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa, penguasa janganlah menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekerasan. Pernyataan sikap mahasiswa dalam mimbar bebas itu

adalah agar mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam melihat persoalan, sehingga menghadapi persoalan seperti itu tidak terjadi de-humanisme.

Dari tema gerakan mahasiswa di atas terlihat bahwa tindakan kekerasan menjadi hal tabu dalam gerakan itu. Tema gerakan seperti ini sangat mendasar sekali dalam gerakan mahasiswa, karena sebagai kaum intelektual, maupun calon pemimpin bangsa, maka bentuk gerakan seperti itu haruslah dilakukan dengan pikiran yang bersih, tanpa diikuti oleh keinginan yang anarkis ataupun kekerasan. Malari yang terkenal itu, agaknya telah menyimpang atau sengaja disimpangkan dari pola-pola gerakan mahasiswa.

Idealnya suatu gerakan mahasiswa tidaklah berupa gerakan kekerasan, tetapi berbentuk gerakan moral ataupun gerakan intelektual. Sebagai gerakan moral ataupun gerakan intelektual, maka dalam bentuk apapun, penyaluran pikiran menjadi sebuah hak azazi mutlak, hak yang tidak boleh ditindas dan dirampas oleh kekuatan dan kekuasaan apa pun jua. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bukankah begitu jaminan yang diberikan oleh UUD negara republik ini, yang letaknya pada awal dari pembukaan UUD itu.

Jaminan yang diberikan oleh UUD itu haruslah dipahami secara terbuka, terutama oleh pihak penguasa. Dalam hal ini, hal yang paling penting dalam dunia akademik adalah termasuk di dalamnya kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan menyampaikan pendapat secara merdeka. Hanya saja dalam setiap penyampaian pikiran haruslah didukung oleh data-data yang primer. Hal inilah yang menjadi kata kunci dalam mengamati “roh” gerakan mahasiswa.

Mengamati peta gerakan mahasiswa di Indonesia, terlihat bahwa tema central adalah persoalan-persoalan bangsa yang menjadi sorotannya. Mereka membiasakan menghadapi persoalan-persoalan besar dan mengambil peran yang bisa dimainkan di dalamnya. Kedangkala mereka mampu membuat peristiwa besar yang tidak dapat diperhitungkan dan dikendalikan oleh kekuatan apa pun. Ketika Belanda berada di puncak kekuasaannya di Indonesia, sekelompok mahasiswa/anak muda menggelar konggres untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Ketika Bung Karno berada dalam masa jaya-jayanya,

sekelompok mahasiswa turun ke jalan untuk menuntutnya mundur. Gerakan mahasiswa ini menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan, tiada hentinya dan tiada yang mampu mencegahnya. Begitu terjadi pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia, maka bermunculan kelompok-kelompok yang melawan dan menentang pelanggaran itu. Persoalan utama sekarang adalah kelompok manakah atau siapa yang menjadi penggerak dari gerakan itu.

Jika boleh meminjam idiom yang menjadi isu sentral dalam Pekan Sastrawan Nusantara yang baru lalu di Kayu Tanam (1997), bahwa adanya dua kutub dalam dunia sastra yaitu kutub pusat dan kutub pedalaman. Perjuangan seniman -terutama seniman pedalaman- adalah mencoba memasuki lingkaran pusat. Wilayah pusat sebagai wilayah yang terbuka untuk siapa pun yang ingin memasuki, namun tidak bisa ditembus oleh seniman pedalaman. Untuk menembus wilayah pusat yang dibutuhkan hanya tunggal yaitu karya, satu hal yang tidak dimiliki oleh sastrawan pedalaman.

Begitu juga dengan gerakan mahasiswa, ada kelompok yang bergerak di pusat kekuasaan dan ada juga mahasiswa yang bermain di pedalaman. Yang tinggal di pedalaman bermain di pedalaman. Hanya saja yang tinggal di pedalaman tidak terbiasa dengan perputaran hidup yang keras dan tantangan besar, sehingga dalam banyak hal tertinggal dari yang berada di pusat. Ibarat kuda pacuan, yang dimulai pada garis start yang sama, kuda pusat bergerak dan berlari secara konstan menuju titik final. Namun kuda pedalaman hanya stabil seperempat jalan. Setelah itu sudah kehabisan nafas. Berhenti. Mati.

Mengkaji secara seksama persoalan gerakan mahasiswa pedalaman, salah satu faktor penting adalah spirit intelektual dan etos kerja yang dimilikinya. Pada tahap dasar, spirit intelektual yang dimiliki setiap diri haruslah dipertanyakan terlebih dahulu. Hal seperti ini tidaklah terlalu berlebihan, karena spirit intelektual menjadi persoalan mendasar dihadapi oleh mahasiswa pedalaman. Pemikiran dasar adalah mereka hanya sekedar ada dan belum memperlihatkan keberadaan mereka.

Banyak faktor yang melingkari kehidupannya. Berdasarkan latar belakang keluarganya -yang umumnya petani- sebuah latar belakang keluarga yang lemah dalam memiliki tradisi intelektual. Gerakan yang muncul pun memiliki tipikal

gerakan petani yaitu gerakan spontan atau sporadis. Perkelahian antar mahasiswa, perkelahian dengan penduduk setempat, merupakan tipikal dari gerakan mahasiswa yang memiliki latar belakang gerakan petani yaitu gerakan yang dilandasi oleh kekerasan (Kuntowijoyo, 1994).

Pemikiran seperti itu rasanya tidaklah berlebihan, karena keteringgalan gerakan mahasiswa misalnya, tidak terlepas dari rendahnya spirit keilmuan yang mereka miliki. Jika boleh meminjam idiom yang digunakan oleh Weber dalam melihat kemajuan dari bangsa Eropa, kata kunci yang digunakannya adalah *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* (Max Weber, 1958) merupakan faktor penting dari kemajuan yang dicapai oleh negara barat.

Etos kerja dan spirit keagamaan seperti ini boleh dikatakan sangat sedikit dimiliki oleh ilmuan-ilmuan Islam. Studi-studi tentang agama Islam pun memiliki etos kerja ataupun spirit keagamaan seperti yang dimiliki agama Kristen. Studi Taufik Abdullah mencoba membahas tentang Islam di Indonesia dari kacamata tesis Weber (Taufik Abdullah, 1979). Kondisi kontemporer, walaupun ada, itu hanya segelintir dan sibuk pula menjadi birokrat-birokrat (barangkali ICMI bentuk kaum intelektual yang berada dalam “sangkar emas” yang disengaja ataupun yang tidak dibuatnya sendiri).

Saya punya pengalaman yang unik tentang spirit atau etos kerja kaum intelektual di Padang di sebuah tim penelitian dari berbagai lembaga bekerja sama. Dalam proses awal sudah terlihat gambaran kerja setiap orang. Perkembangan dari hari ke hari, satu persatu mulai memperlihatkan watak asli mereka dalam bekerja. Memasuki dan membolak-balik arsip Belanda yang cukup rumit misalnya, mulai terlihat karakter keilmuan yang sesungguhnya.

Ada yang mengutamakan perut, ada juga mengutamakan bagiannya dan ada juga yang diam. Di sisi lain, ada juga yang serius dan gila kerja. Berjalan seminggu, mulai berguguran. Ada yang stres, sakit, dan “tewas”. Persoalannya adalah ketahanan mental, pikiran, tidaklah dimiliki. Etos kerja dan spirit keilmuan mereka sangat lemah, sehingga tidak dapat mengikuti arus kerja, seperti arus kelompok yang serius dan gila kerja. Pada gilirannya, karena tidak dapat survive, orang seperti itu tersingkir atau menyingkirkan diri dari pusaran kehidupan penelitian yang ada.

Kesungguhan dalam bekerja dan berbuat menjadi permasalahan besar, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan intelektual. Artinya, tindakan yang dilakukan tidaklah didukung oleh suatu spirit untuk maju, akan tetapi lebih memenuhi tuntutan sekedar mengisi “daftar hadir”. Orang berbuat, kita ikuti juga. Namun, dalam berbuat, secara konseptual arah yang ditempuh, strategi yang dijalankan dan sasaran yang ingin dicapai tidak pernah dirumuskan secara tegas. Solusinya misalnya adalah memetakan masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa ini. Cari cela yang bisa membuat *action* di dalamnya. Gunakan kesempatan untuk melakukan sebuah manuver, jika dapat sebuah manuver yang historis. Manuver yang akan dikenang sepanjang sejarah.

Lantas bagaimana kita merumuskannya atau apakah yang harus dikerjakan. Sederhananya begini, aborsi misalnya semakin absurd melanda republik, bagaimanakah sikap lembaga-lembaga resmi agama menyelesaikan persoalan ini. Oke, kita lupakan mereka (barangkali mereka lagi sibuk mencari perusahaan yang membutuhkan label halal-haram). Saya pribadi menunggu “fakta dari tuan-tuan dan puan-puan” di sini untuk menyampaikan sikapnya. Lebih dari itu, saya pribadi tidak akan berharap banyak.

Persoalan penting sekarang adalah adanya kevakuman di berbagai faktor di Republik ini. Ketika lembaga yang ada sudah tidak lagi berfungsi dan menjalankan fungsinya, diperlukan lembaga alternatif mengeluarkan sikap dan pikirannya. Dalam konteks ini, jika lembaga seperti MUI tidak mampu mengeluarkan fatwa tentang korupsi, aborsi, suksesi, HAM, dan penyakit masyarakat lainnya, maka sudah semestinya aktivis mahasiswa seperti dari IAIN ini yang turun tangan untuk menyatakan sikapnya.

Benar atau salah *fatwa* itu, urusan belakangan. Satu hal yang penting adalah sikap telah diperlihatkan. Pikiran telah disampaikan. Tanggungjawab moral sebagai kaum muda Islam, kaum muda yang menentukan kehidupan masa depan bangsa sudah dibina dan dipupuk dari sekarang. Tentu saja strategi dan taktik dalam menyampaikan gagasan itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pemahaman terhadap faktor ini menjadi penting, terutama untuk membina kebesaran diri seorang tokoh mahasiswa di masa depan.

Pada gilirannya, mengikuti arus angin, ataukah menaburkannya. Semuanya tergantung pada kata (atau pada kita). Sebagai penutup kata, keterlanaan harus dibangkitkan. Berbagai cara bisa ditempuh, Al-Qur`an agaknya bisa menjadi alternatif utama dalam melihat dan memahami persoalan yang ada. Akhirnya yang dibutuhkan sekarang adalah *action*. Apa pun bentuknya. Seorang bijak menuliskan: Seratus konsep tak bermakna, Seribu teori tidak berguna; Revolusi tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang bermakna”.

J. Rangkuman

Melihat sepak terjang mahasiswa belakangan ini, saya pribadi sepertinya merasa kehilangan kepercayaan. Kepercayaan yang hilang itu mulainya dari keterlibatan aktifis mahasiswa dalam gonjang-ganjing politik praktis, baik terjun ke dunia politik maupun bentuk lainnya seperti memantau pemilu yang baru lalu.

Dengan suara ringan dan tanpa beban, biasanya para elite menggunakan slogan berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal yang seringkali dipertanyakan adalah apakah demi kepentingan rakyat atau demi kepentingan kursi yang diinginkannya. Tidak ada satu pun orang yang terjun ke dunia politik untuk tidak berkuasa. Mereka mendambakan kekuasaan, dan jika perlu kekayaan dan penghormatan, hal yang telah menjadi persoalan klasik terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia.

Untuk mengubah realitas seperti ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Persoalan pokok adalah karakter yang telah mendarah daging dalam pikiran, jiwa dan budaya bangsa. Mengharapkan perubahan secara radikal, merupakan suatu hal yang mustahil. Sartono Kartodirdjo seringkali menyatakan bahwa untuk membangun sebuah gedung berlantai 20 hanya dibutuhkan waktu 2-3 tahun. Namun, membangun budaya ataupun watak bangsa, dibutuhkan 2 sampai 3 generasi. Jika pikiran Sartono Kartodirdjo ini benar, maka elite yang bermain sekarang tidaklah berubah. Perubahan karakter manusia tidaklah mungkin dapat berlangsung secepat membangun sebuah gedung. Dalam konteks ini, penyelesaian secara lebih radikal diperlukan.

Jika Bung Hatta menyatakan bahwa *rakyat yang utama, hidup matinya Indonesia Merdeka semuanya tergantung pada semangat rakyat*, maka Bung

Hatta memperlihatkan ucapannya juga dengan sikapnya. Jelas sekali bahwa Bung Hatta tidaklah memperkaya dirinya ataupun keluarganya. Juga tidak gila dengan kekuasaan. Ia tetap mempertahankan kederhanaan kehidupan keluarganya. Dalam konteks ini, hal yang penting dimiliki oleh seorang pendampingan rakyat adalah sikap sederhana seperti kehidupan rakyat itu sendiri. Jika tidak demikian, sang hero sama saja dengan pecundang, yang pada masa sekarang tumbuh subur di republik ini.

Pada gilirannya, jika Marx benar dalam ucapannya bahwa 100 teori yang canggih, 1000 konsep yang hebat tidak akan dapat menggerakkan masyarakat. Satu tindakan yang bermakna akan dapat membuat revolusi yang sesungguhnya. Barangkali *action* jauh lebih dibutuhkan daripada perdebatan yang tidak ada realisasinya. Sebagai penutup kata, perubahan nasib bagi rakyat lebih banyak ditentukan oleh mereka sendiri, bukan oleh kelompok yang berada di luar mereka. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum jika orang atau kaum itu tidak ingin mengubah nasibnya.

K. Soal-soal Latihan

4. Bagaimana kah corak gerakan dari tokoh-tokoh bangsa di awal pergerakan nasional ?
5. Bagaimanakah ideologi dari tokoh gerakan mahasiswa dan elite politik ?
6. Kenapa dalam setiap generasi melahirkan tokoh besar dan sekaligus juga pecundang besar ?

Bacaan Pilihan

Azyumardi Azra, 2002. **Konflik Baru Antar Peradaban : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Camara, Donm Helder, 2000. **Spiral Kekerasan**. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar

Efrem Silubun dan Pieter Elmas, 2004. **Ken Sa Faak : Benih-Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei**. Yogyakarta : INSIST PRESS

Eko Prasetyo, 2002. **Membela Agama Tuhan : Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global**. Yogyakarta : INSIST PRESS.

- Fransisco Wahono, dkk, 2003. **Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Gurr, Robert, 1971. **Why Men Rebel** Princeton : Princeton University Press.
- Hefner, Robert W., 1999. **Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik**. Yogyakarta : LKIS.
- Loekman Sutrisno, 1997. **Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu**. Yogyakarta : Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta.
- Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Msi, 2004. **Konflik dan Integrasi TNI-AD**. Jakarta : Institute for Policy Studies.
- Mills, C.W. 1967. **The Power Elite**. London : Oxford University Press.
- Mirsel, Robert, 2004. **Teori Pergerakan Sosial**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Otto Syamsudin Ishak, 2003. **Teungku Bantaqiah**. Jakarta : Yappika.
- Sartono Kartodirodjo, 1992. **Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah**. Jakarta : PT Gramedia.
- Scott, C. James. 2000. **Senjatanya Orang-orang Yang Kalah**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Singh, Rejendra **Social Movements : Old and New**. New Delhi : Sage Publications, 2001.
- Suryadi Radjab, 2002. **Indonesia : Hilangnya Rasa Aman**. Jakarta : The Asia Foundation dan PBHI.
- Tahmidy Lasahido, dkk, 2003. **Suara dari Poso : Kerusuhan, konflik, dan resolusi**. Jakarta : Yappika.
- T. Ibrahim Alfian, 1987. **Perang di Jalan Allah**. Jakarta : Sinar Harapan.
- Zaiyardam Zubir, 2006. **Menggugat Minangkabau**. Padang : Unand Press.

BAB VII

DIMENSI ISLAM DALAM TRANSFORMASI POLITIK : SEBUAH PENGAMATAN PERMULAAN

*Matahari terbit sia-sia mencoba menarik bulan sabit
untuk menetap dalam orbitnya.
Bulan sabit terlalu besar
untuk menjadi satelit
yang tidak berbahaya bagi siapapun,
untuk sekedar menjadi sebuah sputnik
(Wertheim).*

A. Deskripsi

Memasuki areal persoalan bangsa, maka secara langsung akan diikuti oleh persoalan umat Islam. Betapa tidak demikian, jumlah dominan dari penduduk bangsa Indonesia ini adalah umat Islam, sehingga persoalan yang dihadapi bangsa terkait erat dengan persoalan umat Islam. Ibarat satu mata uang dengan dua sisinya, tidak dapat dipisahkan. Satu sisi adalah umat Islam, dan sisi lainnya adalah bangsa.

Dari segi ekonomi misalnya, persoalan yang sangat berat dihadapi oleh bangsa sekarang ini sesungguhnya adalah beban yang diderita oleh umat Islam. Meminjam ungkapan Mochtar Lubis dalam wawancara dengan Panjimas, ia katakan bahwa 80 % dari kekayaan Indonesia dipegang oleh 20 % penduduk, sedangkan 20 % sisanya menyebar di kalangan 80 % penduduk lainnya, yang *notabene* adalah umat Islam.

B. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari materi bab ini adalah mahasiswa dapat memahami pergolakan yang terjadi dalam dunia Islam. Dalam pergolakan itu, berbagai elemen masyarakat dan negara terlibat didalamnya seperti tokoh-tokoh Islam, organisasi Islam, tentara dan pemerintah. Hal yang menarik adalah keberadaan kelompok Islam berada dalam situasi itu, yang kadangkala tertindas dan kadangkala menindas. Dalam situasi yang penuh gejolak, spirit Islam kadangkala diartikan berjihad, yang tujuannya melawan pemerintah yang zalim. Dalam kondisi diatas, mereka juga menguasai hampir seluruh denyut kehidupan masyarakat, sebagaimana diperlihatkan oleh ICMI dibawah pimpinan B.J. Habibie.

C. Tujuan Instruksional Khusus

1. Membahas hubungan negara dan Islam dalam sejarah kontemporer Minangkabau
2. Menganalisis gerakan-gerakan Islam lokal di Minangkabau
3. Mengkaji posisi organisasi Islam dalam Dinamika politik bangsa di Minangkabau

D. Perspektif Historis

Sepanjang sejarah dari gugusan kepulauan nusantara ini, Islam sebagai sebuah kekuatan politik sudah lama menancapkan pengaruhnya. Berbagai kerajaan yang bernaung di bawah bendera ideologi Islam pernah mengalami kejayaan pada masa-masa lalu. Dapat dikatakan bahwa Islam sebagai sebuah ideologi politik telah memiliki pengaruh kuat dalam tatanan kehidupan kerajaan ataupun sebuah negara di Indonesia. Hal ini terlihat banyaknya kerajaan yang bernuansa ideologi Islam di kepulauan Nusantara seperti kerajaan Pasai, Perlak, Demak dan Mataram Islam.

Dalam penyebaran ajaran Islam, ketika belum ada kekuatan dari ideologi lain berkuasa dari suatu wilayah, Islam mengembangkan sayapnya. Namun jika ada kekuatan asing menjajah suatu wilayah ataupun ada kekuasaan yang sewenang-wenang yang sedang berkuasa, maka kelompok Islam menjadi kekuatan dominan untuk melawan kezaliman yang berlangsung dalam

masyarakat. Dalam konteks ini ayat yang digunakan oleh pemuka Islam dalam melawan kekuasaan yang zalim adalah ;

Mengapakah kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membebaskan orang-orang yang lemah di antara laki-laki dan perempuan, dan anak-anak, sedang mereka itu berkata: ya Tuhan kami keluarkanlah kami dari negeri yang dianiaya penduduknya dan adakanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang penolong (Al Quran surat An-Nisa ayat 75).

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menelusuri munculnya ayat ini, akan tetapi bagaimana ayat ini dijadikan sebagai ayat untuk memupuk semangat melawan penguasa yang zalim dijalankan oleh kyai atau ulama.

Pemikiran ini tergambar secara jelas dalam sejarah Islam di Indonesia. Kasus Minangkabau misalnya, ketika pemerintah Kolonial Belanda mulai berkuasa, maka ulama secara terang-terangan melawan kekuasaan ini. Jika penghulu merupakan perpanjangan tangan kekuasaan Belanda untuk menjalankan berbagai kepentingan kaum penjajah, maka ulama dengan basis surau merupakan kekuatan yang sangat ditakuti oleh Belanda. Lebih jauh Young menulis; para pemimpin agama senantiasa dicurigai dan sering dilihat dengan rasa cemas oleh pegawai pemerintah (Kennet R. Young, 1988 : 142).

Perkembangan Islam di Minangkabau selanjutnya memang memperlihatkan dinamika tersendiri. Dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan agama Islam ini muncul sebuah dialog yang terus menerus untuk mencari sebuah bentuk yang ideal, terutama antara agama Islam dengan adat setempat. Kayam menyebutkan bahwa sintesa budaya Minangkabau menjadi idiom budaya dalam memahami konsep kemajuan dalam konteks *beamstenstaat* (Umar Kayam, 1989:23). Kaum modernis Islam, yang memiliki pengaruh besar membangun jaringan sekolah yang sekaligus berorientasi kepada “kemajuan” dan iman. Iman dan akal dijadikan semboyan perjuangan untuk mencapai kemajuan (Taufik Abdullah, 1972).

Dalam masa-masa perjuangan inilah ideologi Islam menimbulkan sebuah pergolakan agama yang berlangsung secara luar biasa di Minangkabau. Schrieke menyebutkan bahwa Islam merupakan sumber dari pergolakan agama yang

berlangsung di Sumatera Barat (B.J.O. Scrieke, 1973). Pergolakan ini tidak hanya dilakukan oleh golongan agama, tetapi secara tegas ia memiliki pendukung-pendukung yang radikal, terutama dari kalangan angkatan muda Islam. Kasus yang menarik adalah Sumatera Thawalib tahun 1930-an. Semarak dalam aktifitas politik yang dimainkan oleh kaum muda Islam di Minangkabau tahun 1930-an, Taufik Abdullah menyatakan bahwa laporan politik yang berasal dari Minangkabau satu banding enam dengan daerah lainnya. (Taufik Abdullah, 1971).

Alasan objektif untuk mengambil contoh Islam yang terdapat di Minangkabau adalah dinamika yang pernah diperlihatkan oleh pendukung ideologi agama itu sendiri. Artinya pada masa jayanya, pengikut ajaran Islam di Minangkabau baik ulama maupun umatnya memiliki pengaruh yang sangat kuat, sehingga diperhitungkan oleh kawan dan lawan politiknya.

Kondisi itu sudah tidak berlaku lagi dalam perkembangan Islam kontemporer di Minangkabau dewasa ini. Kasus pengurus ICMI pusat agaknya merupakan fenomena menarik dari Islam kontemporer di Indonesia, terutama perhatian dari pihak orang-orang pusat terhadap elite Islam di ranah Minangkabau ini.

Melihat eksistensi elite Islam Minangkabau, ketika terbentuknya ICMI tahun 1990 yang lalu, tak ada satu pun tokoh Islam di Sumatera Barat yang menjadi pengurus pusat. Ketika hal itu saya tanyakan pada seorang rektor sebuah universitas yang memiliki bendera Islam, ia jawab “kan ada Emil Salim dan Azwar Anas”. saya jawab, bahwa mereka sudah menjadi elite pusat. Bandingkan misalnya dengan elite lokal Imaddudin dari Bandung, Asmah Affan dari Medan, ataupun Amin Rais dari Yogyakarta sebagai orang daerah, sang rektor tidak menjawab dan hanya melongos saja. Hal penting yang ditekankan di sini adalah Minangkabau sebagai wilayah yang pernah memproduksi elite Islam dalam skala nasional dan internasional telah dilupakan dan terlupakan oleh sejarah.

E. Persoalan bangsa adalah problem Ummat Islam

Melihat dari peta perjalanan umat Islam sejak awal perjuangan merebut kemerdekaan sampai dewasa ini, kelompok ini selalu memainkan peranan

penting. Studi zaman Jepang yang dilakukan oleh Benda memperlihatkan kekuatan dari Islam. Wertheim, dalam kata pengantarnya tentang studi zaman Jepang yang dilakukan oleh Benda memperlihatkan kekuatan dari Islam. Wertheim, dalam kata pengatarnya tentang studi Benda menyebutkan; Apa pun politik yang dijalankan terhadap Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari keinginan mereka. Kekuatan-kekuatan dunia sedang mencoba mempergunakan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Pada gilirannya, mereka akan dimanfaatkan oleh para politisi Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat berbeda dengan tujuan kekuatan dunia itu sendiri (Harry J. Benda, 1980: 10). Selanjutnya dengan puitis Wertheim menuliskan :

Matahari terbit sia-sia mencoba menarik bulan sabit untuk menetap dalam orbitnya. Bulan sabit terlalu besar untuk menjadi satelit yang tidak berbahaya bagi siapa pun, untuk sekedar menjadi sebuah *sputnik* (Wertheim).

Matahari terbit sebagai simbol dari kekuasaan tentara kependudukan Jepang di Indonesia dalam tahun 1945 memang mengalami kegagalan total. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, Bulan Sabit berhasil menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh matahari terbit untuk mencapai tujuannya. Namun setelah tujuan tercapai, berbagai persoalan intern muncul di kalangan Islam seperti sumber daya manusia, konflik intern, ataupun kesiapan untuk mengisi kemerdekaan sehingga merdeka, kelompok Islam mengalami kegagalan untuk “memberi warna Islam” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini kembali terjadi ketika pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru dalam tahun 1963.

Pergantian musim yang berlangsung di Republik ini tahun 1960-an yang lalu, kelompok Islam sesungguhnya memiliki modal besar dalam pergumulan politik itu. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh rezim saat itu membuat umat Islam, yang didukung oleh tentara berjihad melawan rezim yang ada.

Untuk memobilisasi kekuatan massa seperti itu, maka ulama ataupun elite Islam memiliki strategi, taktik, dan ketrampilan yang luar biasa. Biasanya mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang berbau jihad seperti diungkapkan pada bagian awal (surat An-Nisa ayat 75), maka umat bersedia secara langsung untuk

berjihad di jalan Allah. Jika Kyai atau Ulama sudah menyatakan untuk berperang, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu untuk membelokkan ataupun mengubah semangat untuk mati itu.

Islam berkembang dalam bentuk formulasi normatif. Pola seperti ini kemudian berkembang dalam bentuk Islam sebagai sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi, maka hal yang penting adalah mobilisasi lewat partai-partai politik (Kuntowijoyo, 1985: 26).

Sekali lagi, satu hal yang sangat penting ditegaskan bahwa sebagai kekuatan *pendobrak tirani yang zalim*, pontesi umat Islam tidak dapat disangsikan lagi keberadaannya. Kekuatan Islam dengan jihadnya akan dapat mendobrak ataupun melabrak apa saja, tanpa memiliki rasa takut sedikit pun di dalamnya. Jihad fisabilillah menjadi ungkapan yang teramat populer di kalangan umat Islam. Mereka ini biasanya berasal dari kelompok Islam petani ataupun kalangan pesantren. Hasil nyatanya adalah tumbangnya rezim yang lama dan masuknya Orde Baru, orde yang diharapkan sangat dapat memberi harapan yang cerah bagi kehidupan bangsa.

Namun setelah berhasil menjatuhkan rezim yang zalim itu misalnya, untuk mengisi selanjutnya umat Islam memiliki kelemahan yang sangat besar sekali. Kelemahan utama adalah umat Islam tidak memiliki tenaga yang terampil dan profesional. Masalah utama adalah mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga umat Islam tidak memiliki tokoh-tokoh yang mampu menjadi elite, terutama elite intelektual yang profesional dalam berbagai bidang pemerintahan.

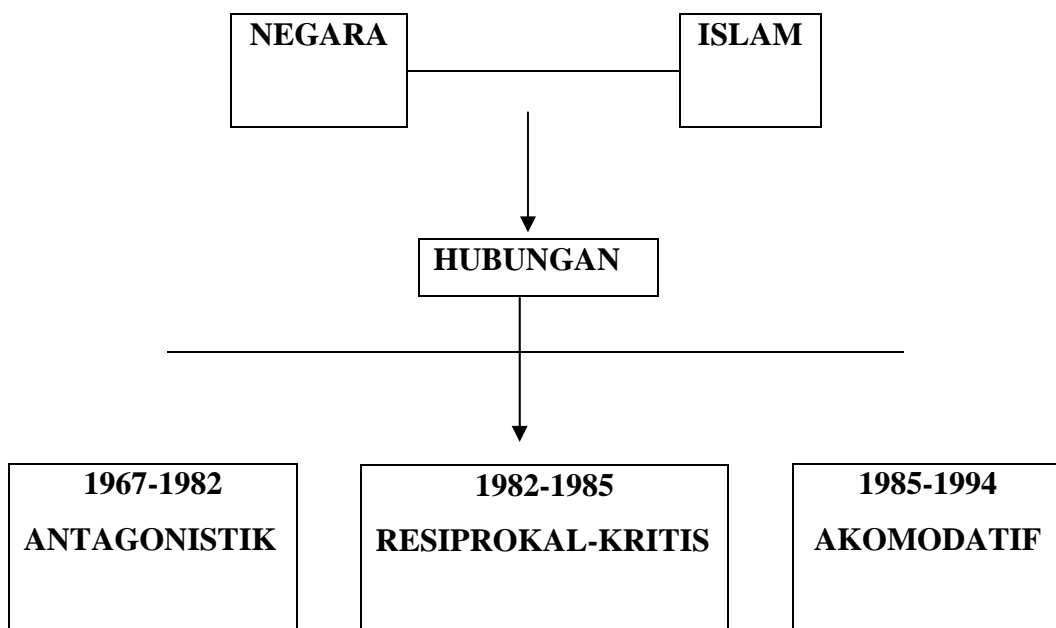
Masalah utama dalam konteks ini adalah sedikitnya umat Islam yang sempat mendapat pendidikan tinggi, sehingga pos-pos penting itu diisi oleh non Islam. Walaupun ada yang beragama Islam banyak duduk di pemerintahan misalnya, namun komitmen keIslamannya seringkali dipertanyakan. Artinya, ketika ia menduduki sebuah jabatan, apakah ia duduk dalam rangka mengabdikan kepada Allah atau dalam rangka mengabdikan kepada rezim yang sedang berkuasa.

Penekanan pada bagian ini penting, karena dalam sepanjang sejarah Republik ini, pergantian sebuah rezim, pos-pos penting dalam pemerintahan banyak diisi oleh kekuatan non Islam. Kondisi ini secara langsung maupun tidak

langsung menempatkan Islam sebagai kekuatan pinggiran yang tidak diperhitungkan.

Hal ini juga berlangsung dalam perkembangan Islam kontemporer. Mengamati peta kekuatan Islam dalam tiga dekade terakhir di Indonesia misalnya, Abdul Azis merumuskannya atas tiga periode dalam melihat hubungan negara dengan Islam di Indonesia. Ketiga periode yaitu periode pertama 1967-1982, periode kedua 1982-1985, periode ketiga 1985 sampai dewasa ini (Abdul Azis, 1995: 202-203). Bagan yang terdapat di bawah ini mencoba menerangkan periodisasi dari hubungan Islam dan negara sejak berlangsungnya orde baru di Indonesia.

F. Hubungan Negara Dengan Islam Periode 1967-1994



Sumber : Abdul Azis, "Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru 1966- 1994, dalam *Berkala Penelitian Pasca Sarjana UGM*, jilid 8 Nomer 2 A, Mei 1995.

Melihat periodisasi yang dirumuskan oleh Abdul Azis di atas, sejarah umat Islam Indonesia tidak dapat dilihat secara kaku. Periodisasi ini haruslah dilihat secara fleksibel, karena ada beberapa hal penting yang tidak sesuai dengan realitas dan juga generalisasi sejarah tidak bisa berlaku begitu saja.

Pada periode pertama hubungan umat Islam dengan negara merupakan hal yang menonjol adalah sifat antagonistik. Tahap ini seringkali terjadi pertentangan-pertentangan yang keras antara kelompok Islam dengan penguasa. Walaupun demikian, tetap saja ada dari tubuh umat Islam yang memiliki hubungan yang harmonis, terutama organisasi-organisasi keagamaan yang dibentuk atau di bawah organisasi pemerintah.

Periode kedua, sifat antagonistik mulai menipis dan secara perlahan-lahan penguasa mulai mengurangi rasa kecurigaan dan mencoba memahami potensi dan posisi masing-masing. Hal yang menonjol adalah ketegangan konseptual, terutama masalah azas tunggal. Namun pada periode ini juga berlangsung konflik tajam antara umat Islam dengan negara yaitu peristiwa berdarah di Tanjung Priuk tahun 1984.

Periode ketiga bersifat akomodatif, hubungan yang saling menguntungkan. Periode ini ditandai mulainya pemerintah melihat Islam sebagai kekuatan yang perlu dirangkul. Kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki komitmen Islam yang kuat dari alumni angkatan 66 menandai hubungan yang mesra antara negara dengan kekuatan Islam (Abdul Aziz, 1995: 202-203).

Dalam tahap ini, perkembangan Islam sampai pada tahap sebagai sebuah ide atau ilmu. Kunci pokok dalam era Islam sebagai ide adalah kesadaran masyarakat. Sasaran utama bukan lagi negara, akan tetapi lebih mengutamakan pada sistem yang rasional, sehingga negara melalui sistem yang ada itu dapat melindungi masyarakat (Kuntowijoyo, 1985 : 27).

Dalam era ini, tokoh-tokoh Islam mulai memainkan peranan penting dalam percaturan politik bangsa. Tokoh-tokoh seperti Mar'ie Muhammad, Tarmidzi Taher, Fadel Muhamad, Fahmi Idris, Amin Rais, Imaduddin merupakan tokoh Islam yang tidak diragukan lagi perjuangannya membela Islam.

Hal yang penting bagi umat Islam dewasa ini adalah bagaimana menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang di Republik dewasa ini. Artinya, jika kondisi sekarang ini memang menguntungkan atau akomodatif bagi umat Islam, baik secara ekonomi, politik, hukum maupun bidang lainnya, maka sudah pada tempatnya seluruh potensi umat diarahkan untuk mendukung rezim yang berkuasa. Namun sebaliknya, jika penguasa hanya menggunakan Islam sebagai

kekuatan penyanggah, agaknya diperlukan pemikiran alternatif dalam menghadapi dan menyikapi kondisi yang tengah berlangsung sekarang ini, sehingga umat Islam tidak hanya sebagai batu sandaran saja.

G. ICMI dan Masa Depan Umat Islam

Seorang yang memiliki tingkat kesadaran keimanan Islam yang fanatik akan menentang secara tegas jika dikatakan bahwa masa depan umat Islam akan sangat tergantung kepada ICMI. Mereka katakan bahwa masa depan umat Islam sangat tergantung kepada Sang Mahapencipta Allah SWT, bukan kepada organisasi seperti ICMI. Di balik persoalan itu, hal yang menarik adalah kehadiran ICMI membawa angin segar dalam peta perkembangan umat Islam Indonesia.

Sebagai langkah nyata yang telah dijalankan oleh ICMI, bahwa mereka memiliki CIDES, surat kabar, majalah, dan lainnya. Hal penting lainnya adalah ICMI berhasil mengumpulkan elite-elite Islam dari berbagai kalangan seperti orang kampus, pengusaha, penguasa, seniman, ulama, dan aneka aliran politik. Kehadiran ICMI menjadi penting karena dalam periode akomodatif ini, pemerintah yang selama ini menempatkan intelektual Islam di luar koridor kekuasaan, maka dengan kelahiran organisasi ini akan sangat berperan sebagai sarana untuk memperjuangkan partisipasi umat Islam di segala bidang, secara lebih luas (Mohammad Maiwan, 1997: 16).

Pemerintah juga memiliki keinginan besar dengan berdirinya ICMI. Bagi pemerintah sendiri, dengan merestui ICMI dan mengizinkan salah seorang tangan kanannya menjadi ketua umum, maka pemerintahan regim Soeharto berharap akan memperoleh apresiasi yang lebih positif sekaligus “sayap baru” dukungan dari kalangan mayoritas (Mohammad Maiwan, 1997 : 23).

Melihat kondisi yang tengah berkembang dewasa ini, terutama kuatnya tuntutan terhadap reformasi dalam tubuh pemerintah, maka umat Islam secara konseptual haruslah secepatnya merumuskan agenda jangka pendek. Situasi yang berkembang dewasa ini seperti sulit untuk diduga. Misalnya, ketika tuntutan masyarakat untuk menurunkan harga, pada saat yang sama pemerintah justru menaikkan harga minyak. Suatu tindakan yang sulit untuk dipahami secara akal

sehat. Tindakan pemerintah ini pada akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan.

Persoalan utama adalah hukum pasar. Hukum pasar adalah jika minyak naik, maka secara otomatis seluruh harga barang juga naik. Sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan harga yang berlangsung di pasar, sehingga beban kehidupan masyarakat semakin berat, terutama yang dominan umat Islam. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai calon intelektual seharusnya memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa.

Apa pun bentuknya, sikap peduli mahasiswa seperti ini telah menjadi modal bagi mahasiswa bagi kehidupannya dimasa yang akan datang. Tanpa ada sikap itu, sulit membayangkan generasi muda yang akan dihasilkan nantinya. Tentang kepedulian mahasiswanya, saya ingin mengemukakan tiga kisah pendek di bawah ini yaitu ;

Kisah pertama, saya punya adik yang kuliah di FMIPA Unand. Secara intelektual, ia memiliki kemampuan yang tinggi. IP bagus, tamat cepat, namun demikian, ada hal yang seringkali membuat saya pusing. Selain urusan zat-zat kimia, ataupun alat-alat praktikum di laboratorium, ia tidak memiliki keterampilan lainnya.

Secara bergurau, seringkali saya katakan bahwa untuk pergi ke Pasar Raya saja ia tidak bisa. Namun, jika jengkel, ungkapan populer yang saya katakan adalah bahwa jika tamat nantinya, lowongan kerja yang cocok adalah di laboratorium. Masuk jam 8 pagi, jam 12 siang di dikasih makan, dan kemudian jam 4 sore dikeluarkan. Selama bekerja di dalam laboratorium, biarkanlah ia sibuk dengan mengaduk-aduk zat kimia, ataupun bercengkrama dengan tikus, monyet, ataupun kelinci percobaan yang dimilikinya. Urusan-urusan yang berlangsung di luar, tidak ada dalam kamusnya, tak masuk dalam memorinya.

Kisah kedua adalah masih mahasiswa Teknik Kimia, di UGM Yogyakarta. Sebut saja namanya Taufik Rahzen yang juga kuliah di Teknik Kimia. Secara intelektual, ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun ia memiliki orientasi yang berbeda dengan kisah mahasiswa yang dituturkan pertama tadi. Jika kisah pertama yang ada dalam otaknya adalah zat-zat melulu, maka pada kisah kedua di bawah ini yang ada di otaknya adalah demonstrasi melulu. Tidaklah heran, ia

mampu memobilisasi mahasiswa sampai dua puluh lima ribu orang untuk turun ke jalan.

Jangan harapkan ia memiliki buku-buku yang berbau kimia. Di tangannya selalu saja bertengger buku-buku sosial, politik, filsafat, sejarah dan sastra. Zat-zat kimia tidak memberi inspirasi apa pun juga, begitu ungkapan yang seringkali diucapkannya kepada teman-teman sekelasnya. Akhirnya, bidang perkuliahan yang ia masuki terbengkalai dan ia memasuki dunia politik kampus dan menempatkan dirinya sebagai tokoh penting di dalamnya.

Dalam satu lomba yang diadakan oleh Departemen Koperasi, ia berhasil menjadi juara pertama. Bustanul Arifin menawarkannya sebagai staf ahli di lembaga itu. Berkaitan dengan kuliahnya - tanpa maksud membela - perlu ditegaskan di sini bahwa ia memilih keluar dari teknik kimia bukan karena bodoh, ataupun tidak mampu mengikuti kuliah, akan tetapi lebih pada pilihan hidupnya. Pada saat sekarang ini, Taufik Rahzen lebih dikenal sebagai seorang budayawan muda yang terkemuka di Indonesia.

Kisah ketiga adalah kisah alumni Filsafat UGM mencari kerja. Ketika iklan pada majalah terkemuka membuka lowongan untuk menjadi direktur BPR, dengan yakin ia melamar. Tahap demi tahap test dilaluinya. Banyak yang berguguran di sepanjang jalan. Sampai pada tahap wawancara, pemilik modal menanyakan, bagaimana mungkin alumni filsafat bisa menjadi direktur bank. Dengan ringkas dan santai saja, alumni filsafat itu menjawab “saya lulusan terbaik, dari universitas yang terbaik di Republik ini”.

Seminggu setelah test, ia menerima panggilan untuk mengisi job yang dilamarnya. Melalui training 1 tahun, jadilah ia manager BPR yang terkemuka. Di balik cerita, pemilik modal berani mempertaruhkan modalnya karena pernah menjadi aktivis kelas berat di kampusnya.

Sebagai aktivis ia terbiasa mengurus aneka ragam persoalan, sehingga mengurus bank bukanlah pekerjaan besar baginya. Bukankah ia seringkali berdialog dengan aneka ragam orang, mulai rakyat kecil sampai Pronk, bos IGGI yang terkenal itu. Bukankah koran memuat namanya ketika berbeda pendapat dengan Pronk, dan memujinya setinggi langit.

Dari ketiga kisah kehidupan mahasiswa yang diceritakan di atas tergambar secara jelas bagaimana lakon kehidupan mahasiswa, sebagai persiapan untuk menyongsong masa depan bangsa dan figur-figur yang akan menata hari depan bangsa. Kisah pertama merupakan kisah yang diinginkan oleh banyak pejabat kita bahwa mahasiswa belajar sajalah. Tugasnya sekarang hanyalah menuntut ilmu. Hanya saja, kelompok ini seringkali terpisah dari kehidupan masyarakat. Mahasiswa itu tidak mengenal bangsanya, tidak memahami persoalan bangsanya. Jika tidak terbiasa, maka bagaimana mungkin ia menjadi elite di Republik ini dan ketika menjadi pemimpin di masa depan, ia tidak memahami aspirasi rakyatnya.

Persoalan berikutnya adalah Agenda Jangka Panjang juga telah harus dipikirkan oleh elite Islam. Artinya, jika persoalan yang sedang berlangsung sekarang ini selesai (semua kita tentu berharap secepatnya tuntas), maka periode berikutnya percaturan elite akan kembali berlangsung. Pengalaman yang sudah-sudah haruslah disadari sekali, meminjam ungkapan dalam idiom kebudayaan Minangkabau *mamaga karambia condong*, [*memagar pohon kelapa yang condong*], jangan sampai terulang kembali. Islam yang berjuang, namun hasilnya dinikmati oleh orang lain.

Melihat peta politik yang berkembang dewasa ini, agaknya desakan untuk berpartisipasi secara nyata bagi politisi Islam pada tingkat pengendali kekuasaan harus lebih besar. ICMI sesungguhnya telah memperlihatkan hasil nyata, yaitu kemenangan Habibie sebagai Wakil Presiden. Satu hal yang pasti adalah ICMI merupakan salah satu tiang dari kekuasaan di Indonesia. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Habibie merupakan salah seorang tokoh penting dan punya akses politik besar di negara ini (Mohamad Maiwan, 1997: 23).

H. Rangkuman

Fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri adalah umat Islam memainkan peranan penting dalam pendirian Republik ini. Tahun 1945 misalnya, sebanyak dua juta umat Islam di Jawa Timur menyediakan diri untuk berjihad mempertahankan Republik ini dari serangan tentara sekutu. Begitu juga dalam tahun 1965, umat Islam juga turut memiliki andil besar dalam menumbangkan Orde Lama.

Kekuatan Islam terletak dalam kemampuannya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Hanya saja, melihat kondisi internal sejarah Islam di Indonesia, di balik kekuatan itu tersimpan kelemahan dasar. Adapun persoalan utama umat adalah bagaimana mengisi dan memainkan peranan dalam sebuah negara yang merdeka. Dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah kaum intelektual, bukan hanya seorang politikus saja. Kaum intelektual yang memiliki berbagai keahlian dan menjadi profesional di bidangnya.

Pada akhirnya, dengan memiliki dasar moral agama Islam yang kuat, diharapkan pada negara yang dominan pemeluk agama Islam ini dapat berjalan pemerintah yang bersih. *Baidatun Warabun Gafur*.

I. Soal-soal Latihan

4. Bagaimana hubungan negara dan Islam dalam sejarah kontemporer Minangkabau ?
5. Bagaimana gerakan-gerakan Islam lokal di Minangkabau ?
6. Bagaimana posisi organisasi Islam dalam Dinamika politik bangsa di Minangkabau ?

Bacaan Pilihan

Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, 2001. **Atasi Konflik Etnis**. Yogyakarta : Global Pustaka Utama.

Azyumardi Azra, 2002. **Konflik Baru Antar Peradaban : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Efrem Silubun dan Pieter Elmas, 2004. **Ken Sa Faak : Benih-Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei**. Yogyakarta : INSIST PRESS

Eko Prasetyo, 2002. **Membela Agama Tuhan : Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global**. Yogyakarta : INSIST PRESS.

Emilianus Afandi, 2005. **Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan**. Jakarta : European Union dan PBHI.

Hefner, Robert W., 1999. **Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik**. Yogyakarta : LKIS.

- Mills, C.W. 1967. **The Power Elite**. London : Oxford University Press.
- Mirsel, Robert, 2004. **Teori Pergerakan Sosial**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Muhidin M. Dahlan, “Gerakan Nirkekerasan Dibawah Bayang-bayang Utopia”, dalam **Jurnal Wacana** No. IX/2002, hal. 123-124.
- Otto Syamsudin Ishak, 2003. **Teungku Bantaqiah**. Jakarta : Yappika.
- Shaw, Martin, 2001. **Bebas dari Militer**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Singh, Rejendra **Social Movements : Old and New**. New Delhi : Sage Publications, 2001.
- T. Ibrahim Alfian, 1987. **Perang di Jalan Allah**. Jakarta : Sinar Harapan.

BAB VIII

TIADA HARI TANPA ILLEGAL LOGGING : Masalah Eksploitasi Hutan DI Sumatera Barat ²

*Orang tua itu berkata
Jangan gunduli juga hutan itu
Nanti ia marah*

*Mereka tak peduli
Bahkan menjadi-jadi*

*Dengan angkara murka
desa dihanyutkan oleh air bah
yang menghabiskan seisiinya
hutan marah tiada terkira*

A. Deskripsi

Dalam budaya Minangkabau, setiap jengkal tanah yang terdapat di wilayah ini sudah ada pemiliknya. Tanah itu dapat diurutkan dari sawah, ladang, hutan dan rimba (A.A. Navis, 1985). Pada tiga bagian pertama yaitu sawah, ladang dan hutan, maka tanah bagian ini masih terpelihara dan terjaga dengan baik. Namun, pada rimba-rimba yang terdapat di Sumatera Barat, eksploitasi habis-habisan tidak dapat dihindari. Bahkan, kondisi ini sudah sangat memprihatinkan sekali, sehingga sulit untuk mendapatkan hutan yang masih perawan.

² Dalam penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan dari beberapa LSM yang concern dengan masalah hutan seperti ; LSM LILIN, PBHI Wilayah Sumbar, dan Walhi Sumatera Barat.

B. Manfaat

Manfaat utama dari materi ini adalah mahasiswa dapat memahami fenomena illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat. Persoalannya adalah dampak yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu, yang tidak hanya merusak hutan dan seisinya. Lebih jauh lagi adalah dampak yang ditimbulkannya seperti banjir bandang, yang seringkali menimpa masyarakat sekitar. Akibatnya adalah banjir itu tidak pandang bulu, sehingga mereka yang tidak menbang hutanpun secara membabi buta, juga kena dampak banjir itu.

C. Tujuan Instruksional khusus

1. Mahasiswa dapat memahami makna hutan bagi masyarakat
2. Mahasiswa dapat mengkaji dampak kerusakan hutan
3. Mahasiswa dapat menganalisis keterlibatan oknum pemerintah dalam illegal logging

D. Prolog

Sekali tempo, seorang teman dari Belanda ingin melihat Harimau Sumatera yang berkeliaran. Kakeknya -pernah bekerja sebagai ambtenar zaman Kolonial Belanda di Sawahlunto- bercerita bahwa ; di malam hari, harimau berkeliaran masuk kampung ke luar kampung di Sawahlunto Sijunjung. Cerita kakeknya ini menimbulkan keinginannya untuk melihat harimau yang hidup di alam bebas. Ketika saya katakan kepadanya bahwa itu zaman Belanda, dimana hutan dan rimba raya belum terjamah sepenuhnya oleh tangan-tangan jahil manusia, bulldozer maupun senso, maka sekarang jangan berkhayal akan melihat mahluk rimba raya itu lagi. Dapat dikatakan bahwa pada masa itu, tingkat kebutuhan terhadap kayu yang masih sangat rendah dan belum adanya senjata-senjata berat untuk menaklukkan hutan, sehingga rimba raya masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem mahluk hidup seperti harimau.

Sumber : Surat kabar mingguan **Zaman**, 23- 2 Maret 20201

Dalam tiga dekade belakangan ini, untuk mendapatkan hutan yang masih perawan di Sumatera Barat, maka sama saja susahnyanya untuk melihat harimau yang hidup di alam bebas. Persoalan pokok adalah wilayah kehidupan harimau yaitu rimba raya seperti yang terdapat di Solok, Payakumbuh, Sawahlunto, Sijunjung, Pesisir Selatan, dan Pasaman terkikis habis ditebangi oleh manusia. Berbagai alat-alat berat dikerahkan, bermacam senjata penebang kayu digunakan dan truk-truk raksasa siap membawa kayu milik para pengusaha itu keluar dari rimba, sehingga sulit untuk menemukan hutan rimba yang tersisa. Dalam konteks inilah akan dikaji persoalan *illegal logging* yang berlangsung di Sumatera Barat, sebagai penyebab utama dari terjadinya *deforesitas* rimba raya yang terdapat di Sumatera Barat.

E. Pemetaan Hutan di Sumatera Barat

Beberapa kabupaten di Sumatera Barat sampai sekarang ini sesungguhnya masih memiliki hutan. Wilayah yang masih memiliki rimba raya seperti Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Mentawai. Di kabupaten-kabupaten yang masih memiliki rimba raya, ini juga terdapat hutan lindung. Di Pasaman hutan lindungnya adalah Rimbo Panti, di Sawahlunto Sijunjung yaitu hutan Lubuk Tarok, di Pesisir Selatan yaitu Taman Nasional Kerinci .

Pada wilayah-wilayah yang dilindungi ini, persoalan penebangan kayu secara illegal juga masih terjadi. Polemik aktivis Lilin dengan Siu, seroang pengusaha kayu misalnya dalam penebangan kayu di hutan lindung Lubuk Tarok, Sawahlunto Sijunjung dikatakannya bahwa pencurian secara besar-besaran berlangsung secara aman dan dikendalikan oleh oknum aparat yang bernama Damanhuri berpangkat serma. Kayu illegal itu kadangkala mencapai 23 truk. Pada gilirannya, persoalan penebangan kayu di hutan lindung seperti ini sudah menjadi pemandangan keseharian di Hutan Lubuk Tarok itu. Dari illegal logging yang terjadi ini, diperkirakan hutan lindung di kawasan Sawahlunto ini telah ditebang sebanyak 12 ribu hektar (Mingguan **Canang**, 7 Desember 2000).

Di Mentawai, berbagai persoalan pengrusakan hutan juga terjadi setiap harinya. LSM Lilin mendesak pemerintah untuk menolak memberi izin kepada PT Salaki Summa Sejahtera untuk beroperasi di Mentawai (harian **Singgalang**, 6 April 2001). Untuk beroperasi di Mentawai, PT SSS ini mengantongi izin langsung dari Gubernur. Namun ada dugaan kuat bahwa dalam pemberian izin Gubernur telah menerima bagiannya (harian **Semangat Demokrasi**, 6 April 2001).

Polemik antara LSM Yayasan Citra Mandiri dengan Koperasi Andalas Madani masalah HPH di Siberut juga menjadi polemik berkepanjangan. Bahkan, polemik kedua ini sudah mencapai tindakan kekerasan, sehingga dalam suatu demonstrasi, sebanyak 29 orang penduduk dan aktivis YCM ditangkap. Dalam kasus ini, koperasi yang seharusnya menikmati hasil tebangan juga tidak mendapatkan bagian yang jelas, karena mereka juga menyerahkan kepada pengusaha untuk membabat hutan itu, sehingga yang diuntungkan hanya pengusaha itu. Namun, akibat pembabatan hutan oleh pengusaha itu, koperasi itulah yang menanggungnya. Sementara itu, bagi masyarakat juga mendapatkan beban yang sangat berat karena penebangan itu membuat 7 anak sungai berubah jalannya. Di musin hujan, maka banjirpun merupakan pemandangan baru yang tidak dapat dielakkan di perkampungan disekitar wilayah HPH milik koperasi Andalas Madani itu.

Ditempat lainnya, Apeng, seorang raja kayu di Pesisir Selatan merupakan pelaku illegal logging yang terkemuka di Sumatera Barat saat ini. Hanya saja, kapasitas sebagai penebang kakap menempatkannya sulit dijangkau oleh tangan-tangan hukum. Bisa jadi 2 atau 5 truk kayu milik apeng di tangkap. Namun, sang raja sendiri tidak pernah ditangkap karena keterlibatannya dalam persoalan *illegal logging*.

Bahkan simbol-simbol agamapun digunakan oleh pengusaha untuk memudahkan penggarapan kayu. PT Bukit Raya Midusa, misalnya memakai nama Pesantren Suamtera Thawalib dan Diniyah Putri Padang panjang untuk mengarap hutan. Pada PT ini diduga anak gubenur memiliki saham dan menjadi salah seorang direkturnya. Dengan dalih mendukung program pesantren, maka PT ini membabat hutan untuk mencari keuntungan bagi pimpinannya. Pada hal, hutan

yang dibabatnya itu merupakan hutan penyangga atau daerah tangkapan air hujan untuk mengatur keseimbangan aliran air menuju sungai Batang Hari (Tabloid **Bijak**, 13 -19 November 2000).

F. Hukum Nasional dan Hukum Adat

Pada wilayah diatas, dalam setiap harinya terjadi *deforesitas* atau kehilangan hutan. Pokok persoalan adalah adakah hukum yang melindungi hutan-hutan yang terdapat di Sumatera Barat. Dalam konteks ini, ternyata ada dua bentuk hukum yang berlaku yaitu hukum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hukum adat yaitu hukum yang telah berlaku berabad-abad lamanya. Titik persoalan adalah pola pemilikan tanah yang terdapat di Sumatera barat – yang termasuk dalam wilayah kebudayaan Minangkabau.

Adakah undang yang melindungi hutan itu. Afrizal, Ketua komisi B DPRD Tk. I sumbar mendesak pemerintah propinsi Sumatera Barat untuk membuat rancangan Perda Tentang Pengaturan Hutan di Sumbar (surat kabar **Pos Metro**, 22 Maret 2002). Dalam penguasaan hutan, Pemerintah masih bersifat sentralistik, sehingga diperlukan perda tentang masalah hutan ini. Pada gilirannya, berbagai HPH yang ada sekarang ini harusnya dicabut saja, sehingga pengendalian hutan dapat berjalan dengan semestinya.

G. Trio Penjarah : Pengusaha, penguasa dan polisi

Ternyata, persaoan kayu bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Persoalan ini merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Ibarat sebuah rantai, maka matanya cukup banyak, sehingga penghilangan satu mata rantai tidak menutas persoalan. Setidaknya, mata rantai dalam persoalan kayu adalah pengusaha, penguasa dan polisi. Ketiga kelompok ini memiliki kekuatan masing-masing dalam bisnis illegal ini.

Pihak pertama yaitu pengusaha. Bagi pengusaha, hal yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk memperoleh itu, sang pengusaha akan melakukan jalan apa saja. Penyogokan, penipuan, penebangan secara liar dan akibat dari kerjanya tidak menjadi persoalan bagi pengusaha. Persoalan mereka hanya tunggal yaitu mendapatkan keuntungan

sebesar-besarnya. Untuk mengerem nafsu pengusaha ini, setidaknya ada dua lembaga yang dapat mengendalikan yaitu penguasa dan polisi.

Pihak kedua adalah penguasa. Penguasa adalah kelompok yang paling bertanggungjawab dalam persoalan ini. Pemberian izin adalah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan awal dari malapetaka ini. Izin dari pemerintah ini selalu saja disalahgunakan oleh pihak pertama untuk menjarah hutan secara bebas. Kontrol yang tidak ketat dari pemerintah dan bahkan keterlibatan keluarga pejabat dalam bisnis ini menjadikan izin yang didapatkan digunakan secara bebas.

Pihak ketiga adalah polisi. Pihak polisi bertanggungjawab dalam konteks pengawasan hutan. Namun, yang terjadi adalah polisi ataupun tentara sendiri yang terlibat didalamnya, sehingga mereka mereka yang seharusnya melindungi hutan malahan melindungi para penjarah hutan itu sendiri. Dalam banyak kasus di Sumatera Barat, keterlibatan pihak keamanan dalam kasus illegal logging sudah hal yang lumrah saja. Bahkan, kayu-kayu hasil tangkapan pihak Polda Sumbar misalnya tidak pernah sampai ke pengadilan. Setidaknya, dalam operasi Wahana Laga Singgalang 2001, 8 kasus oleh terjadi dalam tangkapan Ditserse Sumbar, 22 kasus diselidiki oleh Polres Sawahlunto, 8 kasus diselidiki Polres Solok. Namun dari kasus-kasus yang ada, tidak ada satupun yang sampai ke pengadilan. (harian **Semangat Demokrasi**, 13 Februari 2002). Kasus itu seperti rahib di tengah jalan. Jikapun dari kasus yang ada dan kemudian yang ditangkap hanyalah sebatas sopirnya saja, sedangkan truknya kemudian dilepas. Sementara itu, pemilik kayu tetap berkeliaran mencari mangsa kayu-kayu baru yang akan mereka tebang.

Dalam persoalan illegal logging, tidak ada satu pihak yang bisa berdiri sendiri. Biasanya, ketiga pihak ini saling bekerja sama, sehingga berbagai penebangan yang mereka lakukan menjadi pemandangan keseharian saja. Dalam kasus-kasus tertentu, gubenur dan kapolda, bahkan ikut bermain didalamnya, sehingga pemberantasannya terhadap illegal logging menjadi sangat sulit dilakukan.

H. Illegal Logging dan Masa Depan Hutan

Berbagai faktor mempercepat hancurnya hutan di Sumatera Barat. Salah satu adalah Peraturan Daerah yang seharusnya dapat melindungi hutan, belum sampai sekarang ini belum ada. Penanganan masalah kehancuran hutan secara maksimum melalui perangkat hukum dan prosedur-prosedur administrasi tampaknya tak memberikan jalan keluar yang bisa mencegah terjadinya penebangan hutan secara sporadis. Bukankah dengan memberikan izin yang dikeluarkan secara syah memiliki kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang sangat mungkin terjadi. Di tingkat aparat penegak hukum yang terkait seperti para polisi yang berjag-jaga di jalan raya secara tak langsung juga memiliki motif dan kesempatan memperkaya diri sama halnya dengan para pengusaha yang menghalalkan cara untuk kepentingan dan hasrat memperkaya diri tanpa memperhatikan mata rantai kehidupan yang bersumber dari hutan.

Sumber; surat kabar harian **Haluan**, 20 Mei 2003

Di balik selubung dokumen ada dalih-dalih yang kelihatannya legal sering kali para cukong akan berargumen dan menantang para relawan untuk membuktikan kebenarannya. Tapi pada tingkat permukaan, dokumen yang ditunjukkan hanya berguna untuk melakukan beberapa perpindahan-perpindahan larian kayu dari satu tempat ke tempat lain, dengan mengusahakan penegasan-pengesahan semisal “stempel PHH”. Bukankah ini hanya merupakan sebuah dokumen yang justru melegalkan hal yang tak legal. Seperti contoh yang diterbitkan oleh Tablod Bijak edisi 86 tahun 2, 27 November-3 Desember 2000, di daerah Payakumbuh ada cukong kayu bernama Siu yang menggunakan dokumen SKSHH-KO yang bertanda daerah Bangkinang (Riau), tapi melakukan operasinya yaitu pengolahan kayu melalui sawmill di daerah lain di Rimbo Bujang. Sebelum kayu selesai diolah, ada anak buah cukong itu yang membuat dokumen kayu itu di sahkan di Pos Hasil Pengecekan Hutan PHH di di tempat lain, yaitu di daerah Singai Rumbai, kabupaten Sawah Lunto Sijunjung (Sumbar). Jika dokumen semacam ini sudah selesai, maka kayu pun diberangkatkan. Tindakan semacam

ini merupakan modus operandi yang sudah berlaku umum di tengah-tengah oknum dan cukong yang terlibat penjarahan hutan. Pada akhirnya dokumen yang dianggap memiliki kekuatan administratif yang dianggap kuat justru merupakan perangkat yang turut menghancurkan hutan. Sebab penerbitan dokumen-dokumen itu hanya berkenaan dengan urusan bagaimana arus komoditi hutan itu bisa “diatur” yang jelas hanya dilihat oleh para petugas atau oknum satu dari satu pos penjagaan PHH hingga oleh petugas lainnya di jalan raya sampai komoditas itu di pelabuhan, sebagai syarat untuk memberikan kesan maksimum bahwa hutan tak dijarah secara serampangan.

Sumber : surat kabar harian **Haluan**, 23 desember 2004

Yang tak kalah pentingnya, modus operandi para cukong ini sampai melibatkan masyarakat setempat yang mungkin memiliki keserupaan dengan operasi pola kemitraan dalam mengolah (mencuri) hasil hutan. Bisa dikatakan sebagai usaha pemberdayaan masyarakat setempat oleh para cukong dengan memberikan bantuan-bantuan modal berupa dana dan fasilitas pengolahan berupa chainsaw. (Tabloid **Bijak**, no 88 tahun 2 11-17 Desember 2000). Tentu saja ini dilakukan mulai dari pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di mana hutan yang diincar itu berada di daerah pengaruhnya. Modus ini memiliki kesamaan dengan pola operasi para tengkulak biasa, ketika modal kerja berupa peralatan dan dana diberikan, maka mereka pun diwajibkan mengembalikan semua itu berupa hasil tebang kayu yang disetorkan kepada sang cukong. Pada awalnya bantuan itu hanya diberikan dalam jumlah yang terbatas. Ini agaknya bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja strategi perambahan hutan melalui tangan pertama (yaitu masyarakat setempat yang diasumsikan memiliki “hak” untuk memanfaatkan (menjarah) sehingga pengusaha itu merassa diuntungkan dengan kerja yang tak langsung ini). Metode seperti ini diselubungkan sebagai sebuah bentuk philantropis yang lain, yang saling menguntungkan antara anggota masyarakat yang ditunjuk oleh cukong dengan cukong itu sendiri.

Proses kehancuran hutan di Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah yang masih menyisakan hutan torpisnya semakain memprihatinkan kita, dan

menegcewakan kita. Gejala kehancuran ini semakin tampak saja secara gembalang ketika hukum tak lagi mampu bicara, dan peraturan-peraturan kehutanan hanya dipakai justru untuk melegalkan kegiatan para penjarah hutan yang diberikan izin oleh penguasa setempat. Isu kekayaan alam sebagai sumber penghasilan negara dan masyarakat setempat tak mampu ternyata memberikan pembenaran bagi mereka untuk memanfaatkan hutan secara tak seimbang. Kalau dicermati dengan akal sehat dan dengan memprahatikan hatinurani, hasil yang dicapai oleh pengusaha dan pemerintah, yang mengharapkan pemasukan dari retribusi pembabatan hutan oleh para penjarah, sungguh sangat tak seimbang dengan mudarat-mudarat yang diakibatkannya. Persoalan sekarang adalah, pertama, hutan sekarang ini bagi pemilik modal rakus adalah sebagai sumber kekayaan ekonomi ketimbang sebagai sumber kekayaan dan cadangan kehidupan orang banyak. Kedua, kalau kita cermati, hutan pada satu rentang waktu tertentu memang memiliki potensi bagi masyarakat sekitar sebagai sumber ekonomi sekaligus masih menyedikan dirinya sebagai plasmanutfah yang mencukupi. Pemikiran dalam bentuk konseptual. Kenyataan pada masa sekarang adalah hutan di daerah ini boleh dikatakan hanya sebagai sumber kehidupan bagi manusia sebagai penyambung keseimbangan ekologi. Dengan melenyapnya berjuta hektar hutan dengan kemampuan regenerasi yang diperlambat oleh penjarah itu sendiri, justru hutan tak lagi bisa dipaksakan sebagai sumber pendapatan yang tak terbatas oleh negara maupun oleh perampoknya. Ketiga, budaya korupsi telah menggerogoti hutan mulai dari masyarakat di sekitrar hutan, para cukung, oknom aparat sampai pada pemegang kekuasaan seperti gubernur yang masih memberikan izin HPH dan IPK. Keempat, kemusnahan hutan hanya tinggal soal waktu, mungkin sebuah percepatan yang tak terelakkan bila penegakan hukum seara total dan kesadaran masyarkat, pengusaha, aparat, dan pejabat masih dikuasai secara kuat oleh nafsu ekonomis.

I. Rangkuman

Ternyata, akibat terjadinya *illegal logging* tidak sekedar merugikan negara. Dalam jangka panjang, perbuatan ini bahkan dapat merusak sistem kehidupan umat manusia. Dalam penebangan hutan, baik yang memiliki HPH

maupun yang liar ternyata membawa akibat yang sama terhadap hutan. Keduanya merupakan tangan-tangan jahil yang mengeksploitasi hutan secara habis-habisan. Hal yang membedakan adalah HPH merupakan penjarah hutan yang dilindungi oleh UU, sedangkan illegal logging merupakan penjarah yang tidak dilindungi oleh UU. Baik yang memiliki HPH maupun ytidak, dampak yang mereka tinggalkan sama saja yaitu eksploitasi habais-habisan.

Sumber : surat kabar harian **Media Indonesia**, 16 April 2003

Persoalan yang bersifat ekstrem, kadangkala juga dibutuhkan penyelesaiannya secara ektrem. Contoh kasus masalah penggundulan hutan habis-habisan menjadi hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga suatu kebijakan yang bersifat ektrem juga harus dilakukan. Salah satu bentuknya adalah *pencabutan sebuah bentuk HPH* dan sejenisnya untuk janghka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Melihat dampak yang ditimbulkan, maka dalam bentuknya sendiri, para penjarah hutan ini juga merupakan *teroris* yang merusak sendi-sendi ekosistem kehidupan manusia. Bahkan dampak yang ditinggalkan oleh penjarah hutan ini berakibat fatal dalam waktu yangb panjang seperti banjir, erosi, dan kekeringan.

Melihat pola-pola yang digunakan oleh para pengusaha dalam melakukan penebangan, msaka untuk dapat menyelematkan hutan agaknya harus dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas lagi. Bahkan, hal yang amat mendesak adalah penarikan seluruh HPH yang sudah diberikan, sehingga setiap penebangan kayu dianggap sebagai tindakan yang dapat disamakan dengan *teroris* terhadap negara. Sikap tegas seperti ini menjadi hal yang sudah semestinya, karena dampak yang ditinggalkan akibat penebangan yang ada menjadi pengrusakan terhadap ekosistem kehidupan. Sangat disadari bahwa untuk menamam kembali kayu-kayu yang ada, dibutuhkan waktu yang panjang. Sementara itu, penebangan berlangsung terus menerus. Jika pola ini dibiarkan secara terus menerus, maka 5 tahun kedepan tidak akan ada lagi hutan yang dapat diwariskan pada generasi yang akan datang.

J. Soal-soal Latihan

1. Bagaimana masyarakat memahami makna hutan sebagai bagian integral kehidupan masyarakat ?
2. Bagaimana dampak kerusakan hutan terhadap kelangsungan hidup umat manusia ?
3. Bagaimana keterlibatan oknum pemerintah dalam illegal logging ?

Bacaan Pilihan

A.A.Navis, **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta: PT Grafiti press, 1986

Ahmad Nazri Abdullah, **Melayu dan Tanah**. Selangor : Media Intelek SDN BHD, 1985.

Chesney, Allan Mc., **Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, sosial, dan Budaya**. Yogyakarta : Insist Press, 2004.

Hasrul Piliang, Zaiyardam Zubir dan Firman, **Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Di Minangkabau : Studi kasus di Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok Kabupaten Sawahlunto Sijunjung**. Padang : Balitbangda, 2003.

Muchtar Naim, **Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Padang : Center for Minangkabau Studies Press, 1968

_____, *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, Jakarta, **Makalah**, 1997.

Muhammad Radjab, **Sistem Kekerabatan di Minangkabau**. Padang : Center for Minangkabau Studies Press, 1969.

Nurdin Nurdin Dt. Bandaro, **Hukum Kekerabatan Minangkabau** (jilid I dan II), Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia, 1995.

Pye-Smith, Charlie, **Dukungan Yang Berkarya Untuk Perubahan, Sebuah Potret Program Kehutanan Multipihak Indonesia**. Jakarta : MFP, 2006

Sajuti Thaib, (editor). **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau**. Jakarta : Bina Aksara, 1985.

_____, **Hukum Adat Minangkabau**. Jakarta : Rajawali, 1992.

Y.R. Zakaria, **Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat**. Jakarta : Walhi, 194

Zulkifli B. Lubis, Manusia dan Hutan : Peluang Kearif Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif”, dalam Jurnal **Wawasan**, no. 9, Juni 1998.

BAB IX

MANGGALEHKAN ANAK KAMANAKAN

JO HARATONYO ³

*Zaman kolonial,
sang ulama merupakan kelompok yang ditakuti
oleh pemerintah kolonial Belanda
karena sikapnya yang tidak mau kompromi
untuk mempertahankan keyakinannya
sementara itu
penghulu merupakan kelompok
yang mau bekerja sama
dan menjual tanah, harta dan anak kemenakannya
Namun, kini Kedua elite ini sama saja perangainya
korupsi berjamaah dipimpin oleh haji*

A. Deskripsi

Untuk membicarakan masalah elite, maka perlu di-rumuskan terlebih dahulu konsep elite itu. Dalam me-lihat elite, hal yang pokok sebenarnya adalah ikatan ko-munitas yang mendukung keberadaan elite itu. Anderson mengemukakan bahwa dalam komunitas yang berkem-bang dengan kesadaran dan pengalaman sejarah, corak hubungan sosial terbina, elite adalah sesuatu yang diba-yangkan berdasarkan perjalanan sejarah yang diukir oleh pejuang-pejuang bangsa dengan perjuangan penuh pengorbanan. Para pejuang yang telah bekerja untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya atau bangsa inilah yang dinamakan

³ Dari diskusi dengan Prof. Umar Kayam (Almarhum), Sumando orang Minangkabau, - penyanggah utama nilai-nilai budaya Jawa- menyatakan bahwa Minangkabau merupakan wilayah yang memiliki adat istiadat yang demokratis. Dalam pidato pengukuhan, masyarakat Minangkabau merupakan sorotan utamanya. Ketika diskusi dengan beliau dan penulis menyatakan pikiran yang berbeda, terutama temuan lapangan, atas dasar itulah tulisan ini lahir. Terima kasih pada Prof. Umar Kayam, yang telah banyak membantu dalam merumuskan tulisan ini. Kemudian bersama Lindayanti, tulisan ini dikembangkan lagi melalui penelitian, namun tetap berpijak pada makalah dasar. Sebagian dari naskah ini pernah dimuat dalam “Percaturan Elite di Minangkabau : Dari Demokrasi ke Feodal”, dalam Jurnal kebudayaan *Genta Budaya*, Padang No. 4 Th. II, 1997. dan Zaiyardam (eds), *Menggugat Minangkabau*. Unand Press, 2006.

pemimpin (Benedict R.O.G. Anderson, 1983). Dalam pengertian yang lain Bottomore mengemukakan bahwa elite adalah untuk menyebutkan kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi (karena apapun alasannya) dalam suatu masyarakat (T. B. Bottomore, 1990: 32). Jabatan yang didudukinya itulah yang menentukan keduanya sebagai elite dalam masyarakat.

B. Manfaat

Dengan membahas bab ini, mahasiswa diharapkan akan dapat :

1. Mengetahui nilai-nilai dasar penghulu Minangkabau
2. Memahami keberadaan elite penghulu Minangkabau
3. Memahami penyimpangan yang dilakukan oleh elite penghulu Minangkabau

C. Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa dapat menganalisis budaya konflik Minangkabau
2. Mahasiswa dapat menganalisis penghulu sebagai aktor utama penyebab konflik di Minangkabau
3. Mahasiswa dapat mengkaji sepak terjang penghulu dalam persoalan harta pusaka
4. Mahasiswa dapat memahami eksistensi penghulu dalam bidang sosial dan politik kontemporer

D. Ajang Bohong-bohongan

Dalam suatu kampanye pemilu tahun 1992 yang lalu di sebuah perkampungan pedesaan di Minangkabau (sebut saja nama desa itu Sumanik Kabupaten Tanah Datar) ada hal yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang antropologi politik. Kajian itu adalah melihat percaturan elite-elite politik lokal berhadapan dengan elit politik nasional selama masa-masa kampanye sampai berlangsungnya pemilu. Selama masa kampanye, mereka hanya berhadapan dengan dua kubu saja yaitu *Partai Persatuan Pembangunan (PPP)* dan *Golongan Karya (Golkar)*, sedangkan dari *Partai Demokrasi Indonesia (PDI)* tidak mempunyai massa dan tokoh di desa itu, sehingga praktis tidak mendapatkan suara dalam pemilu.

Perimbangan kekuatan tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam masa kampanye secara kualitas maupun kuantitas sesungguhnya tidak berimbang. Betapa tidak, PPP dalam setiap kampanye diwakili oleh seorang ulama pedesaan yang bernama Haji Mahludin Yatim. Sebaliknya, Golkar menurunkan tokoh-tokoh utamanya baik yang berasal dari desa itu sendiri maupun dari desa lain dan bahkan juga ada tokoh-tokoh nasional seperti Ir. Yanuar Muin (kepala PLN Sumbar-Riau), DR. Irma Alamsyah (anggota DPR) dan Prof. Dr. Yurnalis Kamil (Rektor Unand Padang).

Lebih jauh lagi, upaya untuk menarik massa pemilih mendengarkan pidato kampanye, pihak Golkar menurunkan penyanyi dan pelawak ibukota (Harian Singgalang, 1992). Pada waktu kampanye, memang lapangan penuh dihadiri massa, yang tidak hanya datang dari desa itu, tetapi juga desa-desa tetangga sehingga gebyar kampanye amat dirasakan. Bandingkan misalnya kalau PPP melakukan kampanye, maka ia dalam menyampaikan pidato-pidato kampanye hanya dalam suasana dan bahasa yang sederhana, tanpa diikuti dengan "*janji-janji kampanye*" yang menjadi ciri khas bahasa politik dari juru-juru kampanye kelompok lainnya.

Kehadiran pejabat tinggi dalam suatu acara dalam masyarakat pedesaan merupakan suatu hal penting bagi orang desa karena mereka didatangi oleh pejabat tinggi. Masyarakat desa beranggapan bahwa kedatangan pejabat setingkat menteri membawa opini dalam masyarakat pedesaan bahwa hal itu bisa saja terjadi, namun dalam pidato-pidato kampanye, para pejabat itu menyampaikan janji-janji kampanye yang hanya "retorika kampanye". Belajar dari pemilu yang sebelumnya, janji-janji itu hanya sebatas mimbar kampanye sehingga menimbulkan sikap apriori dalam masyarakat.

Kepribadian pemimpin dalam segala hal juga menjadi hal amat penting bagi masyarakat pedesaan. Mereka akan melihat antara "*Das Sein* dengan *Das Sollen*" dari elite itu. Di kala terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian perkataan dengan perbuatan, maka masyarakat pedesaan langsung saja memvonis bahwa pejabat hanya banyak bicara tetapi tidak sesuai dengan sikapnya. Hal ini memang terjadi pada tokoh-tokoh yang menyampaikan kampanye itu, sehingga antipati warga tak terelakkan lagi.

Dalam pemungutan suara diharapkan Golkar mam-pu memenangkan pemilu. Namun dalam realitas di lapa-ngan tidaklah demikian, masyarakat pemilih memang datang untuk mendengar pidato-pidato kampanye dan untuk mendapatkan hiburan dari artis ibukota itu. Seba-gai catatan, kehadiran artis ibukota memang merupakan strategi yang tepat untuk memobilisasi massa, namun hal ini bukan jaminan untuk menarik minat massa yang menghadiri kampanye itu untuk memilih pidato, teru-tama hiburan gratis dari artis ibukota, namun demikian tidak mengikuti suara dari partai yang sedang mela-kukan kampanye itu.

Sebagai jawaban dari percaturan politik di tingkat pedesaan ini akan terlihat dari hasil perhitungan akhir. Dari hasil akhir pemilu tahun 1992 terlihat dari konfigu-rasi suara di bawah ini yaitu Golkar hanya mampu mem-peroleh 20 % dari peserta yang berhak memilih, semen-tara itu PPP berhasil memperoleh kemenangan yang besar dengan suara yang berhasil dikumpulkannya seba-nyak 80 %, sedangkan PDI berhasil memperoleh 2 suara (Zaiyardam Zubir, 1992 : 40).

Untuk memahami kemenangan PPP di atas agaknya perlulah dipahami konsep kepemimpinan dalam masya-rakat Minangkabau. Pepatah petiti adad tentang konsep kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau yaitu : *“Ditinggikan seranting, didahulukan selangkah”* (Datuk Sangguno Diradjo, 1955 : 50). Artinya, seseorang diang-kat menjadi pemimpin hanya satu langkah daripada yang dipimpinnya dan satu ranting lebih tinggi daripada ang-gotanya. Dengan demikian tidak terdapat suatu hierarki yang vertikal antara pemimpin dengan yang dipimpin-nya. *“Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”* (Datuk Sangguno Diradjo, 1955: 52). Sebagai gambaran kedudu-kan setiap individu dalam masyarakat yaitu :

Ukuran-ukuran yang dipakai bukan maunya yang mengatur (pemimpin), tetapi berdasarkan ukuran *“alur dan patut”* dengan segalanya berorientasi pada kepentingan orang banyak. Yang menentu-kan kata putus bukanlah orang yang di sana, tetapi adalah *“hukum”* yang didasarkan kepada prinsip alur dan patut serta pada kebenaran (Mochtar Na-im, 1987 : 213).

Hal ini dapat dipahami, bahwa hierarki kepemim-pinan dalam masyarakat Minangkabau lebih cenderung berorientasi ke dalam bentuk kepemimpinan yang de-mokratis. Hubungan dengan pemimpin atau bahkan de-ngan raja diungkapkan dalam bentuk *“Raja alim raja disembah, raja zalim raja dibantah”* (Datuk

Sunggono Dirajo, 1955) ini menggambarkan bahwa semua perka-taan dan perbuatan raja bisa saja dikritik dan dilawan kalau raja itu salah. Raja itu juga manusia biasa yang mempunyai sifat khilaf dan salah.

Dalam konsep budaya Minangkabau tidak berlaku perkataan bahwa “*Raja tidak pernah bersalah, sebab ia titisan dewa di bumi dan setiap yang dikatakan oleh raja adalah benar dan tidak boleh dibantah*”. Memang dalam hierarki struktur pemerintah di Minangkabau ter-dapat dua corak yaitu corak “*Bodi-Caniago*” yang lebih bersifat demokratis dan corak “*Koto-Piliang*” yang le-bih bersifat aristokrasi. Walaupun Koto-Piliang lebih bercorak aristokrasi, namun dalam pengkultusan raja tidak dikenal dalam budaya suku ini di Minangkabau. Hal yang menarik adalah dalam perkembangan kontem-porer, pola-pola seperti ini mulai dikenal dan berkem-bang dalam kehidupan masyarakat terutama pada lembaga pemerintah (hal ini akan dijadikan sebagai kajian tersendiri dalam tulisan ini).

Kembali pada konteks pemilu tadi, hal yang perlu diperhatikan untuk dikaji adalah segi-segi apakah yang membuat PPP mampu mengatasi Golkar, sementara Gol-kar memiliki berbagai fasilitas yang jauh melebihi PPP. Menyimak dengan seksama proses pemilu dan juga ke-beradaan ulama dalam sejarah kekuatan inti yang di-miliki oleh kelompok Islam sebagaimana yang diterap-kan PPP dalam kampanye itu.

Figur ulama itu terletak pada kebenaran tokohnya yaitu H. Mahludin Yatim. Ia merupakan ulama yang di-segani oleh masyarakat karena sikap hidup keseharian yang dapat dijadikan contoh teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh misalnya, dalam gotong royong desa, ia langsung turun ke lokasi gotong royong. Sikap seperti ini membuat penduduk desa merasa segan dan risih, se-hingga tanpa ia minta, maka penduduk pun langsung ikut bergotong royong. Masjid di desa itu merupakan bentuk nyata dari hasil kerja sebagai ulama terutama ke-mampuannya menarik uang dari masyarakat desa dan dari rantau. Secara ekonomis, ia pun dalam ukuran ma-syarakat kampung dianggap orang kaya yang dermawan dengan kekayaan yang berasal dari hasil perdagang-annya (Zaiyardam Zubir, 1992).

Mahludin Yatim dalam berdagang mengikuti sun-nah rasul. Ia mengemukakan alasan tentang dunia per-dagangan bahwa rasul semasa hidupnya

telah ikut dalam dunia perdagangan, sehingga mata pencaharian yang di-ikuti seperti ini merupakan jalan yang diinginkan rasul. Lebih jauh lagi, ia melihat bahwa dalam dunia perdaga-ngan terdapat kebebasan dan tidak harus tunduk pada orang lain. Pemikiran yang menarik yang dikemukakan-nya adalah bahwa ada sunnah rasul menyatakan bahwa rezeki Allah sebanyak 75 % terletak di tangan pedagang (H.Mahludin Yatim, 1985). Dengan usahanya seperti ini, memberi kesempatan padanya untuk menyumbang-kan harta kekayaan dalam rangka menjalankan agama Allah SWT.

Bandingkan misalnya dengan pejabat dari Golkar, secara “*demonstratif*”, memberikan bantuan untuk mes-jid dan desa pada waktu kampanye. Cara yang demikian itu dianggap oleh orang desa bersifat ria dan sombong. Bahkan cara yang lebih Islami adalah “*tangan yang ka-nan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya*”. Hal ini bukannya menimbulkan simpati masyarakat, (kecuali pejabat desa seperti kepala desa yang memang mendapat bagian dari setiap bantuan), akan tetapi malahan seba-liknya menimbulkan antipati dari masyarakat. Pola Gol-kar yang tidak sesuai dengan pola berpikir masyarakat desa menjadi “*bumerang*” bagi kelompoknya sendiri.

Sebagai seorang ulama, ia konsisten dengan sikap dan pandangan hidupnya. Bagi pengikutnya, hal ini amat prinsip sebab mereka akan menyoroti sang elite secara teliti dalam kehidupan kesehariannya. Ulama yang baik adalah yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan-nya. Ia akan menyampaikan sesuatu kebenaran walau-pun dirasakan pahit bagi dirinya maupun bagi pengikut-nya. Dengan demikian, kesesuaian seperti ini merupakan suatu modal untuk menarik massa pemilu. Dan bagi H. Mahludin Yatim, sikap konsisten seperti ini justru dimilikinya, sehingga dimata pengikutnya H. Mahludin Ya-tim menjadi figur yang diakui dan didengar setiap pem-bicaraannya (Zaiyardam Zubir, 1992).

Meminjam konsep tentang ulama yang dikemuka-kan oleh Soltaire bahwa ada dua tipikal ulama yaitu ula-ma Al-i-duniya dan ulama-i-akhirat (Soltaire, 1981 : 130-131). Bentuk pertama yaitu ulama i-duniya adalah lebih bersifat duniawi dalam pandangan hidup mereka. Mereka menginginkan kekayaan dan kehormatan dunia dan tidak segan-segan mengkhianati hati nurani sendiri asalkan tujuan mereka tercapai. Sebaliknya ulama akhi-rat hidup bersahaja dalam

pengabdian yang saleh terha-dap ilmu agama dan menjauhkan diri dari mengejar hal kebendaan dan politik. Mereka lebih suka melewatkan hari demi hari dalam kemiskinan dari pada bergaul de-ngan raja dan orang kaya. Keseluruhan hidup mereka adalah berjuang untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan berjuang untuk mempertinggi moral agama.

Kedua corak ini terdapat dalam corak ulama di Mi-nangkabau. Hanya saja, corak yang berbentuk ulama i-duniya lebih menonjol dalam kehidupan masyarakat, se-dangkan ulama iakhirat yang didukung oleh kelompok tarekat tidak begitu mendapat tempat dalam masyarakat Minangkabau. Artinya, ulama tidak hanya memikirkan soal akhirat, tetapi juga soal dunia. Patut dicatat di sini adalah sejak masa awal kemerdekaan melalui partai po-litik Masyumi, kelompok ulama telah memainkan peran penting dalam politik. Juga, pengaruh Muhammadiyah di pedesaan di Minangkabau amat kuat. Ulama-ulama dari Muhammadiyah inilah yang umumnya terjun ke dalam politik praktis dan juga bergerak dalam sektor ekonomi yang bergabung dengan partai yang bercirikan Islam, sedangkan aliran lainnya seperti Tarbiyah masuk ke dalam Golkar. Dalam konteks inilah, penulis menco-ba membahas masalah kepemimpinan di Minangkabau.

Pergumulan elite di Minangkabau sesungguhnya adalah pergumulan dari tiga kubu elite yang saling beru-saha merekrut pengikut sebanyak-banyaknya. Ketiga eli-te-elite itu dikenal dengan sebutan "*Tigo Tungku Saja-rangan*" dan "*Tigo Tali Sapilin*", yaitu ulama sebagai elite kelompok Islam, *penghulu* sebagai elite bangsa-wan, dan *cadiak pandai* (kaum intelektual) sebagai elite yang menempuh pendidikan umum (Herman Sihombing, 1983: 43). Secara teoretis, ketiga elite ini akan dapat be-kerja sama dalam menjalankan roda kehidupan di setiap kampungnya, namun kenyataan juga sering terjadi kon-flik bahkan sampai pada perang.

Pembagian ini tidaklah kaku, artinya seorang ula-ma juga bisa seorang penghulu, ataupun seorang ulama juga bisa menjadi cerdik pandai. Contoh yang menarik seperti H. Datuk Panglimo Kayo yang pernah menjadi ketua MUI di Sumatera Barat. Juga, seorang ulama bisa juga menjadi seorang *cadiak pandai*

seperti M. Natsir. Istilah “Intelektual Muslim” yang berkembang dewasa ini agaknya bentuk dari ulama sekaligus berperan sebagai *cadiak pandai*.

Dalam sejarah Minangkabau, ketiga elite di atas telah memperlihatkan berbagai peristiwa baik yang berbentuk kerja sama dari ketiganya maupun konflik yang dilakukannya. Hanya saja, dua kelompok yang memberi warna dalam percaturan elite Minangkabau adalah ulama mewakili kelompok kaum adat akan terlihat dari berbagai peristiwa penting seperti perang Paderi, gelombang gerakan pembaharuan Islam mulai dari Akhmad Khatib, Haji Rasul, Hamka, AR. Sutan Mansyur sampai M. Natsir.

Dua kelompok ini mewakili dua nilai yang berkembang dengan kuatnya di Minangkabau. Kedua nilai itu kadangkala mempunyai persamaan, namun demikian juga terdapat perbedaan-perbedaan yang tajam, sehingga menimbulkan berbagai konflik di tengah-tengah masyarakat. Konflik tidak hanya pertikaian dalam soal pandangan atau visi tentang agama dan adat, lebih jauh lagi sampai pertumpahan darah. Perang Paderi merupakan contoh konkret dari konflik antara kaum adat dengan ulama di Minangkabau (M. Radjab, 1954).

E. Komponen Elite dan Peta Konflik

Sebagai seorang memiliki kekuatan tertentu, seorang elite dapat memainkan peranan dalam menentukan gagasan-gagasan terhadap bangsa atau kelompoknya. Dari gagasan baru yang dimilikinya itulah yang membuatnya menjadi elite dalam masyarakatnya. Sebaliknya, masyarakat kebanyakan akan lebih cenderung sebagai pengikut pendapat dan gagasan dari pemimpinnya. Keduanya massa kebanyakan berperan untuk melakukan penapisan, pemilihan atau memperkuat gagasan-gagasan segelintir pemimpin (Deliar Noer, 1983 : 37).

Dalam elite terdapat dua komponen penting, yaitu elite dan pengikutnya. Secara sadar atau tidak, keduanya terjalin emosional kuat yang mengikutinya. Taufik Abdullah menyatakan bahwa elite adalah penilaian dengan sistem sosial yang berlaku. Interaksi yang dinamis antara kedua unsur pribadi dan sistem sosial adalah faktor utama yang memapankan elite. Lebih jauh Taufik Abdullah melihat bahwa dalam konteks kepemimpinan Islam, maka kategori dari seorang pemimpin adalah :

Pertama, kemampuan yang diperkirakan terdapat padanya untuk memimpin ke arah tercapainya situasi yang diciptakan oleh komunitasnya. Kedua, kemungkinan bobot fungsinya dalam mempertahankan eksistensi komunitas. Namun kepemimpinan yang berlandaskan nilai keagamaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial itu ditambahkan, atau bahkan lebih tepat diutamakan-keterluluhan pribadi itu dalam keharusan moral agama. Barangkali hal terakhir ini perwujudannya bersifat his-toris (Taufik Abdullah, 1987 : 64).

Fenomena tentang elite akan dapat dijumpai dalam semua komunitas. Pada masyarakat yang paling sederhana sampai kepada masyarakat yang modern, akan dijumpai elite dengan berbagai persoalan yang dihadapinya, sebab dalam setiap masyarakat walau primitif sekalipun akan membutuhkan pemimpin untuk mengatur kehidupan dan memimpin komunitasnya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah bahwa setiap elite akan terdapat suatu ikatan yang kuat dengan pengikutnya sehingga dalam membicarakan tentang elite tidak dapat dipisahkan dari dimensi-dimensi dalam elite seperti status, peran, kekuasaan, otoritas, personalitas, fungsi, nilai sosial-kultural dan situasi (Sartono Kartodirdjo, 1990 : v-vi).

Aspek sosial, budaya dan politik akan sangat menentukan corak dari elite itu sendiri. Perbedaan sosial budaya suatu masyarakat memberikan corak yang berbeda pula dalam tipikal elite yang berkembang di dalamnya. Pada masyarakat feodal misalnya, maka corak elite akan lebih cenderung berdasarkan pada geneologis (Suzanne Keller, 1984 : 20). Aspek sosial, budaya, dan politik akan berkaitan erat dengan jalan yang ditempuh dan digunakan elite untuk dapat menaiki jenjang kekuasaan.

Pembicaraan mengenai elite pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan *"The Ruling Class"* sebagai kelompok yang memegang kendali kekuasaan. Hanya saja yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa tidak semua elite itu berada dalam struktur kekuasaan. Gambaran tentang ulama misalnya seringkali berada di luar kekuasaan resmi. Kelompok ini biasanya menjadi kelompok

“*oposisi*” yang memberikan koreksi terhadap pe-nguasa. Di Minangkabau sendiri misalnya, ada dua ke-lompok elite yang sering berada di luar struktur keku-asaan yaitu ulama dan cadiak pandai. Kedua kelompok ini biasanya jauh lebih merdeka dibandingkan penghulu yang selalu memegang kekuasaan. Edward Shils mengemukakan bahwa setiap masyarakat ada golongan cende-kiawan ini, biarpun mereka belum mengalami diferen-siasi, bukti kemiskinan mereka dan tipisnya tradisi inte-lektual dan rapuhnya teknologi, namun mereka tetap mempunyai tempat tersendiri dalam struktur masyarakat (Edwar Shils, 1982 : 25-34).

Proses pembentukan elite dapat dilakukan dengan berbagai jalan. Keller merumuskannya melalui jalan:

1. Kelompok elite yang muncul sebagai pimpinan atau penguasa karena faktor politik. Mereka menduduki posisi ini karena dukungan yang diberikan kepada penguasa atau kepada sistem po-litik yang sedang memegang kendali kekuasaan.
2. Kelompok elite yang muncul karena melalui pro-ses pendidikan formal.
3. Kelompok elite yang muncul karena geneologis yang didukung langsung oleh sistem sosial bu-daya dari masyarakat.
4. Kelompok elite yang muncul berdasarkan repu-tasi sosial dengan kombinasi pengalaman dan pe-ngetahuan agama.
5. Kelompok elite yang muncul berdasarkan faktor kekayaan-kekayaan yang dimilikinya, termasuk keluarganya (Suzanne Keller, 1984 : 1-30).

Pola-pola di atas akan dapat dijadikan sebagai lan-dasan teoritis dalam melihat kelahiran elite di Minang-kabau. Misalnya saja dalam melihat kelahiran elite penghulu, maka pada suku koto piliang akan berlaku bentuk geneologis, ungkapan adat menyatakan bahwa “*karambia tumbuh di mato*” (kelapa tumbuh pada ma-tanya). Artinya adalah bahwa seseorang yang diangkat menjadi penghulu haruslah turunan langsung dari yang digantikannya seperti kemenakan kandung laki-laki yang paling tua (M. Radjab, 1969: 15-17).

Pada suku Bodi-Caniago, corak kepemimpinan-nya lebih demokratis. Pada suku ini, bahkan yang bukan orang Minangkabau pun dapat diberi gelar penghulu berdasarkan hubungan baik dengan masyarakat Minang-kabau, jasa-jasa, dan prestasi yang diraihny. Pengang-katan Prof. Koesnadi Hardjosumantri (Rektor

UGM Yogyakarta saat itu) sebagai penghulu Minangkabau pada tahun 1987 di Yogyakarta diangkat oleh suku Bodi-Caniago. Pemikiran dasar pengangkatan itu sesungguhnya lebih ditentukan oleh faktor hubungan baiknya dengan masyarakat Minangkabau, baik yang berada di Yogyakarta maupun di tempat lainnya (Harian Kedaulatan Rakyat, 1987 : 12).

Secara spesifik masalah elite dapat menggunakan berbagai pendekatan. Weber menggunakan tiga cara pandang yang berbeda dalam melihat elite yaitu :

1. Elite dapat dipandang sebagai suatu kemampuan yang dimiliki dan melekat dalam diri seseorang. Dengan sendirinya aspek tertentu dari dalam diri seseorang telah menampilkan suatu "*penampilan berkuasa*", sehingga menyebabkan orang lain menerima perintah dan keinginannya sebagai sesuatu yang harus diikuti (sangat elite dipandang telah memperoleh kekuasaan yang luar biasa). Individu yang memiliki kekuasaan itu diyakini mendapat bimbingan langsung dari wahyu dengan kualitas yang sakral dan dapat dianggap mempunyai kesaktian akan dapat menghimpun massa dari masyarakat umum.

Weber mengemukakan bahwa bentuk kepemimpinan yang luar biasa ini dinamakannya kepemimpinan *Kharisma*. Kepemimpinan yang berbentuk ini jelas pada identifikasi psikologis seseorang terhadap massa pengikutnya. Identifikasi psikologi dapat diidentifikasi sebagai suatu keterlibatan emosional seseorang dengan orang lain didasarkan pada persamaan nasib. Bagi para pengikutnya, pemimpin adalah suatu harapan untuk mengembalikan masa lalu yang lebih baik menuju suatu kejayaan di masa depan karena kemampuan pemimpin itu sebagai penyelamat dan pelindung pengikutnya.

2. Bentuk kepemimpinan yang bukan bergantung pada diri individu, melainkan dalam jabatannya atau status yang dipegangnya. Weber menamakan bentuk kepemimpinan ini sebagai *Legal Authority* sebagai suatu pola normatif dan hak memerintah dari pemimpin yang terpilih berdasarkan pola aturan yang disahkan secara bersama oleh anggota masyarakat.

Otoritas legal seperti ini akan terwujud melalui organisasi atau birokrasi pemerintah. Tanggung jawab dalam pengendalian organisasi tidak ditentukan

oleh penampilan individu seseorang akan tetapi dari prosedur yang telah disepakati secara bersama. Dengan sendiri unsur-unsur emosional tidak mendapat tempat dalam bentuk kepemimpinan seperti ini dan sebagai gantinya, maka segala sesuatu diukur oleh rasional dari kebijaksanaan penampilan individu seseorang akan tetapi dari prosedur yang telah disepakati secara bersama. Dengan sendiri unsur-unsur emosional tidak mendapat tempat dalam bentuk kepemimpinan seperti ini dan sebagai gantinya, maka segala sesuatu diukur oleh rasional dari kebijaksanaan yang diambil dan dijalankan.

3. Bentuk kepemimpinan tradisional. Weber melihat bahwa sumber kepercayaan dalam kepemimpinan tradisional sudah mapan bagi pengikutnya terhadap kesakralan tradisi yang telah dijalankan selama ini. Kedudukan pemimpin ditentukan oleh tradisi-tradisi yang telah lama dilakukan kelompok masyarakat (Max Weber, 1966).

Masalah konsep konflik juga menjadi persoalan yang mendasar dalam tulisan ini. Konflik dapat diartikan sebagai suatu perbedaan antara satu bentuk dengan bentuk lain. Hanya saja untuk menyelesaikan perbedaan itu dibutuhkan suatu penyelesaian baik yang bersifat kekerasan maupun yang bersifat dialogis. Penyelesaian yang berbentuk kekerasan dapat melalui berbagai jalan seperti yang dikemukakan oleh Gurr yaitu:

1. Turmoil : Yaitu kekerasan politis yang tidak terorganisasi dan partisipasi populer, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik, dan pemberontakan kedaerahan yang relatif spontan.
2. Konspirasi : Kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi terbatas termasuk pembunuhan politis yang terorganisir, terorisme dalam skala kecil, kudeta dan pemberontakan.
3. Perang Internal : Kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi populer dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu, merombak negara, kekerasan yang ekstensif termasuk terorisme, perang gerilya dalam skala besar, perang saudara sampai kepada revolusi (Robert Gurr, 1971 : 11).

Corak konflik yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau ada pada ketiga bentuk di atas itu. Hanya konflik sesungguhnya sudah merupakan

su-atu tradisi hidup sehari-hari dalam masyarakat. Artinya, konflik tidak hanya sebagai suatu tindakan kekerasan, akan tetapi pola berpikir sudah didasari pada konflik.

Konflik sudah menjadi bagian keseharian dari kehidupan masyarakat di Minangkabau. Hanya saja konflik yang berkembang bukanlah dalam bentuk fisik atau kekerasan, akan tetapi lebih menonjol kepada konflik watak atau pemikiran. Taufik Abdullah mengutip dari Bousquet melukiskan bentuk perpaduan antara adat dengan Islam yaitu Ranah Minangkabau sebagai daerah yang kuat adat, tetapi mengalami proses Islamisasi yang dalam, sehingga menimbulkan paradoks yang mencolok dalam sosiologis Islam, sedangkan Ronkel bertanya-tanya betapa antitesa dengan agama dunia dapat menghasilkan sintesa yang kemudian menjadi dasar bagi watak Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987 : 104).

Dalam melihat kelahiran konflik, maka hal ini biasanya diawali oleh rasa ketidakpuasan yang berkembang dalam masyarakat. Ketidakpuasan ini menjadi pemicu untuk mengadakan serangkaian aksi. Secara teoretis, Robert Gurr menggambarkan bahwa konflik diawali dengan ketidakpuasan, diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Satu sisi ada keinginan relatif muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemampuan, nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan (Robert Gurr, 1971: 24). Dalam konteks inilah konflik muncul dalam masyarakat Minangkabau terutama sikap ulama dalam melihat realitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dijalankan oleh pengikutnya.

Dalam menjalankan konflik, elite biasanya juga mempunyai cara-cara tersendiri. Cara seperti ini dibutuhkan dalam pencapaian tujuan yang diinginkannya. Strategi dalam setiap konflik maupun revolusi memang membutuhkan suatu langkah dasar dan batu pijakan sebagai modal dalam pencapaian tujuan dari konflik itu. Menganalisa kekuatan lawan dan menganalisa kekuatan sendiri merupakan kunci pokok dalam strategi suatu konflik ataupun revolusi (Robin Blackburn, 1969 : 28-29).

Pendekatan yang digunakan dalam kondisi konflik seperti ini setidaknya ada dua jalan yaitu, pertama, menganalisa fenomena yang berhubungan

seperti organisasi, ideologi revolusioner untuk menampilkan asal usul, karakteristik dan akibatnya; kedua, memilih kejadian atau kelas kejadian kekerasan tertentu sebagai objek penjelasan dan membuat spesifikasi (Robert Gurr, 1971: 37). Memahami konflik yang terjadi antar elite di Minangkabau, maka hal itu akan dapat dikaji dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan di atas, terutama sekali bagaimana makna konflik dan eksistensi konflik dalam masyarakat Minangkabau.

F. Proses Terbentuknya Tradisi Konflik

Dalam dinamika kehidupan masyarakat di Minangkabau, terdapat dua nilai yang kuat mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran masyarakatnya yaitu adat dan Islam. Kedua nilai itu pada periode tertentu berjalan berdampingan secara mesra atau saling mengisi antara nilai-nilai adat dengan nilai agama Islam. Namun sebaliknya pada periode lain, kedua nilai ini sering juga merupakan sumber konflik yang keras dan berkepanjangan dalam masyarakat Minangkabau yang menimbulkan berbagai gejala intelektual dan fisik.

Sorotan yang tajam dilakukan oleh banyak ahli terhadap adat dan Islam di Minangkabau adalah konflik yang terjadi antara kedua nilai-nilai itu. Artinya, kehadiran agama Islam tidak hanya berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam, sebaliknya juga menimbulkan konflik dalam masyarakat yang telah mempunyai nilai-nilai tradisional atau nilai adat sebelumnya.

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah makna konflik dalam budaya Minangkabau. Dalam perkembangan sejarah kebudayaan Minangkabau, konflik mempunyai kedudukan penting dalam menumbuhkan dinamika kebudayaan. Konflik tidak hanya membawa kearah perpecahan, sebaliknya konflik inilah yang menjadi sumber dinamika dalam masyarakat di Minangkabau. Dialektika seperti ini menjadi hal yang teramat penting dalam transformasi budaya di Minangkabau sebagai suatu upaya untuk menumbuhkan dinamika dalam masyarakat. Pada gilirannya, konflik sudah menjadi ciri khas dari budaya Minangkabau.

Sedemikian pentingnya konflik dalam masyarakat Minangkabau, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan, masyarakat berpacu untuk menghadapi

berbagai kompetisi sebagai perwujudan nyata dari budaya konflik yang berkembang dalam masyarakat. Tentang kehidupan konflik dalam kebudayaan Minangkabau, mengikuti pemikiran yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah tentang makna konflik adalah sebagai berikut:

Sifat ganda dari posisi adat dan juga Islam, tidak dapat dipahami secara tepat tanpa memperhitungkan fungsi konflik dalam masyarakat sebagai keseluruhan. Di Minangkabau, konsep tentang konflik tidak hanya diakui, tetapi juga dikembangkan dalam sistem sosial itu sendiri. Konflik dilihat secara dialektis, sebagai unsur *hakiki* untuk tercapainya integrasi masyarakat (Taufik Abdullah, 1987:107).

Pada satu sisi, nilai-nilai adat sudah berkembang melalui proses yang amat panjang telah mengakar dalam keseharian dan tingkah laku masyarakat, namun pada sisi lain, nilai Islam secara bergelombang juga memasuki alam kehidupan dan pemikiran masyarakat Minangkabau. Interaksi kedua nilai membawa suatu dinamika tersendiri dalam masyarakat Minangkabau. Sebagai contoh adalah dalam melihat pola kepemimpinan, maka pergumulan antara kaum adat dengan ulama mewarnai perjalanan sejarah Minangkabau yang dipenuhi darah dan air mata.

Warna Islam yang mempengaruhi Adat Minangkabau secara jelas untuk pertama kalinya adalah sewaktu Syekh Burhanuddin mengembangkan ajaran Islam di Minangkabau. Ia mengembangkan aliran Sattariyah. Semasa muda, ia belajar aliran Sattariyah kepada Syekh Abdul Rauf di Singkel (Hamka, 1982: 11).

Ajaran ini sesungguhnya sudah banyak menyimpang dari ajaran Islam yang murni, seperti orang baru dipandang syah keislamannya apabila ia telah lebih dahulu masuk suluk. (Hamka, 1982 : 82). Warisan dari ajaran Syekh Burhanuddin yang dianggap keramat oleh pengikutnya adalah kuburannya di Ulakan. Pada waktu tertentu seperti pada bulan Syafar, makam yang dianggap keramat itu banyak dikunjungi oleh pengikutnya dengan harapan mendapat berkah (M. Noer, 1991 : 35).

Syekh Burhanuddin dilahirkan di Ulakan, sebuah kampung di wilayah Kabupaten Padang Pariaman sekarang ini. Sejak dahulu telah terdapat perbedaan orang Minangkabau Pariaman yang dianggap sebagai orang pantai dengan orang Minangkabau pedalaman atau darat. Dikotomi antara Minangkabau darat yang

terdiri da-ri tiga *luhak* (*luhak nan tigo*) yaitu Luhak Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota dengan Minangkabau pantai atau rantau seperti Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, dan Solok. Dalam berbagai hal, kedua wilayah ini mem-punyai banyak persamaan.

Dari sinilah lahirnya ungkapan “*Adat Menurun, Agama Mendaki*”. Syekh Burhanudin yang berasal dari Ulakan Pariaman merupakan daerah pantai mengem-bangkan ajaran agama Islam ke darat, sehingga dikata-kan bahwa adat yang berkembang di Luhak nan Tigo menurun berinteraksi dengan Islam yang datang dari pantai. Secara geografis antara daerah pantai dengan da-erah darat memang mendaki, sebab perkampungan pada wilayah darat umumnya terletak pada kaki gunung se-perti Gunung Merapi, Gunung Singgalang, ataupun ja-jaran Bukit Barisan.

Syekh Burhanuddin mencoba mengembangkan aja-ran Islam secara kompromis. Ia menemui Yang Diper-tuan Agung kerajaan Pagaruyung untuk berdialog ten-tang ajaran Islam. Bersama muridnya yang bernama Id-ris Majolelo dan penghulu Ulakan, ia berhasil diterima raja, sehingga raja Pagaruyung membantunya dalam me-ngembangkan ajaran Sattariyah di Minangkabau. Walau-pun ajaran ini tidak menjadi ajaran resmi kerajaan Pa-garuyung, dengan diterimanya oleh raja ini memudah-kannya untuk mengembangkan ajaran ini (Marjani Mar-tamin, 1987 : 35-45).

Lembaran yang paling hitam dalam sejarah Mi-nangkabau akibat pertikaian para elitnya adalah dikala meletusnya perang Paderi dari tahun 1821-1837, terja-dilah perang saudara antara pengikut kaum agama yang tergabung dalam kaum Paderi melawan kelompok adat. Pada awalnya, konflik terjadi setelah kepulangan tiga orang haji yaitu H. Miskin, H. Piobang, dan H. Sumanik yang kembali dari Makkah. Mereka ingin mengembang-kan ajaran Wahabi yang baru saja berkuasa di Makkah (Christine Dobbin, 1992 : 152-170).

Pada ajaran Wahabi ini, berbagai bentuk aktivitas kaum adat bertentangan dengan ajaran Wahabi seperti mengadu ayam, minum tuak, dan menyabung ayam. Per-tentangan seperti ini kemudian memicu pertikaian yang lebih keras lagi. H. Miskin misalnya, ketika terjadi su-atu pesta adat di Pandai Sikat, maka ia membakar *rumah gadang* pertemuan kaum adat itu. Hal ini tentu saja membuat

kaum adat tidak dapat menerima begitu saja sikap Haji Miskin, sehingga mereka menyerang H. Mis-kin dan pengikutnya.

Perangpun tidak dapat dielakkan. Kaum Wahabi kemudian melahirkan pemimpin perang yang terkenal dengan sebutan “*Harimau nan Salapan*” yang semuanya merupakan tokoh-tokoh Paderi yang berpengaruh. Ke-tidakseimbangan kekuatan, membuat kaum adat memin-ta bantuan kepada Belanda. Hal inipun dinanti-nanti Be-landa dalam rangka proyeknya untuk menguasai Mi-nangkabau. Salah satu puncak dari peperangan adalah penyerangan terhadap keluarga istana Pagaruyung di Balai Tangah Simabur. Peristiwa ini dikenal sebagai pembumihangusan pertama di Minangkabau. Dalam pe-ristiwa itu, semua keluarga istana Pagaruyung mening-gal diserang oleh kaum Wahabi (M. Radjab, 1954 : 90-120).

Walaupun pertikaian yang berkepanjangan antara kaum adat dengan agama berjalan terus, pada waktu-waktu tertentu tetap saja diusahakan suatu perdamaian. Tercetusnya sumpah *satie* antara kaum adat dengan ka-um agama melahirkan filosofis dasar kehidupan Mi-nangkabau yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basan-di Kitabullah*” (Abdul Aziz Saleh,1991). Pencetusan sumpah *satie* dianggap sebagai suatu persetujuan yang dapat meredakan konflik yang telah mengorbankan ji-wa dan raga masyarakat Minangkabau sejak meletusnya perang Paderi di Minangkabau.

Pada tahap selanjutnya dari gerakan-gerakan pem-baharuan Islam, konflik tidak hanya dilontarkan ter-hadap kaum adat, akan tetapi terhadap sesama pemeluk agama Islam. Tema-tema yang dilontarkan adalah upaya pemurnian ajaran Islam dari berbagai bid`ah yang mele-kat dalam berbagai praktek ajaran Islam. Hal yang me-nonjol dalam periode ini adalah corak dari gerakan pem-baharuan Islam ini adalah serangan tokoh-tokoh pem-baharu terhadap tarikat-tarikat seperti tarikat Sattariyah dan Naqsabandiyah .

Gelombang pembaharuan Islam setelah berakhir-nya paham Wahabi yang dianggap mempunyai pengaruh besar adalah dipelopori oleh Syekh Khatib dan para pe-ngikutnya. Akhmad Khatib dianggap sebagai ulama be-sar yang pernah menjadi imam Masjidil Haram di Mek-kah. Ronkel, dalam laporan rahasianya menyatakan bah-wa ada orientasi keagamaan di Minangkabau yaitu ;

Pertama, berlanjutnya tradisi agama lama yang mendapat akomodasi dari kaum adat. Kedua, aliran baru yang lebih bersifat ortodoks, yang dilahirkan oleh Syekh Akhmad Khatib dan murid-muridnya yang tidak menyetujui bentuk tarekat dan adat Minangkabau (terutama soal harta pusaka). Ketiga, kebangkitan baru, suatu aliran yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan modernisme Islam atau kaum muda Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987 : 222).

Dari ketiga bentuk gerakan Islam itu, maka yang paling memberi warna dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah gerakan pemurnian agama Islam yang dipimpin oleh Syekh Akhmad Khatib yang bermukim di Mekkah, namun pikiran-pikirannya mewarnai secara kental gerakan-gerakan Islam di Minangkabau.

Syekh Akhmad Khatib memang dianggap sebagai tokoh penting dalam gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Salah satu tema yang dilontarkannya adalah masalah harta warisan. Ia katakan bahwa sistem harta warisan yang terdapat di Minangkabau pada dasarnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti harta warisan tinggi sehingga orang Minangkabau memakan harta haram (B.J.O. Schrieke, 1973 : 28).

Begitu keras dan kuatnya kritik yang dilontarkan Ahmad Khatib terhadap Minangkabau, sehingga beberapa tulisannya tidak boleh beredar. Pelarangan tulisannya di Minangkabau disebabkan pemikiran yang dilontarkannya dapat mengganggu kepentingan Belanda di Minangkabau. Misalnya masalah kerja sama antara pemerintah dengan Belanda, maka Syekh Akhmad Khatib beranggapan bahwa kerja sama bagaikan suatu dosa besar karena bekerja sama dengan orang-orang kafir (Taufik Abdullah, 1987 : 223).

Syekh Akhmad Khatib dalam mengembangkan gerakan pemurnian Islam tidaklah seorang diri. Sebagai seorang ulama besar dan berpengaruh, ia mempunyai beberapa murid yang dengan segala kemampuan berusaha mengembangkan gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Ketidakpuasan terhadap berbagai praktek ajaran Islam yang berkembang terutama dari tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Syattariyah membuat tokoh-tokoh muda seperti H. Abdul Karim Amrullah, H. Abdullah Ahmad, dan Syekh Jamil Jambek. Reaksi

dari si-kap ketidakpuasan ini menimbulkan gelombang gerakan pembaharuan Islam di tengah-tengah masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam gerakan pembaharuan Islam tidak lagi melalui kekerasan, akan tetapi melalui dialog intelektual. Melalui berbagai media cetak seperti Majalah Al-Munir, tokoh-tokoh pembaharu melancarkan kritik terhadap kaum tarekat. Melalui majalah-majalah, mereka melemparkan kritik dan celaan-ce-laan terhadap tarekat-tarekat sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Akhmad Khatib terutama hal yang dianggap bid'ah, mulai dari ajaran dan praktek tarekat sampai hukum waris Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987 : 220).

Pada waktu itulah muncul dua kubu, yaitu kubu pembaharu seperti H. Abdul Karim Amarullah, H. Abdullah Ahmad, dan Syekh Jamil Jambek melawan kubu tarekat seperti Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Abbas, Syekh Mustafa, Syekh Khatib Ali dan Syekh Munka (Hamka, 1982 : 106-107). Sebutan bagi kaum pembaharu yang terkenal yaitu kaum muda yang pertama kali diperkenalkan oleh Datuak Sutan Marajo dalam Majalah Panji Islam tentang gelombang pembaharuan oleh kaum itu (Sidi Ibrahim Boehari, 1981 : 61-63).

Untuk lebih mengembangkan paham pemurnian Islam, mereka mendirikan sekolah. Surau Jembatan Besi yang selama ini menjalankan sistem tradisional mereka kembangkan menjadi sekolah Sumatera Thawalib yang merupakan bentuk gerakan pembaharuan Islam yang berpengaruh dalam mengembangkan gerakan pembaharuan Islam. Taufik Abdullah menyatakan bahwa gerakan kaum muda di Minangkabau justru berpusat di Sumatera Thawalib ini (Taufik Abdullah, 1971). Banyak muridnya dari berbagai daerah untuk belajar. Sekolah inilah yang kemudian melahirkan sejumlah ulama seperti Hamka dan Ar. St. Mansyur.

Kemajuan yang terpenting dari Sumatera Thawalib adalah sistem pendidikan yang diberikan. Pada sekolah inilah diperkenalkan berbagai pelajaran yang sebelumnya tidak ditemui dalam sekolah-sekolah agama lainnya. Sistem surau bergeser menjadi sistem sekolah. Murid sudah dibagi dalam kelas-kelas, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Pelajaran bahasa Arab menjadi pelajaran yang utama dengan sasaran untuk dapat memahami ajaran Islam langsung dari sumbernya yang asli (Deliar Noer, 1987 : 52-59).

Proses dalam dinamika kehidupan masyarakat selalu saja terjadi perubahan-perubahan, baik dalam pola berfikir maupun dalam struktur. Arti penting dalam perubahan yang berlangsung dalam masyarakat akan terwujud dalam ungkapan adat yaitu *“sakali air gadang, sa-kali titian barubah”*. Perubahan dalam kehidupan amat disadari sehingga tradisi yang berkembang dalam masyarakat adalah tradisi perubahan itu sendiri.

Tidaklah heran, bila mana orang Minangkabau melakukan berbagai aksi dan protes terhadap nilai-nilai yang bertahan dalam masyarakat sebagai perwujudan dari kecintaan akan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Orang seperti Sutan Syahrir misalnya, lebih merasakannya dirinya sebagai warga Banda Naira daripada sebagai seorang Minangkabau, Syekh Akhmad Khatib memilih hidup sampai mati di Mekkah sebagai protesnya terhadap harta waris di Minangkabau, dan H. Agus Salim tidak mau menginjakkan kakinya sampai mati di Minangkabau karena konfliknya dengan nilai-nilai di Minangkabau.

Dari berbagai peristiwa sejarah yang telah dikemukakan sebelum ini, penulis sebenarnya ingin menyampaikannya bahwa konflik dalam sejarah Minangkabau sesungguhnya merupakan hal yang sudah menjadi tradisi kehidupannya. Proses yang panjang dalam sejarah Minangkabau yang penuh dengan pertikaian, konflik, dan perang telah menjadikan konflik ini sebagai tradisi dalam masyarakat.

Pada gilirannya, dari berbagai konflik yang telah dilewati, baik secara intelektual maupun dengan kekerasan seperti Perang Paderi, menjadikan watak orang Minangkabau dipenuhi dengan keinginan untuk selalu bergejolak sehingga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tradisi dalam masyarakat. Yang penting untuk dikemukakan adalah bahwa tradisi konflik ini sesungguhnya upaya untuk mencari alternatif-alternatif dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik. Begitu adanya tradisi konflik dalam masyarakat Minangkabau, menjadikan watak ini bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika kehidupan keseharian yang berkembang sebagai modal dasar dan besar yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau untuk menjadi yang lebih maju.

G. Eksistensi Konflik

A.A. Navis, dalam sebuah pembicaraan di seminar menyatakan bahwa orang Minangkabau yang muncul menjadi tokoh nasional semenjak zaman pergerakan sampai Indonesia merdeka mencapai 65 % dari semua tokoh pergerakan nasional yang ada. Dalam konteks ini, penulis mencoba menjadikan pernyataan di atas sebagai suatu titik tolak pertanyaan, faktor apakah yang menyebabkan orang Minangkabau mampu melahirkan tokoh-tokoh yang berkaliber nasional maupun internasional?

Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, maka terdapat dua kubu dari tokoh nasional itu yaitu dari pendidikan Islam dan pendidikan sekuler. Mereka yang mendapatkan pendidikan Islam pada umumnya belajar di berbagai negara di Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, sedangkan yang menempuh pendidikan sekuler umumnya belajar di Indonesia dan berbagai negara-negara Eropa khususnya Belanda. Christine Dobbin mengemukakan sikap masyarakat Minangkabau terhadap dunia pendidikan sekuler pada masa-masa awal berdirinya sekolah sekuler di Minangkabau yaitu :

Pada tahun 1840-an, dengan gagalnya pemberontakan mereka, dan menghadapi kenyataan pemerintahan kolonial Belanda, beberapa keluarga di desa-desa memutuskan untuk mencari kemajuan yang sebaik-baiknya. Ternyata mereka telah memilih dengan bijaksana. Kalau pada masa lalu, keluarga menghasilkan gugusan pedang dan pengrajin, sekarang yang dihasilkan adalah guru-guru, birokrat, dokter, dan ahli hukum, dengan keluarga-keluarga tertentu sering menspesialisasikan diri pada "*profesi intelektual*" tertentu (Christine Dobbin, 1992: 286).

Kemajuan pendidikan ditandai dengan banyaknya profesi yang bersifat intelektual dimasuki oleh orang Minangkabau. Graves menyatakan bahwa komponen utama golongan elite Indonesia abad kedua puluh muncul dari desa-desa di Agam ini, dan kaum elite intelektual ini terbukti siap menghadapi imperialisme Belanda ketika tiba waktunya (Elizabeth Graves, 1971: 171). Hal ini memang terbukti kemudian hari terutama setelah Indonesia merdeka, dimana orang Minangkabau yang mendapat pendidikan Barat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Perubahan dari dunia pedagang ke dunia intelek-tual ini menjadi penting bagi masyarakat Minangkabau. Suatu proses kultural berlangsung dalam dunia pendidikan ini kemudian membuat mereka jauh lebih dinamis dalam menatap kehidupan itu. Gejala yang menarik ada-lah bahwa tidak semua yang mengikuti pendidikan Barat itu semuanya menjadi sekuler, tetapi bahkan menjadi to-koh-tokoh Islam.

Orang Minangkabau yang memperoleh pendidikan Barat banyak juga yang mempunyai pikiran yang Islami. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan adalah Abdul Muis, H. Agus Salim, dan M. Natsir. Ketiganya mempuny-ai dasar pendidikan Barat, namun mereka tetap saja mempunyai visi ke-Islaman yang kuat. Abdul Muis se-masa hidupnya aktif dalam Serikat Islam. Ia juga meru-pakan tokoh yang disegani dalam organisasi itu karena kemampuan intelektualnya. Dengan demikian, *dikotomi* pendidikan Barat melahirkan manusia yang sekuler, pa-da kasus-kasus tertentu menyimpang dari anggapan umum yang berkembang dalam masyarakat.

Tokoh lain yang lebih menonjol dalam Serikat Is-lam yang berasal dari Minangkabau adalah H. Agus Salim. Bahkan tokoh yang satu ini dianggap sebagai ba-pak pemikir Islam di kalangan muda. Agus Salim dalam ke-Islaman dianggap sebagai tokoh penting dalam seja-rah Islam di Indonesia sekaligus sebagai tokoh nasional bangsa. Dalam melihat perbedaan tentang perjuangan misalnya, ia menyatakan bahwa perjuangan untuk mem-peroleh kemerdekaan hanya semata-mata karena Allah S.W.T (Taufik Abdullah,1987:16).

Dari hal yang dikemukakan di atas akan dapat ter-lihat bahwa suatu dialog terus berlangsung dalam me-mentukan visi kehidupan dalam masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak dan kebebasan untuk me-mentukan nilai-nilai dan sikap hidupnya. Pada saatnya, benturan-benturan pun tak dapat dielakan terutama de-ngan nilai-nilai yang telah mapan. Dalam konteks ini sesungguhnya telah berlangsung suatu dialog kebuda-yaan antaranggota masyarakat.

Dalam dialog kebudayaan berbagai idiom diguna-kan untuk dijadikan sebagai pegangan. Setiap idiom itu diperjuangkan oleh setiap kelompok pendukungnya, ha-nya saja yang perlu diperhatikan adalah selama berlang-sung

dialog, maka ada yang secara terbuka dan bahkan sampai konflik yang bersifat intelektual maupun bera-khir dengan konflik fisik. Mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Umar Kayam tentang dialog kebudayaan yang berlangsung di Minangkabau, dikatakannya:

Segera kita melihat perbedaan yang jelas antara Jawa dengan Minangkabau. Di Jawa upaya dialog budaya diharapkan pada suatu saat dapat sampai pada transformasi budaya yang memuaskan adalah terutama lewat jalur priyayi atau pembangunan elite birokrasi. Di Minangkabau di mana tradisi suatu birokrasi apalagi elite birokrasi nyaris tidak dikenal, mereka mengembangkan upaya dialog budaya lewat jalur yang lebih bebas (Umar Kayam, 1989:23).

Kunci pokok dalam memahami budaya Minangkabau agaknya dapat dilihat dari pemikiran yang dilontarkan oleh Umar Kayam di atas yaitu bahwa jalur yang dikembangkan dalam dialog budaya adalah jalur yang bebas, sehingga setiap komponen dalam masyarakat mendapatkan kesempatan dalam melakukan dialog. Warna yang lebih jelas tentang dialog ini akan terlihat dari suasana kehidupan pedesaan di Minangkabau.

Di pedesaan misalnya, di samping mesjid, maka warung kopi juga merupakan suatu tempat dialog penting yang perlu diperhatikan. Pada kedai kopi ini, setiap orang akan bebas menyampaikan pendapatnya tanpa harus diikuti suatu ketakutan ataupun intimidasi. Rosihan Anwar menyatakan bahwa di “*DPR kedai kopi*”, semua pembicaraan mulai dari permasalahan yang berlangsung di kampung sampai pada masalah internasional akan dibicarakan dan putus di kedai kopi itu. Artinya, mereka tidak hanya membicarakan persoalan yang berlangsung disekitarnya, akan tetapi juga memperdebatkan persoalan-persoalan yang berlangsung secara nasional atau internasional.

Walaupun tidak menghasilkan secara material, namun kemampuan untuk berdialog dan mengemukakan gagasan akan diuji secara terbuka sebab dalam DPR kedai kopi itu, kritik yang dilancarkan amat keras dan kadang kala “*vulgar*” sehingga setiap orang yang akan berbicara akan berlaku hati-hati. Yang menarik adalah bahwa pada DPR kedai kopi segala status sosial yang dimiliki akan terlepas begitu saja. Mereka akan memperlakukan orang sama, sehingga seorang pejabat penting atau sarjana akan diuji pemikirannya oleh masyarakat

secara terbuka. Dari hal-hal seperti inilah watak konflik terbentuk sebagai suatu “batu ujian” ataupun sebagai bagian dari “*pendidikan non formal*” dalam suatu pro-ses pembentukan pemikiran masyarakat.

Dalam suatu dialog seperti ini, maka setiap pembicara akan berlangsung dalam bentuk tingkat pembicara secara bebas. Setiap orang akan melontarkan pemikirannya sesuai dengan pemikiran yang dimilikinya. Tradisi kebebasan seperti ini membuat mereka bersikap kritis dalam melihat kehidupan, sehingga segala sesuatu yang tidak berkenan dengan pikiran dan jiwa mereka akan langsung disampaikan. Akan berbeda dengan sistem budaya priyayi yang berkembang seperti di Jawa, di mana terdapat suatu sikap yang sungkan untuk melakukan suatu kritik ataupun beda pendapat dengan kaum yang lebih tua dan kalangan yang berdarah biru.

Pada saatnya, situasi perdebatan secara bebas akan dapat mengundang berbagai dinamika dalam dialog budaya itu. Dinamika budaya seperti ini membutuhkan suatu kedewasaan dalam setiap orang untuk dapat menerima berbagai lontaran kritik dan kecaman yang sering-kali tidak mengenakan bagi orang lain. Namun kebiasaan seperti ini sudah menjadi bagian hidup mereka, maka setiap pembicaraan tanpa diikuti oleh perbedaan dan kritik menjadi terasa hambar. Memang terasa sebagai suatu hal yang berlebihan, namun bisa terasa sebagai hal yang mengasyikkan apabila terjadi suatu kritik dan dialog yang seimbang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Cerminan ini juga dapat terlihat dari berbagai upacara-upacara tradisional seperti perkawinan. Dalam upacara perkawinan, pidato adat berlangsung berjam-jam sebagai suatu cerminan dialog dalam suatu pesta. Artinya, untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam upacara di Rumah Gadang, maka dilakukan dengan pidato persembahan yang selalu saja dengan perdebatan antara sesama penghulu. Hal seperti ini sudah mencerminkan arti penting dialog dalam masyarakat di Minangkabau.

Kembali mengikuti pemikiran Umar Kayam bahwa dalam sejarah Minangkabau nyaris tidak dikenal elite birokrasi. Catatan sejarah hanya memperlihatkan bahwa hanya pada waktu kerajaan Pagaruyung berkuasa terdapat suatu sistem pemerintahan yang terpusat. Hal itu pun sesungguhnya bukan

berarti semua wilayah di Minang-kabau tunduk pada Pagaruyung, akan tetapi kerajaan ini lebih bersifat simbolis saja. Hal ini juga akan berbeda dengan yang terdapat di Jawa ataupun di Bali, di mana terdapatnya suatu kekuatan yang menyatukan berbagai wilayahnya.

Sebagai suatu nagari yang merdeka, ia mempunyai sistem pemerintahan nagari yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini berlakulah sistem demokrasi, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama dalam masyarakat. Elite desa akan dihargai bukan berdasarkan kedudukan-nya, akan tetapi sikap dan pandangan hidupnya. Sebagai perbandingan dengan Jawa misalnya, Umar Kayam mengemukakan yaitu ;

Dalam konteks “negara” yang harus tampil sebagai suatu pentas atau suatu *theatre* suatu sistem nilai yang menekankan pada keselarasan hierarkhis, rukun, anti konflik, halus, cangguh, luwes indah, ele-gant, adalah ramuan nilai yang sangat mendukung kelangsungan hidup sistem kerajaan tersebut. Sesuai dengan kiat memerintah yang efektif sistem nilai tersebut terutama harus berlaku bagi bawahan bukan atasan. Yang bawah mengacu pada yang atas, yang atas mengacu pada yang atas lagi se-hingga kerucut piramida itu sampai dipuncak ha-nya sang raja yang boleh menikmati *privilege* un-tuk berbuat sekehendak hatinya. Namun demikian pada setiap jenjang birokrasi tradisional dan feo-dal setiap pemimpin adalah puncak piramida se-hingga ia sedikit banyak menikmati *privilege* yang sama dengan raja (Umar Kayam, 1989 : 30-31).

Pemikiran yang dikemukakan oleh Umar Kayam di atas memperlihatkan suatu bentuk sistem pemerintahan yang feodal di mana struktur pemerintahan yang terben-tuk adalah berbentuk piramida terbalik. Puncak dari se-gala kekuasaan terletak pada tangan raja. Dalam skala mikro, maka puncak kekuasaan terletak pada tangan pe-mimpin lokal seperti Bupati, Adipati, Kepala Desa dan sebagainya. Mereka secara langsung maupun tidak lang-sung sudah menjadi raja kecil dengan memerintah seper-ti raja di wilayah kekuasaannya.

Sistem birokrasi tradisional di Minangkabau pada prinsipnya tidak memiliki bentuk yang feodal. Dalam skala yang lebih luas, sesungguhnya sistem feodal tidak berakar dalam masyarakat. Kerajaan Pagaruyung misal-nya, ia hanya berhasil menempatkan beberapa pejabat-nya di daerah tertentu seperti Mangkudun di Sumanik yang bertugas sebagai Menteri Keamanan, Tuan Kadi di Padang Ganting yang mengurus keagamaan, Indomo di Saruaso yang mengurus

persoalan adat dan Bandaharo di Sungai Tarab yang mengurus persoalan keuangan (A.A.Navis, 1985).

Hanya saja yang perlu dicatat adalah bahwa mereka sesungguhnya tidak mempunyai akar yang kuat pada masyarakat banyak. Dalam menjalankan kebijakan, mereka lebih cenderung memanfaatkan kekuatan elite lokal seperti penghulu. Sebagai contoh yang menarik adalah manakala Haji Sumanik, sebagai salah seorang tokoh paderi berhasil mengimbangi kekuatan Mahkudum di Sumanik. Maka untuk menjalankan misi kerajaan, ia terpaksa berkerja sama dengan penghulu untuk membendung kekuatan haji Sumanik. Konflik pun tak dapat dielakan antara Haji Sumanik dengan Mahkudum, yang harus menyelesaikan sebuah konflik. Pada gilirannya, kekuatan Paderi mengalami kekalahan dan membuat Haji Miskin harus angkat kaki dari Sumanik (M. Radjab, 1969).

Percaturan elite seperti ini sudah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Minangkabau. Artinya, konflik dalam berbagai bentuk sudah menjadi gaya hidup dan pandangan hidup dalam masyarakat. Dari berbagai contoh yang telah dikemukakan terlihat makna konflik dalam kehidupan masyarakat sehingga eksistensi konflik amat dihargai sebagai suatu nilai untuk mengembangkan dinamika kehidupan masyarakatnya.

Sebuah anekdot dalam masyarakat kampus di Medan menyatakan bahwa; kalau lima orang Batak berkonflik, maka akan memunculkan tiga kelompok yang saling berbeda pendapat. Sebaliknya, apabila lima orang Minangkabau berkonflik, maka lahirlah sebanyak tujuh kelompok yang saling memperjuangkan keinginannya. Lantas dari mana dua kelompok yang berlebih itu berasal? Sesungguhnya dari anekdot di atas yang dikemukakan memperlihatkan tingkat keinginan akan terwujudnya suatu perbedaan yang tinggi antar sesama orang, sehingga setiap orang ingin memiliki alternatif sendiri dalam menyampaikan pikiran dan bahkan satu orang boleh-boleh saja mempunyai pikiran yang lebih dari satu ataupun mempunyai pemikiran alternatif sehingga memunculkan dua pemikiran baru dari satu anggota masyarakatnya. Munculnya tujuh kelompok dari lima akan memperlihatkan bahwa ada di antara yang lima orang itu mempunyai pemikiran alternatif sendiri di samping pikiran pokok yang

dimilikinya. Sifat-sifat seperti ini pa-da gilirannya sudah menjadi watak yang mendarah da-ging dalam masyarakat Minangkabau.

Hal yang ingin saya sampaikan adalah sulit bagi orang Minangkabau untuk bersatu dalam suatu kelom-pok tanpa memperlihatkan ke-*aku*-annya. Jiwa yang ber-gejolak menjadikan dinamika kehidupan beragam. Sam-pai zaman Indonesia merdeka, gejala konflik ini tetap menjadi bagian yang penting dalam dinamika masyara-kat Minangkabau. Perubahan mendasar terjadi dalam di-namika kehidupan masyarakat Minangkabau di kala ter-jadi perubahan dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto.

Pada rezim Soekarno, konflik di tingkat nasional yang diperlihatkan oleh masyarakat Minangkabau ada-lah reaksi terhadap pemerintah Soekarno yang terlalu dekat dengan PKI. Tokoh-tokoh masyarakat Minangka-bau baik yang berada di Jakarta maupun yang berada di Minangkabau sendiri melakukan koreksi total terhadap Soekarno. Puncak reaksi itu adalah meletusnya PRRI se-bagai suatu protes terhadap rezim yang berkuasa. Kon-flik yang muncul, meminjam istilah Gurr, sudah sampai pada tahap *konfirasi*, yaitu bentuk ketidakpuasan yang melahirkan bentuk perang saudara.

Kekalahan pihak PRRI dalam pemberontakan pada masa rezim Soekarno itu membawa dampak yang besar dalam dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau. Kekalahan dalam perang itu membuat masyarakat bera-da seperti dalam ketakutan dan rendah diri. Mereka mempunyai anggapan bahwa kekalahan perang merupa-kan suatu kekalahan besar, karena mereka gagal mem-perjuangkan pemikiran mereka terutama untuk men-dongkel PKI yang tertamat dekat dengan Soekarno.

Pemberontakan daerah ini telah merusak sendi-sen-di penting dalam nilai budaya masyarakat Minangkabau. Pemberontakan bukan hanya kekalahan dalam perang, lebih jauh lagi menghancurkan nilai-nilai yang selama ini dapat membuat masyarakat lebih maju. Seperti yang diungkapkan oleh Imran Manan, seorang antropolog dari IKIP Padang mengemukakan tentang dampak dari PRRI terhadap masyarakat Minangkabau bahwa, sebagai aki-bat dari kekalahan PRRI adalah bahwa harga diri orang Minangkabau menjadi jatuh. Gengsi yang mereka miliki selama ini sebagai suku bangsa yang mempunyai andil besar dalam

memperjuangkan republik ini, setelah kekalahan PRRI gingsi itu seperti abu di atas tungku yang habis ditiup angin. Sedemikian fatalnya akibat perang itu bagi masyarakat Minangkabau, melihat orang berpakain hijau (tentara) membuat masyarakat ciut nyalinya dan merasa ketakutan yang tak beralasan.

Kondisi seperti di atas terus berlanjut di saat Indonesia di bawah rezim Soeharto. Masyarakat Minangkabau seperti menyimpan trauma yang dalam akibat kalah perang, sehingga berbagai watak yang mereka miliki selama ini seperti watak konflik berubah mengikuti pola umum yang berlangsung secara nasional.

H. Dari Demokrasi Ke Feodalisme

Menurut Kuntowijoyo, sewaktu Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia, dalam sebuah wawancara dengan koran Kedaulatan Rakyat mengemukakan pemikiran yang amat menarik yaitu *“kerajaan semakin demokratis, sedangkan republik semakin feodal”*. Landasan pemikiran Kuntowijoyo adalah membandingkan dua nilai yang berada dan berkembang kuat di Indonesia dewasa ini, yaitu feodalisme dan demokrasi. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai simbol raja yang feodal dalam masyarakat Jawa dengan proses sejarah di Yogyakarta sudah mulai meninggalkan tradisi-tradisi feodalismenya dan mencoba untuk mengembangkan nilai-nilai yang demokrasi. Namun sebaliknya, Republik Indonesia dengan Jakarta sebagai pusat yang memperjuangkan lahirnya demokrasi bergeser ke arah sistem pemerintahan yang feodalistik. Pergeseran ini dirasakan sekali dalam dua dasawarsa belakang ini.

Pergeseran orientasi budaya ini akan ditandai dengan perubahan kiblat kebudayaan itu. Dalam sistem demokrasi orientasi budaya lebih cenderung kepada Dewan Rakyat, maka dalam budaya feodal orientasi budaya mengacu kepada keraton. Dalam hal ini keraton adalah perlambang dari pusat kekuatan politik dan sosial budaya yang sentralistik, yang penataannya diatur secara hierarkis dari atas ke bawah. Oleh karena itu, raja telah menjadi figur sentral yang mengendalikan semua kekuasaan, baik kekuasaan duniawi sebagai raja maupun pemegang kekuasaan sakral sebagai wakil dewa di bumi (Mochtar Naim, 1987 : 212).

Persoalan upaya membentuk sistem hierarkis dalam struktur kebudayaan sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan politik pihak penguasa. Untuk mempertahankan rezimnya, maka langkah yang ditempuh untuk mempertahankan *status quo*, kekuasaan yang mereka pegang adalah mengkondisikan masyarakat untuk tetap di bawah kendali pihak penguasa. Semua keinginan penguasa secara paksa maupun sukarela, secara keras maupun persuasif akan dijalankan.

Kekuasaan menjadi kekuatan yang tak terkendali sebab lembaga yang seharusnya mengontrol kekuasaan juga berada di bawah pengaruh yang kuat dari elitnya. Kedudukan semua lembaga dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara tidak langsung dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan sang penguasa, sedangkan rakyat kebanyakan tidak masuk perhitungan sang penguasa sebab posisinya dianggap sebagai *abdi dalem* yang harus mengabdikan dirinya kepada kepentingan sang penguasa. Dalam bentuk yang tradisional, seorang *abdi dalem* di keraton di Jawa misalnya digaji Rp. 15.000,- juga ditetapkan dalam bentuk lain oleh penguasa.

Pengendalian tidak hanya dalam bidang politik, akan tetapi juga meliputi hampir semua lapisan kehidupan masyarakat. Untuk mengekspresikan seni saja misalnya, maka pemerintah memberikan suatu izin tertentu sehingga kalau ada seniman yang mengkritik penguasa, maka pada pertunjukan selanjutnya akan dicekal. Kejadian yang menimpa W. S. Rendra merupakan contoh kongkrit keterlibatan penguasa yang terlalu dalam pada bidang kesenian. Begitu juga misalnya, memberi “SIM” kepada juru dakwah juga merupakan suatu kebijaksanaan untuk menghindari adanya juru dakwah yang mengkritik pemerintah.

Keinginan mempertahankan kekuasaan yang membabi-buta membuat mereka menempuh segala cara untuk meredam kelompok-kelompok yang melakukan oposisi. Dengan menggunakan dalih mempertahankan stabilitas dan menjaga kesinambungan, pihak penguasa tidak menghiraukan segala suara yang datang dari pihak bawah. Tidak mau menerima kritik dan merasa strategi pembangunan yang diterapkan merasa benar membuat mereka menutup mata dari pemikiran luar. Sistem feodalis secara nyata berjalan, terutama upaya untuk menutup dirinya dari pihak lain.

Pola yang diterapkan adalah menggunakan sistem *patron-client* antara sang penguasa sebagai *patron*nya dengan rakyat sebagai *client*-nya yang harus mengabdikan kepada kepentingan *patron*. Sasaran yang diharapkan adalah bahwa bapak dalam mengambil kebijaksanaan ti-dak dapat disalahkan. Sebab bapak selamanya benar, se-dangkan rakyat yang menjadi sasaran dari kebijaksanaan itu sesungguhnya untuk mendukung kepentingan mereka juga. Pidato-pidato pejabat mulai tingkat bawah sampai orang nomor satu di Republik ini akan selalu menyata-kan bahwa tujuan pembangunan ini adalah untuk mema-jukan kepentingan rakyat banyak, namun demikian da-lam realitasnya adalah untuk kepentingan sekelompok orang saja yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Pada gilirannya berlangsunglah *pengebirian* terha-dap berbagai peraturan yang telah disepakati secara ber-sama. Pancasila digunakan sebagai senjata untuk mema-tikan lawan yaitu dalam bentuk segala sesuatu yang me-nentang penguasa berarti anti Pancasila, padahal Panca-sila hanya sebagai tameng saja. Contoh yang lebih kon-krit misalnya, Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi; “Per-ekonomian disusun secara bersama berdasarkan azas ke-keluargaan”, dalam rangka prakteknya ekonomi me-mang disusun secara bersama, namun azas kekeluargaan yang mereka kembangkan adalah azas keluarga inti da-lam konsep antropologi.

Dalam konsep antropologi, keluarga dimaksudkan adalah terdiri dari *ayah*, *ibu* dan *anak*. Demikianlah juga halnya kelompok yang mengendalikan ekonomi nasional yaitu ekonomi nasional berada di bawah cengkeraman pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan dan bahkan langsung dikendalikan oleh keluarga inti pemegang ke-kuasaan. Keterlibatan yang besar dari keluarga *Cendana* dalam lapangan ekonomi merupakan indikator dari pe-nerapan yang kaku dari azas kekeluargaan yang berlaku dewasa ini (Yahya Muhaimin, 1989). Dalam bentuk lain dikatakan bahwa kemajuan ekonomi yang melahirkan kelompok konglomerat di Indonesia hanyalah berbentuk kapitalisme semu saja. Arief Budiman mengemukakan-nya dalam bentuk kapitalisme yang malu-malu.

Secara keseluruhan warna budaya seperti yang le-bih cenderung berubah ke arah feodal memang telah me-rekat kuat dalam dinamika perkembangan budaya Indo-nesia kontemporer. Prof. Umar Kayam, dalam pidato pe-ngukuhannya

sebagai Profesor di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, menyatakan ciri khas budaya feodal dalam masyarakat Indonesia modern yaitu:

Budaya agraris feodal yang mengutamakan kerukunan dan takut kepada konflik dengan demikian juga akan sangat menghargai dan mementingkan gaya bahasa penyampaian pikiran. *Euphemism*, bahasa untuk melunakkan itu, menjadi penting. Orang cenderung takut, risukuh untuk menyampaikan pendapatnya secara terus terang, apabila kepada penguasa, penguasa pun cenderung agar kritik disampaikan dengan sopan, halus, dan elegant (Umar Kayam, 1989 : 34).

Mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Umar Kayam di atas, akan terlihat bahwa ciri khas budaya feodal amat merasuki kehidupan masyarakat yang menamakan dirinya “Orde Baru” sekarang ini. Lebih jauh Umar Kayam menyatakan bahwa sulit membayangkan suatu modernitas dengan nilai feodal *beamtenstaat*, adalah sulit membayangkan modernitas tanpa sistem yang terbuka, sebab membayangkan apabila modernitas tercapai dengan sistem tertutup alangkah akan kering dan sunyi (Umar Kayam, 1989 : 36).

Persoalan yang menarik adalah sejauh mana dalam sistem politik yang berkembang dewasa ini di Indonesia mampu memberikan sebuah peluang kepada masyarakat untuk dapat berkembang secara bebas dalam menentukan visinya. Dalam sistem masyarakat yang bersifat feodal, salah satu hal yang jelas adalah menghindari konflik dan sulit untuk dikritik. Dengan demikian, pola yang diterapkan adalah pola tunggal yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan dari atas. Keluar dari hal itu, maka akan dianggap suatu tindakan yang melawan pihak atas, sehingga bisa mengakibatkan “*kualat*” bagi yang melakukannya. Dalam konteks ini, semua yang dikatakan oleh atasan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahkan. Pada gilirannya dialog budaya tidak memungkinkan untuk dilakukan sebab komunikasi dengan pihak atas sudah “ditutup” terlebih dahulu. Senjata yang digunakan tidak hanya politiknya dialog dengan pihak atas, lebih jauh lagi menggunakan kekuatan tentara “mematikan” jalur dialog. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, maka setiap kelompok yang memiliki visi yang berbeda dengan pihak penguasa akan langsung dicap sebagai “anti Pancasila” dan dituduh sebagai pihak yang melakukan makar terhadap penguasa. Padahal sesungguhnya yang mereka laku-

kan adalah suatu kritik terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa. Mereka tidak menginginkan menumbangkan penguasa secara militer sebab mereka tidak memiliki angkatan bersenjata, tetapi menginginkan suatu dialog terbuka yang menyangkut berbagai pernyataan, tindakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara. Hal ini akan terlihat sebagaimana yang dilakukan oleh suatu kelompok yang amat terkenal yaitu Petisi 50.

Masalah pendekatan yang digunakan sesungguhnya merupakan kunci pokok. Artinya, dengan menggunakan “*security Approach*” terutama memanfaatkan secara maksimal kekuatan tentara, penguasa mencoba meng-hambat seluruh jalur-jalur yang mencoba mengoreksi kebijakan yang diambil. Bahkan lebih jauh lagi, penguasa tidak memberi kesempatan pada kelompok yang ber-beda pendapat untuk berkembang. Penguasa secara ce-pat “*memotong pucuk yang baru tumbuh*” dari setiap ke-lompok yang mencoba memberi koreksi terhadap pe-nguasa.

Setiap kelompok yang mereka anggap tidak meng-ikuti dan berlawanan dengan pemikiran pihak penguasa, secara langsung ditindak secara tegas dengan menggu-nakan tentara. Pada hal, seperti Petisi 50, mereka se-sungguhnya tidak memiliki persenjataan untuk melawan penguasa dan hanya menginginkan dialog, namun jawa-ban yang diterima adalah mencekal mereka dalam ber-bagai aktivitasnya, sehingga mematikan sebuah dialog yang mungkin saja akan amat menarik dilihat dari kon-teks sebuah dialog budaya.

Satu pertanyaan yang ingin dikemukakan, dapat-kah dalam situasi yang demikian akan muncul suatu “*kompetisi*” dalam melahirkan *inovasi-inovasi* dalam rangka mencapai suatu bentuk baru yang lebih baik yang dapat mengangkat harkat kehidupan manusia?. Mengacu pada pertanyaan yang dikemukakan di atas, maka tulisan ini menyoroti secara khusus dinamika kebudayaan di Minangkabau.

Mengikuti secara seksama kondisi internal perkem-bangan kehidupan masyarakat Minangkabau dewasa ini, ada satu hal yang terasa amat kental yaitu cengkeraman budaya yang berkembang secara makro yang lebih cen-derung mengacu bentuk budaya yang *feodal* merasuk se-cara amat kuat ke dalam dinamika kehidupan masya-rakat Minangkabau. Hal ini tidak lagi sekedar permu-kaan saja, akan tetapi sudah merasuki gaya kehidupan keseharian, sehingga tidaklah mengherankan dikatakan di sini bahwa ciri khas kebudayaan yang

dikembangkan di Minangkabau dengan “*demokrasi desa*”nya telah bergeser menjadi bentuk “*feodalism*”.

Dalam mengkaji proses perubahan dari nilai demokrasi ke nilai feodalisme pada hakikatnya haruslah dilihat bagaimana suatu nilai budaya baru yaitu seperti kekuasaan menciptakan bentuk dalam tatanan kehidupan masyarakat. Proses perubahan dari budaya demokrasi ke feodal sesungguhnya lebih banyak didukung oleh kelompok yang memegang kekuasaan di tingkat lokal. Para *Ambtenaar* ini mencoba menerjemahkan kekuasaan pusat dengan meniru pola yang berkembang di pemerintahan pusat. Kecenderungan menerapkan budaya Jawa yang lebih berwarna feodal pada pemerintahan pusat juga secara langsung maupun tidak langsung diterapkan oleh pemerintah daerah.

Para pejabat di daerah juga mempunyai kepentingan besar dalam menjalankan keinginan pemerintah pusat. Berbagai komponen yang terdapat di daerah sesungguhnya merupakan alat bagi kepentingan pemerintah pusat untuk menjalankan misinya di daerah. Walaupun gubernur dipilih oleh DPRD, namun yang menentukan seseorang diangkat atau tidak menjadi gubernur ditentukan oleh presiden.

Kebudayaan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari unsur kekuasaan. Rekayasa kebudayaan yang dilakukan oleh pihak penguasa lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang dikembangkan oleh penguasa. Untuk mempertahankan rezimnya, maka kebudayaan pun halal saja dimanipulasi untuk mempertahankan kepentingannya. Manipulasi terhadap rakyat bisa dilakukan dengan berbagai cara terutama sekali melalui berbagai media seperti TV, radio, dan surat kabar. Pemberitaan yang berasal dari satu sumber (pemerintah) akan lebih memudahkan untuk merekayasa pemberitaan yang harus sesuai dengan keinginan dan kepentingan penguasa.

Dengan demikian, kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini kepentingan dan keinginan presiden haruslah diwujudkan secara optimal oleh pejabat daerah. Jika keluar dari hal itu, maka akan dapat membahayakan kedudukannya. Para pejabat daerah akan melakukan langkah dalam bentuk apa pun untuk menjalankan semua program pusat tanpa mendapat kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Meminjam pemikiran Ma-chiavelli yang terkenal itu,

maka saat ini, seringkali pe-jabat daerah untuk mewujudkan keinginan penguasa pu-sat akan menjalankan semua cara.

Contoh yang menarik adalah paket pusat yang ha-rus dijalankan oleh pejabat daerah dalam memenangkan Pemilu. Untuk memenangkan Pemilu pemerintah daerah mengerahkan segala potensinya. Biasanya, dalam kon-teks ini elite tradisional pedesaan dijadikan alat perpan-jangan tangan bagi pemerintah untuk memenangkan Pe-milu. Dengan memberi “*iming-iming*” tertentu, mereka dirayu, diintimidasi untuk memenangkan Golkar, se-hingga pada saatnya para elite inilah yang bekerja pada tingkat bawah untuk memenangkan Pemilu. Hal ini su-dah menjadi rahasia umum dalam masyarakat pedesaan di Minangkabau.

Sebaliknya, tidak semua elite yang ada memihak pada pihak penguasa. Elite lainnya seperti ulama tetap saja menjadi kekuatan yang mencoba menahan laju ge-rak dari pihak Golkar tetap saja menjadi pihak yang oposan terhadap pihak penguasa yaitu ulama. Ulama pe-desaan seperti H. Mahludin Yatim yang dikemukakan pada awal tulisan ini tetap mencoba komitmen terhadap garis perjuangan yang dilandasi oleh ajaran Islam. Ia mencoba memberi suatu alternatif terhadap kebijakan yang dilakukan penguasa dengan memberikan alternatif PPP sebagai kekuatan alternatif.

Secara umum PPP memang mengalami kekalahan di Minangkabau, namun keberhasilan PPP menahan la-junya Golkar di Sumanik misalnya masih memperlihatkan adanya suatu pola berpikir alternatif dalam masya-rakat. Namun demikian, secara umum bentuk pemikiran yang alternatif ini sudah mulai memudar sebagai proses dari cengkraman budaya makro yang jauh lebih kuat. Salah satu kekuatan yang digunakan penguasa adalah menempatkan ABRI (sekarang TNI) sebagai ujung tom-baknya di pedesaan-pedesaan.

ABRI ditempatkan di setiap pedesaan sebanyak satu orang anggota. ABRI atau yang lebih dikenal de-ngan Babinsa mencoba mengintimidasi masyarakat un-tuk memilih Golkar dalam Pemilu. Seperti dikemukakan di atas bahwa ada satu sikap dalam masyarakat setelah kekalahan PRRI menjadi traumatis terhadap ABRI, ma-ka secara langsung maupun tidak hal ini juga dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk meredam gerak laju kelompok masyarakat terutama kelompok

Islam. Dengan dalih dituduh sebagai kelompok ekstrim karena kecurigaan yang tidak beralasan.

Ulama sesungguhnya ujung tombak untuk mengimbangi mobilitas yang dilakukan oleh Golkar dan dibantu ABRI. Hanya saja, ulama sendiri juga sudah dirangkul oleh pihak penguasa. Misalnya saja ketua MUI Tanah Datar H. Mustafa Ali, pada Pemilu 1971 dan 1977 merupakan tokoh penting dalam memenangkan PPP di Kabupaten Tanah Datar. Pada Pemilu 1982 dan 1987 ia menyeberang ke Golkar. Keberhasilan pendekatan yang dilakukan oleh pihak penguasa, membuat tokoh ini menyeberang dari PPP ke Golkar yang membawa dampak cukup kuat dalam pemilu-pemilu selanjutnya, terutama menyeberangnya para pengikut setia Mustafa Ali dari PPP ke Golkar.

Sebaliknya, sikap yang tidak konsisten dalam mendukung satu partai membuatnya tidak disukai oleh umat Islam secara keseluruhan. Artinya, ulama yang diharapkan dijadikan pegangan dalam bersikap dan bertindak memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Hal yang menarik adalah walaupun masyarakat mengakui perubahan sebagai suatu hal pokok, namun perubahan dalam kasus seperti itu sulit diterima oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan antipati yang kuat dalam jiwa masyarakat.

Gaya kehidupan feodal juga merasuki kalangan elite di Minangkabau. Dengan berbagai cara, mereka diangkat menjadi penghulu dari sebuah suku dan diberi gelar-gelar datuk seperti Harun Zain Datuk Sinaro, Azwar Anas Datuk Kuning. Mereka diangkat menjadi datuk sebagai suatu simbol baru bahwa mereka merupakan "*bangsawan*" turunan raja-raja. Sebuah silsilah disusun bahwa Azwar Anas Datuk Raja Sulaiman dicari-cari, ditarik-tarik, dihubungkan dan dibuktikan bahwa ia keturunan raja Pagaruyung. Dari berbagai penulisan sejarah Minangkabau menyebutkan bahwa raja Pagaruyung dan keluarganya habis terbunuh dalam perang Paderi, sehingga pernyataan bahwa Azwar Anas sebagai keturunan raja Pagaruyung menjadi "*lelucon yang tidak lucu*".

Bilamana diperhatikan secara seksama, maka proses feodalisasi itu masuknya melalui kalangan para *ambtenaar-ambtenaar* di semua departemen pemerintah. Bahkan ABRI sendiri sesungguhnya selama berlangsung proses feodalisme yang kuat terutama melalui doktrin, mereka harus tunduk pada

perintah atasan. Satu hal yang jelas adalah bahwa presiden merupakan panglima tertinggi ABRI sehingga berbagai perintah harus mendukung eksistensi presiden. Juga perlu diperhatikan, bahwa penempatan pejabat juga berasal dari suku bangsa yang memelihara dan mengembangkan budaya feodal, sehingga keberadaan mereka di Minangkabau mempercepat proses berlangsungnya feodalism.⁴

Dalam menjalankan berbagai aktivitas, elite lokal juga seringkali menerapkan dan berlaku sebagai seorang “*raja*” yang harus mendapat hak-hak istimewa. Dalam sebuah *tourne* ke daerah, maka sang pejabat pun akan meminta berbagai keistimewaan yang menggambarkan dirinya sebagai raja yang harus dihormati dan tunduk kepada semua keinginan dan perintahnya. Kalau sudah demikian, maka sulitlah kiranya membentuk suatu dialog yang terbuka antara atasan dengan bawahan, sehingga berlangsunglah proses *patron-client* di dalamnya.

Dalam bentuk lain, pejabat lokal juga harus membayar *upeti* kepada penguasa pusat. Berbagai kasus pernah mencuat kepermukaan seperti kasus tanah *Famili Saiyo* yang menggemparkan beberapa tahun lalu. Tanah yang seharusnya milik suatu kaum diberikan kepada penguasa pusat dan sebagai imbalannya ia memperoleh sebuah jabatan tinggi di Jakarta. Kasus tanah di Pasaman Barat juga menimbulkan konflik, di mana menyangkut nama pejabat penting di daerah. Tanah ini juga diberikan sebagai imbalan baginya menduduki jabatan penting di Padang. Melihat pembayaran upeti seperti ini, mengingatkan kita kepada kebiasaan raja-raja dan bangsawan-bangsawan pada kerajaan-kerajaan tradisional.

Siapa yang paling repot untuk menyediakan segala kebutuhannya? Pertama, sudah tentu adalah pejabat wilayah yang didatangi, kemudian para “*ambtenaar*” yang mengabdikan diri pada negara ataupun pada penguasa. Tidak ketinggalan, dalam kunjungan itu mereka disambut dengan *umbul-umbul* dan *tarian*

⁴ Dari diskusi dengan Prof. Umar Kayam (sekarang Almarhum), Sumando orang Minangkabau, penyanggah utama nilai-nilai budaya Jawa seringkali menyatakan bahwa Minangkabau merupakan wilayah yang memiliki adat istiadat yang demokratis. Dalam pidato pengukuhan, masyarakat Minangkabau merupakan sorotan utamanya. Ketika beberapa diskusi dengan beliau dan penulis menyatakan pikiran yang berbeda, terutama temuan lapangan, atas dasar itulah tulisan ini lahir. Terima kasih pada Prof. Umar Kayam, yang telah banyak membantu dalam merumuskan tulisan ini. Kemudian bersama Lindayanti, tulisan ini dikembangkan lagi melalui penelitian, namun tetap berpijak pada makalah dasar.

kebesaran (kalau di Minangkabau terkenal dengan tari *Gelombang* untuk menyambut para petinggi sampai di suatu tempat). Juga, biasanya anak-anak sekolah diliburkan dan disuruh me-nanti di sepanjang jalan yang dilalui “*sang raja*” sambil mengibarkan secarik bendera kebangsaan di tangan ka-nan. Setelah selesai pidato diikuti dengan ramah tamah dan sedikit dialog, maka mulailah sang rakyat bertanya kepada sang *raja* dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan disensor dan disetujui oleh pihak ke-amanan.

Para elite ini direkayasa untuk mengikuti pola yang ditetapkan dari atasaan mereka. Mereka juga me-makai pola yang sama terhadap bawahannya. Misalnya saja sebagai contoh, di kampus seorang Dekan akan me-nerapkan sistem hirarkis terhadap bawahannya. Hal yang mereka terima juga dari rektor sehingga terciptalah tingkatan-tingkatan yang harus dipatuhi tanpa melihat salah benarnya. Dapat dengan mudah dipahami misal-nya, seorang seperti DR. Mochtar Naim yang mencoba bersikap demokratis dan mengkritik atasannya, akhirnya begitu saja “*dipensiunkan*” dari Unand Padang.

Padahal, kalau mau berkata secara objektif, orang seperti dialah yang diharapkan dapat menjaga “*keseim-bangan*” dalam menahan lajunya arus feodal yang sema-kin kental merasuki kehidupan elite di Minangkabau. Tidak hanya itu saja, dari segi kemampuan akademis, ia merupakan salah seorang ilmuwan yang berada di Suma-tera Barat sekarang ini mempunyai reputasi intelektual yang handal. Hukum yang berlaku lain, siapa pun yang mencoba mempertanyakan kebijakan di atas, maka ja-ngan diharapkan ia akan dapat bertahan. Jalan apa pun akan dicari dan dilaksanakan untuk secepatnya tersing-kir ataupun disingkirkan dari peredaran.

I. Rangkuman

Perubahan merupakan satu hal yang amat penting dalam masyarakat. Dalam dinamika kehidupan realitas keseharian masyarakat, secara sadar ataupun tidak, ma-ka berlangsunglah suatu interaksi antar anggota masya-rakat. Dalam interaksi itu akan dapat menimbulkan sua-tu akulturasi nilai-nilai, sehingga dapat menimbulkan berbagai interaksi ataupun saling mempengaruhi nilai yang datang

dari luar dengan nilai lama yang telah ber-akar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian se-panjang hidupnya akan terus saja berlangsung suatu perubahan-perubahan nilai dan makna dalam berbagai bi-dang.

Satu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Mi-nangkabau adalah keterbukaannya dalam menerima ber-bagai nilai-nilai yang datang dari luar. Hindu, Islam, dan pengaruh Barat terutama lewat dunia pendidikan mendapat tempat yang cukup kuat dalam masyarakat Minangkabau. Bahwa Islam misalnya, sedemikian da-lamnya pengaruh terhadap kehidupan sehingga mela-hirkan antithesa dalam dialog Islam dan adat yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang diang-gap sebagai filosofis dasar hidup masyarakat Minangkabau.

Di Minangkabau, pengaruh yang amat kuat pada berbagai bidang kehidupan berasal dari agama Islam. Bentuk Islam secara bertahap mencoba mencari penyesuaian-penyesuaian dengan nilai lokal. Dalam banyak hal, memang terdapat banyak persamaan antara adat dengan ajaran Islam. Persamaan itu terutama disebabkan oleh nilai budaya lokal yaitu Minangkabau mengambil alam sebagai filosofis dasarnya yang dikenal dengan se-butannya *Alam Takambang Jadi Guru*.

Sementara itu, pada alam sendiri sudah berlaku *sunnatullah* (hukum alam). Pada gilirannya, ajaran aga-ma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sa-ling mendukung dengan hukum adat yang berlaku. Lebih jauh lagi, ajaran Islam memberi *roh* dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. *Adat Dibuhua Mati* (nilai adat yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu *Adat Basandi Islam, Islam Basandi Kitabullah*) merupakan bentuk hu-kum Islam yang dijadikan dasar utama nilai adat. Na-mun demikian tidaklah semua nilai lokal itu mempunyai persamaan dengan ajaran Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada kemudian memicu lahirnya berbagai konflik dalam masyarakat Minangkabau yang menjadi ciri khas dari perkembangan budaya Minangkabau.

Satu hal yang penting dalam memahami pola kebu-dayaan Minangkabau adalah kedudukan konflik dalam masyarakat. Yang perlu dipahami dalam konteks konflik bahwa konflik janganlah diartikan dalam skala sempit, akan tetapi dalam skala yang luas. Setiap keinginan un-tuk tidak menerima begitu saja pemikiran yang datang, ataupun yang telah matang sampai keberanian untuk me-nampilkan

perbedaan-perbedaan yang telah mendasar dan suatu sikap yang ingin tampil berbeda dalam melihat suatu persoalan.

Dari berbagai perbedaan yang muncul, diharapkan munculnya suatu alternatif pemikiran yang baru dan segar dalam kehidupan. Hanya saja bentuk konflik yang muncul itu beragam sekali bentuknya. Gurr menggambar-barkan tingkat konflik itu mulai dari bentuk konflik yang paling sederhana yaitu *turmoil* sampai bentuk *konspirasi* seperti pemberontakan sampai mencapai puncak-nya dalam bentuk *internal war* seperti perang saudara. Semuanya itu silih berganti berlangsung dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Untuk menumbuhkan dialektika dalam masyarakat, maka setiap anggota masyarakat dituntut untuk melakukan suatu inovasi-inovasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal untuk menyongsong masa depan. Kebebasan dalam melakukan inovasi menumbuhkan kreatifitas berpikir dan kebebasan intelektual sehingga menjadi suatu tradisi intelektual dalam masyarakat. Dalam berbagai kasus seperti pada gerakan-gerakan pembaharuan Islam, intinya bermula dari keberanian untuk melakukan koreksi terhadap pihak lain baik sesama Islam maupun dengan pihak lain sampai pihak yang lebih tinggi.

Walaupun pengaruh Islam amat menonjol, namun pengaruh budaya lain juga mempunyai tempat tersendiri. Hal ini akan terlihat aneka ragam aliran yang dianut orang Minangkabau seperti Tan Malaka dan St. Syahril yang beraliran Sosialis, M.Hatta, M.Yamin yang beraliran Nasionalis dan Aidit dengan Komunis.

Dalam dinamika kebudayaan di Minangkabau mengalami berbagai pasang surutnya. Menjelang akhir rezim Soekarno dan sampai rezim Soeharto, terdapat kecenderungan yang kuat bergesernya pola kebudayaan dari tradisi konflik menuju tradisi damai/harmoni. Kelompok yang menjadi pendukung utama dari perubahan ini adalah pejabat pemerintah di daerah. Hal ini dapat dipahami sebab dengan sistem sentralisasi dalam semua lapangan kehidupan, maka terdapat suatu kondisi ketergantungan yang kuat antara penguasa pusat dengan penguasa lokal.

Pengaruh yang kuat dari kekuatan makro membuat kekuatan mikro sulit untuk mengimbangnya. Juga keinginan untuk memerintah pada pejabat lokal, membuat-nya membenarkan semua kebijaksanaan makro tanpa terlebih dahulu meninjau sesuai atau tidak dengan budaya lokal. Hal yang penting bagi para

pengabdikan lokal adalah dapat mempertahankan kekuasaannya dan kalau memungkinkan akan dapat mencapai kedudukan yang lebih tinggi di masa depan.

Kelompok lain yang mendukung proses ke arah feodalisme adalah elite tradisional lokal seperti penghulu. Para penghulu dijadikan perpanjangan tangan dalam menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan pengusaha. Penghulu juga dijadikan sebagai kekuatan untuk mengimbangi kelompok ulama yang telah mempunyai akar dalam masyarakat pedesaan. Prosesnya mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam merangkul penghulu untuk menerapkan sistem tanam paksa. Penghulu dijadikan sebagai perpanjangan tangan kolonial untuk memaksakan tanaman kopi di pedesaan Minangkabau. Dalam masa sekarang pun, penghulu dijadikan sebagai ujung tombak dalam berbagai event seperti Pemilu, menyukseskan Keluarga Berencana dan pembebasan tanah rakyat yang terkena proyek pembangunan.

Ulama sebagai kelompok yang biasanya kritis secara lambat laun memudar peranannya. Banyak persoalan yang mengitarinya seperti kelangkaan ulama yang berbobot, tekanan yang keras dan terus menerus dari pihak luar, masalah lemahnya tingkat kesadaran agama dalam masyarakat menempatkan ulama pada posisi yang teramat sulit untuk mengangkat citranya. Meminjam ungkapan Wertheim dalam kata pengantar pada buku Harry J. Benda "*Bulan Sabit dan Matahari Terbit*" yang terkenal yaitu matahari terbit akan sulit menarik bulan sabit dari orbitnya, sebab bulan sabit akan memanfaatkan kekuatan matahari terbit untuk mencapai keinginan-nya. Namun sekarang matahari terbit yang datang dari balik "*pohon beringin*" tidak perlu lagi menarik bulan sabit dari orbitnya. Sebab bulan sabit sudah memudar cahayanya dan tidak memiliki spirit untuk dapat mengimbangi dobrakan kekuatan yang datang dari luar.

Rekayasa kebudayaan yang berlangsung secara terencana membuat masyarakat secara umum tidak mempunyai tempat lagi dalam sebuah dialog budaya. Berbagai wadah yang selama ini dijadikan ajang dialog semakin kecil perannya. Surau semakin kurang pengunjung-nya, kedai kopi masih ramai, namun takut melontarkan pembicaraan secara bebas sebab adanya aparat keamanan seperti Babinsa yang mengawasi pembicaraan.

Budaya konflik yang selama ini menjadi kekuatan dalam menumbuhkan dinamika masyarakat menjadi me-mudar dan diganti dengan segala sesuatu yang bersifat harmoni. *Security approach* sebagai gaya dalam mereka-yasa kebudayaan dan kehidupan bangsa pada saatnya mematikan kreativitas berfikir masyarakat. Pilihan-pi-lihan lain sebagai dampak dari konflik tidak dimiliki. Masyarakat digiring pada budaya harmoni yang tidak se-suai dengan akar budayanya. Doktrinisasi yang berlang-sung secara terus-menerus membuat masyarakat semakin tidak kritis. Proses pendoktrinisasi diarahkan pada satu tujuan bahwa masyarakat harus mengikuti pola tunggal yang diterapkan oleh penguasa. Dalam konteks ini, berlangsung proses pembentukan ke arah budaya feodalisme dalam kehidupan masyarakat di Minangka-bau. Disukai atau tidak, masyarakat dijadikan sebagai *abdi dalem* oleh penguasa. Pada akhirnya, proses reka-yasa feodalisme baru pun berlangsung tanpa dapat die-lakkan di tengah-tengah masyarakat.

J. Soal-soal Latihan

1. Bagaimana kedudukan konflik dalam budaya Minangkabau ?
2. Kenapa penghulu sebagai aktor utama penyebab konflik di Minangkabau ?
3. Bagaimana sepak terjang penghulu dalam persoalan harta pusaka
4. Sejauhmana peran penghulu dalam sosial dan politik kontemporer ?

Bacaan Pilihan

A.A.Navis, 1986. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta: PT Grafiti press.

_____, (ed.), 1988. **Dialektika Minangkabau**. Padang : PT Singgalang Press.

Alfan Miko (ed), 2006. **Pemerintahan Nagari dan tanah Ulayat**. Padang : Andalas University Press.

Bell, David, V.J., 1973. **Resistance and Revolution**. Boston : Hontoun Miflin Company.

Burke, Peter, 1992. **History and social Theory**. Cambridge, Polity Press.

- Chambers, R. 1987. **Pembangunan Desa : Dimulai Dari Belakang**. Jaklarta : LPES.
- Datuak Batah Sango, 1954. **Tambo Adat dan Alam Minangkabau**. Pajakumbuh : Percetakan Lembago.
- Datuak Sanggono Diradjo, 1955. **Mustika Adat Alam Minangkabau**. Djakarta : Balai Pustaka.
- Datuak Toeah, 1976. **Tambo Alam Minangkabau**. Bukittingg : Pustaka Indonesia.
- Dobbin, Chritine, 1992. **Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847**. Jakarta : INIS.
- Emraldi Catra, 2001. **Adat Salingka Nagari**. Padang : FISIP Unand.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, 1988. **Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Palito Alua Pasambahan Adat Minangkabau**. Bandung : Remadja, Karya.
- Mochtar Naim, 1968. **Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Padang : Center for Minagkabau Studies Press.
- _____, 1997. *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, Jakarta, **Makalah**.
- Muhammad Radjab, 1969. **Sistem Kekerabatan di Minangkabau**. Padang : Center for Minagkabau Studies Press.
- Nurdin Yakob Dt. Bandaro, 1995. **Hukum Kekerabatan Minangkabau** (jilid I dan II), Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia.
- Sartono Kartodirdjo, 1992. **Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah**. Jakarta : PT Gramedia.
- Sajuti Thaib, (editor), 1985. **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau**. Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1992. **Hukum Adat Minangkabau**. Jakarta : Rajawali.
- Taufik Abdullah, 1982. **Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi**. Jakarta : LP3ES.

Young, Kennet R., 1988. “sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat :Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu Dalam Politik”, dalam Anne Booth (ed), **Sejarah Ekonomi Indonesia**. Jakarta : LP3ES.

Weber, Max, 1999. **Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme**. Jakarta : Pustaka Pramathea.

BAB X

PERTEMPURAN LUAR DALAM PEREMPUAN PEDESAAN MINANGKABAU : Dari Sekedar Mencari Tambahan Sampai Tiang Utama

*Sakit sanang kami jo mandeh
Panyambuak hiduik hanyo mande
(Syahrul Tarun yusuf)*

A. Deskripsi

Merantau -khususnya bagi kaum lelaki Minangkabau- merupakan bagian yang integral dalam perjalanan hidupnya. Belumlah afdol menjadi seorang lelaki Minangkabau, jika ia belum pernah meninggalkan kampung halamannya. Banyak hal yang dipertaruhkan dalam perantauan, terutama soal keberhasilan, kesuksesan ataupun kebesaran selama berada di rantau. Dari catatan sejarah memeperlihatkan bahwa tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau yang mencapai kesuksesan justru dibesarkan oleh budaya rantau sehingga merantau itu menjadi kata suci bagi setiap lelaki Minangkabau. Tidaklah sempurna bagi kehidupan seorang lelaki Minangkabau, jika belum merasakan pahit getirnya kehidupan rantau, sehingga merantau menjadi budaya masyarakat.

B. Manfaat

Setelah mempelajari bab ini, maka diharapkan akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk :

1. Mahasiswa dapat mengetahui pola gerakan perempuan Minangkabau
2. Mahasiswa dapat menganalisis eksistensi perempuan Minangkabau
3. Mahasiswa dapat memetakan kehidupan perempuan pedesaan Minangkabau

C. Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa dapat menganalisis peran perempuan Minangkabau yang ditinggalkan merantau oleh suaminya
2. Mahasiswa dapat memahami kemampuan bertahan hidup perempuan pedesaan yang ditinggalkan merantau oleh suaminya
3. Mahasiswa dapat mengkaji hubungan ketergantungan atau kemandirian perempuan minangkabau yang ditinggalkan merantau oleh suaminya

D. Nan Merantau dan Nan Tinggal

Di balik kisah-kisah sukses yang terungkap tentang dunia rantau, sesungguhnya tersimpan banyak penyakit yang ditinggalkan di kampung halaman oleh lelaki yang pergi merantau. Hal ini tidak mendapat sorotan sama sekali bagi kebanyakan orang – baik pengamat maupun pelaku sendiri. Pada hal, ketika seorang lelaki pergi merantau, kepergiannya itu ternyata meninggalkan penderitaan yang mendalam bagi kelompok lainnya terutama perempuan.

Ketika sang suami pergi merantau, maka sang istrilah yang menjadi kepala keluarga. Istri tidak hanya sekadar mengambil *peran ganda* saja, akan tetapi semua peran ia mainkan, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai tiang ekonomi, pendidik. Syahrul Tarun yusuf dalam lagunya *Aia Mato Mande* menuliskan ; *Sakit sanang kami jo mandeh Panyambuang hiduik hanyo mandeh*. Dari syair diatas tergambar bahwa istrilah yang memainkan peran dan bertanggungjawab atas semuanya. Hanya saja, bagi perempuan bagi perempuan Minangkabau dianggap sebagai hal wajar saja, atau dalam bahasa yang lazim digunakan “memang sudah kodrat perempuan”. Persoalannya adalah apakah ini memang kodrat wanita sudah demikian atau kondisi yang diciptakan, sehingga perempuan menjadi korban budaya masyarakat ?.

E. Sakit dan Penderitaan Orang Nan Tinggal

Memang, tidak selamanya korban itu berjatuh di pihak perempuan. Bahkan, budaya merantau ini juga mengisahkan cerita keberhasilan. Hanya saja, satu sama lainnya sering menjadi kontradiktif dalam masyarakat. Dua kisah kecil di bawah ini memperlihatkan dampak positif (kisah pertama) dan luka mendalam

(kisah kedua) dari kesukaan merantau orang Minangkabau dan bahkan sebagai budaya yang diagung-agungkan oleh masyarakat Minangkabau.

Kisah pertama. Jika dilihat dari pola kehidupan perempuan di pedesaan Minangkabau, Sofia, sebut saja begitu namanya merasa sangat beruntung memiliki suami yang baik, terutama karena perhatian yang sangat penuh diberikan oleh sang suaminya. Betapa tidak, sebagai seorang sumando dalam pola budaya Minangkabau pada masa hidupnya, sebagai seorang suami sesungguhnya tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya, karena tanggung jawab terletak pada mamaknya. Namun sebagai laki-laki, ia harus memenuhi segala kebutuhan anak dan istrinya.

Di tahun awal perkawinannya hidup sebagai petani di kampung. Sang suami melihat bahwa menjadi petani tidak memiliki prospek bagus dan menjanjikan harapan kesuksesan bagi anak dan istrinya. Setelah anak ketiganya lahir, ia akhirnya mangadu untung ke rantau untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Awalnya, bukan kisah sukses yang didupatkannya. Bahkan dalam 5 tahun pertama berada di perantauan, ia masih saja bergulat dengan segala bentuk kemiskinan dan penderitaan.

Sebagai suami yang baik, ia setiap 3 bulan pulang ke kampung, untuk melihat sang istri dan anak-anaknya. Jika perdagangan sepi, maka ia tidak pulang sampai 6 bulan. Namun sebagai gantinya, maka iapun mengirimkan uang belanja bagi anak dan istrinya melalui orang sekampungnya yang sama-sama merantau, sehingga secara ekonomi, anak-anaknya bisa makan. Barulah, pada tahun ke enam perantauannya, ditandainya dengan kelahiran anaknya keenam, impian kesuksesan mulai menghampiri keluarga itu. Hal itu ditandai dengan semakin membaiknya perdagangan sang suami. Jika sebelumnya berdagang martabak, *gale mudo*, maka sejak anak ke enamnya lahir, ia mulai berdagang kain, yang secara ekonomis jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan kesuksesan di masa depan. Sejak berjualan kain, keberuntungan keluarga ini terus naik, sehingga secara ekonomi ia termasuk keluarga yang terpendang di kampung halaman.

Kisah kedua, Sofia, termasuk perempuan yang beruntung. Namun, tidaklah semua perempuan yang memiliki keberuntungan sama seperti dirinya. Bahkan sebaliknya, banyak juga perempuan yang mendapatkan nasib bertolak

belakang dengan Sofia. Sebut saja namanya Elly misalnya, seorang ibu rumah tangga, yang pada masa mudanya merupakan *bintang* di kampung halamannya. Elly juga memiliki suami yang pergi merantau. Sebagai bentuk perantau tradisional, ia juga bolak balik dari Jakarta ke kampung halamannya. Sampai anaknya yang keempat lahir, sang suami masih rajin pulang kekampung sekali 3 atau 4 bulan. Namun, ketika istrinya hamil anak kelima, secara diam-diam sang suami kawin di rantau. Sejak itu, ia tidak pernah lagi pulang kekampung melihat anak-anaknya. Bahkan, anaknya yang paling kecil tidak pernah dilihatnya. Sementara bagi sang anak, ayah hanya sebuah sebutan tanpa dilihatnya secara nyata dan hanya dilihatnya dalam foto ataupun sekedar cerita ibu dan kakaknya. Syarul Tarun Yusuf, musisi Minangkabau dengan tepat sekali menggambarkan penderitaan anak dan istri yang ditinggalkan suami merantau, yang kemudian tidak pulang-pulang, sebagaimana tergambar dari ungkapan bait-bait syair lagu, yang dinyanyikan Fitri dibawah ini ;

Ayah ayah
Habih musim baganti
Lamo Ayah bajalan
Tinggakan kami

Oi ayah
Pulang ayah pulang lah dulu
Sansai kami di kampuang
Dimabuk rindu

Tasintak Adiak ditangah malam
Batanyo ayah dimano
Badarai tangih jatuhah kadalam
Mandeh manjawek jo aia mato

Lantas, ketika suami kawin di rantau, ketika kiriman putus, ketika semua tanggung jawab berada di pundaknya, apakah si Elly menjadi gila, gantung diri, ataupun melacur diri?. Disinilah letak ketegaran dan ketangguhan seorang perempuan Minangkabau, terutama perjuangan hidup yang dilaluinya. Perjuangan berat seperti ini tidak mutlak bagi laki-laki saja, akan tetapi justru dengan lima anak seperti yang dihadapi oleh Elly, perempuan justru jauh lebih berat menghapinya. Belum lagi tekanan-tekanan keseharian yang datang dari keluarga

sendiri dan lingkungannya sehingga perjuangan hidup yang dilaluinya membuatnya memang menjadi keras. Meminjam istilah Toyenbe, kekerasan hidup inilah menjadikan orang bermakna menjadi seorang manusia, sebagaimana dilakoni oleh Elly dengan tanggungan 5 orang anak-anaknya (Arnold Tyimbee, 1987).

Proses merantau dan keadaan ditinggalkan suami membuatnya sudah terbiasa menjadi kepala rumah tangga dan dengan segala tanggung jawabnya. Barangkali, keberadaan suami selama ini bisa jadi menjadi beban saja karena setelah ia tinggalkan benih-benih di rahim perempuan, ia kemudian pergi merantau dan mencari kesenangan lainnya. Perceraian seperti ini hanya berakibat pada kurangnya materi bagi seorang istri, namun sisi lainnya mereka sangat tangguh, sehingga kepulangan suami yang sekali 3 atau 6 bulan dan berada satu – dua minggu di kampung hanya jadi selingan saja. Sementara, sisa-sisa hari lainnya mereka jalani dan terbiasa hidup tanpa suami, sehingga membuat mereka jadi mandiri. Bagi Elly misalnya, dengan caranya sendiri, ia kemudian tidak bergantung dan tergantung hidup pada suaminya. Dengan bekerja sebagai petani – baik mengerjakan sawah orang lain, bagi hasil, maupun dengan kerja tambahan lainnya, seperti membuat kue, beternak ayam, dan itik. Dengan bekerja seperti itu, kemudian Elly membesarkan anak-anaknya. Selain itu, meminjam istilah yang dikemukakan oleh Boeke, setiap anak atau manusia merupakan faktor produksi, dan anak-anaknya kemudian ia aktifkan bekerja seperti anak pertama membantunya di sawah, anak kedua dan ketiga menjual kue keliling kampung, sedangkan anak keempat menjaga adiknya yang bungsu di rumah. (Boeke, 1983) Dengan corak seperti ini, walaupun dengan pola yang sederhana, ia kemudian berhasil membesarkan anak-anaknya, seorang diri. Memang betul seorang, karena jika memahami budaya Minangkabau, yang seharusnya mamak dan penghulunya membantunya justru sebaliknya. Dalam perceraian itu, ia disalahkan oleh mamak dan keluarga sebagai istri yang tidak bisa melayani suami, sehingga suami pergi mencari istri baru.

Walaupun tidak sukses sebagai petani, karena bukan persoalan pada diri petani, akan tetapi diluar diri petani, ia masih bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tamat SMA.(Noe Fauzi, 1999). Persoalan yang lebih besar dihadapi petani

justru bukan pada dirinya sendiri seperti etos kerja petani, akan tetapi masalah kebijakan pemerintah pada petani dan tanah. Kekuatan besar inilah yang sangat menentukan ritme kehidupan petani, pilihan hidup sebagai petani membuat impian-impian kesuksesan secara ekonomi sulit untuk diwujudkan. Perjalanan hidup seorang Elly telah memperlihatkan hal itu, sehingga kekuatan besar dari luar dirinya, yang membuatnya tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya lebih tinggi lagi. Persoalan ini tidak sebatas kaum perempuan seperti Elly saja, akan tetapi kekuatan dari luar diri petani yang menggerogoti mereka terjadi dalam setiap mereka yang bergerak disektor pertanian.

F. Subsidi Orang Kaya

Djoni, kepala Balai Perlindungan Tanaman(BPT) Sumbar, menyebutkan bahwa persoalan pertanian tidak melulu berasal dari petani, akan tetapi juga tekanan yang datang dari luar diri petani. Bahkan, secara tegas dikatakannya bahwa persoalan pertanian hanya 30 % - 40 % saja, sedangkan persoalan yang lebih berat adalah kebijakan terhadap petani. Kebijakan seperti inilah yang sering menyengsarakan kehidupan petani. Artinya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidaklah selamanya menguntungkan petani, bahkan sebaliknya merugikan petani itu sendiri. Misalnya adalah masalah harga pupuk dan harga jual gabah, yang diatur pemerintah justru tidak menguntungkan petani. Memang, secara retorika yang dikatakan oleh pejabat terkait bahwa semuanya untuk meningkatkan taraf hidup petani, namun realitas di lapangan membuat petani menjadi lebih sengsara.

Penentuan harga gabah justru membuat petani tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya, karena pematokan harga itu tidaklah terlalu menguntungkan petani. Dalam bahasa Mubyarto, pematokan harga gabah dan pupuk yang dilakukan pemerintah justru membuat petani memsubsidi orang kota (orang kaya).

Hal yang tidak dapat dielakkan adalah petani berada dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dengan sistem, pola, dan corak pertanian yang terdapat di Sumatera Barat, apakah ada petani yang bisa naik haji, dari hasil pertaniannya ?, Sekedar bertahan hidup saja sudah merupakan prestasi yang bagus bagi kalangan petani. Sulitnya adalah para

petani sendiri belum memiliki kesadaran akan kondisi mereka sendiri, sehingga pihak luarlah yang menyoroti kondisi internal mereka. Mereka beranggapan bahwa kondisi yang mereka hadapi sudah kodrat -apalagi petani perempuan- yang harus mereka laokani saja. Tidak ada perlu perlawanan, gerakan ataupun memikirkan nasib secara bersama, karena barangkali Tuhan memang sudah menghendaki nasib kaum petani begitu adanya ; sekali lagi, barangkali mungkin itulah yang ada di kepala mereka. Pada hal, kerja keras yang mereka lakukan memperlihatkan ketangguhan mereka di lapangan seperti dari pagi sampai sore bekerja disawah, ladang ataupun di kebun.

Memang, di beberapa daerah yang relatif subur seperti di Agam, Alahan Panjang, kaum lelaki masih banyak yang turun ke sawah. Namun, daerah-daerah yang tadah hujan, kebanyakan kaum lelakinya memilih merantau mencari kehidupan. Mereka yang pergi merantau ini lah yang dapat keluar dari jebakan kemiskinan, sedangkan yang tetap berada di kampung dan kemudian mereka menjadi petani. Kelompok ini seringkali terperangkap oleh jebakan kemiskinan, yang datangnya buyikan dari dalam diri mereka, akan tetapi kekuatan-kekuatan besar diluar diri seperti kebijakan pemerintah.

Kebijakan itu juga tidak berdiri sendiri karena di belakangnya ada kekuatan besar yang menentukan kebijakan itu seperti kelompok pemilik modal atau kapitalisme dalam menentukan harga pupuk, dan harga gabah, sehingga petani mau tidak mau mengikuti kekuatan besar itu. Sangat sulit bagi petani untuk keluar dari jurang kemiskinan itu. Kondisi keseharian mereka hanya untuk sekadar dapat bertahan hidup, sedangkan untuk hal-hal lain seperti meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, menyekolahkan anak lebih tinggi (sebagaimana keluarga Elly dalam ilustrasi diatas tadi) menjadi sulit untuk dijalankan.

Sisi lain yang takkalah beratnya adalah faktor internal dari dalam diri petani seperti SDA dan SDM yang tidak memadai. Chamber menyebutkannya bahwa jebakan kemiskinan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebodohan, kemiskinan,

keterasingan, cacat fisik, dan tidak memiliki sumber daya alam (Robert Chambers, 1987). Hal yang tidak dapat dielakkan adalah mereka terjebak dalam penderitaan yang berkepanjangan dan turun temurun. Meminjam ungkapan yang ditulis Tawne, sebagai mana dikutip oleh Scott ia menyatakan bahwa ada daerah-daerah dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekali pun sudah cukup menenggelamkannya (James Scot, 1995).

Untuk keluar dari kemelut seperti ini, cara efektif yang dilakukan bertempur melawan ketidakadilan yang dilakukan berbagai pihak seperti penguasa, pengusaha ataupun kondisi internal petani sendiri. Para petani harusnya menyusun strategi dan taktik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Secara akademis, mengharapkan teroi-teori besar dalam menyelesaikan persoalan petani, sejarah memperlihatkan bahwa teori besar gagal meningkatkan taraf hidup petani. Juga Adalah sebuah kesia-siaan mengharapkan perubahan dilakukan atau yang datang dari pihak lain seperti pengusaha atau penguasa. Mana ada kebijakan penguasa yang mereka buat betul-betul menguntungkan kelompok tani. Hal yang terjadi justru sebaliknya, secara retorika menguntungkan, namun, operasional di lapangan yang terjadi adalah petani yang telah terjepit dalam penderitaan yang dalam kemudian semakin terhimpit oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka (Zaiyardam zubir, 2002).

G. Rangkuman

Dari catatan-catatan yang tercecer dari dinamika kehidupan perempuan memperlihatkan bahwa mereka sesungguhnya jauh lebih tangguh dari yang diperkirakan setiap orang. Walaupun nuansa kehidupan mereka diluputi oleh *ratok jo tangih*, dan ini seringkali dijadikan *kapalo gale* oleh penulis cerita, tukang dendang, ataupun para peneliti. Namun sisi itu hanya *galeme* saja dari pertempuran hidup yang sebenarnya. Dalam realitas yang sesungguhnya justru perempuan pedesaan Minangkabau justru lebih tangguh menghadapi pahit getirnya kehidupan. Dalam banyak kasus, mereka justru lebih siap menghadapi

hidup, walaupun tekanan datang bertubi-tubi dari atas, bawah, muka dan belakang serta dari kiri kanan. Hanya saja, ketangguhan itu hanya dihadapi oleh orang per orang, dan tidak ditemui perlawanan bersifat mengelompok apalagi terorganisir, sehingga tidak ditemui corak khas dari perlawanan perempuan Minangkabau melawan ketidakadilan, baik dari suami, kaum, penguasa maupun pemerintah. Kekuatan itu hanya sebatas potensi untuk melakukan perlawanan, yang harus digali dan dikembangkan oleh berbagai kelompok perempuan. Sehubungan perlawanan kaum perempuan hanya bersifat orang per orang, maka menjadikan sebagai sebuah gerakan sosial untuk melakukan perubahan, selama ini kekuatan perempuan tidak diperhitungkan.

Upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran kritis bagi kaum menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Apapun bentuk, seperti issue gender yang lagi ngetrend misalnya, hanya salah satu cara saja dari corak gerakan perempuan. Hal pokok adalah menumbuhkan kesadaran kritis bahwa hai kaum perempuan, sesungguhnya ada persoalan-persoalan besar yang sedang dihadapi, dan itu harus dibincangkan, dicari jalan keluarnya, disusun strategi dan taktik untuk menggerakkannya. Cara yang efektif adalah harus dipetakan persoalan itu secara bersama, dirumuskan bersama, dan kekuatan serta teori-teori dari luar hanya sekedar membantu pemahaman, sedangkan setiap orang ataupun kelompok harus merumuskan teori-teori kecil (sebab teori besar telah gagal menyelamatkan hidup manusia) yang datangnya dari mereka sendiri.

Dengan sendirinya, tidak mungkin menghadapi sendiri-sendiri. Dalam konteks seperti ini, pengorganisian sangat perlu dilakukan. Hal itu tidak terlalu sulit untuk dikembangkan, karena mereka memiliki modal sosial yang besar, terutama persamaan nasib sebagai kelompok yang termarginalkan dan tertindas serta dengan ketangguhan perempuan menghadapi realitas kehidupan. Penutup kata, langkah yang tidak dapat ditunda-tunda lagi adalah petani khususnya kaum perempuan sendiri yang harus bergerak dan bergerak melawan ketidakadilan yang terjadi terhadap diri mereka. ***Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Seseorang atau Sekelompok Orang, kalau Orang itu tidak Ingin Merubah Nasibnya sendiri.***

H. Soal-soal Latihan

1. Bagaimana peran dalam rumah tangga bagi perempuan Minangkabau yang ditinggalkan merantau oleh suaminya ?
2. Bagaimana kemampuan bertahan hidup perempuan pedesaan yang ditinggalkan merantau oleh suaminya ?
3. Bagaimana hubungan ketergantungan atau kemandirian perempuan minangkabau yang ditinggalkan merantau oleh suaminya ?

Bacaan Pilihan

Amir, MS., **Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau**, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.

Arimbi et.al (ed.), **Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis**, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Robert Chambers, **Pembangunan Desa : Dimulai dari Belakang**. Jakarta : LP3ES, 1987

Endah Trista Agustiana, **Penegakan Hak-hak Perempuan**, Jakarta: Yayasan OWA Indonesia, 1999.

Hairus Salim (ed.), **Menjadi Perempuan**, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak kerjasama dengan Ford Foundation, 1999.

Julia Cleves, Mosse, **Gender dan Pembangunan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Loekman Sutrisno, **Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan**. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Mansour Fakhri (et.al), **Membincang Feminisme: Diskursus Gender dalam Perspektif Islam**, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Mernisi, Fatima, **Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim**, Bandung: Mizan, 1999.

Jurnal Perempuan

Dewi Fortuna Anwar, **Potret Perempuan Kini dan Esok, Perspektif Politik, Otonomi Daerah dan Kembali ke Nagari Minangkabau**, pointers yang diaamapaikan dalam seminar pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh Forum komunikasi WArtawati Indonesia

“Suntiang Nagari”, Sumatera Barat, Pangeran Beach Hotel , Padang 2 Juni 2001.

Hayati Nizar, **Jender dlam Pandangan Islam**, makalah disampaikan dalam seminar “Jender dalam kajian Pluralisme” yang diadakan oleh Komunitas Agama untuk Kemanusiaan dan Kedamaian (KAKK) Fakultas Ushuluddin pada tanggal 10 Novenber 2001.

Nursyahbani Katjasungkana, **Kearah Perumusan dan Program Yang Responsif Jender**. Cimanggis, 17 Maret 2000.

Scott, C. James, **Perlawanan Kaum Tani**. Jakarta : LP3ES, 195.

BAB XI

MENUJU INDONESIA NAN DAMAI DAN SEJAHTERA

*Keadilan itu milik Tuhan
Jadi hanya ada di Sorga
Di bumi
Tuhan menciptakan sebagai areal pertempuran
Pertempuran yang baik melawan yang jahat
Yang benar melawan yang yang salah
Yang kuat melawan yang lemah*

Didaerah pengungsian itu, seorang nenek tua duduk termenung diatas kursi roda. Ratusan bayi-bayi menangis kepanasan, kehausan dan kelaparan. Sementara itu, ribuan orang, menatap kosong, tanpa harapan masa depan yang pasti. Hanya anak-anak yang tetap begembira, kejar-kejaran, main petak umpet ataupun bebas dari kewajiban sekolah. Anak-anak memang tidak memahami kondisi yang sebenarnya terjadi dalam keluarga mereka, kampung mereka, ataupun negara mereka. Mereka hanyalah korban-korban yang tidak tahu menahu dan tidak berdosa dan bersalah dari pergulatan patron-patron yang berebut kekuasaan, uang ataupun penghormatan di republik ini. Dari Meoreke sampai sabang, kondisi ini menjadi pemandangan yang akrab dan sudah terbiasa yang dipancarkan oleh TV, disiarkan radio ataupun ditulis oleh surat kabar dan peneliti.

Sang patron memfokuskan diri pada perebutan kekuasaan. Berbagai konspirasi tingkat tinggi dijalankan untuk mempertahankan kekuasaan ataupun untuk menjatuhkan lawan-lawan. Munculah kasus-kasus yang sangat mengerikan seperti Baligate, Lippogate, kasus Ambon, Aceh dan Timor-Timur dan banyak kasus lainnya yang terbenam dibawah permukaan publik.

Memahami secara seksama peta republik dewasa ini, kiamat yang sesungguhnya tengah menimpa republik ini. Kasus-kasus yang tidak masuk akal sehat dan nurani manusia berjalan seperti hal yang lumrah saja. Berapa ribu orang

yang sengaja dibunuh dan terbunuh di Ambon, berapa banyak yang tertembak dan ditembak di Timor-Timur, dan berapa triliyun uang rakyat (bukan uang penguasa dan pengusaha) yang raib begitu saja. Sementara itu, ratusan juta orang kelaparan dan mengais sampah untuk sekdar dapat mempertahankan hidup. Ironis sekali.

Kasus-kasus yang sedang berlangsung ini tidaklah berdiri sendiri. Kasus-kasus ini memiliki suatu benang merah satu dengan lainnya. Intinya tetap dalam koridor keinginan untuk mempertahankan kekuasaan bagi sang penguasa ataupun merebut kekuasaan bagi yang belum berkuasa. Hanya saja bayaran yang mahal sekali yaitu nyawa-nyawa bayi, anak-anak dan wanita yang tidak berdosa.

Dalam beberapa bulan mendatang, dapat dengan mudah diprediksi bahwa perebutan kekuasaan akan berjalan alot, tegang dan dapat saja memakan korban ataupun tumbal. Puncak dari segalanya adalah saat berlangsungnya pemilihan presiden yang akan datang. Dalam perebutan kekuasaan itu, setidaknya sudah ada tiga kubu yang ngotot untuk menjadi “raja” di republik yaitu Golkar, PDIP dan Poros Tengah. Seorang raja baru yang mencoba memperbaiki republik yang berantakan ini.

Dari ketiga kubu yang sedang bermain itu untuk berkuasa, maka kubu manakah yang tidak mengorbankan jiwa rakyat untuk berkuasa?. Kita tidak lagi berpikir siapa yang berkuasa, akan tetapi melihat mentalitet sang elit untuk mengorbankan rakyat untuk ingin berkuasa. Pertanyaan yang cukup rumit juga. Persoalannya adalah dalam sejarah pergantian kepemimpinan, perebutan kekuasaan di Indonesia, selalu saja diawali dan diakhiri dengan pertumpahan darah. Kisah-kisah sang perampok Ken Arok menjadi raja melalui pembunuhan seperti sudah menjadi gaya dalam perebutan kekuasaan di Indonesia.

Kasus Timor Timur memperlihatkan kerakusan ingin menjadi besar dari seorang raja. Untuk menjadi besar, maka dibutuhkan wilayah-wilayah jajahan baru. Namun satu hal yang mereka lupa atau dilupakan adalah mereka bermain-main dengan jiwa manusia. Pola seperti ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan sang eksekutor dunua seperti Hitler, Napoleon, Firaun dan sebagainya.

Secara murni kemanusiaan, dalam kasus Timor Timur telah banyak menelan korban manusia yang tak berdosa. Indonesia sesungguhnya terjebak oleh kerakusan kekuasaan dan menjadikannya sebagai ajang latihan oleh jendral-

jenderal yang haus perang. Timor Timur bukanlah bagian historis dari Indonesia (Hindia Belanda), maka jalan yang terbaik adalah melepaskan begitu saja. Sepanjang sejarah Timor Timur masuk Indonesia, Indonesia tidak mendapat hasil apapun dari sana, kecuali kerugian dari APBN yang mengalir triliyunan rupiah dan korban manusia dari bangsa Indonesia, baik sipil maupun tentara. Jadi, pelepasan Timor Timur dapat dilihat dari nurani kemanusiaan saja, terutama banyak nyawa yang melayang selama ini.

Persoalannya adalah masihkah ada nurani kemanusiaan pada diri elite-elite didalam republik ini? Gambaran keseharian memperlihatkan bahwa nurani kita semakin terkikis dalam elite. Penembakan, kematian dan korupsi menjadi adegan keseharian. Dalam setiap persoalan yang muncul, tidak ada penyelesaian persoalan, sehingga muncul satu persoalan ditutupi oleh persoalan lain. Belum selesai kasus Ambon, muncul Aceh dan berlanjut ke Timor Timur. Begitu seterusnya sehingga bertumpuk-tumpuk dan menggunung dan siap meledak kapanpun jua.

Kondisi ini kemudian dipertajam pula karena campur tangan pihak luar. Negara-negara seperti USA, Portugal, ataupun Australia memiliki kepentingan tersendiri dalam gejolak politik di Indonesia. Amerika Serikat jelas demi kepentingan modalnya, Portugal demi gengsi masa lalunya dan Australia demi kepentingan politiknya. Hanya saja, yang tidak mereka pertimbangkan adalah korban dari semua konflik yang berlangsung itu. Apakah artinya ratusan lembaga-lembaga diadakan yang mengumpulkan dana kemanusiaan, jika akan persoalannya tidak terselesaikan. Pada gilirannya, lembaga-lembaga yang ada juga menjadi ajang bisnis baru oleh pengurusnya. Kondisi seperti ini sampai sedemikian parahnya, sehingga sudah ibarat lingkaran setan. Dalam konteks ini, pertanyaan pokok adalah cara apakah yang dapat menyelesaikan persoalan bangsa ini?. Haruskah sebuah evolusi, revolusi atau membiarkan kapal itu pecah, berantakan dan mengurus dirinya sendiri?. Kesemuanya pasti akan menelan banyak korban jiwa rakyat, suatu cara yang tidak diinginkan oleh manusia-manusia normal dan masih memiliki nurani kemanusiaan.

Melihat perkembangan yang tidak menentu, seperti kapal kehilangan kemudi, muncul pertanyaan yang tidak diinginkan, berapa lama lagi usia republik

ini?. Berbagai gejala yang ada, “kapal bangsa yang telah retak” disana-sini memperlihatkan kecenderungan untuk pecah.

Republikku compang-camping. Bunga yang selama ini begitu semerbak telah layu, pudar, dan koyak disana-sini. Mereka seperti berlomba-lomba untuk menghancurkannya. Ibarat buah apel, sudah lebih separah yang membusuk. Apakah kita perlu bersama-sama membusukkan yang sisanya?, atau apel yang itu saja yang dibuang?. Banyak orang yang menginginkan dan banyak pula yang tidak.

Dalam kondisi dewasa ini, kita membutuhkan seorang negarawan bukan politikus. Seorang negarawan yang yang berkemauan untuk dapat mempertautkan kembali kapal yang hampir pecah ini. Berbagai tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat agaknya menjadi titik awal yang harus dilaksanakan seperti adili Soeharto, kembalikan ABRI ke barak dan masalah otonomi daerah. Setidaknya, tiga tuntutan ini agaknya akan dapat meredakan sedikit suasana republik yang sudah seperti bara api.

Sebagai penutup kata, jika bung Karno, bung Hatta, bung Syahrir dan ribuan bung-bung lainnya menyaksikan realitas republik sekarang ini, apakah yang akan mereka katakan?. Bung Hatta misalnya, seorang yang sepanjang hidupnya tidak bergelimang materi, bagaimana pandangannya terhadap kasus-kasus yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa karena ulah elite yang koruptor?. Seorang bung Syahrir, penganut sosialisme yang ketat, pencinta anak-anak, bagaimana pandangannya melihat ribuan pengungsian anak-anak yang kelaparan, karena ulah patron yang gila kekuasaan?. Mereka sudah mati. Akan tetapi, bagi yang masih hidup, tindakan sekali tempo meluangkan waktu sejenak, bertafakur melihat kebersihan, kejernihan jiwa sang “The Founding Father”, bahwa harta dan tahta bukanlah segalanya, akan tetapi nurani kemanusiaanlah yang dapat membuat orang itu besar, agung dan mulia. Impian setiap rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, 1986. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta : PT Grafiti press
- _____, (ed.), 1988. **Dialektika Minangkabau**. Padang : PT Singgalang Press.
- Abdul Muluk Nasution, 1981. **Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927**. Jakarta : Mutiara.
- Adeng Sunardi, 1991. **100 tahun Tambang Baru Bara Ombilin**. Sawah Lunto : Tanpa Penerbit.
- Ala AB. (ed), 1996. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta : Liberty.
- Alfan Miko (ed), 2006. **Pemerintahan Nagari dan tanah Ulayat**. Padang : Andalas University Press.
- Agus Budi Purnomo, Fransisca Melia N. Setiawati, Indra Jaya Piliang, Otto Syamsuddin Ishak, 2004. **Peta Konflik Jakarta : Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara dan Warga**. Jakarta : YAPPIKA.
- Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, 2001. **Atasi Konflik Etnis**. Yogyakarta : Global Pustaka Utama.
- Amir, MS., 2001. **Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau**, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares, 2003. **Perjuangan Amungme : Antara Freepot dan Militer**. Jakarta : ELSAM.
- Arimbi et.al (ed.), 1998. **Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis**, Yogyakarta: Kanisius.
- Azyumardi Azra, 2002. **Konflik Baru Antar Peradaban : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bell, David, V.J., 1973. **Resistance and Revolution**. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Bremen, 1997. **Menjinakkan Sang Kuli : Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20**. Jakarta : Grafiti.
- Brinton, Crene, 1984. **Anatomi Revolusi**. Jakarta : Bharatara.

- Burke, Peter, 1992. **History and social Theory**. Cambridge, Polity Press.
- Camara, Donm Helder, 2000. **Spiral Kekerasan**. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar
- Chambers, Robert, 1987. **Pembangunan Desa : Dimulai dari Belakang**. Jakarta : LP3ES.
- Dadang Trisasongko (ed), 2006. **Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua : 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia**. Jakarta : Kemitraan.
- Datuak Batah Sango, 1954. **Tambo Adat dan Alam Minangkabau**. Pajakumbuh : Percetakan Lembago.
- Datuak Sanggono Diradjo, 1955. **Mustika Adat Alam Minangkabau**. Djakarta : Balai Pustaka.
- Datuak Toeah, 1976. **Tambo Alam Minangkabau**. Bukittingg : Pustaka Indonesia.
- Debray, R., 1969. **Strategy for Revolution**. New York : Monthly Review Press.
- Dewi Fortuna Anwar, **Potret Perempuan Kini dan Esok, Perspektif Politik, Otonomi Daerah dan Kembali ke Nagari di Minangkabau**, pointers yang disampaikan dalam seminar pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh Forum komunikasi Wartawati Indonesia “Sunting Nagari”, Sumatera Barat, Pangeran Beach Hotel , Padang 2 Juni 2001.
- Dobbin, Christine, 1992. **Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847**. Jakarta : INIS.
- Efrem Silubun dan Pieter Elmas, 2004. **Ken Sa Faak : Benih-Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei**. Yogyakarta : INSIST PRESS
- Eko Prasetyo, 2002. **Membela Agama Tuhan : Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Efrem Silubun dan Pieter Elmas, 2004. **Ken Sa Faak : Benih-Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei**. Yogyakarta : Insist Press
- Emilianus Afandi, 2005. **Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan**. Jakarta : European Union dan PBHI.
- Emraldi Catra, 2001. **Adat Salingka Nagari**. Padang : FISIP Unand.

- Endah Trista Agustiana, 1999. **Penegakan Hak-hak Perempuan**, Jakarta: Yayasan OWA Indonesia.
- Erwin, 2006. **Tanah Komunal dan Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau**. Padang : Andalas University Press.
- Erwiza, Miners, 1999. *Managers and the State: A Socio-Political History of the Ombilin Coal-Mines, West Sumatra 1892-1996*. **Phd. Disertation**. University Amsterdam.
- Fransisco Wahono, dkk, 2003. **Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Gurr, Robert, 1971. **Why Men Rebel** Princeton : Princeton University Press.
- Hayati Nizar, 2001. **Jender dlam Pandangan Islam**, makalah disampaikan dalam seminar “Jender dalam kajian Pluralisme” yang diadakan oleh Komunitas Agama untuk Kemanusiaan dan Kedamaian (KAKK) Fakultas Ushuluddin pada tanggal 10 November 2001.
- Hairus Salim (ed.), 1999. **Menjadi Perempuan**, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak kerjasama dengan Ford Foundation.
- Hasrul Piliang, Zaiyardam Zubir dan Firman, 2003. **Penyelesaian Sangketa Tanah Pusaka Di Minangkabau : Studi kasus di Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok Kabupaten Sawahlunto Sijunjung**. Padang : Balitbangda.
- Hefner, Robert W., 1999. **Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik**. Yogyakarta : LKIS.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, 1988. **Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Palito Alua Pasambahan Adat Minangkabau**. Bandung : Remadja, Karya.
- Johan Galtung, 2002. “Kekerasan Kultural”, dalam jurnal **Wacana**, No. IX/2002.
- Julia Cleves, Mosse, 1995. **Gender dan Pembangunan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kivlan Zen, Msi, 2004. **Konflik dan Integrasi TNI-AD**. Jakarta : Institute for Policy Studie

- Korten D. dan Sjahrir (ed),1988. **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan**. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowidjojo,1993. **Radikalisme Petani**. Bentang Press Intervisi Utama.
- Kurniawarman, 2006. **Gamggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat**. Padang : Andalas University Press.
- Loekman Sutrisno, 1997. **Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu**. Yogyakarta : Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta.
- _____, **Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan**. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Mansour Fakhri (et.al), 1996. **Membincang Feminisme: Diskursus Gender dalam Perspektif Islam**, Surabaya: Risalah Gusti.
- Mernisi, Fatima, 1999. **Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim**, Bandung; Mizan.
- Mills, C.W. 1967. **The Power Elite**. London : Oxford University Press.
- Mirsel, Robert, 2004. **Teori Pergerakan Sosial**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Mochtar Naim, 1968. **Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Padang : Center for Minangkabau Studies Press.
- _____,1997. *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, Jakarta, **Makalah**.
- Muhammad Radjab, 1969. **Sistem Kekerabatan di Minangkabau**. Padang : Center for Minangkabau Studies Press.
- Mubyarto, 1983. **Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan**. Jakarta : Sinar Harapan.
- _____, 1992. **Tanah dan Tenaga Kerja Kajian Sosial Ekonomi**. Yogyakarta : Aditya Media.
- Muhidin M. Dahlan, “Gerakan Nirkekerasan Dibawah Bayang-bayang Utopia”, dalam **Jurnal Wacana** No. IX/2002, hal. 123-124.
- Nurdin Yakob Dt. Bandaro, 1995. **Hukum Kekerabatan Minangkabau** (jilid I dan II), Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia.

- Nursyahbani Katjasungkana, 2002. **Kearah Perumusan dan Program Yang Responsif Jender**. Cimanggis, 17 Maret 2000.
- Otto Syamsudin Ishak, 2003. **Teungku Bantaqiah**. Jakarta : Yappika.
- Pye-Smith, Charlie, 2006. **Dukungan Yang Berkarya Untuk Perubahan, Sebuah Potret Program Kehutanan Multipihak Indonesia**. Jakarta : MFP.
- R. Soehadi, 1980 **Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria**. Surabaya : Usaha Nasional.
- R.Yando Zakaria, 2000. **Abieh Tandeh : Masyarakat Desa Dibawah Rezim Orde Baru**. Jakarta : LSAM.
- , **Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat**. Jakarta : Walhi, 194
- Sajuti Thaib, (editor), 1985. **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau**. Jakarta : Bina Aksara.
- Sartono Kartodirodjo, 1992. **Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah**. Jakarta : PT Gramedia.
- Sajogyo, 1977. **Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan**. Bogor : LPSP-IPB, Bogor.
- Sajuti Thaib, (editor), 1985. **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau**. Jakarta : Bina Aksara.
- , 1992. **Hukum Adat Minangkabau**. Jakarta : Rajawali.
- Scott, C. James. 2000. **Senjatanya Orang-orang Yang Kalah**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- , 1995. **Perlawanan Kaum Tani**. Jakarta : LP3ES.
- Shaw, Martin, 2001. **Bebas dari Militer**. Yogyakarta : INSIST PRESS.
- Singh, Rejendra, 2001. **Social Movements : Old and New**. New Delhi : Sage Publications.
- Sjahrir (ed), 1988. **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Suryadi Radjab, 2002. **Indonesia : Hilangnya Rasa Aman**. Jakarta : The Asia Foundation dan PBHI.
- Tahmidy Lasahido, dkk, 2003. **Suara dari Poso : Kerusuhan, konflik, dan resolusi**. Jakarta : Yappika.
- Taufik Abdullah, 1987. **Islam dan Masyarakat**. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Abdullah, 1982. **Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi**. Jakarta : LP3ES.
- T. Ibrahim Alfian, 1987. **Perang di Jalan Allah**. Jakarta : Sinar Harapan.
- Thee Kian Wie, 1981. **Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan**. Jakarta : Sinar Harapan.
- Young, Kennet R., 1988. “sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat :Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu Dalam Politik”, dalam Anne Booth (ed), **Sejarah Ekonomi Indonesia**. Jakarta : LP3ES.
- Weber, Max, 1999. **Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme**. Jakarta : Pustaka Pramathea.
- Zaiyardam Zubir, 2002. **Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan** Yogyakarta : Insist Press.
- , Nurmina, Firman dan Ferawati, 2003, **Penanggulangan Tindakan Kekerasan dan Agresivitas Remaja di Sumatera Barat**. Padang, Balitbangda.
- , 2006. **Menggugat Minangkabau**. Padang : Unand Press.
- Zenwen Pador (ed), 2002. **Kembali Ka Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak ?** Padang : LBH Padang.
- Zulkifli B. Lubis, Manusia dan Hutan : Peluang Kearah Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif”, dalam Jurnal **Wawasan**, no. 9, Juni 1998.

GLOSARIUM

- Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : Kesepakatan antara npenghulu dan ulama Minangkabau untuk mencari titik tempu antara adapt dan Islam, yang dikatakan sebagai sebuah perjanjian atar kedua golongan di puncak bukit Marapalam Lintau, yang kemudian menghasilkan kesepakatan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mengawinkan adat dan agama.
- Adat Istiadat : Kebiasaan hidup masyarakat yang berlangsung secara turun menurun menjadi suatu aturan yang tidak tertulis.
- Alam Minangkabau : Sebutan bagi alam orang Minangkabau. Alam Minangkabau ini dikategorikan atas 3 wilayah yaitu Luhak nan Tigo yaitu Luhak tanah Datar, Agam dan Limah Poluh Koto. Wilayah pesisir yaitu sepanjang pantai barat Sumatera barat. Wilayah rantau yaitu rantau dekat seperti Riau, Jambi, sedangkan ranuat jauh adalah bumi manusia ini.
- Ambtenaar : Sebutan bagi pegawai sipil di pemerintahan Hindia Belanda yang kebanyakan berasal dari ‘kaum pribumi’
- Andema : Buruh kontrak harian yang bekerja pada PT Semen Padang. Ungkapan yang populer adalah Andema Bareh Pirang, Karajo dek awak piti dek urang. (Kerja untuk buruh, uang untuk bosnya)
- Bacakak banyak : Berkelahi yang melibatkan orang satu kampung, antar sekolah, antar etnis dan suku.
- Balahan : Sebuah bentuk hubungan kekeluargaan antar satu suku pada dua negeri yang berbeda. Misalnya orang Piliang Sani di Kampung Sumanik Tanah Datar

		memiliki balahan dengan orang Piliang Sani di kampung Baso Agam.
Batang	:	Nama lain untuk sungai seperti Batang Kuantan, Batang Sinamar, Batang Ombilin dan Batang Antokan.
Bodi-Caniago	:	Salah satu sistem politik yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Sistem politik ini bercorak demokrasi.
Bundo Kanduang	:	Perempuan yang berpengaruh dalam suatu pesukuan. Biasanya kakak tertua atau ibu dari ma-mak <i>tungganai</i> atau ninik mamak. Selain tertua, ia juga punya wibawa dalam pesukuan tersebut.
Buruh Bebas	:	Buruh tambang batu bara yang berasal dari penduduk sekitar areal pertambangan seperti penduduk Talawi, Padang Sibusuk, Muaro Kalaban dan Padang Ganting. Sistem kontrak buruh bebas ini berdasarkan mingguan atau bulanan.
Buruh kontrak	:	Buruh yang dikontrak selama dua sampai tiga tahun. Dalam realitasnya, kontrak ini berjalan lebih lama lagi. Pada awal pembukaan tambang buruh tambang ialah orang Cina. Dalam perkembangannya, buruh kontrak berasal dari Jawa.
Buruh paksa	:	Buruh yang berasal orang hukuman dan dalam bekerja kakinya dirantai. Buruh yang diambil dari penjara-penjara di Padang, Jawa, Madura dan Makasar.
Cadiak Pandai	:	Elite yang terdapat dalam Masyarakat Minangkabau. Elite ini lahir berdasarkan kemampuan intelektual di setiap nagari. Elite ini juga terbentuk berdasarkan pengalaman merantau, semakin lama dan semakin jauh rantaunya, maka semakin diakui keintelektualannya.

Darek	:	Wilayah pedalaman Minangkabau, yang juga merupakan Luhak nan Tigo.
Harato Pusako	:	harta yang didapatkan secara warisan yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum. Harta warisan ini biasanya tidak bisa diperjual-belikan. Secara hukum adat Minangkabau, harta warisan ini hanya boleh digadaikan.
Hari kuning	:	Upacara kebesaran kerajaan Belanda. Pada hari itu buruh diwajibkan untuk memakai pakaian kuning.
Indo	:	Seseorang yang berasal dari hasil perkawinan campuran antar dua suku bangsa. Indo ini mendapat kedudukan yang lebih baik dibandingkan buruh pribumi.
Internal War	:	Kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi populer dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu, merombak negara. Pola yang ditempuh adalah kekerasan yang ekstensif, termasuk terorisme, perang gerilya dalam skala besar, seperti perang saudara sampai kepada sebuah revolusi
Kaba	:	Cerita rakyat Minangkabau seperti Kaba Sabai nan Aluih dan kaba Cindua Mato.
Kaum Modernis Islam	:	Kelompok pemikir muslim yang mencoba memperbaharui pola pelaksanaan ajaran Islam dan pemikiran masyarakatnya, kelompok yang bersikap lebih moderat dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam.
Kaum Paderi	:	Kaum Puritan, di Minangkabau menghendaki pemurnian agama Islam yang berperang melawan kaum Adat dan Belanda.

Kaum Pinggiran	:	Kelompok bawah dalam masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai buruh, petani, dan nelayan atau disebut juga sebagai <i>wong cilik</i> .
Kitabullah	:	Istilah lain untuk menyebut Al qur'an, yang dijadikan sebagai sandi atau dasar dari adat Minangkabau.
Konflik	:	Perbedaan-perbedaan pendapat yang berkembang dalam masyarakat dan perbedaan itu diakui sebagai sistem nilai yang harus dikembangkan untuk dinamika, tapi kadang kadang menimbulkan gejolak sosial.
Konspirasi	:	Kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi terbatas seperti pembunuhan politis terorganisir, terorisme dalam skala kecil, kudeta dan pemberontakan
Koto	:	Pemukiman yang terletak dipinggiran nagari
Koto-Piliang	:	Salah satu sistem politik yang terdapat masyarakat Minangkabau. Sistem ini bercorak feodalisme.
Kuli	:	Buruh perkebunan dan tambang
Lang	:	Lapisan-lapisan yang terdapat pada batu bara seperti lapisan A, B dan C.
Luhak	:	Bagian dari geografis tradisional Minangkabau, yang terdapat dalam daerah darek.
Luhak nan Tigo	:	Daerah inti Minangkabau yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak lima Puluh Koto.
Mamak	:	Kepala rumah tangga yang berasal dari saudara laki-laki dari Ibu.
Mandor	:	Pengawas buruh dalam bekerja.
Membangik batang:		Memiliki makna seperti renaissans, menghidupkan kembali suatu nilai atau tradisi yang pernah dirasakan jaya di masa lalu tapi kini terendam atau tersimpan tanpa ada yang merawatnya. Membangkik batang
Tarandam		

		tarandam tak lain adalah sebuah gerakan revivalisme dan pembaharuan.
Matrilineal	:	sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keibuan. Dari garis ini terbentuk pola mamak-ibu-anak.
Merantau	:	Suatu tradisi migrasi masyarakat Minangkabau untuk meninggalkan kampung halaman pergi ke tempat lain mencari nafkah dan pendidikan. Biasanya didorong oleh alasan ekonomi dan sumber daya kemakmuran yang tak tersedia di kampung halaman, dan adanya keyakinan merantau berguna mengembangkan cakrawala pemikiran dan pengalaman yang bisa mendewasakan dan sebagai sarana menuju penemuan diri.
Nagari	:	Unit kesatuan wilayah, sosial dan politik dalam masyarakat pedesaan minangkabau. Iatan emosional yang terkuat bagi orang Miangkabau hanaya sebatas nagari saja.
Ninik mamak	:	Fungsional adat, ninik mamak terdiri dari penghulu-penghulu yang memegang sako datuk secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal
Patrilineal	:	Sistem kekeluargaan yang berdasarkan garis kebapakan. Dari garis ini terbentuk pola ayah-ibu-anak.
Patron-client	:	Pola hubungan antara atasan dengan bawahan. Pola ini bersifat atasan melindungi bawahan.
Penghulu	:	Elite tradisional yang berdasarkan keturunan. Penghulu merupakan seorang kepala adat dalam sukunya.
Penghulu Puncak	:	Penghulu yang tertinggi dalam suatu nagari. Penghulu puncak diambil dari suku piliang.

Pesisir	:	Wilayah pantai Minangkabau yang meliputi pantai barat Sumatera bagian tengah.
Pusako Randah	:	Harta dari hasil pencaharian seorang yang diperoleh seorang berdasarkan usahanya sendiri.
Parewa	:	Anak muda yang tidak memiliki pekerjaan.
Poros Tengah	:	Gabungan poitisi bernuansa Islam dalam pemilihan Presiden tahun 1999, yang dimotori oleh M. Amir Rais dan berhasil memenangkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.
Rumah Gadang	:	Rumah yang didiami oleh satu keluarga besar dalam suatu kaum. Bentuk rumah ini ditandai dengan atap gonjong.
Spin-off	:	Pemisahan dalam sebuah perusahaan yang melakukan kerjasama atau merger.
Syarak	:	Hukum yang mengacu kepada ajaran agama Islam.
Sumando	:	Sebutan untuk seorang suami oleh orang dalam kaum istrinya.
Tanah Ulayat	:	Tanah suatu kaum yang terdapat disetiap nagari.
Tambang Dalam	:	Pertambangan batu bara yang terdapat dibawah permukaan tanah.
Tambo	:	Kisah yang menceritakan proses terbentuk adat dan Alam Minangkabau.
Tanah Impian	:	Impian untuk mendapat emas bagi orang Jawa yang transmigrasi ke Deli.
Turmoil	:	tindakan kekerasan politis yang tidak terorganisasi dan partisipasi populer, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik dan pemberontakan kedaerahan yang relatif spontan.
Ulama	:	Elite dalam masyarakat yang berdasarkan kemampuan dan penguasaan dalam bidang agama Islam.

- Urang Bawaan : Buruh yang dibawa sebagai pekerja pada tambang batu bara Ombilin. Urang bawaan ini mengacu pada orang yang dibawa oleh Belanda dan Jepang. Mereka umumnya adalah buruh kontrak.
- Urang Lubang : Buruh kasar yang bekerja dalam lubang penggalian batu bara.
- Urang rantai : Buruh paksa yang berasal dari tawanan pada perusahaan Tambang Batu Bara Ombilin zaman kolonial Belanda. Dalam bekerja, buruh ini kakinya dirantai.

INDEK

A

A A Nafis 47
Aburizal Bakri 38
Abdul Muluk Nasution 47
Adeng Sunardi 47
Agus Budi Purnomo 15
Ala A B 47
Alfian 20
Amirudin dan Aderito Jesus De Soares 16
Asmiar 69

B

Benny Utama 33
Betriza Handayani 71
Bremen 47

C

Crane Brinton 17
C.W. Mill 17

D

Dadang Trisasongko,2,57
David V.J. Bell 17
Donm Helder Camara 8

E

Erwiza Herman 28,47
Eri 54,55

G

George Mc. Turnasn Kahin 13

I

Ibnu Khaldun 78

Irwan 60,61

Iska 51

J

James R. scott, 4,16,17,21,40,43,47,58

Johan Galtung 13

K

Kuntowijoyo 17

M

Mansour Fakih 9,21

Mansur 74

Mario Puzo 65

Martin Shaw 5,17,59

M. Hatta

M. Natsir

M.Syafii Maarif 2,57

Mubyarto 47

Munir 2,57

Mursal 74

M. yusuf Kalla 20,38

Muchlis Muchtar 32

N

Nurminah 61,62,63,64

O

Otto syamsudin Ishak 11,14

P

Peter Burke 17

Pramoedya Ananta Toer 14

R

Rahmat 54

Rajendra Singh 17

Regis Debray 17

Riki 60, 61

Robert Chambers 36,47

Robert Gurr, 4,9,10,17

Robert Mirsel 17

Robi 74

Ronald 69

Ratu adil

S

Safarudin 26

Sawitri 33

Sartono Kartodirdjo 17

Satria 51

Sajogyo 47

Soedjatmoko 67

Soeharto 49

Soekarno 14

Sri Mulyani 38

Suryadi Radjab 2,14,17,57

Susilo Bambang Yodoyono 20,38,42

Syafrudin Bahar 14

Syahrir dan D Karten 47

Syamsul Bahri 51

T

Tahmadi Lasahido 7,15,18

Tawne 40

Teungku Bantaqiah 2,11,57

T. Ibrahim Alfian, 7,11,18

Thee Kian Wie 47

V

Verbek 26

Y

Yuli Fitri Saputra 51

Yuhendra Saputra 51

Yusuf Kalla 20,38

Z

Zainal Bakar 26,29

Zulheri 71

Zaiyardam Zubir dilahirkan di Sumanik, Tanah Datar, 10 Juni 1962. Menamatkan S 1 dan S 2 di Fakultas Sastra jurusan sejarah UGM Yogyakarta, Sekarang sedang mengikuti S 3 di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan antara lain:

DALAM BENTUK BUKU

Zaiyardam Zubir, "Orang Rantai, Orang Tambang dan Orang Lobang : Studi Tentang Eksploitasi Buruh Tambang Batu Bara Ombilin, dalam Edy S. Ekawati dan Susanto Zuchri (Eds), **Arung Samudra: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian**. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Budaya UI Jakarta, 2001.

Zaiyardam Zubir, **Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan** Yogyakarta: Insist Press, Desember 2002.

Zaiyardam Zubir, Lani Fitrianti, Lusi Herlina dan Dwi Bertha, **Partisipasi Politik Perempuan di Minangkabau**. Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Zaiyardam Zubir, Eka F. Putra, dan Harry Effendi, **Gerakan Mahasiswa dan Otoritarisme Negara : sketsa Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat 1958-1999**. Jakarta : CPI, 2003.

Zaiyardam Zubir dan Lindayanti, **Dari Ahong Sampai Ahmad, Studi tentang Politik Kekerasan dan Jebakan kemiskinan Pada Level Akar Rumput**. Yogyakarta: Insist Press, 2004.

Zaiyardam Zubir **Pertempuran Nan Tak Kunjung usai : Eksploitasi Buruh Tambang Batu bara Ombilin 1891-1927**. Padang: Unand Press, 2006

Zaiyardam Zubir, "Nasionalisasi atau Bukan, Apa Bedanya? Studi tentang Buruh Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat Pasca-Kolonialisasi". Dalam Alfian Miko (ed), **Dinamika Kota Tambang Sawahlunto**. Padang: Andalas University Press, 2006.

Zaiyardam Zubir, (eds), **Inmemorial Prof. Dr. Khaidir Anwar : Ilmuan Sederhana Nan Bersahaja**. Padang: Fakultas Sastra Unand, 2009.

Zaiyardam Zubir, "Penyelesaian Konflik Berbasis kearifan Lokal suku Dayak Aoheng dan Bukat di Long Apari Kutai Barat Kaltim" dalam Margana (eds), **Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global dalam Dari Global**. Yogyakarta: Ombak. Padang: Minangkabau Press, Zaiyardam Zubir, 2010.

Zaiyardam Zubir, **Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan**. Yogyakarta: Insist Press, 2010.

Hary Efendi Iskandar, Zaiyardam Zubir dan Zulqayim, **Inyo ajo Awak Juo : Solidaritas Primitif, Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman 2005**. Padang: Minangkabau Press, 2010

Zaiyardam Zubir (ed), **Managak-an Banang Basah : Membangun Tradisi Intelektual Dalam Masyarakat Kampus Yang Hedonisme**. Padang: Minangkabau Press, 2010.

Zaiyardam Zubir, “Warisan Arsitektur Belanda di Sawahlunto Sumatera Barat”, dalam Sri Margna dan Heri Priyatmoko, (ed), **Kolonialisme, Kebudayaan dan Warisan Sejarah**. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM Yogyakarta, 2011.

Zaiyardam Zubir dan Hary Efendi, “Saning Baka dan Muaro Pingai: Bacakak Antar Kampung Nan Tak Berkesudahan”, dalam Agus Suwignyo (eds), **Sejarah Sosial (di) Indonesia: Perkembangan dan Kekuatan**. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM Yogyakarta, 2011.

DALAM JURNAL ILMIAH

Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah “Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat” Jakarta: Jurnal **Masyarakat Indonesia LIPI**, ISSN: 0125-9989. Edisi XXXVI, No. 1, 2010.

Zaiyardam Zubir, Menggali Kearifan Loal, Menemukan Jati diri dan Menghilangkan Konflik Kekerasan, dalam jurnal ilmiah **JAS MERAH**, ISSN: 0215-2096, Jurusan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2010.

Zaiyardam Zubir, “Penguatan Komunitas Untuk Pencegahan Konflik Kekerasan”, dalam **Jurnal Samudera** Universitas Samaudra Langsa, ISSN: 2087-2194, Volume 4 No. 5 Mei-Agustus 2012.

Zaiyardam Zubir, “Dilaketika Budaya dalam Masyarakat Heterogen”, dalam **Jurnal Samudera** Universitas Samaudra Langsa, ISSN: 2087-2194, Volume 4 No. 6 September – Desember 2012.

Zaiyardam Zubir, “Potret Perempuan Minangkabau Dalam Era Globalisasi: Sebuah refleksi”, dalam Jurnal ilmiah IAIN Padang, 2012.

